Ngelep, Ngrumat, Niteni:

Ekologi Politik Merawat Air dan Ruang Hidup di Jawa Bagian Tengah

Yesaya Sandang - Umi Ma'rufah
Nandra Eko Nugroho - Nafisatul Khoidah
Muhamad Nasihudin - Muhamad Nabil Gunawan
Marwa - Iqbal Alma Ghosan Altofani
Eka Handriana - Bosman Batubara - Bagas Yusuf Kausan

Daftar Isi

I

Pengantar:

Menghadapi Ketimpangan Pembangunan, Bergelut dengan Air Keseharian

Bagas Yusuf Kausan dan Eka Handriana

Pada pertengahan 2021, Bagas Yusuf Kausan (selanjutnya ditulis Bagas) dan Eka Handriana (selanjutnya ditulis Eka) terlibat menjadi bagian dari tim kerja untuk penulisan buku *Banjir Sudah Naik Seleher: Ekologi Politis Urbanisasi DAS-DAS di Semarang* (2021), selanjutnya disebut BSNS.[1] Buku tersebut berawal dari keinginan Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS) untuk memproduksi buku tentang perubahan sosial ekologis dalam kerangka urbanisasi yang terjadi di lima daerah aliran sungai (DAS) di Kota Semarang, yakni DAS Karanganyar, Silandak, Beringin, Garang, dan Babon. Koalisi MDS membentuk tim kerja untuk menulis dan memobilisasi dana lewat *platform on-line kitabisa.com* untuk penerbitan buku.[2] Selain itu, biaya riset dan penerbitan

---

1 Bosman Batubara, Bagas Yusuf Kausan, Eka Handriana, Syukron Salam, dan Umi Ma'rufah, *Banjir Sudah Naik Seleher: Ekologi Politis Urbanisasi DAS-DAS di Semarang* (Semarang: Cipta Prima Nusantara, 2021).

2 Proses penggalangan dana terdokumentasi melalui akun Instagram Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS). Lihat https://www.instagram.com/p/CNt9PZwBi0R/?img_

buku BSNS juga didanai dari proyek Ground Up.[3] Bagas menulis DAS Beringin dengan banyak memakai data arsip, sedangkan Eka menulis DAS Garang dengan metode autoetnografi.

Pengalaman tinggal di area DAS Garang sejak 2011 membantu Eka menjelaskan rekonfigurasi sosiospasial dan momen sosioalami di tempat tinggalnya, seperti kejadian banjir dan kerusakan bangunan karena tanah di bawahnya terkikis banjir. Sebaliknya, penulisan buku BSNS membantu Eka mengurai ketimpangan yang dialami, ketika Eka harus menanggung segala kerusakan, sedangkan pengembang yang "menjajakan" rumah tetap mendapat untung. Bersamaan dengan proses penulisan itu, Eka mendapat kegunaan; memetakan dan melihat dengan jelas posisi diri dalam urbanisasi di Semarang. Bagian itu merupakan yang terpenting dan paling berguna bagi Eka.

Sementara itu, Bagas punya cerita lain. Proses menulis buku BSNS, lewat pemeriksaan terhadap arsip sejarah, pengalaman menghadapi banjir ketika melangsungkan penelitian, atau perjumpaan dengan warga yang tinggal di DAS Beringin, makin memantapkan pemahaman bahwa banjir di Semarang bukan takdir: banjir pada masa kini diproduksi melalui serangkaian perubahan sosioalami dan sosiospasial pada masa lalu. Bagas tidak pernah bermukim di DAS Beringin, karena pada 2014-2019 dan 2021-2022 lebih banyak bermukim di Gunungpati (DAS

---

index=1.

3 Penelitian "*Ground Up: A Practice Based Analysis of Groundwater Governance for Integrated Urban Water Resources Management in Semarang*" (2019-2022), dikerjakan konsorsium riset yang terdiri atas Jurusan Arsitektur Undip, Jurusan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Jurusan Water Governance IHE-Delft Institute for Water Education, dan Jurusan Human Geography, Spatial Planning, and International Development University of Amsterdam, sebagai bagian dari pihak kampus; serta Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), dan Amrta Institute for Water Literacy, sebagai bagian dari organisasi nonpemerintah. Lihat https://www.nwo.nl/en/projects/w-07501806.

Garang). Sebagai alumnus Universitas Negeri Semarang (Unnes), Bagas pernah (dan masih) menjadi bagian dari proses pengotaan (urbanisasi) yang didorong oleh keberadaan kampus di Gunungpati itu. Ekspresinya tampak pada pertumbuhan rumah kos yang terus meroket, di tengah kebelumtersediaan sumber air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan betapa mahal biaya pembuatan sumur artesis di Gunungpati. Dalam rentang 2014-2016, Bagas beberapa kali merasakan momen kehabisan air di kos lama yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan akan air dari sumur dangkal.

Pertengahan 2023, Bagas berpindah kota untuk keperluan kuliah. Sejak saat itu Bagas menjadi bagian dari proses urbanisasi yang timpang di Yogyakarta. Di kota, area dalam Jalan Ringroad (jalan lingkar pinggir kota), di tengah derap pembangunan Yogyakarta yang sangat berorientasi ke pariwisata, susah sekali menemukan rumah kontrak untuk keluarga kecil (satu kamar tidur, satu kamar mandi, satu dapur) dengan harga di bawah Rp15 juta/tahun. Bahkan kebanyakan rumah kontrak seharga itu pun kosongan, sehingga butuh tambahan biaya untuk membeli perabotan. Situasi itu memaksa Bagas hanya mampu mengontrak rumah mungil di pinggiran kota yang lebih murah: lebar rumah tidak lebih dari tiga meter, di area luar Jalan Ringroad, dan berjarak 10 kilometer dari kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Sumber aliran air untuk rumah kontrak berasal dari PDAM Kabupaten Sleman. Kualitas air PDAM bermasalah, karena berbau kaporit (terutama pada pagi hari) dan acap membawa serta pasir ke dalam bak.

Tak ubahnya kebanyakan warga kota lain, setidaknya dalam konteks buku ini adalah warga yang bermukim di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, atau yang disebut sebagai daerah Jawa bagian tengah, Bagas dan Eka juga tertimpa, karena itu menjadi bagian dari ketimpangan proses urbanisasi. Namun mereka tidak berdiam diri. Eka, misalnya. Untuk merawat ruang hidup supaya tanah tidak terkikis banjir dan tembok rumah tidak roboh,

dia menanam lebih banyak pohon dan membuat saluran air dengan merunut jalurnya. Adapun Bagas, karena layanan air PDAM Kabupaten Sleman tidak optimal, harus merawat air dengan memasang saringan agar bak mandi menjadi tidak mudah kotor.

Cerita-cerita perawatan air dan ruang hidup semacam itu akan banyak ditemui dalam halaman-halaman buku bertajuk *Ngelep, Ngrumat, Niteni: Ekologi Politik Merawat Air dan Ruang Hidup di Jawa Bagian Tengah* ini. Namun, sebelum menuju ke tulisan-tulisan tentang gerak perawatan di bawah timpaan ketimpangan, tulisan ini akan mengantarkan pembaca ke pembahasan tentang ketimpangan di Yogyakarta dan Semarang lebih dahulu.

Ketimpangan Pembangunan di Jawa Bagian Tengah

Peningkatan pembangunan di Jawa Tengah didukung keberadaan kawasan industri dan pertambahan *tenant* (penyewa) di kawasan industri baru, seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Ekonomi Kendal (KEK). Berdasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jawa Tengah (RPJMD) 2018-2023 dan 2024-2026, Jawa Tengah memang dijadikan area pengembangan industri skala besar.[4] Di wilayah kota/kabupaten, selain Kota Magelang dan Kota Surakarta, pengembangan kawasan peruntukan bagi industri diarahkan ke industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja. Sementara Kabupaten Cilacap, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang dikembangkan sebagai kawasan berikat yang digunakan untuk menimbun bahan baku, yang sebagian impor, sebelum diolah dalam industri manufaktur atau digunakan secara langsung.

Di sisi lain, Semarang, Ambarawa, Salatiga dikembangkan menjadi koridor pariwisata Jawa Tengah. Pengembangan-pengembangan tersebut didorong oleh konsentrasi modal di Jawa Tengah yang makin pekat.

---

4 RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026.

Pada 2020 jumlah realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp56,07 triliun, meningkat pada 2021 hingga Rp59,79 triliun, dan bertambah lagi pada 2022 menjadi Rp68,41 triliun. Sebaran paling padat dari nilai investasi tersebut berada di Kota Semarang, khususnya bagian pesisir utara, yang berwujud bangunan pabrik, peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung industri seperti perluasan area pelabuhan termasuk terminal peti kemas, jalan tol, dan tanggul pelindung dari ancaman risiko banjir air laut.

Konsentrasi modal memusatkan bangunan pabrik, infrastruktur pendukung, sekaligus tenaga kerja. Ketika modal beroperasi, baik dalam siklus produksi maupun siklus reproduksi tenaga kerja, ia akan senantiasa membutuhkan air bersih. Dengan demikian, konsentrasi modal (investasi) yang meningkat juga meningkatkan kebutuhan akan air. Pada titik ini Jawa Tengah menghadapi tantangan berkait dengan akses air untuk operasionalisasi modal. Pada 2018, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Provinsi Jawa Tengah mencatat kebutuhan air baku untuk air minum, industri, kebutuhan kawasan prioritas seperti pengembangan pariwisata dan lain-lain mencapai 750,25 juta m^3/tahun. Adapun ketersediaan air baku pada tahun itu hanya 456,83 juta m^3/tahun. Seiring dengan pertambahan realisasi investasi di Jawa Tengah, kebutuhan akan air baku pada 2022 meningkat menjadi 770,08 juta m^3/tahun. Sebetulnya ketersediaan air baku pada tahun itu juga meningkat, tetapi tetap belum memadai, yakni hanya 477,45 juta m^3/tahun.[5]

Air baku, dalam dokumen perencanaan pemerintah tersebut, cenderung lebih dekat dengan air permukaan ketimbang air tanah. Dokumen RPJMD Jawa Tengah menyebut, ketersediaan air baku sangat dipengaruhi oleh keberadaan embung dan waduk. Ketersediaan air baku yang hanya mencakup 62% dari kebutuhan telah memicu penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan akan air bersih secara mandiri,

5 RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.

baik oleh perusahaan maupun warga kebanyakan. Kemampuan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan akan air berlangsung secara timpang. Perusahaan lebih mampu menyediakan air bersih lewat pengeboran sumur air tanah dalam. Misalnya, hingga tahun 2000, jumlah sumur tanah dalam yang terdaftar di Kota Semarang 1.050 unit, dengan debit air yang dipompa 38 juta m^3/tahun.[6]

Sumur air tanah dalam digunakan pula oleh warga kebanyakan, terutama yang tidak mendapat layanan air perpipaan dari pemerintah. Akan tetapi, sumur air tanah dalam bagi warga bukan sumur yang "bebas" mereka buat. Warga punya keterbatasan sumber daya untuk membuat sumur air tanah dalam; menurut beberapa percakapan yang penulis ikuti, harganya bisa mencapai lebih dari Rp50 juta untuk pengeboran 100 meter. Tak ayal, sumur air tanah dalam warga biasanya merupakan sumur yang dibuat pemerintah, melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), atau "sumbangan" politikus yang berkampanye menjelang pemilihan umum, lalu dikelola secara kolektif.

Satu sumur kolektif untuk warga biasanya digunakan oleh ratusan keluarga. Banyak di antara mereka menjadi pelanggan sumur kolektif – dengan tarif yang ditentukan kelompok warga pengguna – karena tidak menjadi prioritas dalam sistem penyediaan air perpipaan milik pemerintah. Dalam konteks Kota Semarang, PDAM sebagai penyedia layanan air milik pemerintah sangat mempertimbangkan minat konsumen layanan air, baik warga kebanyakan maupun perusahaan. Tentu yang paling berminat adalah warga yang mampu membayar, sehingga bagi PDAM, untuk kelangsungan bisnis sebagai perusahaan

---

6 Bosman Batubara, Ivan Wagner, Syukron Salam, Henny Warsilah, *Maleh Dadi Segoro; Krisis Sosial Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak* (Semarang: CV Lintas Nalar).

daerah, potensi keterbayaran layanan menjadi pertimbangan sangat penting.[7]

Ketimpangan akses air terhubung dengan risiko berkait dengan air juga berlangsung timpang. Akses terhadap kuantitas dan kualitas air lebih mudah bagi perusahaan ketimbang bagi warga kebanyakan. Akibatnya, warga kebanyakan lebih rentan menerima risiko kekurangan air dan risiko mendapat kualitas air yang buruk. Di kawasan pesisir utara Jawa bagian tengah terdapat risiko tersendiri yang terhubung dengan cara penyelenggaraan penyediaan air bersih. Keterbatasan layanan air perpipaan yang bersumber dari air baku permukaan telah mendorong kemasifan pengeboran untuk mengekstraksi air bawah tanah. Padahal, karakter geologi di pesisir utara Jawa bagian tengah sarat dengan lapisan tanah muda yang masih terus mengalami proses pemadatan. Alhasil, pengambilan air tanah mempercepat pemadatan, sehingga selanjutnya memperbesar risiko terjadi amblesan tanah.

Bersamaan dengan itu, modal telah memusatkan industrialisasi di pesisir utara Jawa bagian tengah. Konsentrasi kawasan industri juga memusatkan tempat tinggal bagi warga kebanyakan yang sekaligus menjadi buruh di industri tersebut. Alhasil, risiko amblesan tanah lebih berat menimpa warga kebanyakan ketimbang pengelola modal yang memusatkan industri. Warga kebanyakan harus berhadapan dengan dampak amblesan tanah setiap hari di tempat tinggal mereka. Misalnya, warga Kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, yang berada di dekat kawasan industri sekitar pelabuhan, harus hidup dalam risiko keseharian berupa genangan

7 Catatan lapangan Bagas dan Eka untuk penelitian *CARING*.

air rob dan kerusakan bangunan. Bahkan ruang hidup kampung itu juga terancam oleh penggusuran atas nama mitigasi banjir atau banjir rob.

Berkebalikan dari penderitaan yang menekan warga kebanyakan, angka ekonomi Jawa Tengah terus menjulang tumbuh. Sejak 2014-2019 ada pertumbuhan berkisar antara 5,2% dan 5,4%. Walau menurun ketika terjadi pandemi Covid-19 hingga 2,65%, setelahnya angka pertumbuhan ekonomi kembali naik. Hingga triwulan pertama 2024, angka pertumbuhan ekonomi melejit mencapai 4,97% yang didominasi secara berurutan oleh informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi, jasa pendidikan, konstruksi, dan industri pengolahan. Perlu diingat, angka-angka pertumbuhan itu sama sekali tidak memuat kerusakan dan kesulitan yang ditanggung warga kebanyakan.

Gambar I-1: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Triwulan I 2024 (sumber Berita Resmi Statistik, No. 28/05/33/Th. XVIII, 6 Mei 2024).

Keadaan yang tidak jauh berbeda terjadi di kawasan lain Jawa bagian tengah, tepatnya di daerah selatan seperti Yogyakarta. Sama seperti di daerah Semarang, peningkatan pembangunan di Yogyakarta juga merupakan hasil dari dorongan pertumbuhan investasi. Dilihat dari jenis investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tampaknya yang lebih diutamakan adalah industri pariwisata dan industri kreatif.[8]

8 RPJMD DIY 2022-2027.

Jumlah total industri tersebut terus meningkat, dari Rp20 triliun pada 2018 menjadi Rp36 triliun pada 2022. Sebaran investasi terbesar di DIY berturut-turut berada di Kota Yogyakarta (36%), Kabupaten Bantul (30%), dan Kabupaten Sleman (21%).

Gambar I-2: Pertumbuhan Ekonomi Provinsi D.I Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024 (sumber Berita Resmi Statistik No. 28/05/34/Th.XXVI, 06 Mei 2024).

Peningkatan angka investasi itu memompa angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Yogyakarta, dari semula 6,2% (2018) naik menjadi 6,6% (2019). Memang terjadi penurunan hingga 2,69% pada masa Covid-19, tetapi kembali naik menjadi 5,82% pada 2022. Pada kuartal pertama 2024, angka pertumbuhan ekonomi di DIY mencapai 5,02%. Sektor yang menjadi pendongkrak utama pertumbuhan itu adalah akomodasi dan makan-minum yang mencapai 12,58% (Gambar I-2). Sektor tersebut berkait langsung dengan pariwisata, bidang yang diutamakan dalam alokasi investasi DIY.

Investasi untuk pembangunan industri pariwisata acap dinilai "berhasil" meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Namun kemeledakan bidang usaha pariwisata itu menuntut "kinerja" dari hal-hal lain yang tidak diperhitungkan. Salah satunya "kinerja" akuifer Merapi yang berada di bawah tanah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Pada 2016, diperkirakan ada 32 hotel berbintang dan

320 hotel non berbintang di Kabupaten Sleman, 62 hotel berbintang dan 358 hotel non berbintang di Kota Yogyakarta, dan satu hotel berbintang dan 249 hotel non berbintang di Kabupaten Bantul yang mengekstrak air tanah dari akuifer Merapi.[9] Bagi warga kebanyakan yang bermukim di perkampungan, kemenjamuran hotel berarti berhadapan dengan sumur hotel yang lebih dalam dengan kekuatan pompa lebih besar. Imbasnya, sumur dangkal warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari pun kalah. Sumur-sumur warga pun mengering.

Sebagai contoh, di Kabupaten Sleman, akuifer Merapi hanya dapat diekstrak di area tersebut hingga 28.968 liter/hari. Pada 2013 kebutuhan air bersih untuk populasi penduduk Sleman yang berjumlah 1.114.833 jiwa mencapai antara 3.344.499 liter/hari dan 4.459.332 liter/hari. Sementara cakupan PDAM Kabupaten Sleman baru mampu melayani 60% populasi. Alhasil, "perebutan" air dalam keseharian ini tak urung mengempaskan warga kebanyakan ke tangan perusahaan air kemasan dan/atau air isi ulang. Warga harus membeli air galon/isi ulang dengan harga lebih mahal daripada air PDAM. Di sisi berseberangan, pengusaha air kemasan dan hotel-hotel tidak berhenti menangguk untung.[10]

Ngelep, Ngrumat, Niteni: Ekologi Politik Merawat Air dan Ruang Hidup di Jawa Bagian Tengah

Tibalah kita pada bagian yang menceritakan tentang gerak-gerak yang dilakukan warga kebanyakan dalam menghadapi timpaan ketimpangan. *Ngelep, ngrumat,* dan *niteni* merupakan gerak – bukan diam saja – dalam menghadapi kesulitan memperoleh air hingga kerusakan berkait dengan air. Mengambil judul *Ngelep, Ngrumat, Niteni: Ekologi Politik Merawat Air dan Ruang Hidup di Jawa Bagian Tengah*, buku ini

9 Bosman Batubara, 2019, "Krisis, Ketidakadilan, dan Keadilan Sosial-Ekologis", dalam *Prisma*, Vol. 38 No. 3, 2019 (66-84).

10 Bosman Batubara, 2014, "Analisis DPSIR terhadap Sumber Daya Air di Kota Yogyakarta dan Sekitarnya", draft Kertas Kerja I Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA).

mendokumentasikan gerak-gerak perawatan di balik gerak modal yang merangsek ke segala arah. *Ngelep, ngrumat,* dan *niteni* diambil dari apa yang dilakukan warga kebanyakan yang tercatat dalam buku ini.

Buku ini terlahir dari hasil kerja sama beberapa pihak, seperti Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Komite Yogyakarta,[11] FNKSDA Komite Semarang,[12] Yayasan Amerta Air Indonesia,[13] dan konsorsium penelitian CARING.[14] Tiga orang fasilitator penulisan buku ini (Bagas Yusuf Kausan, Bosman Batubara, dan Eka Handriana) terafiliasi dengan dua pihak yang disebut terakhir. Proses penyusunan buku untuk merekam gerak warga dalam merawat air dan ruang hidup di Jawa bagian tengah ini dimulai sejak Agustus 2023. Dalam proses penyusunan buku, setidaknya ada tujuh tahap yang telah dilalui, yaitu rapat persiapan, penyusunan proposal, mobilisasi

---

11 FNKSDA Komite Yogyakarta merupakan organisasi gerakan yang memiliki visi mewujudkan cita-cita pembebasan kaum *mustadl'afin*, memperkuat dan mendukung perjuangan demokrasi, serta mewujudkan kedaulatan rakyat dengan semangat keadilan sosial ekologis. Lebih lengkap tentang kegiatan FNKSDA Komite Yogyakarta, lihat https://www.instagram.com/fnksda.jogja/.

12 FNKSDA Komite Semarang adalah organisasi gerakan yang terdiri atas masyarakat sipil yang berdomisili di Semarang. FNKSDA Semarang lahir dari keresahan bersama atas begitu banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dan perampasan ruang hidup. Selengkapnya, lihat https://www.instagram.com/fnksdasemarang/.

13 Yayasan Amerta Air Indonesia (Amerta) memiliki visi mewujudkan pengelolaan sumber daya dan risiko berkait dengan air yang secara ekologi berkelanjutan/lestari dan secara sosial berkeadilan. Sampai saat ini Amerta masih dalam proses pembuatan akta legalitas lembaga.

14 Ada tiga pihak yang terlibat konsorsium penelitian "*Caring the Flows for Healthier Urban(ized) (Ground)water in Semarang and Yogyakarta, Indonesia (CARING)*" (2023-2026), yakni Water Governance Department, IHE-Delft Institute for Water Education, Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM, dan Arsitek Komunitas (Arkom) Indonesia. Kegiatan penelitian CARING dapat disimak melalui website (https://airwarga.id/) dan Instagram (https://www.instagram.com/air.warga/).

dana, pengayaan materi, penulisan artikel, *review* oleh fasilitator, dan publikasi.

Tahap pertama, rapat persiapan dilakukan melalui satu kali pertemuan *offline* (13 Agustus 2023) serta dua kali pertemuan *online* (17 Agustus 2023 dan 25 Agustus 2023). Pertemuan-pertemuan tersebut membahas sekaligus menyepakati beberapa hal, seperti mengapa kader FNKSDA ingin melakukan riset air sebagai bagian dari isu perkotaan, ekologi, dan ruang di Semarang dan Yogyakarta; agenda mendorong kemunculan atau memperkuat aliansi warga di perkotaan tentang akses dan risiko berkait dengan air; agenda menyelenggarakan *writeshop-workshop*; dan membuat Whatsapp Group (WAG).

Tahap kedua, membuat proposal bertajuk "Ekologi Politik Merawat Air di Semarang dan Yogyakarta". Proposal tersebut disusun salah satu fasilitator (Bosman) yang berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, lensa teori, metode, operasionalisasi, manajemen, serta kebutuhan dan mobilisasi sumber daya. Proposal tersebut menjadi navigator keseluruhan proses penyusunan buku sekaligus bahan untuk tahap ketiga, yakni mobilisasi dana. Belajar dari proses penyusunan buku BSNS, organisasi yang terlibat dalam penulisan buku ini sepakat menggalang dana publik melalui *kitabisa.com*. Konten penggalangan dana publik berbasis proposal tersebut mulai beredar di berbagai media sosial sejak akhir Agustus 2023.[15] Dana dari *kitabisa.com* dipakai untuk membiayai percetakan, penyuntingan, tata letak, dan pembuatan sampul buku (lebih lengkap tentang dana publik dan laporan keuangan dibahas pada "Bab X: Laporan Keuangan"). Sementara untuk biaya riset dan penulisan buku berasal dari proyek penelitian CARING.

Tahap keempat, pengayaan materi. Tahapan ini terdiri atas dua kegiatan, yakni pengayaan materi 1 (*offline*) dan pengayaan materi 2 (*online*). Pengayaan materi 1 berlangsung di Kedai Kopi Kang Putu, Kota

---

15 Lihat https://kitabisa.com/campaign/merawatairsemarangdanyogya.

Semarang, 2 September 2023.[16] Ketiga fasilitator (Bagas, Bosman, dan Eka) secara bergantian memaparkan dua bahan diskusi, yakni perspektif *caring for water* (*ngopeni banyu* atau merawat air) dan autoetnografi kepada 16 orang peserta. Bahan untuk diskusi pengayaan materi 1 berasal dari proses penelitian Tim Air Warga Semarang (penelitian CARING). Sementara pengayaan materi 2 dilakukan secara *online* dalam bentuk diskusi mingguan. Bahan diskusi untuk pengayaan materi 2 adalah artikel-artikel berkait dengan ekologi politik yang dirumuskan secara bersama-sama melalui Whatsapp Group. Tabel I-1 mencantumkan bahan, pemantik, dan waktu penyelenggaraan diskusi untuk pengayaan materi 2.

Tabel I-1: Bahan Bacaan untuk Pengayaan Materi 2
tentang Ekologi Politik

No.	Bahan diskusi	Pemantik	Tanggal
			Sept 2023
1	Heynen N, Kaika M and Swyngedouw E (2006), "Urban Political Ecology: Politicizing the Production of Urban Natures", dalam Heynen, N, M Kaika, and E Swyngedouw (eds.), *In the Nature of Cities: Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism, (*New York: Routledge Taylor & Francis Group, pp. 1-19).	Adib Saifin Nu'man	3
2	Swyngedouw E (2006), "Metabolic Urbanization: The Making of Cyborg Cities", dalam Heynen, N, Kaika, M and Swyngedouw, E (eds.), *In the Nature of Cities: Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism,* (New York: Routledge Taylor & Francis Group, pp.20-39).	Angga Palsewa Putra	
3	Tzaninis Y, Mandler R, Kaika M and Keil R (2020), "Moving Urban Political Ecology Beyond the 'Urbanization of Nature'", *Progress in Human Geography*, 45(2): 229-252.	Muhammad Husnudin	

16 Lihat https://airwarga.id/diskusi-ngopeni-banyu-di-semarang/.

No.	Bahan diskusi	Pemantik	Tanggal
4	Gandy M (2022), "Urban Political Ecology: A Critical Reconfiguration", *Progress in Human Geography,* 46(1): 21-43.	Muhamad Nurul Pahmi Attaptazani	10
5	Kooy M and Bakker K (2008), "Technologies of Government: Constituting Subjectivities, Spaces, and Infrastructures in Colonial and Contemporary Jakarta", *International Journal of Urban and Regional Research,* 32: 375-391.	Muhamad Nasihudin	
6	Batubara B, Kooy M and Zwarteveen M (2018), "Uneven Urbanisation: Connecting Flows of Water to Flows of Labour and Capital Through Jakarta's Flood Infrastructure", *Antipode,* 50: 1186-1205.	Abdul Manan	
7	Belland M, Kooy M and Zwarteveen M (2023), "Destabilizing the Science of Soils: Geoscientists as Spokespersons for Land Subsidence in Semarang, Indonesia", *Environment and Planning E: Nature and Space,* 0(0).	Bowo Arifin Ryan Fanuchi	
8	Hadipuro W and Putri PW (2020), "Right-to-Water Alliances in Indonesia and Two Critical Disjunctions", *PDC Journal,* 8(1): 29-47.	Adetya Pramandira	17
9	Astuti WK (2017), "Air dan Dialektika Kota Pariwisata: Merebut Hak atas Kota dan Air di Yogyakarta", *Wacana,* 35: 91-116.	Zahra S Salsabila	
10	Wardana A (2017), "Neoliberalisasi Kawasan Perairan Teluk Benoa: Sebuah Catatan Kritis atas Praksis Perlawanan di Bali", *Wacana,* 35: 55-90.	Bayu Angga	
11	Padawangi R (2021), "Pembangunan Perkotaan, Kerentanan, dan Bencana di Pesisir Indonesia: Reklamasi Lahan Apakah Pentingnya Keadilan Sosial?", *Tanah Air:* 17-32.	Istikomah	

No.	Bahan diskusi	Pemantik	Tanggal
12	Sidabalok H (2021), "Jalan Tol dan Tanggul Laut Semarang Demak dalam Perspektif Keadilan Lingkungan", *Prisma,* 40(3): 90-99.	Muhammad Muslich	24
13	Priwardhani A (2013), "Ketika Kupu-kupu Kuning Tak Lagi Muncul: Perubahan Iklim dan Pengetahuan Lokal di Dua Desa Pesisir Kabupaten Ende", *Wacana,* 29: 113-135.	Nafisatul Khoidah	
14	Arizona Y dan Chandranegara IS (2017), "Jihad Berkonstitusi: Muhammadiyah dan Perjuangan Konstitusional Melawan Komodifikasi Air", *Wacana,* 35: 25–54.	Nursidi	
15	Adicondro GY (1979), "Industriawan dan Petani Tambak: Kisah Polusi di Dukuh Tapak, Semarang Barat", *Prisma,* 8(7): 65-81.	Nabil Gunawan	
16	Batubara B, Handriana E, Kausan BY dan Ardhianie N *(accepted),* "Ekologi Positif: Praktik Merawat Air Koalisi Maleh Dadi Segoro di Pantura Jateng", disiapkan sebagai satu bab untuk buku ekologi positif yang digagas PMLP-Unika Soegijapranata Semarang.	Jamal	
17	Ahimsa-Putra HS (1997), "Sungai dan Air Ciliwung: Sebuah Kajian Etnoekologi", *Prisma,* 16(1): 51-72.	Neneng H Maryam	

Diskusi *online* untuk pengayaan 2 berlangsung selama dua jam untuk setiap pertemuan. Dari dua jam itu, satu setengah jam untuk presentasi diskusi artikel dan 30 menit sisanya untuk memutakhirkan ide dan kerangka tulisan peserta. Menurut rencana, dalam satu minggu, ada empat artikel yang menjadi pembahasan. Setiap peserta diminta membuat *review* singkat atas artikel yang dibaca dengan cara menjawab enam pertanyaan berikut: (1) tulisan ini tentang apa, (2) teori dan metode yang dipakai apa, (3) untuk apa ia ditulis, (4) apa yang terjadi dalam tulisan itu, (5) apa yang dibuka oleh tulisan itu, dan (6) apa yang bisa diambil dari artikel itu untuk penelitian. Namun dalam perkembangan,

ada banyak sekali penyesuaian, termasuk soal bahan bacaan, teknis diskusi, waktu, dan pemantik.

Tahap kelima, penulisan artikel. Setiap peserta diminta membuat kerangka tulisan, lalu mengembangkan menjadi tulisan utuh. Pada awalnya banyak peserta yang sudah menulis kerangka, tetapi yang menyelesaikan tulisan hanya tiga peserta. Lantas dua fasilitator menyumbangkan dua tulisan untuk melengkapi buku, sembari mengundang beberapa penulis dari luar peserta untuk bergabung, seperti Yesaya Sandang (Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga), Nandra Eko Nugroho (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta), Iqbal Alma Ghosan Altofani (Walhi Jawa Tengah), Umi Ma'rufah (Walhi Riau), dan Marwa (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta). Semua tulisan telah melewati tahap keenam, yakni *review* oleh fasilitator. Pada tahap ini tiga orang fasilitator secara bergantian mengulas, mengomentari, dan menyunting tulisan agar lebih mudah dipahami dan sesuai dengan ide awal proposal penyusunan buku ini.

Proses *review* tulisan oleh fasilitator merupakan bagian dari penyuntingan isi dalam tahap terakhir atau ketujuh, yakni publikasi. Selain penyuntingan isi, buku ini juga telah melalui proses penyuntingan bahasa oleh Gunawan Budi Susanto. Sementara ilustrasi dan desain sampul buku dikerjakan Ahmad Kafabi. Proses tata letak dan percetakan buku dilakukan sebuah penerbit bernama Mata Kata Inspirasi. Buku *Ngelep, Ngrumat, Niteni: Ekologi Politik Merawat Air dan Ruang Hidup di Jawa Bagian Tengah* dicetak secara terbatas, dijual melalui sistem *pre-order*, sebelum akhirnya dibuat menjadi terbuka (*open access*) untuk publik agar sirkulasi dan tingkat keterbacaannya menjadi lebih luas dan tinggi. Yang terpenting, supaya lebih mudah dijangkau warga kebanyakan.

Buku ini memuat tujuh tulisan yang menceritakan dinamika persoalan berkait dengan air di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, atau yang kami sebut sebagai daerah Pulau Jawa bagian tengah. Tulisan pengantar

ini membuat pemetaan sederhana berkait dengan konsep kunci dan dimensi-dimensi yang terkandung dalam setiap tulisan. Sementara pada bagian akhir ditutup tulisan Marwa bertajuk “Memaknai Merawat Air: Resistensi, Desentralisasi, dan Transformasi Tata Kelola Air” yang menjadi pembungkus ketujuh tulisan tersebut. Pemetaan untuk ketujuh tulisan dapat disimak melalui Tabel I-2.

Tabel I-2. Pemetaan Dimensi-dimensi yang Terkandung dalam Setiap Tulisan

Penulis	**Dimensi Tulisan**					**Konsep Kunci**
	Aktor	**Infrastruktur**	**Ketimpangan**	**Air**	**Merawat Air**	
Muhamad Nasihudin	PDAM Tirta Sembada Sleman, PAM Dusun Tirta Wening, Warga Padukuhan Sejati Desa.	Sumur dangkal, pompa, tandon, meteran, pipa, Sungai Progo.	Air sungai menyusut, karena ada pertambangan pasir.	Dialektika air sebagai komoditas yang mahal (PDAM) dan air sebagai kebutuhan bersama yang murah (PAM Dusun).	*Adaptive, Watchful. Tinkering-listening.*	Hidrososial, *Water control, Water caring.*
Yesaya Sandang dan Nandra Eko Nugroho	Warga Berdaya, pihak hotel, Dinas PU-ESDM Yogyakarta.	Sumur dalam milik hotel, sumur dangkal milik warga.	Sumur dangkal warga kering, karena sumur dalam hotel; layanan air untuk hotel lebih diprioritaskan daripada untuk warga.	Dialektika air sebagai komoditas untuk hotel dan air sebagai kebutuhan sehari-hari untuk warga.	*Activism, Tinkering-watchful.*	Hak asasi atas air (HAAR); *Socialising tourism,* sains warga *(citizen science).*

Penulis	Dimensi Tulisan					Konsep Kunci
	Aktor	Infrastruktur	Ketimpangan	Air	Merawat Air	
Nafisatul Khoidah	Pemerintah (provinsi dan daerah), warga Dusun Banyakan.	TPST Piyungan, sumur dangkal warga.	Sawah dan sumur warga di Bantul tercemar, karena air lindi dari TPST Piyungan.	Dialektika Kota Yogyakarta sebagai tempat pariwisata yang mensyaratkan produksi sampah berlebihan dan krisis air di Bantul yang meningkatkan kerja reproduksi sosial perempuan.	*Activism; adaptive-tinkering, watchful, sharing.*	Reproduksi sosial, *water caring.*
Muhamad Nabil Gunawan	Forum Petani Rawa Pening Bersatu (FPRWB), Persatuan Petani Nelayan Rawa Pening (Perpenera), BBWS Pemali-Juana, Kodam V/Diponegoro, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Danau (genangan air) Rawa Pening.	Ruang hidup warga (sawah, rumah) terancam digusur, karena proyek revitalisasi danau versi pemerintah.	Dialektika antara tanah (dan air) sebagai komoditas (wisata) oleh pemerintah dengan tanah (dan air) sebagai ruang hidup bagi warga.	*Activism; adaptive, watchful, listening-activism.*	Ekologi-politis, *everyday resistance, (counter) hegemony.*
Eka Handriana	Paguyuban Pengendali dan Penanggulangan Air Pasang Panggung Lor (P5L), PT Tanah Mas.	Rumah pompa, pintu air.	Warga terkena timbunan derita imbas dari banjir, sedangkan pemodal terus diuntungkan.	Dialektika antara risiko berkait air seperti banjir, rob, dan amblesan tanah dengan respons kolektif warga.	*Activism, watchful, tinkering.*	Ekologi politis urbanisasi, demokrasi langsung, *situated-knowledge.*

Penulis	Dimensi Tulisan					Konsep Kunci
	Aktor	Infrastruktur	Ketimpangan	Air	Merawat Air	
Bosman Batubara dan Iqbal Alma Ghosan Altofani	Warga Kampung Tambakrejo, Pemerintah Kota Semarang, BBWS Pemali-Juana.	Normalisasi aliran kanal, rumah deret, rumpon kerang hijau.	Warga kampung digusur, karena pemerintah ingin "menormalisasi" aliran kanal.	Dialektika antara manajemen banjir dengan proses penggusuran (dan sekaligus pembangunan kembali) perkampungan warga.	*Activism, adaptive-watchful.*	Perjuangan: okupasi *(direct action)*, solidaritas, reokupasi.
Umi Ma'rufah	Negara, privat (swasta), warga miskin.	Sumber daya air.	Warga miskin kurang mendapat akses terhadap air, karena sumber air dirusak dan diprivatisasi.	Dialektika antara pandangan air sebagai amanah Tuhan untuk kemaslahatan umat dengan air sebagai komoditas (privat).	*Activism.*	*Water caring,* privatisasi, profetik ekologi.

Artikel pertama yang ditulis Muhamad Nasihudin mendialogkan pendekatan hidrososial, kontrol air, dan perawatan air untuk menyelami cerita warga Padukuhan Sejati Desa dalam memahami, mengusahakan, memenuhi, mengontrol, dan merawat aliran air. Artikel itu melihat ada hubungan dialektis (saling membentuk) antara siklus hidrososial PDAM yang tiga kali lebih mahal dengan siklus hidrososial PAM Dusun yang lebih murah. Sebagai sebuah infrastruktur, PDAM dan PAM Dusun sama-sama mengontrol air. Bedanya, PDAM melihat air sebagai barang komoditas, sehingga warga atau konsumen yang mampu membayar mahal saja yang bisa mendapatkan air PDAM. Adapun PAM Dusun melihat air sebagai kebutuhan bersama, karena itu harga air dibuat terjangkau (murah) untuk warga. Hidrososial PAM Dusun, tulis Nasihudin, "Tak mengalirkan uang, tetapi mengalirkan kepedulian."

Artikel kedua ditulis Yesaya Sandang dan Nandra Eko Nugroho. Mereka menjahit kerangka hak asasi atas air (HAAR), s*ocialising*

tourism, dan *citizen science* (sains warga) untuk membahas aktivisme warga yang timbul dari konflik antara warga dan pihak hotel. Warga bergerak dalam logika keadilan akses dan pengelolaan air, sedangkan hotel mencari keuntungan dari geliat pertumbuhan sektor pariwisata. Artikel ini menyingkap dimensi sosial politik dari *over-tourism* di Yogyakarta, ketika ledakan pariwisata telah menyebabkan penderitaan bagi warga lokal, terutama dalam hal air bersih. Dalam situasi yang banyak merugikan warga tersebut, warga (dibantu banyak pihak, seperti akademisi dan lembaga nonpemerintah) merespons dengan serangkaian aktivitas yang oleh artikel ini disebut dengan sains warga.

Artikel ketiga yang ditulis Nafisatul Khoidah mengombinasikan teori reproduksi sosial dengan *caring for water* untuk menyingkap ketergantungan Kota Yogyakarta pada TPST Piyungan di Kabupaten Bantul. Tulisan ini melihat krisis sampah di Kota Yogyakarta merupakan satu momen yang saling menyusun, saling memengaruhi, dan tidak terpisahkan dari momen krisis air di Kabupaten Bantul. Relasi ketergantungan tersebut, tulis Nafisatul, "Mirip seperti bagaimana kapitalisme sangat bergantung pada kerja-kerja reproduksi sosial yang lazimnya dilakukan oleh perempuan." Krisis air tersebut telah memperdalam penderitaan warga dan meningkatkan kerja merawat air (sebagai bagian dari kerja reproduksi sosial) bagi warga yang tinggal di dekat TPST Piyungan, dengan perempuan menjadi pihak yang paling merasakan dampak.

Artikel keempat ditulis Muhamad Nabil Gunawan dengan memakai metode autoetnografi. Artikel ini merekam dinamika ekologi politis dari proyek revitalisasi (daerah sempadan danau) pemerintah di Rawa Pening yang banyak merugikan warga dan selanjutnya memunculkan bentuk perlawanan, baik yang bersifat terbuka maupun terselubung dalam keseharian (*everyday resistance*). Tulisan ini mengidentifikasi ada perbedaan makna revitalisasi dan sekaligus ketimpangan akses terhadap sumber daya antara warga dan pemerintah. Warga membayangkan revitalisasi berupa pengerukan endapan, sedangkan versi pemerintah

adalah perluasan area. Imbasnya, akses warga atas ruang hidup tereksklusi, bahkan terancam digusur untuk pembangunan kawasan wisata di sempadan danau.

Penulis artikel kelima adalah Eka Handriana yang membahas respons kolektif warga terhadap risiko berkait dengan air seperti banjir, rob, dan amblesan tanah di Perumahan Tanah Mas Semarang. Artikel ini melihat respons kolektif warga sebagai perwujudan demokrasi langsung yang didasari pengetahuan-yang-tersituasikan (*situated knowledge*) untuk mengatasi masalah banjir. Respons itu juga lahir sebagai ekspresi dari ketimpangan pembangunan, saat pengembang yang membuat perumahan melenggang begitu saja dan mendapat keuntungan. Adapun warga dipaksa tertimbun penderitaan mengalami momen banjir selama bertahun-tahun. Tulisan Eka menganggap apa yang berhasil dikerjakan P5L di Tanah Mas layak direpliaksi di tempat lain dengan didahului keterhubungan antarlokasi serta pengakuan atas keragaman situasi dan pengetahuan di lokasi masing-masing.

Artikel keenam ditulis Bosman Batubara dan Iqbal Alma Ghosan Altofani. Artikel ini adalah bentuk pendokumentasian proses membangun Kampung Tambakrejo. Proses membangun – mendirikan, merawat, dan mempertahankan menjadi bagian utama – tersebut dibidik melalui tiga elemen teori (perjuangan), yaitu okupasi, solidaritas, dan reokupasi. Artikel ini memosisikan program penanggulangan banjir berupa normalisasi kanal sebagai suatu "proses ganda-tetapi-tunggal": proyek normalisasi menggusur dan selanjutnya (melalui solidaritas yang kuat) membangun kembali perkampungan warga (reokupasi). Artikel ini juga melihat bahwa okupasi tidak hanya menyangkut bagaimana menduduki lahan, tetapi sekaligus membentuk ruang (peng) hidup(an) berupa ekosistem rumpon kerang hijau yang menjadi tempat pencaharian warga.

Artikel terakhir atau ketujuh ditulis Umi Ma'rufah. Tulisan ini tidak berjangkar pada suatu kasus dengan lokasi geografi tertentu, tetapi berangkat dari suatu diskursus yang spesifik: perspektif Islam

tentang air. Tulisan ini membangun kerangka profetik ekologi air dalam Islam dengan cara mengkritik pandangan pengelolaan air oleh negara, privatisasi air, air sebagai komoditas, dan pendistribusian air yang timpang. Lewat penelusuran terhadap ayat Al-Qur'an dan beragam hadis, tulisan ini menunjukkan dalam pandangan Islam air merupakan kebutuhan pokok milik umum (barang sosial) dan pemanfaatannya tidak atas perantara jual-beli.

Artikel penutup yang ditulis Marwa menjadi pembungkus agenda mendialogkan pendekatan ekologi politik dan merawat air (*caring for water*) yang tertanam dalam ketujuh tulisan dalam buku ini. Marwa memaknai merawat air sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik desentralisasi atas dan upaya transformasi tata kelola air dari model pembangunan kapitalisme yang senantiasa mensyaratkan ketimpangan. Di samping itu, Marwa juga memberi pesan untuk memahami prinsip merawat air secara kritis. Dalam arti, pertama, tidak meletakkan pendekatan merawat air sebagai upaya meromantisasi pengetahuan dan/atau praktik keseharian warga belaka. Kedua, memosisikan praktik merawat air senantiasa berhubungan dengan relasi kuasa tertentu yang memproduksi ketimpangan sistemik, baik dari segi kelas, gender, identitas, maupun persimpangannya (interseksi). Ketimpangan sistemik itulah yang memarginalkan dan sekaligus memberikan tanggung jawab lebih untuk merawat air bagi aktor tertentu yang sering kali adalah perempuan.

Mendorong Pengakuan Kerja Perawatan Air dalam Keseharian

Artikel Muhamad Nasihudin mencatat beberapa bentuk merawat air yang dilakukan warga. Pertama, *adaptive* (adaptif), ketika kondisi air PDAM yang mahal dan momen kesulitan air telah mendorong mereka beradaptasi dengan cara mengajukan bantuan pendirian PAM Dusun. Sumber air PAM Dusun berasal dari sumur yang berlokasi di tepi Sungai Progo. Di dasar sumur warga memanfaatkan ijuk (*tinkering*/mengutak-atik) untuk memfilter air. Agar sumur tidak terendam ketika Sungai

Progo meluap, warga melindungi (adaptif) tepian sumur dengan batu. Ketika datang permintaan izin menambang pasir, warga sepakat menolak (*activism*/aktivisme) aktivitas itu. Mereka begitu teliti (*watchful*/waspada) menyimak bagaimana aliran air sungai tidak lagi merembes ke tepian sumur warga, tetapi lewat begitu saja, imbas dari keberadaan tambang pasir. Pada saat terjadi kekeringan, warga menggalakkan kembali tradisi (*tinkering-listening*/mengutak-atik-mendengarkan) *ngelep* atau membasahi tanah sekitar sumur dengan air dari Sungai Progo. Warga begitu hati-hati (waspada) untuk tidak langsung memasukkan air dari sungai ke dalam sumur. Warga justru menyiramkan air sungai ke area sekitar sumur lebih dahulu untuk membiarkan air sungai tersaring tanah dan batuan. Cara itu tidak hanya menguntungkan warga, tetapi sekaligus bagi tanaman yang hidup di sekitar sumur.

Ada dua bentuk merawat air yang menonjol dalam tulisan Yesaya Sandang dan Nandra Eko Nugroho: aktivisme dan mengutak-atik. Bentuk aktivisme tersebut tampak dalam aksi protes di depan hotel, buntut dari kemengeringan sumur-sumur dangkal milik warga. Aksi protes terus bergulir, melibatkan akademisi, aktivis, jurnalis, seniman, dan organisasi lingkungan, sehingga terbentuk Warga Berdaya. Sebagai bagian dari sains warga, bersama jejaring, mereka mendata (mengutak-atik) muka air tanah di sumur-sumur warga dan mempelajari serta mengukur kualitas air dengan menghitung komposisi spesies di lingkungan mereka. Mereka menyimak (mengutak-atik-waspada) bahwa makin banyak spesies (keanekaragaman hayati) terjaga berarti kualitas air di lingkungan mereka masih terjaga. Begitu pula sebaliknya.

Tulisan Nafisatul Khoidah mengidentifikasi empat bentuk merawat air dalam kasus krisis air di sekitar TPST Piyungan, Kabupaten Bantul. Pertama, aktivisme saat warga melancarkan aksi memblokade PTST Piyungan sebagai bentuk protes karena sawah dan sumur mereka rusak. Protes itu datang dari praktik merawat air yang kedua, yakni mengamati terus-menerus (waspada) atau dalam keseharian disebut *niteni* terhadap kualitas air di sumur-sumur mereka. Bentuk ketiga, adaptif-mengutak-

atik, yakni warga memaksa pemerintah menyediakan sumur dalam (artesis) untuk komunal dan bergotong royong memasang pipa agar air dari sumur dapat mengalir ke rumah-rumah warga. Bentuk merawat air lain yang diidentifikasi Nafisatul adalah solidaritas (*sharing*/berbagi) ketika warga yang memiliki sumber air dengan kualitas lebih baik berbagi dengan warga lain, terutama warga miskin yang punya pilihan lebih terbatas dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Ada empat bentuk perawatan air muncul pula dalam tulisan Muhamad Nabil Gunawan. Untuk menentang pematokan sepihak oleh Kodam V/Diponegoro dan BBWS Pemali-Juana, warga mendirikan paguyuban dan kemudian melawan (aktivisme) melalui berbagai macam cara. Salah satu cara adalah mempertahankan cerita mitos mistis tentang Rawa Pening (mendengarkan-aktivisme) yang dipakai untuk menggalang kekuatan dan menuntut struktur sosial politik yang tidak adil. Selain itu, warga juga menyimak (waspada), lalu menyimpulkan berdasar pengamatan sehari-hari bahwa danau telah mendangkal akibat sedimentasi. Seperti kata salah seorang warga, "Pokoknya sekarang Rawa Pening *udah* jadi piring, Mas, dari sebelumnya mangkuk." Untuk menghidupi ruang hidup, warga pun senantiasa beradaptasi (adaptif): ketika genangan air sedang surut, warga menanam padi. Ketika genangan air naik, mereka menjadi nelayan. Dengan kata lain, bagaimana warga mengakses ruang hidup sangat dipengaruhi oleh ketinggian permukaan air danau yang berubah-ubah.

Tulisan Eka Handriana merekam tiga bentuk perawatan air dalam kasus banjir di Perumahan Tanah Mas Kota Semarang. Pertama, aktivisme, yakni warga perumahan yang bertahun-tahun mengalami banjir dan melihat solusi yang ada tidak memadai, memutuskan membentuk organisasi warga (P5L). Organisasi itu pula yang mereka pakai untuk mengadu ke pemerintah dan pengembang. Berhadapan dengan masalah banjir kronis membuat warga sangat sensitif dalam menyimak (waspada) masalah air. Hasilnya, pengetahuan mereka soal banjir menjadi begitu kaya dan menapak: mereka mengetahui secara

pasti bagaimana kondisi permukaan saluran air ketika terjadi pasang surut. Kekuatan pengetahuan sehari-hari itu mereka jadikan bekal ketika mengutak-atik (*tinkering*) dan merancang infrastruktur pintu air dari dana hasil iuran warga. Solusi pintu air berhasil dan berkelanjutan, karena didasari pengetahuan-yang-tersituasikan (*situated knowledge*).

Dua bentuk perawatan air yang menonjol dari tulisan Bosman Batubara dan Iqbal Alma Ghosan Altofani adalah aktivisme dan adaptif-waspada. Bentuk aktivisme tampak sejak awal warga secara sendiri-sendiri, berangsur-angsur, lalu menghimpun diri untuk menduduki tanah (dan air) di pesisir Kampung Tambakrejo. Mereka juga merawat kampung sebagai bagian dari merawat ruang hidup – air menjadi salah satu elemen penting – dengan cara membangun solidaritas untuk mempertahankan, memaksa pemerintah, dan menduduki kembali ruang hidup di kampung mereka. Praktik dan pengalaman hidup sehari-hari di area pesisir membuat warga sangat teliti dalam menyimak ekosistem untuk ladang penghidupan mereka (adaptif-waspada). Banyak warga sangat memahami di mana lokasi budi daya kerang yang baik, di aliran air mana biasanya banyak lumpur dan limbah, persis di area mana mereka *ngrumat* (merawat) rumpon, dan seterusnya.

Tulisan Umi Ma'rufah membawa satu bentuk perawatan air yang sangat kuat: aktivisme. Namun aktivisme di sini tidak terbatas pada pengorganisasian warga atau upaya menekan dan/atau melawan pemerintah secara langsung. Aktivisme lebih dimaknai sebagai upaya mengarusutamakan pengetahuan bahwa alih-alih mengontrol air yang kerap berujung monopoli, perspektif ekologi air dalam Islam cenderung lebih mengutamakan merawat air. Bentuk dari merawat bisa beragam dan sesuai dengan anjuran Nabi, dari menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan dan menanam pohon, tidak mencemari lingkungan, tidak menebang pohon secara sembarangan, memanfaatkan

tanah telantar untuk kepentingan yang bermanfaat/produktif, sampai menetapkan suatu kawasan sebagai area konservasi alam.

Tulisan-tulisan dalam buku *Ngelep, Ngrumat, Niteni: Ekologi Politik Merawat Air dan Ruang Hidup di Jawa Bagian Tengah* ini telah merekam kerja-kerja warga dalam merawat air di tengah timpaan ketimpangan (penderitaan) sehari-hari. Salah satu maksud dari perekaman tersebut adalah untuk mendorong pengakuan/rekognisi (*recognition*) terhadap kerja perawatan. Dalam hal ini, pengakuan yang dimaksud bukan sekadar dianggap ada begitu saja, atau sekadar dipuja-puji secara romantis. Pengakuan dibutuhkan untuk mencapai keadilan sosial, atau dalam konteks tulisan pengantar ini, keluar dari derita ketimpangan. Namun politik rekognisi tidak dapat berjalan sendirian, jika tidak ingin mengarah pada meromantisasi suatu gerak. Politik rekognisi harus berlangsung secara bersamaan dengan politik redistribusi. Sebagaimana dirumuskan seorang feminis dan ahli filsafat, Nancy Fraser, rekognisi-redistribusi merupakan gerak ganda yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai keadilan sosial.

Politik rekognisi berkait dengan identitas, kultur, dan gender. Dorongan utama politik rekognisi adalah menghadirkan pengakuan sosial politik. Dilihat menggunakan lensa gerak ganda rekognisi-redistribusi, rasanya kerja perawatan yang berhubungan dengan akses dan risiko berkait dengan air dalam keseharian warga akan sulit untuk membuat warga terbebas dari derita ketimpangan, jika tidak dibersamai dengan politik redistribusi.

Politik redistribusi berkait dengan masalah-masalah seperti ketimpangan akses sumber daya hingga pertentangan kelas yang mendorong pencapaian kesejahteraan sosial. Biasanya, para pemangku kebijakan menyelesaikan urusan ketimpangan itu dengan sekadar redistribusi. Misalnya dalam kasus di Kampung Kalialang, Kota Semarang, yang tidak mendapat layanan PDAM. Pada musim kemarau panjang, kampung itu mendapat kiriman bertangki-tangki air bersih dari pemerintah. Padahal, di tempat itu ada sendang yang semula masih

bisa digunakan warga, hanya airnya terus surut karena pepohonan di area lebih tinggi daripada sendang berangsur habis digerus proyek perumahan. Kembali memakai cara pandang rekognisi-redistribusi, redistribusi air tangki berpotensi tetap akan menyulitkan warga keluar dari derita ketimpangan, sepanjang penggunaan sendang itu tidak mendapat pengakuan, dengan tidak dipertimbangkan saat proyek pembangunan di sekitarnya terus digencarkan. Politik redistribusi pun tidak akan berfungsi baik untuk mencapai keadilan sosial tanpa politik rekognisi. Untuk keluar dari derita ketimpangan, atau untuk mendapatkan keadaan hidup yang lebih baik, perawatan air dan dengan demikian perawatan ruang hidup tidak cukup hanya diakui. Namun membutuhkan redistribusi secara politis. (*)

Dialektika Siklus-Siklus Hidrososial yang Mahal dan yang Murah:

PDAM Tirta Sembada dan PAM Dusun Tirta Wening

Muhamad Nasihudin

Sari: Tulisan ini menganalisis bagaimana masyarakat di Padukuhan Sejati Desa, Moyudan, Sleman, memahami air melalui dialog tiga pendekatan: siklus hidrososial, mengontrol air (*water control*), dan merawat air (*water caring*). Analisis melalui dialog tiga pendekatan itu menunjukkan bahwa PAM Dusun Tirta Wening adalah infrastruktur air yang mengontrol dan merawat air yang lebih murah, yang muncul secara dialektis didorong oleh infrastruktur air lain berupa PDAM Tirta Sembada yang airnya tiga kali lebih mahal. Tulisan ini berkesimpulan mengontrol air melalui infrastruktur hidrologi selalu dipengaruhi oleh konteks, yaitu cara pandang manusia tentang air, yang saling membentuk, dan selanjutnya membentuk ulang hubungan antara air dan masyarakat.

Kata-kata kunci: PAM Dusun, PDAM, siklus hidrososial, mengontrol air, merawat air.

Menolak Dikirim Air saat Kekeringan, Mengapa?

Siang itu panas sekali. Selepas zuhur, saya mencari tempat nongkrong untuk mengakses internet dan menikmati air kopi "semi"; tidak terlalu pahit. Karena cuaca terik, saya juga memesan air es. Tak berselang lama, seorang pekerja warung kopi menyuguhkan secangkir kopi hitam tidak terlalu pahit, sebotol air mineral, dan gelas berisi es batu; sesuai pesanan. Sewaktu saya membayar, pekerja warung kopi menyodorkan nota pembelian Rp15.000 dengan perincian air kopi hitam "semi" Rp7.000 dan air mineral serta segelas es batu senilai Rp8.000. Saya terkejut dengan harga barang terakhir. Biasanya saya membeli air es di warung kopi lain seharga Rp1.000, dan kalaupun air mineral dingin hanya seharga Rp3.000, sama seperti harga di toko kelontong Madura yang sedang mewabah di Yogyakarta.

Sambil meminum air es mineral seharga Rp8.000 itu, saya berselancar di internet. Saya mengulik masalah apa saja yang sedang terjadi di Yogyakarta. Setelah hampir setengah jam menjelajah di internet, saya menemukan berita bertajuk "Terdampak Kekeringan, Warga di Wilayah Sleman Ini Tak Mau Dikirimi Bantuan Air Bersih".[17] Dalam berita itu disebutkan, warga yang bertempat tinggal di Padukuhan Sejati Desa, Kelurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, kesulitan air karena debit air PAM Dusun (Pamdus) mengecil, tetapi warga menolak dikirimi air.

Padukuhan Sejati Desa adalah satu dari 16 *padukuhan* (pedukuhan) yang secara admisitratif masuk wilayah Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabutapen Sleman.[18] Istilah pedukuhan merupakan padanan

---

17 Wijaya Kusuma dan Dita Angga Rusiana, "Terdampak Kekeringan, Warga di Wilayah Sleman Ini Tak Mau Dikirimi Bantuan Air Bersih", dalam https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/10/02/231911178/terdampak-kekeringan-warga-di-wilayah-sleman-ini-tak-mau-dikirimi-bantuan (diakses 24 Desember 2023).

18 Wikipedia Bahasa Indonesia, "Sumberarum, Moyudan, Sleman," dalam https://id.wikipedia.org/w/index-.php?title=Sumberarum,_Moyudan,_

dari kata "dusun". Dua kata itu digunakan untuk menunjukkan suatu wilayah administratif di Indonesia yang berkedudukan di bawah kelurahan atau desa. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), merujuk Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019, istilah *padukuhan* digunakan pada awal 2020.[19]

Judul dan isi berita itu aneh, mengandung dua hal yang kontradiktif. Di satu sisi mengalami kekeringan, di sisi lain menolak dikirimi bantuan air bersih. Itu menimbulkan rasa penasaran saya. Mengapa mereka menolak air bersih?

Rasa penasaran itu bukanlah tanpa alasan. Waktu itu (Oktober 2023) di Yogyakarta – juga daerah lain di Indonesia – memang sedang dilanda kekeringan. Air bersih menjadi barang langka yang dicari dan diperebutkan. Kelangkaan air itu bukanlah persoalan baru. Di beberapa wilayah, seperti di Kota Yogyakarta,[20] Batam,[21] dan Ambon,[22] kelangkaan air bersih telah terjadi. Kelangkaan air, di Yogyakarta misalnya, terjadi karena ada penyedotan air tanah dalam oleh hotel,[23] karena privatisasi air oleh perusahaan air minum, dan karena air sungai tidak diolah untuk

---

Sleman&oldid=24105709 (diakses 30 Agustus 2023).

19 Wikipedia Bahasa Indonesia, "pedukuhan," dalam https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedukuhan-&oldid=24805277 (diakses 21 November 2023).

20 Sapariah Saturi, "Berebut Air dari Bumi Yogyakarta," dalam https://www.-mongabay.co.id/2022/03/27/berebut-air-dari-bumi-yogyakarta/ (diakses 22 Februari 2024).

21 Ahmadi Sultan, "Krisis Air di Batam Bisa Berubah Jadi Krisis Kepercayaan," dalam https://metro.batampos.co.id/kri-sis-air-di-batam-bisa-berubah-jadi-krisis-kepercayaan/ (diakses 22 Februari 2024).

22 Jaya Barends, "Ambon Keringe' Krisis Air di Kota Ambon dan Hilangnya Wilayah Resapan", dalam https://www.mongabay.co.id/2023/10/31/ambon-keringe-krisis-air-di-kota-ambon-dan-hilangnya-wilayah-resapan/ (diakses 22 February 2024).

23 Lihat Sandang Yesaya, *Seharusnya Air untuk Kita Jaga* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2024), hal 12; Astuti, "Air dan Dialektika Kota Pariwisata: Merebut Hak atas Kota dan Air di Yogyakarta", dalam *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*, No. 35, 2017, hal. 91.

kepentingan publik. Kelangkaan air itu memuncak berupa rebutan air. Rebutan air tidak hanya melibatkan sesama warga negara, tetapi juga antara warga dan negara. Selain itu, juga antara negara dan warga negara, dengan pemodal/korporasi. Dalam istilah yang lebih radikal, seorang aktivis lingkungan sekaligus cendekiawan, Vandana Shiva, menyebut rebutan air itu sebagai "perang air".[24]

Rebutan air memuat corak hubungan masyarakat dan air yang berbeda-beda. Satu sisi, air dan manusia membentuk hubungan pemodal dan komoditas yang menjadikan air sebagai lapak mencari dan mengeruk keuntungan. Di sisi lain, air dan manusia membentuk ulang hubungan air dan masyarakat menjadi hubungan ekonomi, dengan air sebagai komoditas dan masyarakat sebagai konsumen. Situasi tersebut berperan menjadikan air sebagai barang mahal dan akhirnya melahirkan kelangkaan air. Dengan demikian, hubungan antara manusia dan air ditentukan dari dua sisi: keberadaaan air dan cara manusia memahami/ memandang air.

Lalu, bagaimana masyarakat di Padukuhan Sejati Desa memahami air, sehingga menolak dikirimi air meskipun terdampak kekeringan seperti dalam berita tersebut? Bagaimana mereka bertahan memenuhi kebutuhannya dengan pemahaman itu, dengan akses terhadap air melalui infrastruktur air berupa PAM Dusun?

Tulisan ini menjawab dua pertanyaan itu melalui dialog tiga pendekataan: siklus hidrososial (Linton dan Budds, 2014),[25] mengontrol air, dan merawat air (Guzman, dkk., 2021).[26] Dialog tiga pendekatan

---

24 Vandana Shiva, *Water Wars Privatisasi*, *Profit, dan Polusi* (Yogyakarta: Insist Press, 2002).

25 Jamie Linton dan Jessica Budds, "The Hydrosocial Cycle: Defining and Mobilizing a Relational-Dialectical Approach to Water," dalam *Geoforum,* Vol. 57, November 2014, hal. 170-180.

26 Carolina Domínguez-Guzmán, Andres Verzijl, Margreet Zwarteveen, dan Annemarie Mol, "Caring for Water in Northern Peru: On Fragile Infrastructures and the Diverse Work Involved in Irrigation," dalam *Environment and Planning*

tersebut diletakkan pada bagian kedua bab ini. Pendekatan hidrososial membantu meletakkan praktik mengontrol dan merawat air dalam diskusi relasi air dan manusia/masyarakat. Sebaliknya, pendekatan mengontrol dan merawat air membantu hidrososial untuk membuka praktik relasi air dan manusia/masyarakat mengambil bentuk konkret. Dengan kata lain, dialog tiga pendekatan itu diperlukan dalam tulisan ini untuk mempertegas bahwa siklus hidrososial, mengontrol air, dan merawat air saling berkait. Dialog tiga pendekatan itu digunakan sebagai teori untuk menganalisis pemahaman masyarakat tentang air di Padukuhan Sejati Desa.

Bagian ketiga artikel ini terdiri atas dua blok. Pertama, tarif langganan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sembada di wilayah Sleman dijadikan sebagai data untuk menyelidiki bagaimana masyarakat di Padukuhan Sejati Desa memahami/mengalami akses atas air. Data tarif langganan PDAM membantu menjelaskan alasan mengapa masyarakat di Padukuhan Sejati Desa yang tidak mau berlangganan air PDAM, justru mendirikan PAM Dusun. Kedua, hasil kerja lapangan etnografi menjelaskan asal mula pembangunan PAM Dusun di Padukuhan Sejati Desa. Bagian keempat bab ini memperdalam pembahasan pemahaman masyarakat di Padukuhan Sejati Desa tentang air dengan cara menjelaskan praktik merawat air yang dilakukan warga melalui praktik *ngelep*, yaitu mengisi batuan sarang air tanah, untuk memastikan keberlangsungan kontrol mereka atas akses terhadap air. Bagian kelima, terakhir, simpulan.

Dialog Siklus Hidrososial, Water Control, dan Water Caring

Linton dan Budds (2014) menjelaskan, siklus hidrososial sebagai "suatu proses sosioalami di mana air dan masyarakat saling membentuk, dan terus membentuk ulang, dalam ruang dan waktu".[27] Dalam Kamus

E: Nature and Space, Vol. 5, No. 4, Desember 2021, hal 2153-2171.

27 Jamie Linton dan Jessica Budds, "The Hydrosocial Cycle: Defining and Mobilizing

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), proses diartikan sebagai rangkaian tindakan/perbuatan/ pengolahan yang menghasilkan produk.[28] Sementara sosioalami, merujuk Swyngedouw (1996), bermakna sebagai penubuhan alam – setidaknya apa yang sering disebut sebagai alam: nonmanusia – dan sosial.[29] Jadi proses sosioalami adalah rangkaian tindakan yang menghasilkan keberpilinan alam dan manusia. Kalau digunakan untuk menafsirkan definisi Linton dan Budds (2014), siklus hidrososial berarti menjadi serangkaian tindakan yang menghasilkan keberpilinan alam dan manusia di mana air dan masyarakat saling membentuk, dan terus membentuk ulang, satu sama lain dalam ruang dan waktu.

Water control (mengontrol air) adalah salah satu manifestasi siklus hidrososial. Linton dan Budds (2014) tidak secara tegas menyebut atau memakai istilah *water control*, tetapi menyebut istilah *control* (mengontrol) untuk mendefinisikan bagaimana aliran air melalui ruang dan waktu juga dibentuk oleh institusi, praktik, dan wacana manusia yang menentukan cara-cara pengendalian, pengelolaan, dan pengambilan keputusan.[30] *Water control* mengambil tempat utama di dalam paradigma hidrologi. Ia digunakan untuk mengukur, menampung, dan menentukan siapa yang dialiri dan tidak. Dalam praktik, *water control* memainkan peran di dalam teknis tata kelola air yang menempatkan air sebagai objek. Corak pemahaman air sebagai objek itu berkonsekuensi pada satu

---

a Relational-Dialectical Approach to Water," dalam *Geoforum,* Vol. 57, November 2014, hal. 6.

28 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Arti Kata Proses", dalam https://www.kbbi.web.id/proses, (diakses 25 Desember 2023).

29 Bosman Batubara, Bagas Yusuf Kausan, Eka Handriana, Syukron Salam, dan Umi Ma'rufah, *Banjir Sudah Naik Seleher: Ekologi Politis Urbanisasi DAS-DAS di Semarang* (Semarang: Cipta Prima Nusantara, 2021), hal. 26-27.

30 Jamie Linton dan Jessica Budds, "The Hydrosocial Cycle: Defining and Mobilizing a Relational-Dialectical Approach to Water", dalam *Geoforum,* Vol. 57, November 2014, hal. 4.

hal; air harus dikendalikan melalui pusparagam bentuk infrastruktur air, seperti bendungan, waduk, kanal, dan irigasi.

Guzman dkk. (2021), dalam artikelnya berjudul "Caring for Water in Northern Peru: On Fragile Infrastructures and The Diverse Work Involved in Irrigation", memberikan kritik terhadap pendekatan *water control* melalui studi etnografi Kanal Huallabamba dan Irigasi Motupe di Peru. Di sana, mereka menemukan berbagai persoalan yang dihasilkan oleh cara kerja *water control.* Pusparagam persoalan itu, menurut Guzman dkk. (2021), muncul dari kerusakan-kerusakan infrastruktur air, seperti kerusakan meteran air dan lapisan dinding kanal yang rontok. Kerusakan infrastruktur air itu telah mengakibatkan longsor dan berdampak kegagalan panen dua tahun berturut-turut yang dialami masyarakat Motupe.[31] Beragam persoalan yang Guzman dkk. (2021) rekam itu memberikan pesan penting bahwa air tak bisa dikendalikan. Ia hidup dan bergerak.

Bagi Guzman dkk. (2021), infrasruktur Kanal Huallabamba dan sistem Irigasi Motupe merupakan bentuk kegagalan pendekatan mengontrol air. Kerusakan infrastruktur air itu membuat petugas air Motupe tidak bisa mengandalkan pendekatan mengontrol air, dan karena itu mereka mengambil sikap adaptif, misalnya memercayakan persoalan air secara langsung ke para penjaga yang merupakan warga lokal. Selain itu, warga lokal di Motupe juga melakukan pekerjaan untuk mengutak-atik air di kanal yang mereka sebut sebagai *cuidar*. *Cuidar*, dalam paparan Guzman dkk. (2021), mereka dapatkan dari penjelasan seorang tetua di Motupe bahwa, "Manusia mesti mendengarkan dan menari untuk air." Lebih jauh, bahkan tetua itu juga berpesan pada Guzman dkk. (2021)[32], betapa penting aktivisme melawan invasi

---

31 Carolina Domínguez-Guzmán, Andres Verzijl, Margreet Zwarteveen, dan Annemarie Mol, "Caring for Water in Northern Peru: On Fragile Infrastructures and the Diverse Work Involved in Irrigation", dalam *Environment and Planning E: Nature and Space,* Vol. 5, No. 4, Desember 2021, hal. 2157.

32 Ibid., hal. 2156.

perusahaan tambang. Berdasar penjelasan yang didapat dari tetua adat di Motupe itu, Guzman dkk. (2021) memberikan padanan kata dalam bahasa Inggris untuk *cuidar* dengan *care* (merawat).[33]

Dari sinilah istilah merawat air diajukan Guzman dkk. (2021) sebagai antitesis terhadap pendekatan *water control* yang mereka lihat sudah gagal. Guzman dkk. (2021) membeberkan kerusakan-kerusakan infrastruktur air dalam cara kerja *water control* diatasi oleh masyarakat dan pemimpin di Motupe dengan mengutak-atik (*thinkering*) air. Masyarakat di Motupe membuat saluran air sementara dari tabung plastik besar yang mampu mengalirkan air 1,3 m^3/detik.[34] Guzman dkk. (2021) menyimpulkan secara polaritatif, mengontrol air melalui infrastruktur dan teknologi berkutat pada perhitungan dan prediktabilitas (keterprediksian), sedangkan perawatan air bersifat adaptif dan responsif.[35]

Cara masyarakat di Motupe mencoba-coba memperbaiki (aliran) air atau mengutak-atik air (*thinkering*) dengan membuat saluran plastik menyimpan penjelasan hubungan air dan masyarakat. Kanal Huallabamba lengkap beserta teknologi kontrol yang rusak itu adalah momen/lokasi di mana air berpilin dengan masyarakat, dalam sebuah bentuk, memakai istilah Linton dan Budds (2014) yang dipaparkan di atas, siklus hidrososial: dia adalah siklus hidrologi yang diproduksi melalui sekaligus memproduksi proses sosial; dia adalah manifestasi dari kerja sosial, tetapi sekaligus menjadi bagian dari siklus hidrologi. Dalam kanal dan teknologinya, air (hidro) dan sosial berpilin. Kanal dan teknologinya yang rusak, lebih lanjut, telah berdampak pada kegagalan panen dua tahun beruntun bagi masyarakat di Motupe. Teknologi kanal

---

33 Carolina Domínguez-Guzmán, Andres Verzijl, Margreet Zwarteveen, dan Annemarie Mol, "Caring for Water in Northern Peru: On Fragile Infrastructures and the Diverse Work Involved in Irrigation", dalam *Environment and Planning E: Nature and Space*, Vol. 5, No. 4, Desember 2021, hal. 2163.

34 Ibid, hal. 2157.

35 Ibid, hal. 2158.

tidak mampu mengontrol air. Air pun meluap dan banjir tak terelakkan. Air yang ditampung dan dialirkan melalui kanal dan teknologinya menunjukkan bentuk hubungan air dan masyarakat, dalam hal ini negara (pemerintah Motupe), yang kemudian mendorong pembentukan ulang: menjadi saluran air dengan plastik yang mengontrol air yang mengalir lebih pelan/kecil.

Peristiwa yang terjadi di Motupe berupa kerusakan kanal dan teknologinya adalah siklus hidrososial, dapat didaratkan pada konteks lain. Misalnya, dalam pengalaman saya di atas, air es mineral adalah sosioalami. Air es mineral (alam) dihasilkan dari campur tangan manusia, seperti pengeboran, ekstraksi, dan pengemasan air. Rangkaian tindakan yang menghasilkan kemenubuhan air es mineral (alam) dan pengeboran, ekstraksi, dan pengemasan air (kerja manusia, sosial) itu adalah kekuasaan tertentu, dalam konteks ini adalah modal. Proses pembentukan air es mineral itu kemudian membentuk hubungan antara air es mineral dan masyarakat. Pertama, air es mineral berhubungan dengan masyarakat kapitalis, sehingga membentuk hubungan air es mineral sebagai komoditas dan masyarakat kapitalis sebagai pemodal. Masyarakat kapitalis itu menggunakan kecenderungan politis berupa keuntungan dalam memahami air es mineral. Kedua, air es mineral yang dijual oleh masyarakat kapitalis membentuk ulang hubungan air dan masyarakat di tempat lain yang berbentuk air mineral dan pembeli. Kecenderungan politis yang menopang pemahaman masyarakat baru itu dengan air es mineral (pembeli) adalah kebutuhan akan air.

Siklus hidrososial menganalisis hubungan dialektis di mana setiap air diproduksi, dan pada gilirannya, berpengaruh terhadap proses produksi yang sangat sosial. Linton dan Budds (2014) memberikan contoh bendungan di Kanada bagian utara. Air yang ditahan di balik bendungan di Quebec adalah produk dari perusahaan listrik yang dikelola negara, tenaga kerja manusia, pemodelan hidrologi, wacana seputar hidronasionalisme, dan ekonomi produksi dan konsumsi energi.

Semua produk itu berdampak terhadap pengaturan air dengan cara tertentu.[36]

Pendekatan siklus hidrososial muncul untuk menggeser pendekatan siklus hidrologi. Merujuk Linton dan Budds (2014)[37], siklus hidrologi merupakan cara/metode untuk merepresentasikan air yang muncul dalam konteks historis tertentu untuk melayani tujuan politik tertentu, sehingga perlu digeser ke cara pandang yang mengedepankan sifat sosial air, yakni air dan masyarakat berhubungan satu sama lain. Linton dan Budds (2014) menambahkan, siklus hidrologi juga menciptakan kajian ilmiah air dan penciptaan klaim keahlian di bidang air, sehingga berkonsekuensi terhadap legitimasi otoritas teknis tertentu atas air.[38] Klaim ilmiah dan kepakaran teknis air itu berdampak terhadap pemisahan air dan masyarakat: hanya orang-orang yang dianggap pakar yang bisa mengolah, mengutak-atik, dan bersentuhan dengan air. Dengan demikian, siklus hidrologi juga memuat dimensi kontrol terhadap air.

Dimensi mengontrol air di dalam siklus hidrologi ditemukan Linton dan Budds (2014) melalui data yang diambil dari *National Resources Board* (NRB) bahwa sepanjang abad ke-20 pemahaman siklus hidrologi seturut modifikasinya digambarkan sebagai tugas pokok lembaga-lembaga air negara. NRB menyodorkan fakta bahwa konsep siklus hidrologi telah digunakan oleh lembaga-lembaga perencanaan pemerintah federal pada 1930-an sebagai sarana untuk memetakan sumber daya air suatu negara.[39] Siklus hidrologi membaca, kemudian memetakan, wilayah sumber daya air mana yang bisa dieksploitasi, dan mengetahui kualitas dan kuantitas air yang dapat disedot seturut hitungan keuntungan yang

---

36 Jamie Linton dan Jessica Budds, "The Hydrosocial Cycle: Defining and Mobilizing A Relational-Dialectical Approach to Water", dalam *Geoforum,* Vol. 57, November 2014, hal. 9.

37 Ibid, hal. 3.

38 Loc cit, hal. 2.

39 Ibid.

akan didapat. Artinya, air dipandang sebagai objek (komoditas) yang harus dieksploitasi dan pengelolaannya disamaratakan melalui teknik hidrolik.

Mengontrol air, dengan demikian, berpijak pada siklus hidrologi melalui tata kelola dengan teknik hidrolik sekaligus meniadakan peran masyarakat luas. Corak kekuasaan tertentu (negara) dalam siklus hidrologi menafikan kepedulian masyarakat luas atas air. Walhasil, siklus hidrologi tidak memuat dimensi merawat. Sebaliknya, siklus hidrososial, sebagai antitesis siklus hidrologi, mengedepankan sifat sosial air yang mengedepankan proses saling membentuk, dan terus membentuk ulang, antara air dan manusia/masyarakat. Ia membawa pemahaman bagaimana manusia memahami air; mengontrol, merawat, atau keduanya sekaligus. Tergantung pada bagaimana, dalam proses sosioalami itu, yang sosial dan yang alam membentuk, dan terus membentuk ulang, satu sama lain dalam ruang dan waktu.

Siklus hidrososial, sebagai proses sosioalami, menunjukkan bahwa hubungan air dan masyarakat terjalin secara internal. Linton dan Budds (2014)[40], menyitir Castree (2005), mengartikan "terjalin secara internal" dengan sifat-sifat yang membentuk air muncul sebagai fungsi dari hubungan air dengan hal-hal dan fenomena lain. Bagi Linton dan Budds (2014), hubungan internal bukanlah hubungan satu arah antara berbagai benda, seperti dampak manusia terhadap kualitas air, tetapi hubungan antar-elemen yang saling membentuk sesuatu, seperti bagaimana proses budaya, ekonomi, dan politik membentuk dan dibentuk oleh karakter khusus air dalam desalinasi air asin, air minum yang diolah, atau air suci.[41] Berkait dengan hubungan internal itu, Linton dan Budds (2014) mengumpamakan keberadaan teknologi spesifik untuk menyediakan air minum secara internal berkait dengan jenis air dan jenis hubungan

---

40 Jamie Linton dan Jessica Budds, "The Hydrosocial Cycle: Defining and Mobilizing A Relational-Dialectical Approach to Water", dalam *Geoforum*, Vol. 57, November 2014, hal. 4.

41 Ibid.

sosial tertentu. Jadi, hubungan secara internal, dengan demikian, adalah proses hubungan air dan manusia yang membentuk jenis air, dan selanjutnya, membentuk hubungan sosial tertentu. Linton dan Budds (2014) mencontohkan hubungan secara internal itu dengan keberadaan air mancur umum yang menghadirkan air sebagai barang publik ketika semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap air. Air mancur, penyediaan air minum, akses gratis, dan masyarakat didorong oleh kepentingan pribadi para pengguna air mancur dalam mempertahankan layanan itu.[42]

Merujuk perumpamaan Linton dan Budds (2014) tersebut, *water control* dan *water caring* memiliki tempat di dalam siklus hidrososial. Keberadaan teknologi spesifik (infrastruktur air) yang berhubungan secara internal dan dialektis dengan hubungan sosial tertentu dapat melahirkan kontrol air yang merusak atau kontrol air yang merawat. Hal itu bergantung pada kecenderungan politis, sosial, dan budaya yang menopangnya.

Wilayah-wilayah Hidrososial yang Mahal dan yang Murah

Bagian ini menjelaskan pelayanan PDAM Tirta Sembada Sleman yang secara dialektis, selain karena harga air yang mahal juga karena jangkauan infrastruktur perpipaan yang terbatas, telah menyebabkan kelahiran PAM Dusun Padukuhan Sejati Desa di area yang tidak terjangkau oleh jaringan perpipaan PDAM Tirta Sembada, dengan harga air tiga kali lebih murah.

Siklus Hidrososial yang Mahal: Bisnis Air oleh PDAM Tirta Sembada Sleman

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sembada adalah satu dari sekian unit bisnis Pemerintah Kabupaten Sleman. Bisnis air melalui PDAM itu tak dapat dilepaskan dari keberadaan geografis Sleman sebagai

42 Loc. Cit, hal. 6.

hulu sungai yang mengalir di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).[43] Ditinjau dari sudut pandang peningkatan pendapatan daerah, keberadaan geografis dengan hulu sungai merupakan potensi luar biasa untuk dimanfaatkan. Atas dasar potensi sumber daya air dan bisnis (pendapatan daerah) itulah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengelola sumber daya air melalui PDAM Tita Sembada, Sleman.

Salah satu sumber air baku yang dimanfaatkan PDAM Tirta Sembada adalah Umbul Wadon yang berada di Sleman. Umbul Wadon terletak di dasar jurang sebelah kanan Sungai Kuning dengan ketinggian sekitar 1.250 meter dari permukaan laut. Umbul Wadon merupakan hulu dari aliran air sungai-sungai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak, Progo dan Oyo. Umbul Wadon memiliki debit air sekitar 650 liter/detik saat musim hujan dan 400 liter/detik saat musim kemarau.[44] Selain itu, air minum juga diproduksi PDAM Tirta Sembada di beberapa sumber air, seperti *sellowel* [*sic*] (sumur dangkal), *deepwel* [*sic*] (sumur dalam, kedalaman lebih dari 60-100 meter), dan sumur bor (kedalaman lebih dari 30 meter dan 50 meter) yang dekat dengan unit-unit pelaksana.[45] Pada 2019, debit sumber produksi air mencapai 353 liter/detik, berasal dari dua mata air (total debit 94 liter/detik), 26 unit sumur dalam (135 liter/detik), 26 unit sumur dangkal (77 liter/detik), dan dua unit sumber air permukaan (47 liter/detik), dengan total volume produksi air 10.133.190 m^3, distribusi air 8.620.428 m^3, dan penjualan air 6.417.118 m^3.[46]

---

43 Media Center Sleman, "Sebagai Hulu Sungai Di DIY, Sleman Wajib Konservasi Sumber Daya Air," dalam https://mediacenter.slemankab.go.id/2022/03/27/sebagai-hulu-sungai-di-diy-sleman-wajib-konservasi-sumber-daya-air/ (diakses 18 Februari 2024).

44 Sleman, "Sumber Air Baku - PDAM Kabupaten Sleman," dalam https://pdamsleman.co.id/sumber-air-baku-pdam-sleman (diakses 18 Februari 2024).

45 Sleman, "Produksi - PDAM Kabupaten Sleman," dalam https://pdamsleman.co.id/produksi (diakses 18 Februari 2024).

46 Sleman, "PUDAM Tirta Sembada Sleman Targetkan 3.900 Sambungan Baru,

Pengelolaan sumber daya air dari Umbul Wadon dan sumber produksi air di unit-unit pelaksana itu digunakan oleh PDAM Tirta Sembada untuk memenuhi kebutuhan pelanggan/konsumen di Sleman. Kebutuhan pelanggan/konsumen dipenuhi melalui produksi air dalam kemasan dan langganan air minum perpipaan.

Produksi air kemasan bernama Daxu (Dari Air Kaliurang) telah dilakukan sejak 2018. Sepanjang 2018, penjualan Daxu terdiri atas air kemasan gelas 240 mililiter 14.603 gelas, kemasan botol 330 mililiter 5.174 karton (satu karton berisi 24 botol), kemasan botol 600 mililiter 2.696 karton (satu karton berisi 24 botol), dan galon ukuran 19 liter 514 galon.[47] Penjualan Daxu meningkat pada 2022, menyitir Direktur PDAM Tirta Sembada Sleman, Dwi Nurwata, menjadi 50.000 kardus/karton per bulan.[48]

Dalam hal penjualan air melalui jaringan perpipaan, menurut Badan Pusat Statistik/BPS (2023), berdasar kategori kecamatan, PDAM Tirta Sembada melayani 42.316 sambungan air; 42.270 di antaranya adalah sambungan air minum, dengan penjualan air 7.454.215 m^3.[49] Pada judul

---

Ekspansi Produk Daxu," dalam https://pdamsleman.co.id/berita/pdam-sleman-pudam-tirta-sembada-sleman-targetkan-3900-sambung-an-baru-ekspansi-produk-daxu (diakses 18 Februari 2024). Perbedaan yang terjadi antara produksi, distribusi, dan penjualan kemungkinan besar terjadi karena ada kebocoran dalam sistem perpipaan PDAM Tirta Sembada; meminjam istilah di dunia *kangouw* (persilatan) pelayanan penyediaan air oleh perusahaan air melalui jaringan pipa, kebocoran seperti itu sering disebut *non revenue water* (NRW).

47 Sleman, "PUDAM Tirta Sembada Sleman Targetkan 3.900 Sambungan Baru, Ekspansi Produk Daxu," dalam https://pdamsleman.co.id/berita/pdam-sleman-pudam-tirta-sembada-sleman-targetkan-3900sambungan-baru-ekspansi-produk-daxu. (diakses 18 Februari 2024).

48 *Harian Jogja Digital Media*, "2023, Air Mineral Produksi Sleman Akan Dipasarkan secara Nasional," dalam https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/09/02/512/-1110537/2023-air-mineral-produksi-sleman-akan-dipasarkan-secara-nasional (diakses 19 Februari 2024).

49 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, "Kabupaten Sleman dalam

Tabel II-1, BPS memberi judul sambungan air minum, tetapi setelah penulis tanyakan kepada salah satu pelanggan PDAM muncul jawaban bahwa air PDAM tidak bisa langsung diminum, tetapi harus dimasak terlebih dahulu. Tabel II-2 menyajikan jumlah sambungan pipa air PDAM Tirta Sembada untuk instansi.

Dari total pelanggan itu, di Kecamatan Moyudan wilayah tempat Padukuhan Sejati Desa di Kelurahan Sumberarum, terdapat sambungan air minum PDAM Tirta Sembada 2.322 sambungan (penulis hitung dari Tabel II-1 dan II-2).[50] Lebih lanjut, selama 2022, menurut unit pelayanan PDAM Tirta Sembada, air yang disalurkan di Kabupaten Sleman untuk 42.316 sambungan (Tabel II-3) adalah 7.454.215 m^3 air dengan nilai uang Rp55.774.244.400 (Tabel II-4).[51]

Tabel II-1: Jumlah Sambungan Air Minum (yang Harus Dimasak Terlebih Dahulu) menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman, 2022.

Kecamatan	Sosial Khusus	Hidran Umum	Rumah Tangga A1	Rumah Tangga A2	Rumah Tangga A3	Rumah Tangga A4	Rumah Tangga B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Moyudan	23	1	17	2.260	0	0	10
Minggir	23	3	31	2.129	0	0	11
Seyegan	1	0	10	69	0	0	0
Godean	18	0	23	2.264	1	0	146
Gamping	40	11	156	5.172	80	0	120
Mlati	51	13	113	4.014	3	0	103
Depok	66	5	61	5.072	10	0	955
Berbah	0	0	1	254	0	0	1
Prambanan	39	1	4	1.692	0	0	31

Angka 2023, dalam https://slemankab.bps.go.id/publication/2023/02/28/-d7689b2f3a1709f8c80cec4a/kabupaten-sleman-dalam-angka-2023.html (diakses 19 Februari 2024).

50 Ibid.

51 Loc.Cit., hal. 189.

Kecamatan	Sosial Khusus	Hidran Umum	Rumah Tangga A1	Rumah Tangga A2	Rumah Tangga A3	Rumah Tangga A4	Rumah Tangga B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kalasan	24	7	111	2.863	0	0	61
Ngemplak	27	11	55	2.037	4	0	270
Ngaglik	83	13	53	7.164	152	1	224
Sleman	20	6	61	1.897	33	0	58
Tempel	3	3	1	399	0	0	1
Turi	1	0	18	223	0	0	0
Pakem	5	3	9	643	2	0	13
Cangkringan	2	0	0	31	0	0	0
Sleman 2022 416 77 724 38.183 285 1 2.004 2021 402 83 895 37.045 249 0 1.898							

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sleman dalam Angka, 2023.

Tabel II-2: Jumlah Sambungan Pipa Air PDAM Tirta Sembada untuk Instansi di Kabupaten Sleman pada 2022.

Kecamatan *Subdistrict*	Instansi	Niaga Kecil	Niaga Besar	Industri Kecil	Industri Besar
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Moyudan	8	3	0	0	0
Minggir	9	3	0	0	0
Seyegan	0	0	0	0	0
Godean	20	9	1	0	0
Gamping	19	29	3	0	0
Mlati	21	25	10	0	0
Depok	38	90	69	0	0
Berbah	0	0	0	0	0
Prambanan	5	0	1	0	0
Kalasan	4	20	0	0	0
Ngemplak	23	5	1	0	0
Ngaglik	18	41	8	0	1
Sleman	55	13	2	0	1

Kecamatan *Subdistrict*	Instansi	Niaga Kecil	Niaga Besar	Industri Kecil	Industri Besar
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tempel	4	0	0	0	0
Turi	0	0	0	0	0
Pakem	15	5	0	0	0
Cangkringan	1	0	0	0	0
Sleman 2022 240 243 95 0 2 2021 241 227 92 0 2					

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sleman dalam Angka, 2023.

Tabel II-3: Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Sleman, 2022.[52]

Jenis Langganan *Type of Customers*	Jumlah Sambungan *Number of Connection*	Terjual *Sold* (m^3)	Rata-rata per Bulan *Average of Months* (m^3)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sosial Umum	77	21.438	27
Sosial Khusus	418	118.547	27
Rumah Tangga A1	724	1.00.769	13
Rumah Tangga A2	38.227	5.864.449	13
Rumah Tangga A3	285	42.234	2
Rumah Tangga A4	1	8	8

52 Penulis tidak mengetahui secara pasti rumus yang digunakan BPS untuk mencari rata-rata penjualan per bulan karena apabila rata-rata itu muncul dari perkalian terjual = jumlah sambungan x rata-rata per bulan x 12, hasilnya akan berbeda dari data BPS. Namun dalam https://slemankab.bps.go.id/subject/5/konsum-si-dan-pengeluaran.html#subjekView- bagian metodologi, dijelaskan BPS menggunakan metode pengumpulan data yang diambil dari setiap rumah tangga yang terpilih dalam survei yang dikunjungi petugas pencacah yang diberi tanggung jawab mewawancarai responden. Wawancara dilakukan langsung terhadap kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga (selain kepala rumah tangga) yang paling mengetahui keadaan di rumah tangga bersangkutan.

Jenis Langganan *Type of Customers*	Jumlah Sambungan *Number of Connection*	Terjual *Sold* (m^3)	Rata-rata per Bulan *Average of Months* (m^3)
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Tangga B	2004	3.69.037	18
Instansi	240	1.50.561	49
Niaga Kecil	243	1.39.871	61
Niaga Besar	95	6.47.301	819
Industri	2	0	-
Jumlah/Total 2022	**42.316**	**7.454.215**	**16**
2021	41.174	7.020.830	15

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sleman dalam Angka, 2023.

Tabel II-4: Air Disalurkan menurut Unit Pelayanan PDAM Sleman di Kabupaten Sleman, 2022.

Unit Pelayanan *Service Unit*	Air Disalurkan *Distributed Water*	Nilai *Value*
(1)	(2)	(3)
Sleman	1.213.025	8.795.519.450
Tridadi	1.81.483	1.361.768.650
Mlati	1.57.522	1.033.430.350
Nogotirto	2.31.687	1.831.931.450
Sidomoyo	2.48.578	1.833.312.350
Gamping	6.18.470	3.990.293.700
Godean	5.20.986	3.533.326.700
Tambakrejo	4.25.092	2.634.812.500
Pakem/Turi	1.59.673	1.232.714.200
Ngaglik	2.58.396	2.021.539.900
Ngemplak	6.04.513	4 065 923 250
Binomartani	1.36.289	8.70.455.700
Minomartani	3.71.049	2.444.554.000
Condongcatur	2.98.949	2.302.051.550
Depok	1.248.444	12.320.512.950

Kalasan	5.26.129	3.809.297.550
Prambanan	2.53.930	1.692.800.150
Jumlah/Total 2022 7.454.215 55.774.244.400 2021 7.020.830 40.127.112.150		

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sleman dalam Angka, 2023.

Perihal biaya/harga, PDAM Tirta Sembada mematok harga tergantung pada jenis rumah tangga dan besaran jenis meter kubik air, sebagaimana perincian di *website* PDAM Tirta Sembada pada Tabel II-5.

Tabel II-5: Harga Air PDAM Tirta Sembada Berdasarkan Kelompok Pelanggan.

No.	KELOMPOK PELANGGAN	DASAR PENETAPAN		
		0 – 10 m^3 (Rp)	11 – 20 m^3 (Rp)	> 21 m^3 (Rp)
	Kelompok I			
	a. Sosial Umum	2.750	2.750	3.000
	b. Sosial Khusus	2.750	2.750	3.000
	Kelompok II			
	a. Rumah Tangga A1	3.650	5.000	5.250
	b. Rumah Tangga A2	4.100	5.900	6.300
	Kelompok III			
	a. Rumah Tangga A3	5.750	6.250	6.850
	b. Rumah Tangga A4	6.050	6.400	6.900
	c. Rumah tangga B	6.200	6.700	7.300
	d. Instansi Pemerintah	6.050	7.100	9.250
	e. Niaga Kecil	6.650	7.400	9.250
	f. Industri Kecil	7.900	8.350	11.500
	Kelompok Khusus			
	a. Niaga Besar	9.100	10.350	13.000
	b. Industri Besar	9.500	11.600	13.500

No.	KELOMPOK PELANGGAN	DASAR PENETAPAN		
		0 – 10 m^3 (Rp)	11 – 20 m^3 (Rp)	> 21 m^3 (Rp)
	Kelompok Khusus yang Lain			
	a. Pelabuhan Udara	Kesepakatan	Kesepakatan	Kesepakatan
	b. Usaha Air Minum	Kesepakatan	Kesepakatan	Kesepakatan
	c. Mobil Tangki	Kesepakatan	Kesepakatan	Kesepakatan

Sumber: Peraturan Bupati Sleman Nomor 55 Tahun 2023.[53]

Dari klasifikasi pelanggan PDAM Tirta Sembada pada Tabel II-5, saya menghitung tarif pelanggan dengan mengambil contoh perhitungan biaya bagi rumah tangga A1, yaitu: "a) pelanggan rumah tangga yang rumahnya berfungsi sebagai tempat tinggal; b) pelanggan rumah tangga dengan luas bangunan sampai dengan 36 m^2 (tiga puluh enam meter persegi)".[54] Kelompok rumah tangga A1 memiliki abondemen (beban biaya) untuk 0-10 m^3 sebesar Rp54.500/$m^{3,}$ pemakaian untuk 0-10 m^3 sebesar Rp3.650/m^3, pemakaian untuk 11-20 m^3 sebesar Rp5000/m^3, dan untuk pemakaian lebih dari 21 m^3 sebesar Rp5250/m^3. Biaya admin dan langganan Rp20.000.

Jika dalam sebulan per rumah tangga memakai 24 m^3 air, hitungannya, merujuk pada Tabel II-5, adalah 24 m^3 X Rp5.250 = Rp126.000 + abondemen (biaya beban) Rp54.500 + biaya pemeliharaan dan admin Rp20.000 = Rp. 200.500 - Rp54.500 abondemen (pemakaian 0-10 m^3 pertama) = Rp146.000. Jadi, total biaya bulanan yang harus dibayar kepada PDAM Sembada untuk keperluan air rumah tangga ini adalah Rp146.000. Simulasi itu masih mengambil jumlah miminal

53 "PERBUP Kab. Sleman No. 55 Tahun 2023," dalam https://peraturan.bpk.go.id/-Details/270305/perbup-kab-sleman-no-55-tahun-2023 (diakses 21 Februari 2024).

54 Ibid, Pasal 4 Ayat (1), Huruf b.

meter kubik air yang dikonsumsi. Jumlah itu selalu berubah tergantung pada jumlah keluarga dan kebutuhan yang diperlukan setiap rumah.

Data persebaran distribusi dan biaya/tarif air di atas menunjukkan bahwa pengelolaan air yang dilakukan PDAM Tirta Sembada merupakan upaya bisnis daerah yang menempatkan publik/masyarakat sebagai konsumen. Penempatan itu mendorong hubungan penjual-pembeli dan merasionalisasi cara kerja; siapa punya uang, ia dapat air. Masalahnya, tidak semua orang dapat membeli (berlangganan) air PDAM, seperti masyarakat di Padukuhan Sejati Desa.

Di Padukuhan Sejati Desa, ketidakmampuan warga berlangganan air PDAM disebut Wardani, kepala dukuh, "Karena mahal." Mahalnya biaya/tarif itu dianggap tidak sebanding dengan pemasukan yang didapat warga yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan serabutan. Akhirnya, kondisi itu menciptakan peristiwa hidrososial berupa kelangkaan air pada waktu musim kemarau di Padukuhan Sejati Desa.

Harga air PDAM yang dirasa mahal oleh masyarakat di Padukuhan Sejati Desa dihasilkan oleh siklus hidrososial. Air PDAM merupakan hasil dari proses sosioalami yang membentuk hubungan air jenis PDAM dan masyarakat, dalam dua bentuk hubungan. Bentuk pertama, air yang berhubungan dengan perusahaan (PDAM) membentuk hubungan air dan PDAM sebagai komoditas dan penjual. Bentuk kedua, air yang dijual PDAM itu membentuk ulang hubungan air dan masyarakat menjadi hubungan komoditas dan konsumen/pembeli, termasuk di Padukuhan Sejati Desa. Di Padukuhan Sejati Desa, pembentukan ulang wilayah siklus hidrososial (air komoditas dan konsumen/pelanggan) itu berinteraksi dengan kebutuhan mengakses air bersih yang murah, dan kemudian melahirkan wilayah siklus hidrososial baru dalam bentuk PAM Dusun.

Siklus Hidrososial yang Murah: PAM Dusun Tirta Wening di Padukuhan Sejati Desa

Awalnya, saya mendapat cerita PAM Dusun di Padukuhan Sejati karena dipantik oleh rasa penasaran, sebagaimana telah saya katakan di bagian pembukaan, perihal alasan warga menolak bantuan air bersih pada waktu kemarau. Saya pun berkunjung ke sana dan bertanya kepada Wardani[55], "Saya baca berita warga sini menolak bantuan air bersih. Kenapa ditolak, Pak?" Setelah berbasa-basi, saya masuk ke tema inti yang ingin saya ketahui. Wardani menjelaskan, kebutuhan akan air di Padukuhan Sejati Desa sudah terpenuhi meski kemarau, karena pedukuhan memiliki infrastruktur air bernama PAM Dusun dan tradisi *lep* (membasahi tanah sekitar sumur dengan air Sungai Progo). Selain itu, menurut Wardani, "Bantuan air itu *enggak* efektif juga, karena sekali pakai. Ini tidak sesuai dengan kebutuhan warga sini, Mas." Dia melanjutkan, "Kalau bentuk bantuannya pompa, pipa, atau tandon kami terima. Kan kami sudah punya PAM Dusun."

PAM Dusun Tirta Wening dibangun secara bertahap sejak 2005, yang diawali dengan pembuatan sumur di tepi Sungai Progo. Biaya pembuatan sumur itu didapatkan oleh warga dari Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ PUPR) senilai Rp5.000.000. Setelah sumur jadi, warga belum bisa memanfaatkan karena belum memiliki kelengkapan mesin dan pipa yang tersambung ke pedukuhan. Pada 2005 itu, dibantu mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) UGM membuat proposal dan surat-menyurat, warga kembali mendapat bantuan dari Dinas PU berupa pompa, tandon, meteran, dan pipa. Barulah pada 2006, PAM Dusun beroperasi sebagai infrastruktur air. Sementara pemerataan distribusi air ke rumah-rumah warga diselesaikan pada 2009. Bermodal bantuan-bantuan itu, "Warga

55 Wawancara dengan Wardani, Sleman, 28 Oktober 2023.

gotong royong membuat sumur, memasang pipa, toren, dan meteran sampai rumah warga selama lima bulan," kata Wardani.

Menurut penuturan warga, pengajuan bantuan PAM Dusun itu dilatarbelakangi oleh kesulitan warga mendapat akses air bersih di pedukuhan itu. Wardani memberi tahu saya, masyarakat sulit mengakses air bersih sebelum ada PAM Dusun. Dia bercerita, "Suatu hari saya didatangi tamu dari Lampung dan pada waktu yang sama tidak ada air di sini. Saya bingung sekali dan akhirnya saya membawa mobil pikap ke irigasi dan *mbandhul banyu* (mengambil air) dari sana (irigasi dekat Sungai Progo) untuk mandi tamu." Memori *mbandhul banyu* Wardani itu juga diperkuat oleh Novi, salah seorang pembuat sumur di tepi Sungai Progo. Dulu, sebelum ada PAM Dusun, *mbandhul banyu* juga dilakukan warga untuk membasahi pinggiran sumur ketika kekeringan. Tindakan itu mereka sebut dengan istilah *lep*. Air diambil langsung dari Sungai Progo menggunakan pikulan, kendi, atau ember.

Efektif beroperasi sejak 2006, PAM Dusun Tirta Wening telah berhasil mendekatkan akses air bersih ke masyarakat di Padukuhan Sejati Desa. Pada 2022, biaya abondemen (beban) sebesar Rp5.000/0-5 m^3, dan Rp1.000 untuk biaya per meter kubik bagi pemakaian lebih besar dari 5 m^3. Pada 2023, PAM Dusun telah mendistribusikan air kepada 150 keluarga. Biaya beban Rp7.000/0-5 m^3, dan untuk penggunaan di atas 5 m^3 dipungut biaya Rp2000/m^3. Jadi saat ini (2024), jika konsumsi air warga dihitung rata-rata 24m^3/bulan, dapat disimulasikan biaya kebutuhan air setiap bulan Rp45.000, dengan perincian: abondemen 0-5 m^3 sebesar Rp7.000, ditambah pemakaian selebihnya 19 m^3 (berasal dari 24 m^3 -5 m^3) dengan biaya Rp2.000/m^3 yang bernilai Rp38.000 (untuk konsumsi air). Jadi, dapat dihitung 19 m^3 x Rp2.000 = Rp38.000 (konsumsi air) + Rp7.000 (abondemen) = Rp45.000.

Bandio, ketua PAM Dusun, menyatakan kenaikan biaya itu telah dipertimbangkan bersama warga melalui mekanisme rapat bulanan

setiap tanggal 10. Pertimbangan itu didasari kenyataan banyak perbaikan harus dilakukan, seperti kebocoran pipa, tandon, dan meteran.[56]

Gambar II-1: Tandon utama PAM Dusun (gambar diambil pada 28 Oktober 2023).

PAM Dusun Tirtawening memiliki tujuh tandon utama (Gambar II-1) dan 13 tandon distribusi. Pada tahun 2024, beberapa tandon bocor. Warga secara gotong-royong mengatasi permasalahan itu. "Dari tujuh tangki utama itu yang berfungsi sekarang empat karena yang lain bocor. Untuk tangki distribusi ada 13 yang setiap tangki ada masalah, tetapi sudah diselesaikan semua," kata Bandio. Merujuk laporan pertanggungjawaban September dan Oktober 2023, Bandio membeberkan pemasukan dari iuran warga dan arus uang keluar iuran tersebut. Kata Bandio, pemakaian air warga dihitung berdasar gerak meteran air. "Bulan ini kami punya pelanggan dengan 138 meteran PAM. Kalau rumahnya lebih. Kadang satu meteran dipakai tiga rumah. Untuk

56 Wawancara dengan Bandio, Sleman, 28 Oktober dan 22 November 2023.

pengeluaran listrik bulan kemarin Rp1.396.000. Kalau bulan sebelumnya malah Rp1.516.000. Kemarin penerimaan hampir Rp5 juta lebih."

Pada Oktober 2023, air sumur utama PAM Dusun Padukuhan Sejati surut. Masalah itu belum pernah terjadi. Gono[57], seorang pemuda di pedukuhan, menjelaskan air sumur PAM surut, "Karena air Sungai Progo (Gambar II-2) tidak sampai ke tepian dekat sumur, jadi tidak merembes ke tanah sekitar sumur." Sebelum saya bertanya, dia melanjutkan, "Sungai Progo itu airnya cuma di sebelah kanan dan mengalir deras ke bawah, Mas. Karena di bawah sana ada tambang pasir, sehingga [aliran] air sungai lewat begitu saja, tidak merembes ke tepian dekat sumur seperti biasa."

Gambar II-2: Sungai Progo (diambil pada 28 Oktober 2023).

Bermodal tradisi *lep*, warga menggeser sistem kerja *lep* menggunakan air Sungai Progo yang awalnya ditujukan ke sumur-sumur rumah warga menjadi ke sumur PAM Dusun. "Untuk pertama kali ini, Mas. Sebelumnya *enggak* pernah *ngelep* sumur PAM. Ya, karena ada pertambangan itu air Sungai Progo jadi *enggak* mampir ke tepi sumur," pungkas Novi. "Herannya," kata Gono, "mereka meminta izin

57 Wawancara dengan Gono, Sleman, 22 November 2023.

ke warga sini untuk menambang (pasir). Ya, kami tolak dong." Bandio memberi tahu, untuk menyuplai sumur PAM, "*Lep* dilakukan empat sampai lima jam dan bisa dipakai untuk kebutuhan satu pedukuhan. Kebutuhan per hari satu pedukuhan sini 43 m^3." Saat itu, kegiatan *lep* dilakukan bergiliran setiap dua hari sekali dan dilakukan oleh empat sampai enam orang sekali *lep*.

Pembangunan PAM Dusun dan *ngelep* memuat dimensi sosiolami, ketika alam (air) dan manusia saling membentuk. PAM Dusun merupakan infrastruktur air yang tidak berbeda dari PDAM Tirta Sembada, bendungan, irigasi, dan infastruktur hidrolik lain. Ia memiliki kuasa yang berpotensi untuk mengontrol dan menjadikan aliran air sebagai keuntungan. Pada saat bersamaan, *ngelep* adalah cara utak-atik air (*tinkering*) untuk mengatasi kekeringan sumur PAM Dusun yang terjadi akibat ada pertambangan pasir di Sungai Progo.

Pada tahap ini, PAM Dusun adalah wilayah hidrososial yang dibentuk oleh wilayah hidrososial lain berwujud PDAM Tirta Sembada Sleman. Pengelolaan yang menghasilkan keberpilinan air dan negara atau pemodal dalam PDAM Tirta Sembada (proses sosioalami) tersebut "merefleksikan konfigurasi politis"[58] (kekuasaan negara dan pemodal), sosial (penjual), dan budaya kapitalisme (keuntungan), sehingga menciptakan ketimpangan berupa kelangkaan air di Padukuhan Sejati Desa. Air dipahami sebagai komoditas yang menguntungkan oleh masyarakat pemodal atau lembaga/perusahaan negara. Konsekuensi dari pemahaman itu menjadikan air sebagai komoditas milik pemodal/ lembaga negara yang dijual ke pelanggan/masyarakat.

Hubungan hidrososial air sebagai komoditas (air PDAM) dan lembaga/perusahaan negara/pemodal (masyarakat) berkontribusi terhadap dialektika air dan masyarakat di wilayah lain yang membentuk

---

58 Erik Swyngedouw, "The Political Economy and Political Ecology of the Hydro-Social Cycle", dalam *Journal of Contemporary Water Research & Education,* Vol. 142, No. 1, Agustus 2009, hal. 59.

wilayah hidrososial baru; air sebagai komoditas dan masyarakat luas sebagai konsumen/pembeli. Dalam praktik, jual-beli air itu mensyaratkan harga mahal bagi siapa pun yang ingin mendapat manfaat dari air (PDAM dan kemasan) itu. Air hanya bisa diakses oleh masyarakat yang mampu membayar mahal. Akibatnya, 150 keluarga masyarakat di Padukuhan Sejati Desa tidak mendapat akses air bersih karena tidak mampu bayar mahal. Dan, terjadilah kelangkaan air.

Cara pandang keuntungan sebagai motivasi pengelolaan air yang menghasilkan PDAM Tirta Sembada menunjukkan air memainkan peran penting di dalam menginternalisasi hubungan sosial (pemodal, negara, dan konsumen). Cara pandang air sebagai keuntungan membentuk peristiwa hidrososial berupa kelangkaan air. Kelangkaan air, sebagai akibat dari proses sosioalami (rangkaian tindakan yang menghasilkan PDAM melalui cara pandang keuntungan), kemudian mendorong keterciptaan wilayah hidrososial baru, yaitu hubungan air dan masyarakat yang dihasilkan dari pengelolaan air yang memahami air sebagai kebutuhan publik dengan biaya murah berbentuk PAM Dusun di Padukuhan Sejati.

Dua wilayah hidrososial tersebut, yang berdialog dengan peristiwa hidrososial berupa kelangkaan air, merupakan hasil dari dua proses sosioalami yang berbeda dan melahirkan jenis air dan hubungan sosial yang juga berbeda. Dua bentuk hidrososial itu merefleksikan kecenderungan hegemoni politis, sosial, dan budaya yang berbeda".[59] Hubungan air dan masyarakat dalam aliran air PDAM, dengan demikian, merefleksikan kecenderungan hegemoni modal antara pemodal/

59 Erik Swyngedouw, "The Political Economy and Political Ecology of the Hydro-Social Cycle", dalam *Journal of Contemporary Water Research & Education,* Vol. 142, No. 1, Agustus 2009, hal. 56.

lembaga atau perusahaan negara dan pembeli yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Cerminan dua kecenderungan politis, sosial, dan budaya dari dua wilayah hidrososial itu dapat saya kontraskan melalui perbandingan biaya akses air yang dibebankan oleh PDAM Tirta Sembada Sleman dan PAM Dusun di Padukuhan Sejati Desa. Untuk konsumsi yang sama, 24 m^3, pelanggan PDAM Tirta Sembada membayar Rp146.000, yang tiga kali lipat dari biaya yang perlu dibayarkan pelanggan PAM Dusun, yakni Rp45.000.

Padahal, PDAM Tirta Sembada dan PAM Dusun merupakan infrastruktur air yang sama; keduanya hasil hubungan air dan sosial (sosioalami) yang sama-sama memiliki kuasa untuk mengontrol air (*water control*), yaitu menggunakan meteran, mencatat air, dan mengalirkan air melalui pipa-pipa ke rumah-rumah warga. Perbedaannya terletak pada bagaimana keduanya memahami air dan kecenderungan politis apa yang menopang. PDAM mengalirkan air dengan motivasi utama mencari untung (air sebagai uang)[60], sedangkan PAM Dusun mengalirkan air sebagai barang publik yang dapat diakses secara murah untuk kebutuhan warga. PAM Dusun dioperasikan, salah satunya, dengan tradisi *ngelep* sebagai praktik merawat air oleh warga dalam mengisi kembali batuan sarang air tanah yang menyediakan air untuk sumur mereka. Titik itu saya perdalam pada bagian berikut.

Ngelep Sumur PAM Dusun: Merawat untuk Mengontrol Air

Sebagaimana telah saya jelaskan pada bagian awal, *ngelep* sumur PAM Dusun (membasahi tanah sekitar sumur dengan air dari Sungai Progo) merupakan peristiwa hidrososial yang dilakukan masyarakat Padukuhan Sejati Desa. Itu terjadi karena aliran air Sungai Progo tidak

60 Jamie Linton dan Jessica Budds, "The Hydrosocial Cycle: Defining and Mobilizing a Relational-Dialectical Approach to Water", dalam *Geoforum,* Vol. 57, November 2014, hal. 6.

sampai di dekat sumur PAM; air menjauh, hanya mengalir di sebelah kanan. Kemenjauhan aliran air Sungai Progo yang menyebabkan air sumur PAM kering bukanlah kondisi alami, tetapi merupakan kondisi sosioalami. Air sungai (alam) menyusut karena ada penambangan pasir (aktivitas sosial) di daerah bawah Sungai Progo yang mengakibatkan sumur PAM Dusun mengering.

Ngelep sumur membantu untuk menjelaskan bagaimana masyarakat memperlakukan air. Air yang diambil dari Sungai Progo disiramkan ke area sekitar, alih-alih memasukkan langsung ke sumur PAM Dusun. Masyarakat Padukuhan Sejati Desa melakukan cara itu karena air dari Sungai Progo belum bersih (bercampur pasir dan kotoran lain), sehingga perlu penyaringan terlebih dahulu dan proses itu mereka serahkan pada air dan batuan di tepi Sungai Progo. Masyarakat hanya memfasilitasi penyaringan air melalui teknologi sederhana, yakni menaruh ijuk-ijuk (serat pelepah pohon aren) dan melindungi tepian sumur dengan batu yang disemen (Gambar II-3) agar air sungai tidak masuk ke dalam sumur sewaktu air Sungai Progo meluap (Gambar II-4 berupa sumur PAM Dusun).

Gambar II-3: Tanggul pelindung sumur (gambar diambil pada 28 Oktober 2023).

Cara masyarakat di Padukuhan Sejati Desa menyiramkan air ke tanah di sekitar sumur PAM Dusun memungkinkan air meresap dan bekerja membersihkan diri sendiri. Cara itu menjadi bentuk khas warga dalam mengutak-atik air (*tinkering*) yang tidak hanya memberikan akses air ke masyarakat, tetapi juga kepada alam, seperti pohon-pohon di sekitar sumur. Selain itu pembuatan pelindung sumur juga dilandasi oleh pengalaman akibat erupsi Gunung Merapi pada 2010 yang menghanyutkan lahar dingin yang mengakibatkan kualitas air menurun dan bangunan sumur PAM tergerus. Menurut penuturan Bandio, warga bersama-sama membersihkan pasir dari dalam sumur, dalam sehari "dilakukan oleh 25 orang pemuda pedukuhan". Pembangunan pelindung di tepi sumur itu dilakukan warga setelah rapat di rumah kepala dukuh yang menghasilkan pemahaman bersama bahwa air menjadi kebutuhan bersama yang harus dijaga dan dirawat. Di satu sisi menjaga dan merawat air menyediakan air bagi warga. Di sisi lain, menjaga dan merawat air menjadi cara masyarakat di Padukuhan Sejati Desa mempertahankan pemahaman tentang air.

Gambar II-4: Sumur PAM tampak dari dalam (Gambar diambil pada 28 Oktober 2023).

Ngelep sumur sebagai cara merawat air (*tinkering*) tak bisa dilepaskan dari kebutuhan masyarakat akan air murah yang membentuk infrastruktur air bernama PAM Dusun. PAM Dusun mengontrol air menggunakan meteran, sehingga menemukan besaran kubik jumlah air yang dikonsumsi warga total 43 m^3 per hari. Namun, PAM Dusun sebagai infrastruktur air yang memuat kontrol air justru dihasilkan dari pemahaman bahwa air adalah kebutuhan bersama dan harus dapat diakses secara murah oleh masyarakat pedukuhan. Dengan demikian, merawat air dengan *ngelep* dan kontrol air melalui PAM Dusun didorong oleh kondisi kebutuhan akan air murah. Pemahaman masyarakat Padukuhan Sejati Desa berkait air membawa mereka pada kekuatan moral yang berakar dari material bahwa air adalah kebutuhan bersama. Pengalaman kesulitan mengakses air meneguhkan mereka untuk menjaga agar aliran PAM Dusun terus bekerja, termasuk menolak daerah sekitar sumur PAM dijadikan tempat pertambangan pasir.

Dengan demikian, mengontrol air melalui infrastruktur hidrolik PAM Dusun di Padukuhan Sejati Desa memuat dimensi praktik merawat sekaligus aktivitisme yang terikat dalam siklus hidrososial. Air dipahami bukan sebagai komoditas. Air dipahami sebagai kebutuhan bersama. Ia tak mengalirkan uang, tetapi mengalirkan kepedulian, sembari menjaga Sungai Progo dari rongrongan tambang pasir.

Kesimpulan

Siklus hidrososial menjadi pendekatan yang berjalin dengan mengontrol dan merawat air. Dua infrastruktur air yang memuat dimensi mengontrol air (PDAM Tirta Sembada dan PAM Dusun) memiliki corak berbeda dalam sudut pandang siklus hirososial. Corak

kerja infrastruktur air itu, dalam siklus hidrososial, dapat dilihat melalui pemahaman manusia tentang air yang membentuk jenis air tertentu.

Air PDAM adalah jenis air yang menyiratkan kecenderungan politis berupa pemahaman bahwa air adalah keuntungan. Corak pemahaman itu melahirkan hubungan air (jenis PDAM) sebagai komoditas dan masyarakat lewat lembaga atau perusahaan milik negara/daerah (PDAM) sebagai penjual dan membentuk ulang hubungan air (jenis PDAM) sebagai komoditas dan masyarakat lain (masyarakat umum) sebagai konsumen. PDAM adalah infrastruktur air yang digunakan untuk mengontrol air (*water control*) agar setiap aliran air dapat dipastikan menjadi keuntungan. Pemastian setiap aliran air menjadi keuntungan itulah yang menjadi cara pandang PDAM Tirta Sembada dalam memahami air.

Berbeda, PAM Dusun di Padukuhan Sejati Desa adalah infrastruktur air yang digunakan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. PAM Dusun dibentuk oleh pemahaman warga bahwa air bersih dan murah adalah kebutuhan bersama. Dalam kerangka siklus hidrososial, hubungan air dan masyarakat di Padukuhan Sejati Desa membentuk air jenis PAM Dusun (komoditas) dan masyarakat (warga pedukuhan) sebagai pengguna. Hubungan air (PAM Dusun) dan masyarakat (warga pedukuhan) sebagai pengguna juga didorong oleh kecenderungan ekonomi (meskipun ia lebih murah dari air PAM Tirta Sembada), politis (kebutuhan), dan budaya (kepedulian) yang menjadi cara warga memahami air, sehingga PAM Dusun tidak memandang air sebagai keuntungan, tetapi kepedulian. Di sinilah warga menggunakan infrastruktur air untuk mengontrol dan merawat air sekaligus mengontrol untuk merawat air yang dilakukan agar aliran air bersih yang dibutuhkan warga tetap tersedia.

Dalam perjalanan, proses kerja mengontrol dan merawat air menghadapi masalah kekeringan sumur utama PAM Dusun akibat

ada pertambangan pasir di Sungai Progo yang berada di sebelah selatan sumur PAM Dusun. Masalah itu diselesaikan masyarakat di Padukuhan Sejati Desa dengan cara khas, yakni *lep.* Warga tidak memasukkan air ke tandon secara langsung, tetapi merembeskan air ke tanah di sekitar sumur utama. Cara demikian tidak hanya menguntungkan masyarakat di Padukuhan Sejati Desa untuk mendapat manfaat air, tetapi juga tanaman di sekitar sumur PAM Dusun. Kekhasan itu menjadi metode merawat air untuk memastikan mengontrol air melalui PAM Dusun tetap mengalirkan kepedulian.

Melawan Ketidakadilan Pembangunan Pariwisata, Menjaga Air:

Aktivisme dan Sains Warga di Yogyakarta

Yesaya Sandang dan Nandra Eko Nugroho

Sari: Bab ini membahas aktivitas warga sehubungan dengan konflik air akibat pembangunan hotel yang pesat di Yogyakarta. Diskusi dalam bab ini mencakup dimensi sosial politik dari pertumbuhan sektor pariwisata yang tidak berkelanjutan, dengan fokus pada upaya mencapai keadilan akses dan pengelolaan air. Konflik antara penduduk lokal dan hotel telah mendorong berbagai gerakan/aktivisme warga. Argumentasi kami, ragam aktivisme warga itu merupakan wujud dari perjuangan hak atas air serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan air dan arah perkembangan pariwisata. Dengan mengadopsi perspektif warga dalam pembahasan tentang pariwisata dan air, bab ini mengungkapkan potensi sains warga dalam memberdayakan komunitas untuk menjaga air sambil mengadvokasi pengelolaan pariwisata yang lebih inklusif.

Kata-kata kunci: Air, komunitas, aktivisme, sains warga, hotel.

Sumur Warga Yogyakarta Kering karena Hotel?

Rabu, 6 Agustus 2014, seorang warga Miliran, Kota Yogyakarta, Dodok Putra Bangsa, melakukan aksi protes di depan sebuah hotel di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta. Dodok menyiram diri dengan pasir sebagai aksi teatrikal atas dampak kekeringan yang dia dan warga lain yang tinggal di sekitar hotel itu alami. "Selama puluhan tahun, sumur-sumur penduduk Miliran tidak pernah kering, termasuk selama musim kemarau panjang. Namun, dalam dua bulan terakhir, sumur-sumur kami telah kering. Kami mencurigai hal ini ada hubungan dengan aktivitas hotel di sini," kata Dodok.[61]

Protes Dodok menandai awal dari gerakan warga yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan masalah air yang berkait dengan pembangunan hotel-hotel (dan perkembangan pariwisata) di Yogyakarta. Dodok tidak sendirian. Protes itu melibatkan berbagai anggota dan kelompok warga, seperti akademisi, aktivis, jurnalis, seniman, dan organisasi lingkungan. Sebagai kelompok, mereka menyebut diri Warga Berdaya. Warga Berdaya adalah forum terbuka bagi warga dan siapa pun yang mendukung prinsip-prinsip dan praktik pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan di Yogyakarta.

Merespons aksi protes Dodok dan Warga Berdaya, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, Energi, dan Sumber Daya Mineral (PU ESDM) Kota Yogyakarta menginvestigasi dan menemukan ada penyalahgunaan dalam pengambilan air tanah oleh hotel yang berdampak terhadap sumur-sumur masyarakat di Miliran.[62] November 2014, tiga bulan setelah protes Dodok dan laporan dari warga mengenai mengeringnya sumur-sumur mereka, pemerintah akhirnya menutup

---

61 Lihat E Wijoyono, "#JogjaAsat, Seruan Keadilan Air untuk Rakyat", dalam https://elantowow.wordpress.com/2017/08/05/jogjaasat-seruan-keadilan-air-untuk-rakyat/ (diakses 20 Februari 2022).

62 Lihat Febriarni, "BLH Akan Ajukan Pumping-Test Ulang Hotel Fave", dalam https://www.solopos.com/blh-akan-ajukan-pumping-test-ulang-hotel-fave-524690. (diakses 5 Maret 2020).

satu sumur hotel di Miliran yang terbukti berdampak mengeringnya sumur-sumur warga di wilayah tersebut.[63]

Di Kota Yogyakarta, sebagian besar hotel hanya mengandalkan air tanah tanpa mendapatkan izin yang diperlukan atau melakukan analisis dampak yang menyeluruh.[64] Menurut temuan Rusqiyati, dari sekitar 600 hotel di Kota Yogyakarta, hanya ada 180 hotel yang menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal itu senada dengan temuan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang menyatakan, beberapa hotel di Kota Yogyakarta tidak memiliki izin pengambilan air tanah.[65] Masalah itu berujung pada penangkapan seorang mantan wali kota Yogyakarta atas tuduhan ketidaktransparanan, terlalu berpihak kepada hotel daripada kebutuhan air warga, dan suap berkait dengan izin bangunan untuk apartemen dan hotel antara 2017 dan 2022.[66]

Pembangunan Pariwisata di Yogyakarta dan Konflik Air

Geliat pertumbuhan pariwisata di Yogyakarta merupakan suatu kesinambungan dari ambisi Pemerintah Indonesia. Secara historis, Yogyakarta selalu menjadi tujuan wisata penting dan ditetapkan sebagai wilayah inti kedua (setelah Bali) dalam pengembangan pariwisata

---

63 Lihat P Wicaksono, "Belasan Hotel di Yogya Diperiksa Izin Penggunaan Air Tanah", dalam https://nasional.tempo.co/read/621799/belasan-hotel-di-yogya-diperiksa-izin-penggunaan-air-tanah/full&view=ok (diakses 18 Oktober, 2021).

64 Lihat E Rusqiyati, "PDAM Yogyakarta Sesuaikan Tarif Air Bersih", dalam https://jogja.antaranews.com/berita/406756/pdam-yogyakarta-sesuaikan-tarif-air-bersih (diakses 20 Januari 2021).

65 Lihat AD Sesanti, *Jogjaku (Kudune Ora) Didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta* (Sleman: Penerbit STPN Press, 2016).

66 Lihat Tim Detik Jateng, "Fakta Sidang Eks Walkot Jogja Haryadi Suyuti Kasus Suap IMB Apartemen-Hotel", dalam https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6357953/fakta-sidang-eks-walkot-jogja-haryadi-suyuti-kasus-suap-imb-apartemen-hotel (diakses 18 Agustus 2023).

nasional.[67] Pada akhir 1990-an, pariwisata di Yogyakarta telah mengalami banyak kemajuan dalam pengembangan objek wisata, pengembangan fasilitas pariwisata, dan peningkatan kedatangan wisatawan. Seperti diamati oleh Dahles, selama pemerintahan rezim Orde Baru, Yogyakarta telah mengalami;

> "Upaya nyata untuk memperluas sistem komunikasi dan transportasi, membangun hotel, meningkatkan fasilitas belanja, memulihkan peninggalan sejarah, mendirikan monumen dari 'periode revolusioner', dan melestarikan artefak budaya dan seni Jawa tradisional" (p. 788).[68]

Dalam konteks kepariwisataan Indonesia kontemporer, Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut Yogyakarta) adalah salah satu provinsi yang termasuk dalam program 10 "Bali Baru". Yogyakarta termasuk dalam Zona Tujuan Wisata Nasional Borobudur. Sejak dijadikan sebagai bagian dari proyek "Bali Baru", pariwisata Yogyakarta telah berkembang secara signifikan. Skema percepatan pengembangan pariwisata difokuskan pada pengembangan infrastruktur, konektivitas spasial, dan tata kelola serta manajemen pariwisata.[69] Pemerintah Indonesia telah menginvestasikan Rp8 triliun untuk pengembangan infrastruktur dalam proyek "Bali Baru" dari tahun 2019 hingga 2020, termasuk di Yogyakarta.[70] Itu termasuk pembangunan Bandara

---

67 Lihat H Dahles, "The Politics of Tour Guiding: Image Management in Indonesia", dalam *Annals of Tourism Research,* Volume 29, Issue 3, July 2002, hal 783-800.

68 Ibid.

69 Lihat Ahsinin dkk., *Memetakan Mozaik Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Perspektif Bisnis dan HAM: Studi Empat Destinasi Bali Baru,* Yesaya Sandang (ed.), (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2020).

70 Lihat Kencana, 2020, "Telan Dana Rp 8 Triliun, Pembangunan 5 Bali Baru Sudah Capai 33 Persen", dalam https://www.liputan6.com/bisnis/read/4265840/telan-dana-rp-8-triliun-pembangunan-5-bali-baru-sudah-capai-33-persen. (diakses 5 Maret 2022).

Internasional Yogyakarta Baru (YIA), pembangunan jalan tol baru, serta perbaikan dan perluasan jalur transportasi kereta api.[71]

Sebagai tujuan wisata, pemerintah Yogyakarta menggunakan "Jogja Istimewa" sebagai semboyan promosi. Sebagai salah satu bekas pusat kekuasaan di Jawa pada masa lalu, Yogyakarta terkenal sebagai pusat seni Jawa klasik seperti batik, juga seni pertunjukan yang meliputi sendratari, drama, musik, puisi, dan wayang. Selain itu, Yogyakarta memiliki beberapa situs warisan dunia yang diakui UNESCO, seperti Candi Prambanan dan Istana Ratu Boko. Beberapa tahun terakhir, Pemerintah Yogyakarta secara agresif mempromosikan warisan budaya dari banyak desa (wisata) untuk menarik lebih banyak wisatawan.[72]

Sekitar 90% dari wisatawan yang datang ke Yogyakarta adalah wisatawan domestik dan 10 % berasal dari mancanegara. Sebanyak 70% dari wisatawan domestik yang datang ke Yogyakarta berasal dari Jakarta, sedangkan sisanya berasal dari kota-kota sekitarnya.[73] Menurut data Biro Pusat Statistik Provinsi DIY, pada tahun 2018 tercatat ada 4,9 juta wisatawan domestik dan mancanegara yang mengunjungi Kota Yogyakarta.[74] Menurut temuan Yusuf dan Purwandani[75], sejak 2015 jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta telah melebihi jumlah penduduk kota, yang pada 2018 sebesar 3,5 juta jiwa. Keadaan itu merupakan tanda bahaya dari *over-tourism*: terlalu banyak pengunjung ke suatu tujuan

---

71 Ahsinin dkk., loc. cit.

72 Lihat HVS, "Indonesia Hotel Watch 2015", dalam https://www.hospitalitynet.org/file/152005690.pdf (diakses 11 April 2020).

73 Ibid.

74 Lihat BPS, *Statistical Yearbook of Indonesia 2019, Sub-Directorate of Statistical Compilation and Publication* (ed.), (Jakarta: BPS-Statistics Indonesia, 2019).

75 Lihat M Yusuf dan I Purwandani, "Ecological Politics of Water: The Ramifications of Tourism Development in Yogyakarta", dalam *South East Asia Research*, Vol. 28, No. 3, September 2020, hal. 327-343.

tertentu yang menyebabkan kerumunan di area yang mengakibatkan warga lokal menderita.[76]

Selaras dengan perkembangan pariwisata yang pesat, hotel-hotel di Yogyakarta juga berkembang masif. Bahkan Kota Yogyakarta telah mengalami pertumbuhan terbesar di antara kota-kota di Indonesia dalam hal pembukaan hotel baru.[77] Seperti diakui Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, jumlah aplikasi izin pembangunan hotel telah meningkat secara signifikan sejak 2013.[78] Pada 2013 saja, ada 105 investor yang mengajukan izin untuk membangun hotel di Kota Yogyakarta. Hal serupa juga terjadi di kabupaten-kabupaten lain, terutama di Kabupaten Sleman. Antara 2013 dan 2020, di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terdapat 714 hotel baru, baik yang dioperasikan operator internasional maupun lokal,[79] dengan para investor yang makin tertarik pada segmen menengah (*budget hotel*) akibat permintaan yang meningkat.[80] Hal itu menyebabkan degradasi lingkungan, konflik lahan, konflik air, dan

---

76 Lihat Milano *et al.*, "Overtourism and Tourismphobia: A Journey Through Four Decades of Tourism Development", dalam *Tourism Planning & Development*, Volume 16, Number 4, 4 July 2019, pp. 353-357(5).

77 Lihat HVS, "Indonesia Hotel Watch 2015", dalam https://www.hospitalitynet.org/file/152005690.pdf (diakses 11 April 2020).

78 Lihat P Wicaksono, "Belasan Hotel di Yogya Diperiksa Izin Penggunaan Air Tanah", dalam https://nasional.tempo.co/read/621799/belasan-hotel-di-yogya-diperiksa-izin-penggunaan-air-tanah/full&view=ok (diakses 18 Oktober, 2021).

79 Lihat BPS Yogyakarta, *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2023 Edisi 1* (Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023).

80 HVS, loc. cit.

gentrifikasi.[81] Lebih dari itu, konversi dari ruang terbuka hijau menjadi bangunan hotel[82] membahayakan keseimbangan air tanah.[83]

Di Yogyakarta, sektor pariwisata menjadi andalan, tetapi pengendalian dan pengawasannya kurang begitu baik. Investigasi Arumingtyas dan Junia mengungkapkan ketimpangan dalam penggunaan air antara hotel dan warga.[84] Konsumsi air 725 hotel ternyata dapat memenuhi kebutuhan air rumah tangga untuk dua kecamatan yang setara dengan 50.000 warga. Selain itu, berdasar informasi dari portal Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Yogyakarta (yang saat ini, Mei 2024, tidak dapat diakses lagi), Sandang dan Cole menemukan hanya 68 dari 1.817 hotel di wilayah tersebut yang memiliki dokumen lingkungan.[85] Lebih parah lagi, dari 68 hotel yang memiliki dokumen lingkungan itu, hanya tujuh yang terkategori analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Dalam penelitian mereka, hanya satu hotel berbintang yang memiliki dokumen amdal. Sementara itu, mayoritas hotel non berbintang tidak memiliki dokumen analisis dampak lingkungan sama sekali. Sedikitnya jumlah hotel yang memiliki/melakukan amdal menjadi cerminan dari betapa rendah perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi atas air (HAAR) warga. Tanpa analisis dampak yang komprehensif, dampak yang terakumulasi (termasuk dampak HAAR) dari pembangunan hotel

---

81 Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, *Investasi Subur, Rakyat Digusur: Catatan Akhir Tahun 2019 LBH Yogyakarta* (Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2019).

82 Lihat AD Sesanti, *Jogja-ku (Dune Ora) Didol: Manunggaling Penguasa dan Pengusaha dalam Kebijakan Pembangunan Hotel di Yogyakarta* (Sleman: Penerbit STPN Press, 2016).

83 Lihat N Ridarineni, "Yogyakarta Kekurangan Ruang Terbuka Hijau", dalam *Republika*, 2019 atau https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/23/ozvie2282-yogyakarta-kekurangan-ruang-terbuka-hijau (diakses 24 Juli 2023).

84 Lihat L Arumingtyas dan M Junia, "Berebut Air dari Bumi Yogyakarta", dalam *Mongabay Indonesia*, Maret 2022.

85 Lihat Y Sandang dan S Cole, "Using a Human Rights Approach to Improve Hotels' Water Use and Sustainability", dalam *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 31, No. 10, Agustus 2022, hal. 2337-2355.

berbintang dan nonbintang tidak dapat diidentifikasi dan dikelola dengan baik, dan berpotensi menimbulkan konflik.

Berkait dengan masalah dokumen amdal, Yusuf dan Purwandani menemukan banyak hotel di Yogyakarta melanggar regulasi sumber air dan aturan gedung dan bangunan.[86] Itu menunjukkan pemerintah gagal menegakkan peraturan atau sanksi atas pelanggaran tersebut. Pemerintah tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi HAAR di tengah peningkatan jumlah penduduk di Yogyakarta, dan aspirasi pemerintah untuk mempromosikan investasi bisnis bertentangan dengan pemenuhan kewajiban HAAR mereka.[87]

Selain konflik air yang terjadi di Miliran, warga di sejumlah daerah lain, termasuk Gowongan dan Penumping, juga mengalami masalah serupa. Warga Gowongan harus meminta air dari kompleks kantor yang memiliki akses air dari PDAM, sedangkan warga Penumping harus mandi di toilet umum di Pasar Kranggan karena tidak memiliki pasokan air. Warga menyatakan, itu kali pertama dalam hidup mereka mengalami sesuatu seperti ini. Mereka yakin ledakan pembangunan hotel di sekitar desa-desa mereka berkait dengan sumur-sumur mereka yang kosong.[88]

Dengan latar belakang tersebut, pada bab ini kami menyoroti perjuangan politik warga dalam mewujudkan HAAR, terutama di tengah pembangunan pariwisata yang tidak terkendali. Kami menggunakan lensa HAAR untuk menganalisis ketegangan dan kontradiksi akses air

---

86 M Yusuf dan I Purwandani, "Ecological Politics of Water: The Ramifications of Tourism Development in Yogyakarta", dalam *South East Asia Research*, Vol. 28, No. 3, September 2020, hal. 327-343.

87 Y Sandang, "Hotels and The Human Right to Water: Prospects and Challenges in Yogyakarta, Indonesia", disertasi PhD, Faculty of Environment and Technology, University of the West of England, 2021.

88 Lihat Watchdoc, *Belakang Hotel* (*English subtitled*) – YouTube", dalam *YouTube* atau https://www.youtube.com/watch?v=u8MhD3iy4rs; S Suharko, Urban environmental justice movements in Yogyakarta, Indonesia. *Environmental Sociology*, Volume 6 (3), 2020, pp 231-241.

yang tidak adil bagi warga yang tinggal di destinasi pariwisata. Kami masuk ke dalam diskursus sosial politik dari HAAR dan gagasan men-”sosialis”-kan pariwisata,[89] ketika pariwisata dipandang sebagai kekuatan bagi warga lokal untuk berpartisipasi secara bermakna dalam setiap aspek pembangunan pariwisata, termasuk urusan air. Lebih jauh kami menyelidiki peran penting yang dimainkan organisasi warga dalam mengubah narasi, memosisikan warga sebagai pemegang hak dalam pengembangan pariwisata dan pengelolaan air. Proses transformasional itu mencakup sains warga (*citizen science)* – praktik luas yang mencakup partisipasi publik dalam penelitian ilmiah,[90] yang juga disebut sebagai sains komunitas,[91] dan pemantauan berbasis masyarakat.[92]

Metode dan Struktur Pembahasan

Pembahasan bab ini merujuk pada data primer yang kami peroleh dari wawancara, observasi, dan *focus group discussion* (FGD) selama penelitian lapangan pada Januari-Mei 2019. Selain itu, kami juga mengacu pada data sekunder terbaru yang dapat diakses oleh publik. Terdapat tujuh wawancara, yakni dengan Forum Pemantau Independen (Forpi) – yang dibentuk oleh Wali Kota Yogyakarta tetapi bukan bagian dari pemerintah – dua organisasi warga dan empat lembaga swadaya masyarakat (LSM). Lebih lanjut, penulis pertama menghadiri 11 pertemuan komunitas, mengamati dan mendengarkan pengalaman masyarakat, diskusi tentang air dan pariwisata, upaya untuk melindungi

---

89 Lihat F Higgins-Desbiolles, “Socialising Tourism for Social and Ecological Justice after COVID-19”, dalam *Tourism Geographies*, Vol. 22, No. 3, April 2020, hal. 610-623.

90 Lihat AN Metcalfe *et al.*, “Applied Citizen Science in Freshwater Research”, dalam *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*, Vol. 9, No. 2, e1578.

91 Lihat CB Cooper *et al.*, “Inclusion in Citizen Science: The Conundrum of Rebranding”, dalam *Science,* Vol. 372 No. 6549, 2021, hal. 1386-1388.

92 Lihat A Miller, “Community-Based Monitoring of Tourism Resources as A Tool for Supporting the Convention on Biological Diversity Targets: A Preliminary Global Assessment”, dalam *Parks*, Vol. 18, No. 2, 2012, hal. 120-131.

pasokan masyarakat, agenda organisasi, dan pelatihan yang mereka persiapkan. Difasilitasi oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana Yogyakarta, kami juga melakukan FGD dengan manajer hotel (dua), divisi air hotel (empat), lembaga pemerintah (10), dan perwakilan warga (tujuh) untuk mendiskusikan hasil survei muka air tanah yang dikoordinasi oleh penulis kedua.

Pada bagian selanjutnya bab ini, kami membahas dampak sektor pariwisata terhadap ketersedian dan keadilan hak atas air serta peran penting aktivisme warga dalam menanggapi ketidakadilan air. Kemudian, fokus pembahasan kami beralih ke perjuangan untuk keadilan akses dan pengelolaan air, menyoroti upaya warga untuk merebut kembali hak atas air, dan peran sains warga dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bagian terakhir menggambarkan potensi sains warga dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan konservasi air, termasuk kontribusi mereka dalam merawat air dan integrasi dalam kebijakan pembangunan pariwisata. Untuk menutup percakapan ini, kami menyajikan implikasi kebijakan dan praktik pembangunan pariwisata di Yogyakarta, serta arahan untuk penelitian mendatang.

Dimensi Sosial Politik Pariwisata dan (Hak atas) Air

Banyak tempat di dunia mengalami tekanan air (*water stress*) akibat perkembangan pariwisata yang cepat, urbanisasi, peningkatan populasi, dan perubahan iklim.[93] Di beberapa destinasi, muncul persoalan ketidakadilan akses air dan konflik berkait dengan kegiatan pariwisata, termasuk dengan hotel.[94] Becken telah menunjukkan kesenjangan dalam

---

93 Lihat ITP, "ITP Destination Water Risk Index", August 2018, dalam https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/itp-destination-water-risk-index-august-2018_1.pdf (diakses 7 Juni 2020).

94 Lihat N Charara *et al.*, "Water Use Efficiency in the Hotel Sector of Barbados", dalam *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 19, No. 2, 2011, hal 231-245; S Gössling, "The Consequences of Tourism for Sustainable Water Use on A Tropical Island:

penggunaan air antara sektor pariwisata dan penggunaan domestik sungguh nyata, terutama di negara-negara berkembang, dengan perbedaan hingga delapan kali lipat.[95]

Pasokan air yang dapat diandalkan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan sering kali menjadi daya tarik utama wisata itu.[96] Namun, perkembangan pariwisata dapat berdampak negatif terhadap pasokan air, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.[97] Penurunan debit air, pencemaran, dan persaingan sumber air merupakan beberapa dampak negatif yang dapat disebabkan oleh pariwisata.[98] Seperti dicatat Cole dkk., salah satu tema yang sering muncul dalam literatur tentang air dan pariwisata adalah konflik sosial ekologis yang timbul akibat pertumbuhan pariwisata dan peningkatan permintaan akan air.[99]

Di beberapa destinasi seperti Nikaragua, Zanzibar, Goa, Gambia, Bali, dan Kerala, ketidaksetaraan akses air dan konflik berkait dengan

---

Zanzibar, Tanzania", dalam *Journal of Environmental Management*, Vol. 61, No. 2, 2001, hal 179-191; C Koç *et al*., "A Study on Assessing the Domestic Water Resources, Demands and its Quality in Holiday Region of Bodrum Peninsula, Turkey", dalam *Tourism Management*, Vol. 62, 2017, hal. 10-19; AM Rico-Amoros *et al*., "Tourist Land Use Patterns and Water Demand: Evidence from the Western Mediterranean", dalam *Land Use Policy*, Vol. 26, No. 2, 2009, hal. 493-501.

95 Lihat S Becken, "Water Equity – Contrasting Tourism Water Use with that of the Local Community", dalam *Water Resources and Industry*, 2014, hal 7-8, 9-22.

96 Lihat S Gössling *et al*, "Tourism and Water Use: Supply, Demand, and Security. An International Review" dalam *Tourism Management*, Vol. 33, No. 1, 2012, hal. 1-15.

97 Lihat SC Stonich, "Political Ecology of Tourism", dalam *Annals of Tourism Research*, Vol. 25, No. 1, 1998, hal. 25-54.

98 Lihat S Cole dan M Browne, "Tourism and Water Inequity in Bali: A Social-Ecological Systems Analysis", dalam *Human Ecology*, Vol. 43, No. 3, 2015, hal. 439-450; M Epler-Wood, *Sustainable Tourism on A Finite Planet,* (London: Routledge, 2017); S Strauß, "Water Conflicts among Different User Groups in South Bali, Indonesia", dalam *Human Ecology*, Vol. 39, No. 1, 2011, hal 69-79.

99 Lihat S Cole *et.al*., "Tourism, Water, and Gender -- An International Review of An Unexplored Nexus", dalam *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*, Vol. 7, No.

aktivitas pariwisata menjadi isu signifikan.[100] Penelitian-penelitian tersebut menggambarkan dampak perkembangan pariwisata yang masif, yang diperparah oleh peningkatan kekeringan, kelemahan regulasi hukum, penegakan hukum dan pedoman nasional, serta keminiman dukungan dari industri pariwisata, yang akhirnya menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap air. Lebih dari itu, kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan orang-orang dengan disabilitas, menjadi kelompok yang paling terdampak karena akses yang tidak merata terhadap air bersih.[101]

Dalam diskusi ekologi politik air di Bali, Cole mengusulkan pemerintah dan industri pariwisata mengadopsi pendekatan hak asasi manusia dalam menangani masalah air yang berkait dengan kegiatan pariwisata.[102] Mengingat pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2010 terhadap HAAR, Cole menyarankan industri pariwisata secara aktif terlibat dalam pencegahan pelanggaran HAAR dengan menilai

---

4, 2020, hal. 1-16.

100 Lihat S Cole, "A Political Ecology of Water Equity and Tourism: A Case Study from Bali", dalam *Annals of Tourism Research*, Vol. 39, No. 2, 2012, hal. 1221-1241; S Gössling, "The Consequences of Tourism for Sustainable Water Use on A Tropical Island: Zanzibar, Tanzania", dalam *Journal of Environmental Management*, Vol. 61, No. 2, 2001, hal 179-191; R Noble *et al.*, "Water Equity in Tourism: A Human Right, A Global Responsibility", dalam *Tourism Concern Research Report*, 2012; ST Romano dan GT LaVanchy, "From Water Insecurity to Water Injustice", dalam S Ryder, K Powlen, M Laituri, S Malin, J Sbicca, D Stevis (*eds.*), *Environmental Justice in the Anthropocene* (London: Routledge, 2021), hal. 76-89.

101 Lihat S Cole, "Water Worries: An Intersectional Feminist Political Ecology of Tourism and Water in Labuan Bajo, Indonesia", dalam *Annals of Tourism Research*, Vol. 67, 2017, hal. 14–24; ST Romano dan GT LaVanchy, "From Water Insecurity to Water Injustice", dalam S Ryder, K Powlen, M Laituri, S Malin, J Sbicca, D Stevis (eds.), *Environmental Justice in the Anthropocene* (London: Routledge, 2021), hal. 76-89.

102 Lihat S Cole, "Tourism and Water: From Stakeholders to Rights Holders, and What Tourism Businesses Need to do", dalam *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 22, No. 1, 2014, hal. 89-106.

dampak yang menyeluruh.[103] Masalahnya, menurut temuan Sandang dan Cole, industri pariwisata tidak akan dengan sukarela menghormati HAAR tanpa kontrol yang kuat dan keseimbangan antara regulasi publik dan tata kelola warga yang memberi arahan dan tekanan terhadap hotel.[104] Menanggapi hal itu, Sandang dan Cole menyarankan integrasi penilaian/analisis dampak HAAR ke dalam analisis dampak lingkungan yang berlaku.

Terinspirasi oleh Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GPs), Sandang dan Cole menyimpulkan, masyarakat lokal, sebagai pemegang hak, harus dapat berpartisipasi secara signifikan dalam membentuk dan memengaruhi proses penilaian/analisis dampak HAAR, terutama berkait dengan keputusan yang berhubungan dengan penggunaan air hotel.[105] Pendekatan HAAR menempatkan warga masyarakat sebagai penjaga air; menjaga didefinisikan sebagai tindakan untuk melindungi, merawat, dan menggunakan air secara bertanggung jawab,[106] serta menolak pendekatan manajemen yang memperlakukan air sebagai komoditas, yang akan memperparah ketimpangan. Tujuannya untuk mencapai dan mempertahankan integritas ekosistem bersama dengan keadilan sosial dan penghidupan warga. Oleh karena itu, inheren dalam pengakuan HAAR adalah mengaktifkan hak warga untuk berpartisipasi dalam tata kelola air dan membayangkan ragam intervensi sosial politik untuk menjaga dan mewujudkan keutuhan ekosistem dan keadilan sosial.

Berhubungan dengan HAAR, van den Berge dkk. menggambarkan, betapa penting mobilisasi warga dalam perjuangan berkait dengan air.

---

103 Ibid.

104 Lihat Y Sandang dan S Cole, “Using a Human Rights Approach to Improve Hotels’ Water Use and Sustainability”, dalam *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 31, No. 10, Agustus 2022, hal. 2337-2355.

105 Ibid.

106 Lihat BP Warner, ”Explaining Political Polarization in Environmental Governance Using Narrative Analysis”, dalam *Ecology and Society*, Volume. 24, No. 3, 2019.

Di Thessaloniki, warga yang terorganisasi dan terpolitisasi berhasil menghentikan upaya privatisasi air dan menunjukkan model pengelolaan utilitas air berbasis warga adalah salah satu alternatif yang layak.[107] Di Kosta Rika, Cole dan Ferguson mencatat perempuan menjadi kekuatan penggerak perubahan dalam menanggulangi ketidakseimbangan kekuatan antara industri pariwisata dan komunitas dalam alokasi air.[108] Dalam kedua kasus tersebut, peran aktor nonnegara sangatlah penting dalam menghadapi tekanan pasar yang mengancam HAAR komunitas. Ketika negara gagal memenuhi dan melindungi hak-hak tersebut, perlu jalur alternatif untuk mewujudkan HAAR.

Kami melihat ada keterkaitan antara upaya komunitas warga untuk menegakkan hak atas air mereka dan gagasan men-"sosialis"-kan pariwisata. Tuntutan warga terhadap keadilan (dan penegakan hak atas) air menegaskan penolakan terhadap komodifikasi air, dan lebih mengutamakan hak-hak komunitas lokal daripada keuntungan bisnis pariwisata. Higgins-Desbiolles berpendapat men-"sosialis"-kan pariwisata berarti memandang dan mengelola pariwisata sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal serta keutuhan ekologis.[109] Dengan demikian, HAAR dapat dianggap sebagai modal perjuangan sosial untuk mencapai keadilan air yang lebih luas, khususnya dalam konteks sektor pariwisata.

Pada bagian selanjutnya kami mengulas perjuangan warga dalam merebut (dan menjaga) HAAR mereka di tengah kemerebakan hotel-hotel di Yogyakarta. Konflik warga dengan hotel-hotel telah menghasilkan beberapa respons, antara lain 1) protes dan kampanye, 2) keluhan resmi,

---

107 Lihat J van den Berge et al., "Citizen Mobilization for Water: The Case of Thessaloniki, Greece", dalam F Sultana, A Loftus (*eds.*), *Water Politics: Governance, Justice and the Right to Water* (Oxfordshire: Earthscan, 2019), hal. 161-174.

108 Lihat S Cole dan L Ferguson, "Towards A Gendered Political Economy of Water and Tourism", dalam *Tourism Geographies*, Vol. 17, No. 4, 2015, hal. 511-528.

109 Lihat F Higgins-Desbiolles, "Socialising Tourism for Social and Ecological Justice after COVID-19", dalam *Tourism Geographies*, Vol. 22, No. 3, 2020, hal. 610-623.

3) tuntutan hukum, dan 4) sains warga. Upaya-upaya tersebut berkait erat dengan perjuangan untuk hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan berkait dengan tata kelola air dan pembangunan pariwisata.

Perjuangan untuk Keadilan dan Pengelolaan (Hak atas) Air

Sejak awal berdiri, Warga Berdaya secara konsisten mengkritik kebijakan pemerintah yang mendorong perkembangan hotel secara masif di Yogyakarta. Selain melakukan protes, bersama dengan pembuat film, mereka juga memproduksi sebuah film dokumenter berjudul *Belakang Hotel.*[110] Film itu menggambarkan bagaimana penduduk setempat harus mencari air dari tetangga atau pasar terdekat setelah sumur-sumur mengering akibat keberadaan hotel yang berdiri di dekat komunitas mereka. Film itu diputar di berbagai forum masyarakat dan kampus-kampus dengan tujuan mendorong partisipasi aktif warga yang peduli terhadap konservasi dan penggunaan sumber daya lingkungan secara adil. Selain itu, Warga Berdaya juga berkolaborasi dengan berbagai organisasi seni, seperti Indonesian Visual Art Archive (IVAA) dan Anti-Tank, untuk membuat mural dan poster dengan slogan-slogan seperti "Yogja Asat (Yogyakarta Kering)" dan "Yogja Ora Didol (Yogyakarta Tidak Dijual)". Dalam rilis resmi, IVAA menyatakan mural-mural itu merupakan bentuk ekspresi perlawanan masyarakat terhadap pembangunan hotel, yang dibawa melalui seni jalanan untuk menyuarakan aspirasi warga kepada "pemerintah kota yang buta-tuli dan pemilik modal yang rakus".[111] Pesan-pesan dalam mural tersebut antara lain mengajak untuk "bangun sumur, bukan hotel" dan menyatakan

---

110 Lihat Watchdoc, *Belakang Hotel* (*English subtitled*) – YouTube", dalam YouTube atau https://www.youtube.com/watch?v=u8MhD3iy4rs

111 Lihat IVAA, Video "Warga Berdaya-Jogja Asat", dalam ivaa-online.org/sorotan-dokumentasi/video-warga-berdaya-jogja-asat/ (diakses 1 December 2020).

"air adalah kehidupan". Mural-mural itu dibuat pada 2014 di kedua sisi bawah Jembatan Kewek di pusat Kota Yogyakarta.

Lebih lanjut, slogan "Yogja Asat" telah tersebar melalui media sosial dengan tagar #YogjaAsat. Pada 2019, tagar itu digunakan sebagai respons terhadap instruksi penyedia air regional kepada warga untuk mulai menyimpan air, karena penggunaan yang tinggi oleh hotel dan pusat perbelanjaan. Melalui *platform* Twitter (sekarang, 2024, X), anggota dan pendukung dari Warga Berdaya mengkritik instruksi tersebut dengan keras, dengan mengklaim layanan air untuk hotel diprioritaskan daripada layanan air untuk penduduk setempat.

Pada tahun yang sama, sejumlah seniman dan mahasiswa turut serta dalam kegiatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta dalam sebuah pameran seni bertajuk "Sebelum Semua Dijual Habis". Pameran itu menampilkan berbagai karya seni visual yang menggambarkan berbagai isu lingkungan. Misalnya, di sepanjang pantai selatan Yogyakarta, seorang fotografer memperlihatkan bagaimana bukit karst dihancurkan untuk membangun resor pariwisata. Sementara itu, seorang seniman dari Anti-Tank menampilkan kolase seni jalanan yang menggambarkan sikap acuh tak acuh para investor yang menggusur warga miskin kota. Dalam pernyataan pembukaan pameran, Walhi menegaskan komunitas dan lingkungan Yogyakarta terancam oleh perkembangan pariwisata yang tidak terkendali.

Selain melakukan protes dan kampanye, berbagai kelompok masyarakat juga telah mengajukan keluhan resmi melalui Forpi. Mereka melaporkan, puluhan sumur warga kekeringan. Sebagaimana diungkapkan anggota Forpi, "Hampir semua laporan warga yang masuk ke Forpi berkait mengenai masalah air."[112] Menurut wakil warga, sebelumnya mereka tidak pernah mengalami kekeringan, tetapi tiba-tiba merasakan penurunan drastis pasokan air dari sumur mereka, meskipun

112 Wawancara dengan anggota Forpi, Yogyakarta, 9 April 2019.

telah memperdalam sumur hingga 16-20 meter.[113] Hotel baru di lingkungan mereka segera menjadi tersangka sebagai penyebab. Namun Forpi menjelaskan, meskipun terdapat jumlah keluhan yang signifikan berkait dengan pembangunan hotel, "Warga tidak memahami (prosedur) izin (hotel), keluhan-keluhan itu muncul setelah izin pembangunan telah diterbitkan"[114] dan izin konstruksi tidak bisa dibatalkan secara retroaktif. Oleh karena itu, satu-satunya opsi yang dimiliki masyarakat adalah meminta dinas lingkungan melakukan uji pompa (*pumping test*) pada sumur hotel untuk mengevaluasi dampaknya serta menyediakan bukti hubungannya dengan kekurangan pasokan air di sumur warga. Masalahnya, uji pompa tersebut sering kali tidak akurat.[115]

Selain keluhan formal, tuntutan hukum juga diajukan terhadap sebuah kondotel di Kabupaten Sleman. Kondotel adalah gabungan antara apartemen (kondominium) dan hotel. Pemilik dapat memiliki unit secara independen dan dapat memilih menyewakan unit mereka kepada hotel, yang kemudian menawarkan kepada pengunjung yang membayar. Tuntutan hukum itu dilakukan warga bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, dan diajukan pada Hari Hak Asasi Manusia untuk menyoroti perjuangan masyarakat guna lingkungan yang sehat berkait dengan hak asasi manusia mereka.[116] Dalam tuntutan hukum itu, warga mengajukan tiga argumen inti. Pertama, waktu penerbitan izin lingkungan melanggar Undang-Undang Lingkungan 2009. Kedua, izin lingkungan tersebut tidak dikeluarkan

---

113 P Wicaksono, "Belasan Hotel di Yogya Diperiksa Izin Penggunaan Air Tanah", dalam https://nasional.tempo.co/read/621799/belasan-hotel-di-yogya-diperiksa-izin-penggunaan-air-tanah/full&view=ok (diakses 18 Oktober, 2021).

114 Wawancara dengan anggota Forpi, Yogyakarta, 9 April 2019.

115 ICRC, *Technical Review: Practical Guidelines for Test Pumping in Water Wells*, 2020.

116 Lihat T Apriando, "Izin Lingkungan Banyak Kejanggalan, Warga Karangwuni Gugat Apartemen Uttara", dalam https://www.mongabay.co.id/2015/12/23/izin-lingkungan-banyak-kejanggalan-warga-karangwuni-gugat-apartemen-uttara/, diakses 16 September 2022.

oleh otoritas yang sesuai. Ketiga, aturan untuk tidak membangun lebih dari 40% dari luas lahan kondotel dilanggar. Meskipun semua argumen hukum dibawa ke pengadilan, tuntutan tersebut ditolak karena alasan teknikalitas/prosedur gugatan.[117]

Ragam aktivisme dan upaya warga tersebut menghadapi tantangan keterbatasan data yang akurat sebagai landasan untuk membangun klaim publik. Dalam suatu FGD terungkap, keterbatasan data itu terutama berkait dengan ketersediaan, pemakaian, dan distribusi air.[118] Kapasitas pengumpulan data yang terbatas di tingkat warga menghambat upaya pemetaan. Sementara itu, budaya *top-down* (dari atas) di Indonesia membuat akses warga terhadap data menjadi sulit dan hal itu mengakibatkan terjadi elitisme dalam sistem informasi yang berkait dengan pengelolaan air.[119] Di sisi lain, salah seorang anggota Warga Berdaya kesulitan memperoleh data tentang izin lingkungan dan konstruksi hotel dari Dinas Perizinan.[120] Untuk mengatasi masalah itu, Warga Berdaya bekerja sama dengan dua organisasi dalam mengembangkan proyek sains warga. Mereka bekerja sama dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) untuk mengembangkan penelitian tindakan partisipatif serta melakukan survei muka air tanah dengan mengukur sumur-sumur milik warga. Selain itu, mereka juga

---

117 Lihat Mahkamah Agung, "Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2016 Tanggal 13 Januari 2017 -- IMAM NUGROHO, S.Ek, dkk vs KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN", dalam https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8b1a94c865628e8595f60137ab146682.html, (diakses 17 November 2020).

118 M Hapsari dan T Nurshafira, "Membangun Tata Kelola Air Berkeadilan di Yogyakarta: Perspektif Masyarakat Sipil", UGM-Osakan University RESPECT Satellite Office Program on Humanitarian Action (POHA) Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada, 2017.

119 Ibid.

120 E Wijoyono, "#JogjaAsat, Seruan Keadilan Air untuk Rakyat", dalam https://elantowow.wordpress.com/2017/08/05/jogjaasat-seruan-keadilan-air-untuk-rakyat/ (diakses 20 Februari 2022).

bekerja sama dengan Walhi dalam mengembangkan analisis dampak lingkungan kaki telanjang (Amdal Kijang).

Data survei muka air tanah yang diukur dari sumur warga dilakukan kali pertama pada 2016 di wilayah Dusun Karangwuni dan Kumpulrejo, Kelurahan Caturtunggal, tepatnya di sekitaran Jalan Kaliurang. Data menunjukkan ada anomali penurunan muka air tanah, hingga mencapai 11 meter di beberapa area, akibat penggunaan sumur dangkal oleh hotel-hotel lokal. Kausalitas itu dapat dilihat dari keberadaan kerucut depresi (*depression cone*) atau bisa disebut juga anomali lengkungan muka air tanah, yang merupakan pola umum dari penurunan permukaan air tanah, dan pola tersebut berpusat di sekitar lokasi hotel-hotel.[121]

Pengambilan air tanah melalui sumur-sumur akan mengakibatkan terjadi lengkung penurunan muka air tanah. Makin besar laju pengambilan air tanah, kian curam lengkung permukaan air tanah yang terjadi di sekitar sumur, lengkungan itu akan normal kembali apabila terjadi keseimbangan baru, jika terjadi pengisian dari daerah resapan. Keseimbangan air tanah yang baru itu dapat terjadi hanya jika laju pengambilan air tanah lebih kecil dari pengisian oleh air permukaan, misalnya air hujan, di daerah resapan. Laju pengambilan air tanah dari sejumlah sumur apabila jauh lebih besar dari pengisian akan menghasilkan lengkung-lengkung penurunan muka air tanah antara sumur satu dan yang lain, yang dapat berujung pada penurunan muka air tanah secara permanen. Kerucut-kerucut atau anomali lengkungan air tanah merupakan pertanda awal terjadi penurunan tanah.[122]

Melalui kerja sama dengan FPRB yang didukung Yakkum Emergency Unit, warga berhasil mengumpulkan data yang meliputi

---

121 Lihat NE Nugroho et al., "Anomali Perubahan Muka Air Tanah di Daerah Urban", dalam *Jurnal Geografi*, Vol 16, No. 1, 2019, hal.1-6.

122 Lihat F Ribera Urenda, "Well Construction, Cones of Depression, and Groundwater Sharing Approaches", dalam *Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science,* 2019 atau https://oxfordre.com/environmentalscience/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-250 (diakses pada

koordinat dan elevasi sumur-sumur dangkal dari permukaan laut, tinggi tepi sumur, diameter lubang sumur, tinggi permukaan air tanah dari tepi sumur, serta kedalaman sumur dari tepi sumur. Dalam studi ini, 21 rumah tangga yang menjadi pemilik sumur berpartisipasi. Sebagian besar di antara mereka telah memperdalam sumur sebagai respons terhadap penurunan permukaan air tanah. Hasil akhir laporan dari FPRB merekomendasikan ada pengendalian yang lebih ketat terhadap pemberian izin pengembangan hotel serta perlu melibatkan warga dalam proses persetujuan dan pemantauan penggunaan air tanah oleh hotel. Hasil studi itu kemudian disampaikan ke lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pemantauan penggunaan air oleh hotel, dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.[123]

Inisiatif sains warga kedua dilakukan oleh Walhi. Walhi menganggap analisis dampak lingkungan kaki telanjang (Amdal Kijang) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas warga untuk berpartisipasi dalam menjaga dan mengawasi dampak pembangunan (pariwisata) di lingkungan mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Walhi, "Kami berusaha untuk memperkuat kapasitas warga. Misalnya, dengan menggunakan analisa dampak lingkungan kaki telanjang, sebuah istilah yang menandakan bahwa analisa dampak lingkungan tidak hanya dilakukan secara formal oleh pihak luar; tetapi juga dapat dilakukan oleh warga setempat. Dengan demikian, warga juga dapat menganalisis dampak pembangunan di sekitar mereka."[124]

Walhi dan kelompok warga bekerja sama dalam menyelenggarakan pelatihan Amdal Kijang, yang memberikan pada warga kesempatan mempelajari dan mengukur kualitas air di lingkungan lokal mereka. Metode analisis menggunakan penghitungan komposisi dan jumlah spesies untuk menilai kualitas air dan keanekaragaman hayati setempat. Pendekatan itu lebih terjangkau daripada pengujian laboratorium. Pada

---

22 Februari 2023).

123 NE Nugroho et al., loc cit.

124 Wawancara dengan anggota Walhi Yogyakarta, 1 Mei 2019.

saat bersamaan, pelatihan itu juga memberikan pemahaman lebih baik kepada anggota masyarakat tentang lingkungan mereka. Hasil analisis itu dapat digunakan sebagai bukti untuk mendukung tuntutan kepada pemerintah dan industri. Pelatihan Amdal Kijang melibatkan individu dan organisasi yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang terkait, dan ditujukan kepada warga dari berbagai latar belakang dan usia. Materi pelatihan mencakup peran warga dalam analisis dampak lingkungan, peraturan lingkungan hidup, biotilik,[125] pengurangan risiko bencana, penelitian aksi partisipatif, negosiasi, dan penyelesaian konflik. Pelatihan tersebut dilengkapi dengan simulasi dan praktik biotilik.

Pelatihan Amdal Kijang diselenggarakan Walhi pada 2019 dan dihadiri 25 individu dari berbagai organisasi warga, seperti Kelompok Pemuda Sungai, Forum Komunitas Winongo Asri, dan Kelompok Mahasiswa Peduli Lingkungan. Forum Komunitas Winongo Asri kemudian menindaklanjuti dengan memantau kualitas air sungai berkait dengan limbah industri di lingkungan mereka.

Potensi Sains Warga dalam Membangun Keseimbangan Antara Pariwisata dan Konservasi Air

Sebagai suatu upaya transformatif, Conrad dan Hilchey menemukan sains warga sering kali lahir dari krisis.[126] Jenis sains warga itu berfokus pada isu-isu lokal tertentu dan tidak memiliki dukungan sektor swasta atau pemerintah. Inisiasi, organisasi, kepemimpinan, dan pendanaan disediakan oleh warga lokal. Tujuannya untuk membangkitkan respons/ tindakan pemerintah dan mengubah atau meningkatkan *exposure*

---

125 Biotilik berasal dari kata "bio" yang berarti biota, dan "tilik" berarti mengamati secara teliti, sehingga biotilik adalah pemantauan lingkungan menggunakan indikator biota, sinonim dengan istilah biomonitoring", lihat "Panduan Biotilik: Pemantauan Kesehatan Sungai", dalam *ecoton.or.id* (diakses 20 April 2024).

126 Lihat CC Conrad dan KG Hilchey, "A Review of Citizen Science and Community-Based Environmental Monitoring: Issues and Opportunities", dalam *Environmental Monitoring and Assessment*, Vol. 176, 2011, hal. 273-291.

(eksposur) isu yang sedang diselidiki. Di Aberdeen (Skotlandia), Fischer dkk. menemukan kesamaan antara sains warga dan penelitian tindakan partisipatif.[127] Kesamaan terletak pada keragaman latar belakang keilmuan sukarelawan, afiliasi mereka dengan tempat dan isu tertentu, serta ketekunan mereka dalam mengatasi tantangan.

Dalam konteks Yogyakarta, warga merupakan aktor utama dalam gerakan Warga Berdaya, dalam advokasi, dalam proses pembelajaran, dan dalam kampanye. Mereka adalah individu dari berbagai usia dan latar belakang yang ingin tahu dan memiliki kepedulian tentang pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Mereka, secara sukarela, menyumbangkan waktu dan tenaga untuk mempromosikan partisipasi publik, berkolaborasi dengan akademisi, dan berkolaborasi dalam penelitian ilmiah dan dengan demikian meningkatkan pengetahuan saintifik. Aktivitas tersebut bersifat sukarela dan warga saling terhubung, belajar satu sama lain, dan saling memperkuat perjuangan untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian dapat dikatakan, Amdal Kijang dan survei muka air tanah adalah tindakan kreatif untuk memenangi pengakuan dalam sistem analisis dampak yang tidak berpihak pada warga, dan untuk memengaruhi perilaku pemerintah dan hotel-hotel. Selain itu, warga menjadi lebih sadar akan sistem air yang memengaruhi mereka, sambil memperoleh pengetahuan dasar tentang hidrogeologi dan sifat akuifer.

Dengan melibatkan warga sebagai peneliti dan memastikan partisipasi aktif mereka di setiap tahap proses penelitian, sains warga menjadi sebuah pendekatan inovatif yang menyisipkan dimensi sosial politik dalam penelitian.[128] Dalam merespons perspektif warga yang

---

127 Lihat A Fischer *et al.*, "Exploring the Potential of Citizen Social Science for Environmental and Sustainability Research: Experiences of and with Community-Based Researchers", dalam *Citizen Science: Theory and Practice*, Vol. 6, No. 1, 2021, hal. 17.

128 Lihat A Hardy *et al.*, "Humanising Research: A Citizen Social Science Agenda", dalam *Annals of Tourism Research*, Vol. 96, 2022.

terpinggirkan, penerapan Amdal Kijang dan pemantauan muka air tanah merupakan bentuk sains warga yang dapat meredam sifat ekstraktif pariwisata. Beberapa penelitian telah menyarankan untuk mencegah pariwisata hanya menjadi sektor yang mengambil keuntungan semata-mata, warga lokal harus terlibat dan memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan berkait dengan pariwisata (dan air).[129] Agar dapat mengklaim hak asasi atas air, warga harus memiliki kesadaran, kemampuan bernegosiasi, kemampuan advokasi, dan kemampuan bergerak bersama. Komunitas warga di sini dipahami sebagai entitas politik sebagai basis representasi, pengambilan keputusan kelompok, mobilisasi, dan tindakan kolektif.[130] Oleh karena itu, upaya mengklaim hak asasi atas air, terutama ketika menghadapi tekanan dari pengguna air lain yang bersaing, termasuk sektor pariwisata seperti hotel, memiliki dimensi politis yang signifikan.

Lebih lanjut, sebagaimana diusulkan Little, Hayashi, dan Liang, pendekatan sains warga terhadap pemantauan air tanah memiliki potensi menjadi alat yang efektif dan terjangkau untuk pengelolaan sumber air yang berkelanjutan.[131] Selain itu, komposisi dan penghitungan

---

129 Lihat S Cole, "Information and Empowerment: The Keys to Achieving Sustainable Tourism", dalam *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 14, No. 6, 2006, hal. 629-644; BB Boley dan NG McGehee, "Measuring Empowerment: Developing and Validating the Resident Empowerment through Tourism Scale (RETS)", dalam *Tourism Management*, Vol. 45, 2014, hal. 85-94; R Scheyvens dan R Biddulph, "Inclusive Tourism Development", dalam *Tourism Geographies*, Vol. 20, No. 4, 2018, hal. 589-609; N Moayerian *et al*., "Community Cultural Development: Exploring the Connections between Collective Art Making, Capacity Building and Sustainable Community-Based Tourism", dalam *Annals of Tourism Research*, Vol. *93*, 2022, hal. 103355.

130 Lihat RJ Chaskin, "Theories of Community", dalam M Weil (*ed.*), *Handbook of Community Practice* (California: SAGE Publications Inc., 2012), hal. 105-121.

131 Lihat KE Little, M Hayashi dan S Liang, "Community-Based Groundwater Monitoring Network Using A Citizen-Science Approach", dalam *Groundwater*, Vol. 54, No. 3, 2016, hal. 317-324.

spesies adalah penilaian penting yang ditujukan untuk mengukur keanekaragaman hayati lingkungan alam. Dalam konteks ini, air diakui tidak hanya sebagai sumber daya untuk konsumsi manusia, tetapi juga sebagai kebutuhan vital bagi spesies lain. Namun, keberhasilan sains warga juga tetap perlu memperhitungkan tantangan kredibilitas organisasi, pengembangan kapasitas untuk pemantauan secara berkala, dan jika memungkinkan, tindak lanjut yang terintegrasi secara eksplisit oleh legislasi.[132]

Arah ke Depan bagi Aktivisme dan Sains Warga Yogyakarta

Di Yogyakarta, kami telah mengamati pemerintah gagal melindungi dan hotel tidak menghormati hak asasi atas air warga.[133] Kegagalan dalam memosisikan warga dan lingkungan, serta justru memosisikan air sebagai komoditas, ditambah dengan kelalaian hotel dalam menghormati HAAR, menjadi pemicu konflik warga dan hotel. Hal itu telah memantik respons sosial politik: aktivisme warga dalam upaya mengungkap ketidakadilan pembangunan pariwisata di Yogyakarta. Dalam konteks tersebut, bab ini telah mendokumentasikan perjuangan warga untuk menjaga dan merawat hak asasi atas air mereka. Warga dan komunitas bertransisi dari semata-mata konsumen air menjadi pelaku politik, menjadi agen-agen perubahan. Koneksi warga dengan air sebagai sumber kehidupan memberdayakan komunitas lokal untuk

---

132 CC Conrad dan K G Hilchey, "A Review of Citizen Science and Community-Based Environmental Monitoring: Issues and Opportunities", dalam *Environmental Monitoring and Assessment*, Vol. 176, 2011, hal. 273-291.

133 M Yusuf dan I Purwandani, "Ecological Politics of Water: The Ramifications of Tourism Development in Yogyakarta", dalam *South East Asia Research*, Vol. 28, No. 3, September 2020, hal. 327-343; Y Sandang dan S Cole, "Using a human rights approach to improve hotels' water use and sustainability", dalam *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 31, No. 10, 2023, hal. 2337-2355.

menantang pembangunan pariwisata yang tidak terkendali melalui berbagai mekanisme dan berkolaborasi dengan berbagai organisasi.

Dalam bab ini kami telah menyoroti peran penting organisasi warga dalam upaya membentuk kembali partisipasi dalam pariwisata dan pengelolaan air, sembari menunjukkan potensi sains warga. Aktivisme warga di Yogyakarta berusaha merebut kembali hak asasi atas air mereka yang diabaikan di hadapan ekspansi hotel. Warga menyajikan narasi dan bukti dampak negatif pariwisata melalui survei muka air tanah. Mereka juga memanfaatkan sains warga, melalui Amdal Kijang, untuk memengaruhi perilaku pemerintah dan hotel. Pada akhirnya, protes dan kampanye, keluhan resmi, tuntutan hukum, dan sains warga adalah bentuk upaya-upaya memosisikan kembali warga sebagai pemegang hak dalam pembangunan pariwisata dan pengelolaan air hotel. Warga telah berhasil mengaktifkan agensi kolektifnya untuk membatasi kontrol elite terhadap pariwisata di Yogyakarta, sambil mengatasi penyalahgunaan air.

Hemat kami, sains warga dapat ditingkatkan dalam dua hal: keandalan dan konsistensi keterlibatan warga. Dari sisi keandalan, perlu perluasan aplikasi sains warga dari pemantauan air ke pemantauan perubahan dalam penggunaan lahan/ruang. Selain itu, integrasi dimensi hidrologis dari perubahan iklim juga penting untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika lingkungan. Dari sisi konsistensi keterlibatan warga, perlu upaya untuk memastikan partisipasi yang berkelanjutan dan terkonsolidasi baik. Konsistensi itu akan menciptakan fondasi yang kuat untuk pengumpulan data yang berkesinambungan dan pemantauan lingkungan yang efektif. Dengan harapan, kita dapat menghasilkan dataset yang lebih luas dan lebih akurat, yang berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang perubahan lingkungan. Pada saat yang sama, memperkuat hubungan antara komunitas dan ilmu

pengetahuan, memfasilitasi pertukaran pengetahuan yang berkelanjutan dan peningkatan kesadaran akan isu-isu lingkungan yang relevan/aktual.

Selain dari aktivisme dan sains warga, ada argumen kuat untuk melakukan transformasi hukum dalam pengelolaan air di sektor pariwisata. Banyak contoh menunjukkan keberadaan regulasi dan kebijakan pemerintah yang eksplisit sangat penting untuk memastikan distribusi air yang adil.[134] Regulasi yang ketat dan efisien menjadi krusial dalam mendorong keterlibatan aktif hotel-hotel dalam pengelolaan air.[135] Oleh karena itu, perlu upaya advokasi untuk melakukan transformasi hukum dalam pengelolaan air sektor perhotelan.

Arah studi lanjutan dapat lebih memperdalam pemahaman terhadap keberhasilan aktivisme warga dan keberlanjutan proyek sains warga. Hal itu memiliki implikasi signifikan bagi pembuatan kebijakan publik yang

---

134 Lihat, S Cole, "A Political Ecology of Water Equity and Tourism: A Case Study from Bali", dalam *Annals of Tourism Research*, Vol. 39, No. 2, 2012, hal. 1221-1241; R Noble *et al*., "Water Equity in Tourism: A Human Right, A Global Responsibility", dalam *Tourism Concern Research Report*, 2012; A Hof dan M Blázquez-Salom, (2015) "Changing Tourism Patterns, Capital Accumulation, and Urban Water Consumption in Mallorca, Spain: A Sustainability Fix?", dalam *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 23, No. 5, 2015, hal.770-796.

135 Lihat A Kasim *et al*., "The Importance of Water Management in Hotels: A Framework for Sustainability through Innovation", dalam *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 22, No. 7, 2014, hal. 1090-1107; M Dinarès dan D Saurí, "Water Consumption Patterns of Hotels and Their Response to Droughts and Public Concerns Regarding Water Conservation: The Case of the Barcelona Hotel Industry during the 2007-2008 Episode", dalam *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, Vol. 61, No. 3, 2015, hal. 623; V Tekken dan J P Kropp, "Sustainable Water Management - Perspectives for Tourism Development in North-Eastern Morocco", dalam *Tourism Management Perspectives*, Vol. 16, 2016, hal. 325-334; M Razumova *et al*., "The Role of Water Tariffs as A Determinant of Water Saving Innovations in the Hotel Sector", dalam *International Journal of Hospitality Management*, Vol. 52, 2016, hal.78-86; M del M Alonso-Almeida *et al*., "Revisiting Green Practices in the Hotel Industry: A Comparison between Mature and Emerging Destinations", dalam *Journal of Cleaner Production*, Vol. 140, 2017, hal. 1415-1428.

lebih efektif dan responsif. Eksplorasi terhadap tanggapan pemerintah atas aktivisme tersebut serta apakah ada perbaikan/perubahan yang telah terjadi pasca-gerakan warga, juga menjadi menarik dilakukan. Selain itu, audit lingkungan hidup dapat dilakukan untuk memberikan dasar yang kuat untuk menyelidiki perubahan yang tengah berlangsung, yang selanjutnya dapat membantu dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan didasari data yang kuat. Tidak hanya itu, penelitian masa depan juga dapat mengarah ke pengembangan metode sains warga yang lebih baik di Yogyakarta dan daerah lain. Hal itu dapat memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan kebijakan yang melibatkan partisipasi warga dan memanfaatkan pengetahuan lokal secara optimal.

Pengungkapan Ucapan Terima Kasih dan Solidaritas

Kami berterima kasih kepada setiap partisipan dari organisasi warga dan lembaga nonpemerintah yang meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berbagi cerita perjuangan mereka. Solidaritas kami sebagai penulis ada bersama warga dan dengan demikian kami turut mengungkapkan posisi (*positionality)* kami sebagai akademisi-aktivis yang berpihak terhadap perjuangan warga. Kami ungkapkan juga, penulis pertama menerima dana dari LPDP untuk riset doktoral di Yogyakarta, dan penulis kedua mendapat dukungan dana dari Yakkum Emergency Unit yang bekerja sama dengan FPRB Yogyakarta untuk survei muka air tanah partisipatoris. Apresiasi kami berikan pula kepada Stroma Cole atas masukan dan inspirasi yang diberikan terhadap pengembangan bab ini.

Luka di Balik Romantisme Yogyakarta:

Krisis Reproduksi Sosial-Sampah dan Pencemaran Air

Nafisatul Khoidah

Sari: Kota Yogyakarta dilanda krisis sampah sejak 2022. Secara bersamaan terjadi krisis yang lain di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berupa pencemaran air yang menjadi babak pembuka bagi penderitaan warga serta beban berlipat bagi komunitas perempuan yang hidup di sekitar TPST Piyungan. Kedua krisis tersebut adalah fenomena yang terhubung dan saling menyusun, ketika dorongan segmen produksi dalam kapitalisme untuk akumulasi nilai lebih melampaui kemampuan reproduksi sosial, sehingga menghasilkan krisis. Dengan melibatkan pengalaman penulis sebagai bagian dari data riset yang dikolaborasikan dengan hasil perbincangan dengan *interlocutor* (teman bicara), tulisan ini mengungkap ketergantungan Kota Yogyakarta pada TPST Piyungan secara jelas dengan berpijak pada teori reproduksi sosial yang dikombinasikan dengan *caring for water* (merawat air).

Kata-kata kunci: Air, TPST Piyungan, sampah, reproduksi sosial, Kota Yogyakarta.

Dari Sebuah Latar Mengejutkan: "Labirin Sampah Jogja"

Suatu hari ketika mendapat tawaran untuk bergabung dalam sebuah proyek riset tentang air dari seorang teman, tanpa berpikir lama, saya menyambut tawaran tersebut dengan sangat antusias dan berkomitmen untuk mengikuti tahap demi tahap riset. Ada sebuah peristiwa yang menjadi jalan pembuka bagi tulisan ini yang akan saya urai secara perlahan. Berdasar pada endapan-endapan pemikiran dan hasil refleksi yang saya lakukan, saya akan mengurai dua krisis yang terjadi secara bersamaan dan terhubung; krisis sampah di Kota Yogyakarta dan krisis air di sekitar TPST Piyungan. Namun, pertama-tama, saya akan mengawali tulisan ini dengan sebuah latar cerita yang mengantarkan saya datang ke TPST Piyungan, bertemu warga dan air di sana.

Siang itu, 23 Desember 2022, untuk kali pertama selama delapan tahun tinggal di Yogyakarta, saya mengunjungi TPST Piyungan di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bukan tanpa sebab, karena saya sedang terlibat untuk mengerjakan sebuah proyek pembuatan film dokumenter bertajuk *Labirin Sampah Jogja*[136] bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta. Proyek pembuatan film dokumenter itu dilatarbelakangi oleh krisis sampah di Kota Yogyakarta, ketika produksi sampah terus berlangsung, tetapi warga kesulitan membuang sampah karena Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di seluruh Kota Yogyakarta tutup. Penutupan itu merupakan buntut dari aksi protes dan blokade terhadap pintu masuk TPST yang dilakukan warga. Protes telah terjadi berkali-ulang sejak 2019, terutama oleh warga Dusun Banyakan yang tergabung dalam Banyakan Bergerak. Puncaknya Mei 2022 berupa blokade total

136 Walhi Yogyakarta, "Labirin Sampah Jogja," MP4 2023, dalam https://www.youtube.com/watch?v=rUoN9knypp4&t=30s (diakses pada 23 Desember 2023).

pintu masuk TPST yang mengakibatkan sampah di Kota Yogyakarta menumpuk.

Aksi yang dilakukan warga adalah tanggapan atas perizinan TPST yang selesai atau habis pada 22 Maret 2022.[137] Situasi di TPST juga menunjukkan tumpukan sampah yang telah melebihi kapasitas *(overload)* dari daya tampung seharusnya. Selain itu, dampak lingkungan berkait dengan air semakin mengkhawatirkan bagi warga sekitar. "Itu limbah, bau, dan untuk limbah itu dialirkan di parit-parit kecil. Warga di dekat parit itu sumurnya sudah tercemar, dan dimasak untuk air minum saja sudah tidak layak," kata Herwin, warga Dusun Banyakan 3, sekaligus salah satu penggerak aksi dan blokade TPST Piyungan, sebagaimana dikutip dari *Detik Jateng* pada tautan catatan kaki di atas.

Sebagai warga Kota Yogyakarta, saya merasakan krisis itu dan itulah alasan yang mendorong saya mau terlibat dalam proyek tersebut. Krisis berkait dengan sampah yang berbuntut penutupan TPS di seluruh Kota Yogyakarta berdampak serius terhadap individu dan keluarga saya, yang berkepentingan membuang sampah dan melakukan metabolisme rumah tangga. Limbah rumah tangga saya menumpuk dan metabolisme rumah tangga macet sejak TPS ditutup total pada 22 November 2022. Situasi itu membuat saya semakin tertarik terlibat dalam tawaran proyek pembuatan film dokumenter *Labirin Sampah Jogja* untuk mengetahui bagaimana siklus pengelolaan sampah di Yogyakarta dari hulu hingga hilir.

Penutupan TPS di seluruh Kota Yogyakarta dibarengi pengerahan petugas penjaga TPS agar tidak ada warga membuang sampah pada malam hari. Warga juga diimbau mengelola sampah secara mandiri dalam skala keluarga. Namun bagi warga seperti saya, situasi itu

---

137 Pradito Rida Pertana, "Warga Blokade TPST Piyungan, Keluhkan Limbah-Pertanyakan Perizinan," dalam *detik jateng*, 2022, atau https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6066522/warga-blokade-tpst-piyungan-keluhkan-limbah-pertanyakan-perizinan (diakses pada 23 Desember 2023).

serbasulit, karena saya tinggal di sebuah rumah kontrakan yang minim ruang terbuka dan tidak memiliki pekarangan, sehingga sangat tidak memungkinkan mengelola sampah secara mandiri, kecuali hanya terus menumpuk dan menunggu TPS dibuka sambil terus menghindari pembelanjaan yang membawa pulang banyak plastik. Apa yang saya rasakan mungkin juga banyak orang rasakan, terutama para perantau yang tinggal di kos, paviliun, atau rumah kontrakan yang cenderung padat dan tertutup.

Krisis sampah di Kota Yogyakarta semakin tampak dengan keberadaan tumpukan sampah liar di pinggir-pinggir jalan di Kota Yogyakarta. Itu terutama terjadi di jalanan yang jarang menjadi tempat pemberhentian seperti jalan lingkar, Ringroad Selatan dan Utara, yang berdampingan dengan lahan kosong dan banyak jalan lain. Di sana banyak kantong berisi sampah bertumpuk dan berceceran (lihat Gambar IV-1). Itulah pemandangan yang tidak pernah saya lihat selama tinggal di Yogyakarta, selain setelah seluruh TPS ditutup.

Suatu malam, di jalanan yang sepi, saya melihat seorang pengendara motor tiba-tiba melambatkan laju kendaraan, lalu menjatuhkan tas kresek hitam berisi sampah. Kemudian, dia segera tancap gas kencang-kencang seolah telah berbuat kriminal. Setelah saya pikir-pikir, mungkin itulah cara warga menghadapi krisis, ketika mereka tidak lagi dapat membuang sampah di TPS dan tidak juga dapat mengelola sampah rumah tangganya. Saya melihat itu sebagai bentuk protes dan perlawanan atas situasi yang terjadi karena tidak lagi ada pilihan. Di satu sisi, sangat sulit menghindari penggunaan sampah plastik. Di sisi lain, mustahil mengelola sampah secara mandiri. Situasi itu berlangsung berbulan-bulan tanpa solusi dan jalan keluar.

Gambar IV-1: Tumpukan sampah terlihat di sepanjang Ringroad Selatan Kota Yogyakarta, 300 meter dari Terminal Giwangan, akibat penutupan TPS Piyungan (diambil pada 30 Januari 2024).

Masih pada hari yang sama, bersama dua orang juru kamera dan seorang sutradara, saya sampai di TPST Piyungan. Saya memperoleh suguhan pemandangan berupa gunungan sampah campur-baur; plastik, kertas, logam, dan sisa makanan. Sampah itu lembek cenderung berair, menggumpal, dan berwarna-warni. Gunungan sampah itu mengeluarkan bau busuk, amis, karat dan kecut. Semua tercampur membentuk aroma yang belum pernah saya cium. Sementara itu, puluhan alat berat menyebar, mengurai sampah yang berdatangan dibawa truk-truk besar pengangkut sampah dari TPS. Ratusan pemulung bertebaran di setiap sudut TPST, membentuk gerakan yang sama; mengorek-ngorek sampah menggunakan sebuah alat dari besi memanjang, lalu memasukkan sampah ke dalam karung atau keranjang besar dari bambu. Saat truk pembawa sampah datang, mereka berlari mendekati truk untuk mengorek sampah yang baru datang. Di antara para pemulung, ada puluhan sapi yang digembalakan di tengah hamparan gunung sampah (Gambar IV-2). Hewan itu memakan plastik dan sampah sisa makanan, lalu berbaring atau berdiri dengan kepala rendah saat kekenyangan.

Gambar IV-2: Di tengah gunungan sampah di TPST Piyungan banyak sapi mencari makan (diambil pada 23 Desember 2022).

Perjumpaan dengan Air di Sekitar TPST Piyungan

Dari gunungan sampah, saya berjalan kembali ke arah pintu masuk TPST melewati sebuah turunan dan anak tangga, kira-kira 500 meter ke tempat lebih rendah. Di sana, saya melihat kolam berair sangat keruh berwarna hitam kecokelat-cokelatan, berbusa, kental pekat, dan sangat berbau (Gambar IV-3). Bau itu sangat menusuk, menembus dinding hidung paling dalam hingga meresap ke kepala dan membuat pusing serta mual. Saya berbisik kepada salah seorang juru kamera, "*Kayanya* siklus pernapasan kita kali ini harus diubah. Sekali menghirup, tahan di perut, lalu keluarkan banyak-banyak." Dia terkekeh mendengar gurauan saya.

Air itu bernama lindi, air hasil infiltrasi dan perkolasi (perembesan air dari permukaan ke dalam tanah) dari air hujan yang melewati tumpukan sampah. Air lindi mengalir dari dasar tumpukan sampah menuju kolam utama melewati penyaringan, kemudian mengalir melalui sebuah parit, sungai kecil seperti aliran irigasi dan bermuara ke

Sungai Opak. Dan, dari sinilah perjumpaan saya dengan air di Piyungan bermula.

Gambar IV-3: Kolam utama penampungan lindi di TPST Piyungan (diambil pada 24 Maret 2024).

Bersama dua pemuda Desa Sitimulyo, Herwin dan Jeni, saya berjalan mengelilingi dusun-dusun di sekitar TPST, sambil menyusuri parit lindi yang melewati ladang dan sawah-sawah. Kemudian kami bertiga berhenti di sebuah jembatan kecil penghubung area persawahan dan permukiman warga. Kami beristirahat dan berteduh sejenak. Saya melihat hamparan sawah. Tanaman padi rusak, *gabuk,*[138] berbatang bantat, daun cokelat kering, terutama sawah-sawah di bibir parit. Menurut Herwin dan Jeni, sawah-sawah itu rusak karena rembesan air lindi. Tak jarang, saat musim hujan tiba, air parit yang dialiri lindi meluber dan limpasannya mengenai sawah-sawah di sisi kiri dan kanan. Menurut penuturan Herwin dan Jeni, suatu hari ada warga yang terluka akibat tertusuk jarum saat bekerja di sawah. Rupanya, itu jarum limbah medis yang terbawa aliran lindi dan terdampar di sawah warga. Sawah-sawah itu juga sangat kotor, banyak sampah plastik terselip di sela-sela tanaman padi. Warga pernah mengeluhkan dampak lindi yang merusak

138 Bahasa Jawa yang berarti tidak ada isinya.

tanaman warga kepada pemerintah daerah karena para petani gagal panen dan rugi. Menurut informasi dari Jeni, keluhan itu kemudian ditanggapi pemerintah daerah dengan memberikan uang ganti rugi. Saya tidak mendapatkan informasi nominal pasti mengenai uang ganti rugi itu. Beberapa orang yang saya wawancarai tidak mau mengatakan, karena obrolan berkait dengan uang dianggap terlalu riskan. Namun Herwin mengonfirmasi, berdasar ingatannya, pemerintah daerah memberikan ganti rugi Rp10.000.000 untuk seluruh sawah yang terdampak dengan pembagian kurang lebih Rp60.000/10 meter persegi. Artinya, ada kurang-lebih 1.666 meter persegi sawah yang rusak oleh lindi.

Menurut penuturan Mendit, warga Banyakan 3, rata-rata petani di sekitar TPST Piyungan memiliki sawah seluas 100 meter persegi dengan hasil panen untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (subsisten). Hasil panen itu akan bertahan hingga panen yang akan datang, kira-kira tiga sampai empat bulan. Jika padi rusak dan gagal panen, petani merugi berkali lipat. Pertama, petani telah mengeluarkan biaya awal untuk memulai masa tanam yang mencakup biaya pengelolaan tanah, pembibitan, pupuk, biaya perawatan dan tenaga yang dikeluarkan oleh pemilik sawah. Terlebih, sejak keberadaan TPST, para petani harus lebih dahulu membersihkan lahan dari sampah sebelum pengelolaan lahan. Itu berarti ada tenaga lebih yang harus mereka curahkan dari proses bertani umumnya. Kedua, gagal panen membuat petani kehilangan sumber pangan untuk tiga hingga empat bulan. Artinya, petani akan mengandalkan uang ganti rugi dari pemerintah Rp60.000 x (100:10) yaitu Rp600.000 untuk kebutuhan pangan selama tiga sampai empat bulan. Jumlah yang tidak mencukupi untuk sekadar menutup biaya awal masa tanam petani yang gagal panen.

Herwin dan Jeni kemudian mengajak saya berjalan ke Dusun Banyakan 3, salah satu dusun di Desa Sitimulyo yang paling dekat dengan parit lindi dan disebut paling tercemar oleh limbah. Herwin dan Jeni secara khusus mengajak saya melihat sumur salah seorang warga

yang menurut mereka sudah sangat tercemar dan tidak layak konsumsi. Saya mendekati sumur yang terletak di antara tiga rumah warga itu dan mengambil airnya. Meski tidak terlalu keruh, ada aroma karat dalam air itu. Aroma yang mengingatkan saya pada suatu hari saat sedang sangat serius berada di suatu forum, sampai lupa bahwa sepanjang forum yang berlangsung tiga-empat jam itu saya menggenggam kunci motor. Setelah itu, saya mencium telapak tangan saya dan aromanya sangat anyir hingga membuat badan saya seperti tersetrum listrik. Ingatan itulah yang membantu saya mendeskripsikan aroma karat pada air sumur itu. Bibir sumur juga mengeluarkan warna kuning kecokelat-cokelatan seperti besi berkarat.

Seorang lelaki tua bercelana pendek tanpa kaus dan baju, kira-kira berusia 70 tahun, keluar dari rumah yang berada di samping sumur dan mengatakan kepada saya bahwa sumur itu sudah tidak layak pakai, kecuali untuk sekadar mencuci. Herwin dan Jeni menambahkan, hampir semua sumur milik warga Banyakan 3 sudah tercemar dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beberapa warga membeli air galon isi ulang, sementara banyak yang lain tetap menggunakan air sumur karena tidak mampu membeli air. Tentu saja, dalam benak saya, bagaimana mungkin air tidak tercemar, sedangkan TPST telah beroperasi sejak 1996 dan sejak saat itu pula timbunan demi timbunan sampah memunculkan limbah sedemikian rupa.

Namun, bagaimanapun, dugaan saya dan warga butuh validasi secara sains untuk mengklaim bahwa benar telah terjadi pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas air tanah dan sumur di sana. Meski saya yakin pengetahuan dan pengalaman warga tentang diri dan lingkungan mereka yang mengalami perubahan adalah valid. Setelah saya cari tahu, ada banyak penelitian yang menguji kualitas air di Desa Sitimulyo, termasuk di Dusun Banyakan 3. Beberapa penelitian yang saya baca menyebutkan air di sekitar TPST Piyungan tidak layak. Salah satu

hasil penelitian[139] menyatakan air tanah di sana tidak layak dikonsumsi karena telah berada di ambang batas maksimum yang diperbolehkan oleh Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008, yaitu COD[140] sebesar 65,31 mg/l, BOD[141] sebesar 57,56 mg/l, *Total coliform*[142] sebesar 460 MPN/100mL dan *E.coli*[143] sebesar 28 MPN/100mL. Dalam penelitian itu disebutkan, semua sumur di sekitar TPST dengan jarak pengambilan sampel 190 m, 290 m, 300 m, 350 m, 400 m, 420 m dan 500 m telah berada di ambang batas yang disyaratkan

---

139 Tirta Puspitasari, "Pemetaan Kualitas Air Bersih di Sekitar TPA Piyungan, Bantul, Yogyakarta", *disertasi* di Universitas Islam Indonesia, 2016.

140 *Chemical Oxygen Demand* (COD): Merupakan parameter yang mengukur jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi senyawa kimia di dalam suatu sampel air. COD digunakan sebagai indikator tingkat polusi organik dalam air.

141 *Biochemical Oxygen Demand* (BOD): Merupakan parameter yang menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk mendekomposisi bahan organik dalam suatu sampel air. BOD digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran organik dan aktivitas biologis dalam air.

142 *Total coliform*: Sebuah kelompok bakteri yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan teknik uji laboratorium tertentu. *Total coliform* digunakan sebagai indikator umum kebersihan air. Jumlah yang tinggi dari bakteri ini dapat menunjukkan kemungkinan ada pencemaran dari sumber kotoran manusia atau hewan.

143 *E. coli* (*Escherichia coli*): Merupakan salah satu jenis bakteri coliform yang berasal dari usus manusia dan hewan. Kehadiran *E. coli* dalam air adalah indikator ada pencemaran tinja dan dapat menunjukkan risiko kesehatan bagi orang yang menggunakan air itu. *E. coli* sering diukur untuk menilai kualitas sanitasi air. Keberadaan *E. coli* digunakan sebagai indikator untuk memantau kemungkinan ada mikroba lain yang lebih berbahaya, seperti cryptosporidium, giardia, shigella, dan norovirus . Beberapa kemungkinan sumber kontaminasi tinja meliputi limpasan pertanian, satwa liar yang menggunakan air sebagai habitat aslinya, limpasan dari area yang terkontaminasi kotoran hewan peliharaan, instalasi pengolahan air limbah, dan sistem septik di lokasi. Curah hujan tinggi dapat menyebabkan organisme itu terbawa ke sungai, sungai, aliran sungai, danau, atau air tanah. Jika air ini digunakan sebagai sumber air minum dan tidak diolah atau tidak diolah secara memadai, dapat mengakibatkan penyakit.

dengan parameter BOD, COD, *Total caliform, Escherichia coli* dengan detail angka hasil pengujian seperti pada catatan kaki yang saya sertakan di atas. Karena tidak mengukur secara pasti, saya mengasumsikan sumur yang saya datangi di Dusun Banyakan 3 berada pada jarak 350 m dari TPST yang berarti memiliki kandungan COD 57,81 mg/l, BOD 43,06 mg/l, *Total caliform* 100 MPN/100ml dan *E.coli* 0 MPN/100ml. Berdasar pembacaan atas hasil pengujian laboratorium pada air di sekitar TPST Piyungan tersebut, bisa saya simpulkan air di sekitar TPST tercemar.

Perjumpaan pertama itu berakhir, karena dokumentasi dan bahan untuk pembuatan film dokumenter telah mencukupi.

***

Pada 27 Desember 2023, setahun setelah kedatangan pertama ke TPST Piyungan, saya kembali datang ke sana. Saya menemui Jeni, setelah kami berkontak dan berjanji untuk bertemu. Setiba di TPST, Jeni bercerita berkait dengan bantuan sumur bor dari pemerintah untuk warga Banyakan 3, wilayah yang hampir seluruh sumur warga tercemar oleh limbah TPST, hasil pengajuan yang diusulkan warga. Setelah saya cek silang, bantuan sumur datang pada Agustus 2023 dari Kementerian Pertahanan yang saat ini di bawah kendali Prabowo Subianto.[144] Saya bertanya-tanya, mengapa bantuan itu datang pada musim pemilihan umum, sementara Prabowo menjadi salah satu calon presiden dalam kontestasi politik 2024. Bukan hanya di Dusun Banyakan, Menteri Pertahanan Prabowo juga meluncurkan bantuan sumur bor di beberapa titik lain di Yogyakarta, seperti di Gunung Kidul dengan 11 titik sumur.[145]

---

144 Pemdes Sitimulyo, "Peresmian Sumur Bor oleh Menteri Pertahanan," go.id, *Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2023, atau https://sitimulyo.bantulkab.go.id/first/artikel/652-Peresmian-Sumur-Bor-Oleh-Menteri-Pertahanan (diakses pada 3 Januari, 2024)

145 Sukma Nur Fitriana, "Beri Sumur Bor, Prabowo Dapat Pantun Dari Warga Gunung Kidul," *News.detik.com*, *DetikNwes*, 2023, atau https://news.detik.com/berita/d-6867589/beri-sumur-bor-prabowo-dapat-pantun-dari-warga-gunung-kidul (diakses pada 3, January 2024)

Apakah itu sebuah kebetulan atau bagian dari cara Prabowo numpang kampanye agar mendapat empati warga melalui peluncuran bantuan sumur bor? Yang pasti, bagi saya, peluncuran bantuan sumur menjelang Pemilihan Presiden 2024 itu sangatlah politis.

Menurut penjelasan Sukardi, warga Dusun Banyakan 3 yang juga bergabung dengan Banyakan Bergerak, bantuan sumur itu semula hanya akan diberikan untuk wilayah Gunung Kidul, tetapi warga Banyakan memaksa meminta satu unit untuk dusun mereka. Hasil permintaan yang cenderung bersifat desakan itu akhirnya terwujud. Sumur dengan kedalaman 80 meter itu digunakan untuk empat rukun tetangga (RT), yaitu warga Dusun Banyakan 3 dan sebagian warga Banyakan 2. Untuk mengalirkan air dari sumur ke rumah-rumah, warga memasang instalasi pipa air secara mandiri dengan gotong royong. Warga juga patungan untuk membeli pipa karena bantuan sumur tidak termasuk biaya instalasi dan pemasangan pipa. Setiap kepala keluarga (KK) dialiri dengan satu keran melalui saluran pipa dan membayar Rp20.000,00 per bulan untuk biaya listrik. Untuk biaya perawatan, warga menggunakan uang kas RT dan membentuk penjadwalan bergilir antar-RT guna pengecekan dan pemeliharaan.

Selain bantuan sumur bor, Sukardi menambahkan, pemerintah juga melakukan program pemasangan pipa dan pembangunan talud. Instalasi pipa dibangun di area utama kolam penampungan lindi. Pipa akan mengalirkan lindi dari kolam penampungan utama ke Sungai Opak melewati talud (Gambar IV-4), sehingga lindi tidak lagi mengalir melalui parit dan limpasannya tidak mengenai sawah dan ladang warga lagi (Gambar IV-5). Namun limbah tetaplah limbah. Saat benda cair itu dialirkan ke sungai utama, yakni Sungai Opak, seluruh wilayah yang dilewati pun akan tercemar.

Gambar IV-4: Pipa penyalur lindi TPST Piyungan ke parit sebelum sampai di Sungai Opak (diambil pada 24 Maret 2024).

Gambar IV-5: Parit aliran lindi yang sudah dibangun talud (diambil pada 24 Maret 2024).

Program-program tersebut, dari ganti rugi sebesar Rp60.000/10 m^2 untuk petani yang sawahnya rusak, bantuan sumur bor, pemasangan pipa dan pembangunan talud, sekilas tampak seperti kebaikan hati pemerintah terhadap warga. Padahal, sebelum keberadaan TPST, air tersedia sangat melimpah dan dengan kualitas yang baik. Herni, warga Banyakan 3, menceritakan dia pernah melihat air di sungai-sungai begitu jernih. Warga bahkan dapat mandi di sungai-sungai itu. Namun secara perlahan, saat TPST beroperasi pada 1996, sungai perlahan-lahan berlumut, "*Kaya ana kithere* (Seperti ada *kither*-nya)."[146] Lambat laun air sungai menjadi sangat keruh sampai akhirnya mencemari sumur-sumur warga, yang sebelumnya baik-baik saja.

Tidak hanya itu. Air sebelumnya dapat diakses secara gratis. Namun kini warga membutuhkan biaya untuk menggunakan air. Herni juga menyampaikan, sebelum ada bantuan sumur, pernah berlangganan PDAM dan biayanya sangat mahal.

> "*Nggak* dipakai saja saya harus bayar 50.000 atau 60.000. Kalau dipakai, per bulan bisa sampai 100.000. Itu pun saya tidak pakai untuk masak, karena ada kaporitnya, jadi tidak enak. Pernah juga sampai warnanya putih seperti ada kapurnya. Jadi kalau masak tetap pakai air sumur, pasang PDAM karena katanya air sumur tercemar," kata Herni.[147]

Herni mengatakan sumur miliknya sebetulnya tidak sekeruh milik tetangga, karena ia menggali ulang untuk menambah kedalaman sumur. Beberapa tetangga dengan air sumur keruh dan tidak layak, menurut dia, kerap mengambil air dari sumur miliknya untuk memasak karena tidak mampu terus-menerus membeli air galon isi ulang atau berlangganan air PDAM.

---

146 Semacam lumut yang muncul di tanah atau batu yang berada di dasar sungai. Ia terbentuk oleh kotoran yang dibawa air sungai dan mengendap membentuk gumpalan.

147 Wawancara dengan Herni, Yogyakarta, 27 Desember 2023.

Setelah perjalanan saya itu, berdasar pengalaman (apa yang saya lihat, cium, dan sentuh), percakapan, refleksi dan bekal bacaan yang saya miliki, saya mengklaim (mungkin ini keputusan terburu-buru) bahwa krisis sampah di Kota Yogyakarta dan krisis air di sekitar TPST Piyungan adalah momen yang saling susun, saling memengaruhi, dan tidak terpisahkan. Secara sederhana, krisis air yang terjadi di wilayah sekitar TPST Piyungan adalah sesuatu yang inheren dari produksi sampah yang dihasilkan Kota Yogyakarta. Saya mengidentifikasi kedua krisis tersebut merupakan konsekuensi dari ketergantungan Kota Yogyakarta terhadap TPST Piyungan. Kebergantungan itu, mirip seperti kapitalisme sangat bergantung terhadap kerja reproduksi sosial yang lazimnya dilakukan perempuan; ibu melahirkan, menyusui, merawat, mengenalkan anak pada nilai baik dan buruk, melatih kemampuan, keterampilan, dan kompetensi. Sebuah pekerjaan yang menjadi penopang bagi kelahiran tenaga kerja (alias buruh) sekaligus syarat utama bagi skema ekonomi kapitalisme dalam menciptakan nilai lebih. Pada saat bersamaan, kapitalisme mengingkari pekerjaan itu dengan mengaburkan nilai kerja yang terkandung di dalamnya, meniadakannya sama sekali: dengan cara tidak memasukkan sebagai bagian dalam komponen gaji buruh.

Untuk membuktikan klaim tersebut, saya akan mengajukan pertanyaan riset sebagai berikut. Bagaimana hubungan ketergantungan Kota Yogyakarta terhadap TPST Piyungan, sehingga menciptakan krisis air?

Untuk menjawab pertanyaan riset tersebut, saya akan menggunakan teori reproduksi sosial; cabang dari teori sosial feminisme yang mengungkapkan bagaimana kapitalisme dapat terus hidup karena ditopang oleh kerja-kerja perawatan yang berlangsung di luar pusaran pasar, di rumah-rumah, di dalam komunitas dan masyarakat. Teori reproduksi sosial akan saya kombinasikan dengan *caring for water* yang berfungsi praktis sebagai jangkar atau *border* untuk membatasi dan memfokuskan pembahasan tentang kerja reproduksi sosial yang

bersinggungan dengan air karena begitu banyak dan luas kerja-kerja reproduksi sosial.

Kombinasi Teori Reproduksi Sosial dan *Caring for Water*

Nancy Fraser dalam *Contradictions of Capital and Care* (2016) menyebutkan, subsistem kapitalisme sangat bergantung pada aktivitas reproduksi sosial[148] yang membentuk latar belakang sekaligus menjadi tulang punggung bagi aktivitas produksi[149]. Aktivitas produksi tersebut mencakup seluruh aktivitas atau pekerjaan yang darinya terdapat nilai moneter. Pada umumnya, aktivitas produksi itu tampak, terlihat, diketahui publik, dan disepakati sebagai sebuah aktivitas yang disebut "kerja" dan itulah yang oleh Fraser disebut sebagai latar depan. Adapun reproduksi sosial memiliki makna berkebalikannya dan ia yang menopang keberadaan latar depan, dan karena itu ia disebut Fraser sebagai latar belakang.

Dalam skema kapitalisme, kerja-kerja reproduksi sosial diperlakukan dengan cara yang kontradiktif; di satu sisi ia membutuhkannya, di sisi lain ia mengingkari makna kerja reproduksi sosial. Padahal, tanpa reproduksi sosial, mustahil kapitalisme dapat bertahan hidup dan

---

148 Reproduksi sosial adalah pekerjaan menciptakan manusia. Arruzza Cincia, Tithi Batacharya dan Nancy Fraser dalam *Feminisme untuk 99% Sebuah Manifesto* (2020) menjelaskan, reproduksi sosial adalah pekerjaan menciptakan dan menopang manusia bukan hanya secara biologis, melainkan juga menciptakan dan menopang manusia secara kapasitas untuk bekerja – atau apa yang disebut Marx sebagai "tenaga kerja". Pekerjaan itu berarti juga membentuk manusia dengan perilaku, watak, nilai benar dan salah. Pekerjaan itu juga meliputi pembentukan kemampuan, kapasitas, dan keterampilan. Tanpa aktivitas ini, baik kehidupan maupun kapasitas tenaga kerja, tidak akan terwujud dalam diri manusia. Lebih jauh lagi, Fraser mengatakan kapitalisme telah mencaplok *(landnahme)* alam, baik sebagai sumber "bahan masukan" untuk produksi maupun menjadi "tempat buangan" untuk menyerap sampahnya.

149 Nancy Fraser, "Contradictions of Capital and Care," dalam *New Left Review* 100, No. 99 (2016).

mengakumulasi nilai lebihnya. Bukan sekadar mengingkari nilai dari kerja reproduksi sosial, kapitalisme juga memisahkan latar depan dari latar belakang tersebut dan terus memupuk mitos bahwa kerja-kerja reproduksi sosial adalah ungkapan cinta dan bentuk afeksi serta alami. Fraser, dalam hal ini, secara menohok menuding kapitalisme sebagai "penumpang gelap" yang menunggang bebas dalam kehidupan dengan menyubordinasi dan mendapat tenaga gratis dari kerja reproduksi sosial.[150]

Reproduksi sosial (latar belakang) oleh Fraser juga dielaborasi, bukan sekadar memberikan pemaknaan terhadap kerja-kerja perawatan yang lazimnya dilakukan perempuan. Ia mengatakan, terdapat cerita latar belakang lain yang dilakukan oleh agensi alam (nonmanusia). Cara kerja kapitalisme dalam hal ini antara lain adalah penguasaan atas alam, manakala alam dijadikan sebagai sumber "input produktif" dan "penampung" limbah produksi. Persis seperti kerja reproduksi sosial yang banyak ditanggung oleh perempuan, alam juga dijadikan sebagai sumber daya bagi kapital dengan nilai yang diabaikan. Alam diperlakukan sebagai persediaan gratis yang menjadi bagian dari penyusun latar belakang dalam membentuk kondisi latar depan (produksi) dalam akumulasi kapital.[151] Itu sangat relevan untuk mendedah bagaimana relasi ketergantungan Kota Yogyakarta terhadap TPST Piyungan. Dalam hal ini, Kota Yogyakarta adalah latar depan yang tampak, dipromosikan sebagai kota wisata dan kota pendidikan. Adapun TPST Piyungan adalah latar belakang yang menopang keberadaan atau eksistensi Kota Yogyakarta, lokasinya jauh dari pusat kota, kotor, bau, dan kalau bisa

150 Arruzza Cincia, Tithi Batacharya dan Nancy Fraser, *Feminisme untuk 99%: Sebuah Manifesto* (Yogyakarta: Penerbit Independen, 2020.)

151 Nancy Fraser, "Behind Marx's Hidden Adobe: For An Expanded Conceptions of Capitalism", dalam *New Left Review,* No, 86 (2014): 55-57.

disembunyikan oleh pemerintah supaya jangan merusak citra Kota Yogyakarta sebagai kota wisata dan pendidikan.

Berikutnya, saya akan mengombinasikan teori reproduksi sosial dengan *caring for water* yang dikemukakan oleh Carolina Domínguez-Guzmán *et al.* (2022)[152] untuk mengkhususkan dan membatasi pembahasan kerja reproduksi sosial agar tetap linear dan fokus terhadap permasalahan air. Pembatasan ini bukan bermaksud mendegradasi makna reproduksi sosial, melainkan secara praktis sebagai pemandu proses penulisan agar tidak meluas karena kerja reproduksi sosial begitu banyak. Sebagai sebuah konsep yang mengkhususkan pembahasan terhadap kerja perawatan terhadap air, *caring for water* saya asumsikan sebagai bagian dalam kerja reproduksi sosial secara umum.

Keduanya, baik reproduksi sosial maupun *caring for water,* adalah dua konsep atau teori yang berangkat dengan napas feminisme yang, secara spesifik, memberikan perhatian lebih terhadap kerja-kerja perawatan yang banyak ditanggung oleh perempuan. Kombinasi antara reproduksi sosial dan *caring for water* diharapkan dapat membuka sekat keberadaan ketergantungan Kota Yogyakarta terhadap TPST Piyungan yang selama ini disembunyikan, serta untuk melihat bagaimana krisis antara keduanya menjadi momen yang saling menyusun dan jelas.

Lebih detail, *caring for water* akan membantu saya mengurai satu per satu bagaimana kerja-kerja perawatan atas air yang dilakukan individu atau komunitas di daerah sekitar TPST Piyungan melalui ragam bentuk perawatan yang ditawarkan oleh *caring for water*. Sementara teori reproduksi sosial akan berfungsi untuk menganalisis bagaimana ketergantungan Kota Yogyakarta terhadap TPST Piyungan beserta individu dan komunitas di sekitarnya, juga memberikan telaah kritis

152 Carolina Domínguez-Guzmán, Andrez Verzijl, Annemarie Mol, "Caring for Water in Northern Peru: On Fragile Infrastructures and the Diverse Work Involved in Irrigation," dalam *Environment and Planning E: Nature and Space* 5, No. 4, 2022, atau https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/25148486211052216 (diakses pada 23 Desember 2023).

terhadap bangunan ekonomi politik yang menjadi pangkal dari krisis yang terjadi.

Caring for water memiliki variasi yang beragam dalam kerja perawatan terhadap air, antara lain *tinkering,* mengutak-atik atau inovasi sehari-hari warga untuk merespons air; *adaptive,* mengubah atau mengolah gaya pengelolaan air secara adaptif untuk memastikan air tetap mengalir secara baik (dari segi kualitas dan kuantitas); *watchful,* bersikap waspada, teliti, dan berhati-hati terhadap air; *listening,* mendengarkan/menyimak air dan melakukan ritual/tradisi berkait dengan air; *activism,* menggalang aktivisme untuk mempertahankan sumber air dan melawan perusak air.[153]

Secara operasional, kombinasi teori reproduksi sosial dan *caring for water* akan membuka secara perlahan bagaimana relasi ketergantungan Kota Yogyakarta terhadap TPST Piyungan dan lebih subtil lagi membuka bagaimana kerja merawat air (bagian dari kerja reproduksi sosial) yang dilakukan individu (terutama perempuan) dan komunitas di sekitar TPST Piyungan semakin berlipat ganda akibat oleh ketergantungan Kota Yogyakarta terhadap TPST Piyungan.

Kota Yogyakarta dan TPST Piyungan: Ketergantungan Segmen Produksi terhadap Reproduksi Sosial

Sebagai kota dengan indeks pariwisata yang tinggi, Yogyakarta merupakan salah satu tempat tujuan wisatawan, baik lokal maupun nonlokal. Menurut data Dinas Pariwisata DIY, nilai Rasio Pergerakan Wisata (RPW) mencapai 6,13, tertinggi di Indonesia dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 3.087 orang per

---

153 Carolina Domínguez-Guzmán, Andrez Verzijl, Annemarie Mol, "Caring for Water in Northern Peru: On Fragile Infrastructures and the Diverse Work Involved in Irrigation," dalam *Environment and Planning E: Nature and Space 5*, No. 4, 2022, atau https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/25148486211052216 (diakses pada 23 Desember 2023).

September 2022 dan jumlah wisatawan lokal 5,13 juta orang.[154] Titik objek wisata tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Yogyakarta, yakni Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Sebagaimana data yang dirilis Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022, pendapatan dari sektor pariwisata mencapai total hampir Rp2,5 triliun untuk seluruh kabupaten dan kota se-DIY dengan pendapatan tertinggi diperoleh Kota Yogyakarta, yaitu lebih dari Rp2 triliun. Tidak hanya itu, menurut laporan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta pada 2013, ada total 81 industri kecil dan sedang yang beroperasi khusus di Kota Yogyakarta dan kemungkinan besar bertambah jumlahnya hingga 2024. Selain sektor pariwisata dan industri, Yogyakarta juga menjadi salah satu kota tujuan pendidikan dengan peringkat teratas di Indonesia. Menurut data Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) DIY tahun 2023, jumlah pelajar dan mahasiswa di DIY 640.658 orang dengan persebaran kampus antara lain di Kota Yogyakarta.[155] Jumlah itu termasuk masyarakat lokal dan perantauan. Tren itu, mau tidak mau, harus dibarengi dengan pembangunan hotel-hotel, kos-kosan, kafe-kafe, rumah sakit, pusat perbelanjaan, ketersediaan air bersih dan fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan kota sebagai ruang produksi kapitalisme beroperasi sepenuhnya.

Kenyataan itu merupakan beberapa pemicu produksi sampah yang tinggi di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan volume sampah 747 ton per hari di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta saja. Ketiganya merupakan pemasok sampah di TPST Piyungan dengan

---

154 Burhan Aris Nugraha, "Pergerakan Wisata di Yogyakarta Tertinggi di Indonesia," https://foto.solopos.com/, dalam *Newswire*, 2023, atau https://foto.solopos.com/pergerakan-wisata-di-yogyakarta-tertinggi-di-indonesia-1567682 (diakses pada 30 December, 2023).

155 Sirijul Khafid, "Jogja Peringkat Teratas Jadi Kota Tujuan Pendidikan," dalam *Harian Jogja*, 2023, atau https://pendidikan.harianjogja.com/read/2023/10/29/642/1152913/jogja-peringkat-teratas-jadi-kota-tujuan-pendidikan (diakses pada 30 December, 2023).

Kota Yogyakarta sebagai penyumbang sampah terbesar, yaitu rata-rata 350 ton/hari[156].

Apa yang telah saya sebutkan itu menunjukkan, Kota Yogyakarta telah terpasarkan *(marketized)*, ia mengambil posisi latar depan (produksi) dengan kapital terkonsentrasi di dalamnya; uang, tenaga kerja, turis, mahasiswa, dan berbagai komoditas lain berputar sangat cepat dan menghasilkan nilai lebih. Sebagai konsekuensi, Kota Yogyakarta menghasilkan limbah dari aktivitas produksi tersebut sebanyak 350 ton sampah per hari yang kemudian dikirim ke TPST Piyungan. Sangat mustahil menemukan sampah berceceran di sepanjang jalanan Malioboro, Nol Kilometer, Tugu Jogja, atau di depan mal-mal, karena itu akan mengurangi performa Kota Yogyakarta sebagai segmen produksi. Sebagaimana lumrahnya, sesuatu yang mengambil posisi latar depan mesti tampil dengan wajah terbaik sambil menyembunyikan borok di belakangnya.

Latar depan dengan wajah terbaik itu, yang setiap sudutnya romantis, atau yang oleh Joko Pinurbo (Jokpin) secara naif dikatakan terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan, menyimpan wajah yang disembunyikan. Itulah TPST Piyungan dan krisis air yang berjalin berkelindan dengannya. Dengan demikian, dalam konteks Yogyakarta sebagai latar depan dan TPST Piyungan sebagai latar belakang, penyair seperti Joko Pinurbo adalah juru bicara segmen produksi kapitalisme yang secara maskulin mendominasi segmen reproduksi. Dia mereproduksi citra baik yang dibutuhkan Yogyakarta, tetapi tidak menyebutkan citra buruknya. Setidaknya itu yang dapat disebutkan melalui cuplikan puisinya yang terkenal itu.

TPST Piyungan bertugas menampung limbah produksi dengan tumpukan sampah yang menggunung dan siap meledak setiap saat. TPST Piyungan inilah yang mengambil posisi sebagai latar belakang,

156 PWNU DIY, "Jogja Merdeka Sampah: Momentum Lakukan Reformasi Tata Kelola Sampah," dalam *Police Brief PWNU DIY,* 2023.

segmen yang menjadi tempat bergantung bagi Kota Yogyakarta untuk melakukan kerja perawatan dengan menampung limbah produksi, mengelolanya, melakukan metabolisme agar segmen produksi tampil dengan performa terbaik setiap hari di hadapan pasar agar dapat terus menghasilkan nilai lebih. Secara bersamaan, kerja-kerja reproduksi itu dikaburkan dan bahkan diingkari dengan cara menyembunyikan, memisahkan, dan menyubordinasi.

Situasi itu memperjelas dan semakin menegaskan bahwa tanpa reproduksi sosial, aktivitas produksi tidak akan berjalan. Saat salah satu dari dua segmen tersebut, produksi dan reproduksi, mengalami krisis, kedua krisis sejatinya adalah momen saling menyusun dan berpilin. Itu menunjukkan, aspek yang sudah terpasarkan *(marketized)* dalam masyarakat kapitalis akan selalu bersisian dengan aspek yang belum terpasarkan *(non-marketized)*.

Fraser mengatakan, krisis terjadi di antaranya karena dorongan akumulasi kapital tidak lagi dapat dibendung, sehingga kerja produksi melampaui kerja reproduksi sosial. Dorongan untuk akumulasi yang tidak terbatas menciptakan ancaman terhadap kestabilan kerja reproduksi yang dibutuhkan oleh kapitalisme.[157] Kontradiksi itu tidak dapat dipisahkan: mereka dua, tetapi pada dasarnya satu (secara dialektis saling berhubungan). Begitulah yang terjadi di TPST Piyungan. Produksi ekonomi yang terjadi di Kota Yogyakarta telah melampaui kemampuan segmen reproduksi, dengan kapasitas TPST Piyungan untuk menampung limbah produksi *overload* tidak lagi mampu menampung limbah. Namun proses akumulasi nilai lebih di Kota Yogyakarta tidak mungkin dihentikan, apa pun yang terjadi, meski segmen penopangnya telah lumpuh. Karena begitulah cara kapitalisme hidup. Semakin dalam, krisis di TPST Piyungan merangsek ke dapur, ke ranah paling subtil dan paling fundamental dari reproduksi sosial,

---

157 Nancy Fraser, "Di Antara Kapital dan Reproduksi Sosial: Merah Muda Memudar", dalam https://medium.com/merah-muda-memudar/di-antara-kapital-dan-reproduksi-sosial-51bf7948bbc (diakses pada 4 Januari 2023).

yaitu krisis air yang memperdalam penderitaan warga yang tinggal di sekitar TPST Piyungan, dengan perempuan sebagai yang terdampak atau menderita paling dalam.

Seperti yang telah panjang-lebar saya ceritakan, krisis air di sekitar TPST Piyungan bukanlah fakta terberi. Itu merupakan momen sosioalami; tidak ada keterpisahan antara manusia dan nonmanusia, sekaligus momen sosiospasial yang merupakan proses ruang di bawah kapitalisme direkonfigurasi. Kedua momen itu dapat ditelusuri dari ingatan warga terhadap lingkungan, saat sebelum dibangun TPST pada 1996, air mengalir begitu jernih di sungai-sungai, anak-anak dapat mandi di sungai, ibu-ibu tanpa ragu memasak dengan air sumur, sawah-sawah cukup air. Kemudian saat TPST mulai beroperasi, kondisi alam berubah dan berimplikasi serius terhadap kualitas air. Tanah yang sebelumnya lahan hijau direkonfigurasi menjadi tempat pembuangan sampah yang menghasilkan limbah dan menciptakan krisis.

Yang Romantis Menyisakan Luka

Jargon populer Kota Yogyakarta, terutama kutipan dari puisi Jokpin, yakni "Jogja Terbuat dari Rindu, Pulang, dan Angkringan", adalah kalimat populer yang sukses menjadi variabel pemasaran Kota Yogyakarta untuk membangun imajinasi khalayak agar datang menyambangi: betapa romantis sudut-sudut Kota Yogyakarta.

Namun kenyataannya, yang romantis itu hanyalah latar depan yang memang sengaja dikampanyekan, disolek, dibuat tampak, pendek kata, "dusta". Ada yang tersembunyi di balik itu adalah TPST Piyungan yang tak lagi mampu menampung limbah, juga warga yang dicerabut hak mereka atas air bersih. Itulah fakta dari latar belakang yang sama sekali tidak romantis; yang ada hanyalah luka.

Krisis air di sekitar TPST Piyungan akan membuka mata kita pada fakta bahwa dorongan akumulasi kapital selalu beriringan dengan krisis reproduksi sosial yang sangat dalam. Setelah menguraikan bagaimana relasi ketergantungan Kota Yogyakarta sebagai segmen produksi

terhadap TPST Piyungan sebagai segmen reproduksi, pada tahap ini saya akan secara khusus membeberkan bagaimana kerja perawatan atau reproduksi sosial semakin berlipat hingga skala terkecil, yaitu komunitas dan individu (terutama perempuan) yang hidup di sekitar TPST Piyungan. Ini, argumen saya, untuk menunjukkan bahwa riset ini benar-benar dipandu oleh teori reproduksi sosial yang diilhami oleh feminisme. Jadi, pada suatu titik, ia harus menyentuh secara langsung pada subjek perempuan yang disubordinasi. Meski, bagi saya, hubungan antara Kota Yogyakarta dan TPST Piyungan telah cukup menunjukkan watak subordinat dan maskulinitasnya, rasanya kurang *kaffah* membicarakan kerja perawatan atau reproduksi sosial tanpa berterus terang menunjuk subjek perempuan sebagai pihak yang dalam hal ini makin berlipat-lipat bebannya. Dalam membahasnya, saya akan mengurai lipatan kerja reproduksi sosial dan penderitaan yang dialami para perempuan di sekitar TPST Piyungan melalui ragam variasi *caring* dalam *caring for water* agar memudahkan saya untuk menuliskannya.

Pada titik ini, saya mengajak pembaca kembali dan mengingat rangkaian cerita awal mula perjumpaan saya dengan air, ketika krisis air bermula karena keberadaan TPST yang menghasilkan limbah dan mencemari air tanah dan sumur-sumur warga. Situasi itu mengkhawatirkan. Kekhawatiran muncul karena warga memiliki pengetahuan tentang lingkungan mereka, yang terus-menerus diamati dan diteliti – *dititeni* – sehingga sampai pada kesimpulan bahwa air tercemar, berbau karat, dan mereka tidak lagi menggunakan lagi untuk kebutuhan memasak. Proses pencermatan, pengamatan, dan sikap teliti itu merupakan bagian dari kerja *caring*, lebih spesifik *watchful:* teliti, waspada, dan berhati-hati – dalam keseharian di Yogyakarta disebut *niteni*. Tingkat kewaspadaan warga di sekitar TPST Piyungan tentu saja memiliki kadar lebih intensif karena air di sekeliling mereka telah berubah menjadi ancaman bagi sawah, sungai, dan kesehatan mereka. Bagi para perempuan miskin yang tidak mampu memasang PDAM atau membeli air bersih, pencemaran air membuat hari-hari seperti berada dalam bayang-bayang bahaya. Saat menanak nasi, mereka harus

secara teliti melihat apakah warna nasi berubah atau beraroma aneh. Saat merebus air untuk minum, mereka harus berkali-kali memastikan rasa air baik-baik saja, sehingga dapat keluarga mereka konsumsi. Dan kalaupun ada hal-hal buruk, para perempuan itu paling berpotensi menjadi korban pertama dari pencemaran air.

Krisis air berarti krisis kehidupan, karena air adalah elemen paling utama sebagai sumber penghidupan. Saat air tercemar, itu berarti akan ada beban tambahan untuk kerja-kerja reproduksi sosial. Dalam hal ini, perempuan menjadi pihak paling rentan dan terdampak, karena lebih banyak bersentuhan dengan air seperti memasak, mencuci piring, memandikan anak, serta untuk menjamin kesehatan dan kebersihan area reproduksi. Pencemaran air yang terjadi di sekitar TPST Piyungan mengharuskan para perempuan menyisihkan uang agar bisa membeli air bersih untuk menjamin kerja reproduksi sosial tetap berjalan. Herni, misalnya, harus menyisihkan setidaknya antara Rp50.000 dan Rp100.000 dari berjualan angkringan untuk membayar air PDAM yang tidak juga bisa dipakai memasak karena mengandung kaporit.[158] Uang yang seharusnya dapat dia gunakan untuk kebutuhan lain, terpaksa dia gunakan untuk membayar biaya air PDAM agar dia sekeluarga dapat mandi, mencuci, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan air bersih. Sementara bagi perempuan miskin yang tidak berpenghasilan, seperti Jeni ceritakan, satu-satunya pilihan adalah tetap menggunakan air sumur yang tercemar untuk seluruh kebutuhan rumah tangga, meski mungkin kelak kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi menjadi taruhan. Bagi perempuan miskin, bentuk *caring* yang paling mungkin mereka terapkan adalah meminta air dari sumur tetangga yang "dianggap" bersih, yang berarti ia harus *ngangsu*[159] terlebih dahulu agar ember di dapur terpenuhi. Ada waktu dan tenaga lebih yang harus para perempuan miskin curahkan untuk mendapat air bersih dengan

158 Wawancara dengan Herni, Yogyakarta, 27 Desember 2023.

159 Bahasa Jawa yang berarti mengangkut.

ngangsu. Bentuk *caring* berupa solidaritas untuk membagikan air bersih kepada orang lain, saya sebut *sharing*.

Namun bayangkan jika di antara mereka sudah tidak tersedia lagi air yang dianggap bersih dan bisa dibagikan. Apa yang terjadi? Mungkin mereka akan berebut mengantre bantuan air bersih yang dibawa oleh mobil-mobil tangki pemerintah. Para perempuan berdesakan membawa jerigen sambil membawa anak, sementara para suami bekerja. Selama menunggu antrean, para perempuan itu sangat berpeluang mengalami berbagai jenis pelecehan dan kekerasan yang bisa saja dilakukan oleh sopir dan petugas tangki air atau sesama warga yang berebut air. Itu sangat mungkin terjadi.

Tidak berhenti di situ, pencemaran air juga berarti krisis kesehatan masyarakat. Banyak penyakit yang dapat ditimbulkan dari air yang tercemar. Orang-orang miskin dan terutama perempuan miskin akan menjadi subjek paling terdampak menghadapi kenyataan itu. Orang-orang miskin akan sangat sulit terhindar dari ancaman penyakit yang dibawa oleh air yang tercemar karena situasi yang tidak dapat mereka hindari. Mereka tidak lagi punya pilihan untuk tidak menggunakan air yang tercemar karena tidak mampu membeli air bersih yang sebelumnya disediakan oleh alam secara cuma-cuma. Orang-orang miskin itu juga menjadi pihak yang paling sulit pulih dari penyakit yang mereka derita karena ketimpangan finansial membuat mereka sulit mengakses fasilitas kesehatan dan memperbaiki kualitas hidup seperti berpindah ke hunian yang layak dan sehat.

Jika dikupas lebih dalam lagi, bagi perempuan, pencemaran air adalah sebentuk kekerasan dengan wajah lain. Kondisi biologis khas perempuan membuat mereka membutuhkan lebih banyak air bersih ketimbang laki-laki dalam menghadapi siklus tubuh harian, bulanan, dan tahunan. Berbeda dari laki-laki, bentuk kelamin perempuan yang cenderung terbuka harus dibasuh dengan banyak air saat kencing (siklus tubuh harian). Saat air yang digunakan tercemar, perempuan lebih rentan terkena penyakit kelamin karena air langsung masuk ke dalam

organ. Atau saat menstruasi (siklus tubuh bulanan), perempuan perlu lebih banyak air bersih untuk membersihkan kelamin agar kesehatan reproduksi terjaga. Saat air yang mereka gunakan untuk membersihkan siklus bulanan tercemar, potensi terpapar berbagai penyakit bagi perempuan sangat besar. Perempuan hamil (siklus tubuh tahunan) bukan hanya membutuhkan air bersih untuk menjamin kesehatan tubuh mereka, melainkan juga anak yang mereka kandung. Saat air yang mereka konsumsi tercemar dan mengandung zat berbahaya, berarti terjadi kekerasan yang semakin berlipat, termasuk kekerasan antargenerasi.

Bentuk *caring* selanjutnya adalah *activism*. Sikap itu terlihat dari gerakan protes dan blokade warga dalam merespons kondisi TPST yang *overload*, dan kekhawatiran mereka terhadap lingkungan, termasuk soal air. Aksi protes yang berkali-ulang itu lahir secara organik; ia muncul dari satu tongkrongan ke tongkrongan lain, demikian kata Herwin. Tongkrongan-tongkrongan itu berubah menjadi mimbar-mimbar warga untuk berdiskusi perihal kondisi air sampai terbentuk serikat seperti Banyakan Bergerak. Protes sebagian besar diikuti oleh laki-laki, meski ada juga perempuan yang turut serta. Sukardi, misalnya, aktif menghadiri berbagai pertemuan Banyakan Bergerak dan selalu hadir dalam aksi protes yang digelar oleh Banyakan Bergerak. Ia bahkan mengakui dialah yang meletakkan batu penghalang di pintu masuk TPST untuk memblokade truk-truk pembawa sampah. Saat Sukardi berangkat untuk aksi protes, berarti harus libur bekerja. Itu berarti kegiatan reproduksi sosial di dalam rumah terganggu, karena sebagai kepala keluarga Sukardi harus mengorbankan waktu kerja yang menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Agar tetap ada pemasukan dan aktivitas reproduksi sosial tidak mandek, istri Sukardi harus menggantikan berjualan angkringan seorang diri sambil melakukan kerja perawatan lain saat turut aksi protes. Apa yang Sukardi dan sang istri lakukan adalah bagian dari bentuk kerja perawatan terhadap air dengan metode *activism*. Mereka meyakini protes adalah

salah satu jalan agar TPST Piyungan ditutup, sehingga pencemaran terhadap air di sumur mereka dapat dihentikan.

Upaya *caring* berikutnya adalah kerja gotong royong memasang kanal pipa yang warga di sekitar TPST Piyungan lakukan agar air terdistribusi ke rumah-rumah. Dalam *caring for water,* itu disebut *tinkering:* mengutak-atik atau membuat inovasi untuk merespons air yang dihasilkan oleh satu sumur agar dapat mengaliri empat RT, yaitu Dusun Banyakan 2 dan Banyakan 3. Upaya itu juga bisa disebut sebagai bentuk *adaptive:* mengubah atau mengolah gaya pengelolaan air secara adaptif untuk memastikan air tetap mengalir secara baik (dari segi kualitas dan kuantitas). Kanal pipa itu tentu saja membutuhkan perawatan ekstra karena ia bekerja setiap hari mengaliri air untuk empat RT ketimbang instalasi air skala rumah tangga. Begitu pun dengan air sumur yang diambil, pada masa tertentu akan mengalami krisis karena telah mencapai masa limitasi. Sementara untuk keperluan pengairan sawah, tidak ada solusi dan jalan keluar. Warga tetap mengandalkan air hujan dan air sungai yang sering kali mencemari tanaman dan membuat warga gagal panen.

Penderitaan belum usai. Setelah TPST Piyungan resmi ditutup sepenuhnya pada April 2024, Pemerintah Kota Yogyakarta malah akan menggunakan sebagian lahan di TPST Piyungan untuk membangun fasilitias pengolahan sampah dari Kota Yogyakarta. Alih-alih menangani persoalan, itu justru menjadi babak baru penderitaan warga dan kerusakan air di sekitar TPST Piyungan. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah itu telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah DIY dan dorongan penuh dari Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. "Yang penting kami akan memperluas [TPST] Piyungan, karena yang ada ini sudah penuh dan tanah juga sudah siap," ucap Sultan, sebagaimana saya kutip dari *Harian Jogja*.[160]

160 Galih Eko Kurniawan, "Dicari Warga TPST Piyungan, Begini Respons Sultan," dalam *Harian Jogja*, 2022, atau https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/05/10/510/1100959/dicari-warga-tpst-piyungan-begini-respons-

Itu membuktikan bahwa protes dan keluhan warga terhadap pemerintah sama sekali diabaikan dan tidak dihiraukan. Lagipula, sejak awal berdiri TPST Piyungan pada 1996, tampak tidak banyak dilakukan pengkajian mengenai dampak dan risiko yang akan ditimbulkan. Hal tersebut terbukti oleh adanya program pemasangan pipa yang baru dikerjakan menjelang akhir 2023 setelah lindi mencemari air dan merusak sawah warga. Itu tidak berbeda dari talud. Pembangunan talud juga dilakukan pada 2023 ketika air lindi telah sempurna meresap ke dalam air tanah selama 30 tahun dan menjadikan air sumur berubah warna, rasa, dan aroma. Inovasi yang nyaris tidak berguna.

Penutup

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa Kota Yogyakarta sangat bergantung terhadap TPST Piyungan untuk terus-menerus melakukan metabolisme; menampung dan mengelola limbah, menyediakan udara yang lebih bersih dan segar tanpa aroma sampah, air yang tidak tercemar dan tata kota yang rapi dan enak dipandang tanpa limbah. Komponen-komponen penting bagi berjalannya skema kapitalisme yang sempurna di Kota Yogyakarta.

Relasi kebergantungan itu mencapai momen krisis saat TPST Piyungan sebagai segmen reproduksi sosial tak lagi mampu menerima dorongan akumulasi yang berlebih dari Kota Yogyakarta (produksi). Krisis terjadi dua arah; timbunan sampah liar di Kota Yogyakarta pada segmen produksi dan kondisi *overload* di TPST Piyungan yang berimplikasi terhadap pencemaran air hingga beban kerja berlipat pada komunitas dan perempuan di sekitar TPST Piyungan pada segmen reproduksi sosial. Kedua krisis itu menjadi momen yang saling menyusun, berkait, dan tak terpisahkan.

Beban yang berlipat terhadap kerja perawatan air yang dialami warga dan perempuan di sekitar TPST Piyungan sangat tampak melalui ragam

sultan-hb-x (diakses pada 31 Mei 2024).

bentuk *caring for water* ketika proses pengamatan *(watchful)*, proses mengotak-atik *(tinkering),* terjadi lebih intensif untuk memastikan ketersediaan air dalam memenuhi kebutuhan reproduski sosial. Proses beradaptasi *(adaptive)* yang dilakukan warga sekitar TPST Piyungan tentu saja lebih berat, karena mereka dipaksa beradaptasi dengan air tercemar yang tentu saja membahayakan. Melalui *caring for water,* saya juga melihat, bagaimana pengetahuan warga di sekitar TPST Piyungan terhadap air di sekitarnya membentuk kesadaran kolektif dalam memperjuangkan hajat hidup untuk mendapat lingkungan dan air yang bersih, antara lain melalui aksi protes penutupan TPST *(activism)*. Kesadaran kolektif itu juga yang, dalam pengamatan saya, membentuk laku berbagi air bersih sesama warga yang saya sebut *sharing,* salah satu bentuk *caring* yang tidak saya temui dalam *caring for water.*

Dalam pemaparan di atas, saya memaknai kerja reproduksi ekologi yang dilakukan TPST Piyungan sebagai bagian dari kerja reproduksi sosial yang lebih luas, karena keduanya, sosial (manusia) dan alam (nonmanusia), tidak bisa berdiri sendiri dalam menciptakan nilai lebih bagi kapitalisme. Dalam hal ini, manusia yang hidup di sekitar TPST Piyungan dan alam yang direkonfigurasi menjadi TPST Piyungan sama-sama menjadi agen yang melakukan kerja-kerja reproduksi sosial atau penyusun latar belakang.

V

Dinamika Ekologi Politis di Rawa Pening:

Tinjauan Kritis Upaya Perlawanan Warga

Muhamad Nabil Gunawan

Sari: Degradasi lingkungan di Danau Rawa Pening sudah terjadi sejak lama. Pemerintah menjawab permasalahan tersebut dengan menjalankan proyek revitalisasi yang justru merugikan warga. Lahan-lahan produktif warga ditenggelamkan dan warga tidak bisa menggarap sawah selama tiga tahun. Selain itu, pemerintah juga mengklaim tanah hak milik warga dan memasukkannya ke dalam wilayah sempadan danau. Tulisan ini membedah dinamika ekologi politis di tengah proyek revitalisasi yang sedang berjalan, dengan menggunakan metode autoetnografi. Warga yang tereksklusi oleh penutupan akses terhadap tanah hak milik mereka bereaksi dengan melawan pemerintah. Upaya-upaya perlawanan sehari-hari dan terbuka warga lakukan demi menantang hegemoni kelas penguasa.

Kata-kata kunci: Rawa Pening, revitalisasi, sawah, sempadan.

Pendahuluan

Ada beberapa momen personal yang mengarahkan penulis untuk mengangkat Danau Rawa Pening sebagai objek tulisan dalam riset kali

ini. Penulis adalah salah satu peserta dalam sebuah kegiatan "Diuber Segoro", sebuah upaya dari jaringan pegiat lingkungan[161] di Semarang untuk mendistribusikan wacana krisis iklim pesisir, terkhusus di Pesisir Sayung Demak yang semakin tenggelam di tengah megaproyek pemerintah. Acara yang berlangsung sekitar seminggu itu dimulai dengan diskusi pengantar bersama kawan-kawan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang bersama jaringan Semarang, dan dilanjutkan pada 4 Juni 2023 dengan mengadakan investigasi singkat, dan berbagai temuan dimuat dalam bentuk tulisan, foto, video, dan puisi yang dikumpulkan menjadi sebuah *zine* kecil. Temuan-temuan tersebut menggambarkan satu contoh kondisi krisis sosial ekologis yang terjadi di daerah pesisir pantai utara (pantura) Jawa Tengah. Ekspresi peserta yang diungkapkan dalam bentuk karya seni atau tulisan kritis menjadi salah satu bentuk upaya distribusi wacana kritis lingkungan yang semakin ditinggalkan dan diharapkan ekspresi peserta itu menjadi gerakan kecil yang dapat memberi banyak pemahaman dan perubahan.

Tak lama berselang, 18 Agustus 2023, saya menghadiri Festival Keadilan di Santren Delik Semarang yang diadakan oleh Social Movement Institute (SMI) yang mengangkat isu lingkungan sebagai salah satu topik diskusi. Hadir Novel Baswedan, mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai salah satu pembicara. Novel Baswedan banyak memaparkan bagaimana gerakan oposisi dibangun, berdasar refleksinya bekerja di KPK menangani banyak kasus korupsi, sebelum KPK dilemahkan melalui revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Juga hadir beberapa warga pesisir Rawa Pening, yang antara lain

---

161 Kegiatan ini diinisiasi Mahasiswa Bergerak (MB), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes), Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Semarang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BP2M) Unnes, PMII Rayon Zamroni Unnes, dan Aksi Kamisan Semarang.

adalah Ramlan. Dia berdiskusi bersama Novel berkait dengan tanah kelahirannya yang terancam diklaim pemerintah melalui Kodam IV/ Diponegoro. Saya baru mengetahui Ramlan turut hadir dalam acara diskusi itu tiga bulan setelah peristiwa itu, ketika saya mendatangi rumahnya di Desa Tuntang.

Saya makin tertarik kasus Rawa Pening ketika pada 10 September 2023 Novel Baswedan menayangkan di kanal *Youtube* sebuah liputan berjudul "Rawa Pening - Tanah Warga, Dipatok Penguasa"[162]. Dalam video itu hadir Ramlan, seorang warga yang juga hadir di pergelaran Festival Keadilan, serta Kasiyan dan Bogi Subasti. Ketiga warga yang diwawancarai Novel Baswedan itu memberikan penjelasan panjang tentang apa yang sebenarnya terjadi di Rawa Pening, berkait dengan kisruh pemasangan patok sempadan danau di atas tanah hak milik warga. Keterangan yang bisa saya dapat dari liputan Novel itu cukup beragam, seperti awal mula warga menuntut pemerintah memperbaiki ekosistem danau yang semakin hari kian mendangkal dan dipenuhi eceng gondok dan upaya warga merevitalisasi danau sebagai tanah kelahiran dan sumber utama mata pencaharian mereka.

Kasian menuturkan, "Proyek revitalisasi ini awalnya ditujukan untuk memperbaiki ekosistem danau yang semakin parah." Namun, kemudian, malah "mencaplok tanah hak milik warga". Keluhan warga berkait dengan pendangkalan danau sudah mereka rasakan belasan tahun lalu. Melansir dari kanal berita *Kompas* tercatat, warga sudah merasakan pengurangan daya tampung Danau Rawa Pening pada 2009.[163] Sugiyono, seorang pengawas senior Sub-Unit Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jelok dan Timo, dalam keterangan saat wawancara

162 Novel Baswedan, "Rawa Pening -Tanah Warga Dipatok Penguasa |Ruang Terang", dalam *Youtube,* 2023, atau https://www.youtube.com/watch?v=b_qcOWKNlzA (diakses pada 30 Desember 2023).

163 Anonim, "Produksi PLTA Jelok Turun Terus" dalam *Regional. Kompas.com*, 2009, atau https://regional.kompas.com/read/2009/10/02/17351958/Produksi.PLTA.Jelok.Terus.Turun#google_vignette (diakses pada 10 Mei 2024).

mengatakan, “Saat ini kami hanya mengoperasikan satu pembangkit dari empat pembangkit yang ada di Jelok dan satu dari tiga pembangkit yang ada di Timo. Ini karena pasokan air dari Waduk Rawa Pening juga turun drastis selama kemarau.” Penurunan debit air juga terjadi di Sungai Tuntang yang menjadi satu-satunya *output* dari danau dan sekaligus masuk dalam instalasi PLTA Jelok, Tuntang.

Atas dasar sedimentasi danau yang semakin parah dari tahun ke tahun, pemerintah mencanangkan proyek revitalisasi Danau Rawa Pening sebagai upaya mengatasi permasalahan ekologis itu. Yang terjadi, ketika proyek tersebut dilangsungkan malah lebih banyak merugikan warga. Ada dua kasus yang, menurut saya, sangat merugikan warga dan perlu menjadi tuntutan warga ke depan kepada pemerintah. Pertama, proyek revitalisasi tersebut menyebabkan ketinggian elevasi danau dinaikkan dari sebelumnya dalam kisaran 462,3 meter di atas permukaan laut (MDPL) menjadi 463,32 MDPL, atau naik sekitar 1 meter. Hal itu berdampak pada terendamnya tanah-tanah produktif warga, yaitu sawah. Warga yang dalam setahun bisa memanen gabah sampai dua kali, setelah sawah terendam jadi tidak bisa melakukan apa-apa di tanah tersebut dan itu sangat merugikan warga. Total tanah persawahan warga yang terendam adalah 200 hektare. Melalui Forum Petani Rawa Pening Bersatu (FPRWB) dan Persatuan Petani Nelayan Rawa Pening (Perpenera), Juli 2022, warga melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah (DPRD Jateng) perihal masalah tersebut. Audiensi itu mempertemukan mereka dengan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah yang berjanji akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk memberikan kompensasi kepada warga terdampak yang tidak bisa menggarap sawah sampai lebih dari tiga tahun.[164]

Kedua, proyek revitalisasi itu juga memperluas kawasan Danau Rawa Pening. Kawasan yang diperluas salah satunya adalah tanah sempadan

164 Jazilatul Khofsoh, “3 Tahun Lahan Pertanian Tenggelam, Petani Rawa Pening

danau. Luas wilayah Rawa Pening, menurut catatan lama warga dalam buku *kretek*[165] desa, adalah 1.516 hektare. Menurut Sekretaris Perpenera, Joko Susanto,[166] itu berbeda dari luasan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 365 tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Rawa Pening, seluas 2.387 hektare. Konsekuensinya, luasan yang diakui oleh keputusan menteri itu tumpang-tindih dengan tanah hak milik warga yang sudah bersertifikat. Karena itu, muncul polemik setelah penetapan keputusan menteri itu. Ramlan berasumsi proyek yang dibangun bukan hanya revitalisasi danau, melainkan ada wacana perluasan danau yang tidak warga ketahui. Joko berpikir pemerintah memiliki ambisi menambah luas Rawa Pening 991 hektar, dengan mengorbankan area permukiman dan lahan produktif warga yang sebagian sudah bersertifikat hak milik.

Dari tayangan video *Youtube* Novel Baswedan muncul rasa ingin tahu yang cukup mendalam yang membawa saya untuk menelusuri Rawa Pening. Dengan berbekal informasi lokasi tayangan video *Youtube* tersebut diambil, saya mendatangi kantor Desa Tuntang pada 17 Oktober 2023, tempat Kasiyan dan Ramlan tinggal. Untuk kali pertama saya bertemu dan berbincang dengan Ramlan, yang ternyata kepala Dusun Klurahan yang telah belasan tahun menjabat. Ditemani beliau, saya mendapatkan banyak informasi dari obrolan bersama beberapa pejabat di kantor Desa Tuntang tentang proyek revitalisasi danau yang dimulai pada pertengahan 2021.

Dalam obrolan itu juga saya menanyakan siapa saja warga atau tokoh masyarakat yang bisa saya temui untuk menggali informasi lebih lanjut berkait dengan permasalahan di Rawa Pening yang kelak

---

Wadul DPRD Jateng", dalam *Lingkarjateng.id*, 2022, atau https://lingkarjateng.id/news/3-tahun-lahan-pertanian-tenggelam-petani-rawa-pening-wadul-dprd-jateng/ (diakses pada 30 desember 2023).

165 Buku *kretek* merupakan buku pencatatan pertanahan yang ditulis sekitar tahun 1955 dan menggunakan tinta hitam di atas kain.

166 Wawancara dengan Joko Susanto, Ambawara, 21 Oktober 2023.

akan mempertemukan saya dengan Joko Susanto, salah seorang warga yang cukup vokal dalam memperjuangkan isu ini. Joko Susanto adalah sekretaris Perpenera, paguyuban warga yang terbentuk pada 2022 atas dasar keresahan mereka terhadap aksi pematokan sepihak oleh Kodam V/Diponegoro yang bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana. Pada awal pertemuan saya dan Joko, saya cukup terkesan oleh kemampuan komunikasi beliau. Dia menerangkan hanya lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Namun dia menyampaikan informasi dan menjelaskan permasalahan Rawa Pening, bahkan sejarah penguasaan lahan, secara terstruktur dan detail. Sementara saya berpikir, tidak semua lulusan SLTP bisa dengan gamblang menginformasikan permasalahan secara terstruktur.

Selain beberapa warga yang telah saya sebutkan, ada banyak sumber media lokal dan nasional yang sangat membantu saya dalam menentukan titik awal penelitian ini. Dalam perjalanan saya bertemu Dhika dan Abdul Kholik, staf advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, yang juga sedang mendampingi warga Rawa Pening dalam penyelesaian permasalahan patok sempadan. Diskusi-diskusi kecil yang sering saya lakukan bersama kedua kawan dari LBH itu cukup membuka pemahaman saya.

Dasar Teori

Saya menyadari permasalahan di Rawa Pening cukup kompleks jika hanya dipahami dari cerita-cerita warga dan analisis pemberitaan media. Butuh telaah sangat panjang untuk mengetahui dinamika yang terjadi. Oleh karena itu, saya mencoba membedah kasus ini dengan kacamata ekologi politik untuk melihat lebih jauh dan memahami isu sosial ekologis ini.

Dalam konteks tulisan ini, saya memakai ekologi politik untuk mempelajari siapa yang memiliki kekuasaan (formal atau nonformal) dalam menggunakan air yang tersedia di danau atau yang berada di permukaan tanah dan di dalam tanah. Ekologi politik mempelajari

bagaimana distribusi kekuasaan dalam penentuan penggunaan sumber daya alam. Ia bergerak menyelisik bagaimana biaya dan manfaat yang berkait dengan perubahan lingkungan didistribusikan secara tidak merata di antara masyarakat dalam ekosistem tersebut.[167] Lebih lanjut, kekuasaan dibagi menjadi dua tingkatan. Pertama, kekuasaan yang memaksakan sebuah keputusan dengan segala cara. Cara yang paling umum adalah dengan tindakan represif yang tidak adil dan tidak merepresentasikan kehendak publik. Kedua, kekuasaan prosedural yang memaksakan sebuah keputusan politis melalui prosedur yang melegitimasi keputusan tersebut.

Batubara (2017) menawarkan sebuah pendekatan akses, eksklusi, dan resistensi dalam memahami dinamika ekologi politis air.[168] Mengutip Ribot dan Peluso (2009)[169], Batubara (2017) menyebutkan akses sebagai "kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai hal termasuk objek material, orang, institusi, dan simbol". Dalam kerangka berpikir ini, akses sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang ada. Foucault menyoroti relasi kuasa sebagai sebuah konsep yang lebih kompleks dari sekadar entitas yang terpusat pada satu kelompok atau individu, tetapi lebih merupakan jaringan relasi dan praktik-praktik sosial yang termanifestasi dalam hubungan antara manusia, lingkungan, dan sumber daya alam.[170]

Melalui pendekatan akses, eksklusi, dan resistensi, saya membedah dinamika masyarakat Rawa Pening atas keberadaan proyek revitalisasi

---

167 Rodríguez-Labajos, Beatriz, dan Joan Martínez-Alie, "Political Ecology of Water Conflict", dalam *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*, Vol. 2, Issue 5, hal 537-558 atau https://doi.org/10.1002/wat2.1092 (diakses pada 30 Desember 2023).

168 Batubara, Bosman, "Ekologi Politis Air: Akses, Eksklusi dan Resistensi", dalam *Wacana Jurnal Transformasi Sosial Nomor* 35, hal 3-23, 2017.

169 Ribot, JC, & Peluso, NL, "A Theory of Access", dalam *Rural Sociology*, No *68*, 153-181. Atau https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x (diakses pada 30 Desember 2023).

170 Foucault, M, *History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*, (Pantheon Books,

danau. Ketimpangan akses di Rawa Pening dapat diamati sebagai sebuah upaya perebutan ruang atau daerah sempadan danau antara warga dan pemerintah. Pemerintah mencoba merebut ruang tertentu melalui upaya legal dengan cara mengeluarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 365/KPTS/M/2020. Keputusan Menteri itu membuat klaim pemerintah terhadap wilayah danau semakin luas dan itu tumpang-tindih dengan tanah hak milik warga. Status kepemilikan tanah yang berada di daerah sempadan menjadi bias. Kekuatan hukum sertipikat hak milik dengan dokumen yang mengklaim kepemilikan warga atas tanah didebat atau digoyang oleh Keputusan Menteri PUPR. Ada upaya memperoleh akses lebih oleh pemerintah pusat.

Perlawanan (resistansi*)* warga dimaknai sebagai bentuk protes terhadap eksklusi mereka dari lahan-lahan pertanian produktif oleh batas sempadan danau. Melalui pendekatan hegemoni Gramsci dan perlawanan sehari-hari yang digagas Scott, saya akan mendiskusikan dinamika perlawanan warga di Rawa Pening. Gramsci menganggap kelas penguasa akan selalu memanipulasi sistem sosial dan moral masyarakat, sehingga kapitalisme menjadi cara pandang yang diterima. Hegemoni bekerja dalam ranah ideologis masyarakat, sehingga perlawanan dipahami sebagai sebuah kontrahegemoni yang mencoba menyingkap hegemoni kelas penguasa.[171] Menurut Scott, kelas penguasa tidak pernah sepenuhnya mengambil kontrol masyarakat, selalu ada perlawanan.[172] Bagi dia, ada dua macam perlawanan. Pertama, perlawanan tertutup yang

---

1987). Dikutip dari Batubara B, "Ekologi Politis Air: Akses, Eksklusi, dan Resistensi", dalam *Wacana Jurnal Transformasi Sosial* , Nomor 53, 2017, hal. 3-23.

171 Bates, Thomas R, "Gramsci and the Theory of Hegemony", dalam *Journal of the History of Ideas* No. 36 Issue 2, hal. 351-366 atau https://doi.org/10.2307/2708933 (diakses pada 30 Desember 2023).

172 Scott, James C, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts* (Yale University Press, 1990), dikutip dari Batubara, B, "Ekologi Politis Air: Akses, Eksklusi dan Resistensi", dalam *Wacana Jurnal Transformasi Sosial Nomor* 35, hal. 3-23, 2017.

cenderung terselubung dan tidak tampak di permukaan. Contohnya adalah ketidaktaatan masyarakat terhadap kelas penguasa dan mitos warga. Scott menyebutnya dengan perlawanan sehari-hari. Kedua, perlawanan terbuka yang sangat beragam, seperti demonstrasi, petisi, dan audiensi dengan kelas penguasa.

Metodologi Penelitian

Tulisan ini menggunakan autoetnografi sebagai sebuah metode penelitian. Autoetnografi (AE) merupakan sebuah cara pandang penelitian manakala pengalaman pribadi penulis (auto) masuk dalam tulisan dan analisis untuk lebih memahami pengalaman budaya (etno).[173] Autoetnografi adalah metode penelitian yang memadukan pengalaman pribadi dengan analisis budaya. Istilah itu terdiri atas tiga komponen. Pertama, auto yang mengacu pada diri sendiri sebagai peneliti atau penulis. Kedua, etno yang memiliki arti budaya dan konteks sosial yang menjadi fokus penelitian. Ketiga, grafi yang mengacu pada proses menulis dan merekam pengalaman dalam bentuk narasi. Peneliti autoetnografi menyelidiki pengalaman pribadi individu dan mengaitkannya dengan komponen budaya yang lebih luas. Mereka memiliki dua perspektif: internal (pikiran, perasaan, dan pengalaman) dan eksternal (hubungan, komunitas, dan budaya). Tujuan utamanya membawa pembaca melalui proses introspeksi, sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengalaman individu berhubungan dengan konteks sosial yang lebih besar.[174] AE bersifat reflektif dengan menjadikan penelitinya sebagai subjek sekaligus objek penelitian. Pengalaman pribadi peneliti yang sangat bersifat subjektif dianalisis

173 Ellis, Carolyn, Tony E Adams, dan Arthur P Bochner, "Autoethnography: An Overview", dalam *Historical Social Research/Historische Sozialforschung*, 2011, hal. 273-290 atau http://www.jstor.org/stable/23032294 (diakses pada 30 Desember 2023).

174 Denzin, Norman K, *Interpretive Ethnography: Ethnographic Practices for the 21st Century* (London: Sage Publications, 1997).

dengan realita etnografi dengan konteks kebudayaan yang ada.[175] Dengan demikian, autoetnografi memungkinkan peneliti mengeksplorasi dan menggambarkan pengalaman pribadi dengan cara lebih mendalam dan kontekstual.

Pengalaman saya selama berada di Rawa Pening dan interaksi saya dengan masyarakat di Desa Asinan dan Tuntang, akan saya tulis secara terperinci menggunakan metode autoetnografi, dalam arti analisis yang akan saya berikan dalam memandang dinamika ekologi politis di Rawa Pening akan berdasar pengalaman pribadi saya dalam memandang budaya (etno) di masyarakat. Pertemuan pertama saya dengan Ramlan pada Festival Keadilan di Semarang menjadi titik berangkat saya untuk mengeksplorasi Rawa Pening untuk mengetahui dinamika ekologi politis di dalamnya. Selanjutnya, melalui telaah media pemberitaan lokal dan nasional, membaca secara keseluruhan kebijakan pemerintah berkait dengan proyek Revitalisasi Rawa Pening, wawancara dengan beberapa warga terdampak, serta diskusi dengan kedua kawan dari LBH Semarang, saya mendapatkan temuan-temuan baru yang sebelumnya belum saya dapatkan. Dari sekian banyak pengalaman itulah saya mendapatkan bahan untuk tulisan ini.

Dimensi Fisik Rawa Pening: Dari Mangkuk Menjadi Piring

Rawa Pening dalam kenyataan fisik di lapangan adalah sebuah genangan air seluas 1.850,10 hektare.[176] Namun lebih jauh dari itu keberadaannya merupakan suatu hal yang lebih kompleks, yang melibatkan aktivitas sosial yang di dalamnya ada masyarakat secara

175 Lapadat, Judith C, "Ethics in Autoethnography and Collaborative Autoethnography", dalam *Qualitative inquiry* Vol. 23, Issue 8, 2017, hal. 589-603 atau https://doi.org/10.1177/1077800417704462 (diakses pada 30 Desember 2023).

176 Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, "Penetapan Batas Badan dan Sempadan Danau Rawa Pening", 2018 atau https://www.scribd.com/document/658598195/4-Paparan-Rawa-Pening-Lombok-25092019 (diakses pada 30 Desember 2023).

menyeluruh sebagai aktor sosial politik. Masyarakat disebut sebagai aktor sosial karena hubungan antara manusia dengan alam yang berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain. Ekologi politis tidak melihat manusia sebagai sebuah entitas yang terpisah dari alam, tetapi sebaliknya ia memosisikan manusia menjadi sebuah kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga melahirkan kajian-kajian tentang relasi manusia dengan alam.[177] Ekologi politis mencoba mendekonstruksi proses-proses yang dianggap alami atau yang dikonstruksikan sebagai sebuah mitos alam ke dalam proses sosial alami (*socio-nature*) yang mengindikasikan perubahan alam yang bersamaan dengan perubahan sosial itu.

Joko Susanto menuturkan, "Dulunya kan memang ini daratan semua, Mas, dan bisa muncul air dari dalam tanah ya karena Baru Klinting itu."[178] Sampai saat ini warga masih memercayai sebuah legenda bahwa Rawa Pening terbentuk dari sebuah lubang kecil tempat Baru Klinting mencabut lidi yang sebelumnya ia tancapkan. Menurut catatan Ramlan[179], yang tercatat pada buku *kretek* Desa Tuntang, Rawa Pening, sebenarnya adalah rawa dalam pengertian seutuhnya; sebuah genangan air saja yang tidak terlalu besar. Itu sesuai dengan catatan yang dimuat dalam laporan LBH Semarang, *Buku Hitam Pekat: Laporan Kolaboratif LBH Semarang Bersama Media Jawa Tengah,* yang menyebutkan catatan Pieter Bleeker, seorang dokter dan ahli ikan Belanda dalam artikel *De Vallei van Ambarawa en de vesting willem I.* Pieter Bleeker menulis bahwa luasan Rawa Pening pada 1847 adalah 392 hektare. Proyek perluasan rawa dilakukan tahun 1900-an oleh Belanda demi mengairi PLTA Jelok yang berlokasi di Tuntang. Rawa Pening yang sekarang seluas hampir tujuh kali lipat dari yang dicatat Pieter Bleeker pada 1847.[180]

177 Batubara B, "Ekologi Politis Air: Akses, Eksklusi, dan Resistensi", dalam *Wacana Jurnal Transformasi Sosial* , Nomor 53, 2017, hal. 3-23.

178 Wawancara Joko Susanto, Ambarawa, 30 Maret 2024.

179 Wawancara Ramlan, Tuntang, 5 November 2023.

180 Aninda Putri K, Aris Mulyawan, Baihaqi Annizar, Heri C Santoso, Iwan Arifianto, Jamal Abdun Nashr, M Dafi Yusuf, Mariana Ricky PD, Praditya Wibisono, Ulil

Hal tersebut menjelaskan, ada upaya perluasan danau karena kebutuhan Belanda akan pasokan air untuk PLTA Jelok. Relasi kebutuhan manusia dan alam atau hubungan manusia dan alam itu sebagai sebuah kesatuan ekologis bisa dijelaskan dengan menggunakan pendekatan ekologi politis. Rawa Pening tidaklah terbentuk karena pancaran air yang timbul dari lubang kecil bekas tancapan lidi dari Baru Klinting, tetapi bisa tercipta karena ada upaya dari pemerintah Belanda untuk memperluasnya karena kebutuhan atas pasokan air untuk PLTA Jelok Tuntang. Relasi kebutuhan manusia dengan alam pada akhirnya menciptakan sebuah ekosistem danau itu.

Rawa Pening merupakan danau buatan yang terletak di empat kecamatan sekaligus mencakup Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru. Ada 14 sungai yang menjadi *input* danau ini, dan hanya ada satu sungai saja yang menjadi *output*, yaitu Sungai Tuntang yang berada di bagian timurlaut dan mengalir sampai Laut Jawa melewati Kabupaten Grobogan dan Demak.[181] Rawa Pening sangat berkontribusi terhadap ekosistem di Jawa Tengah, terutama sebagai sarana irigasi warga dan distribusi air untuk kawasan-kawasan yang dilalui oleh Sungai Tuntang mencakup Kabupaten Grobogan dan Demak. Kawasan sawah yang diairi oleh aliran Sungai Tuntang tercatat seluas 39.277 hektare mengingat Rawa Pening juga menjadi sarana irigasi tiga kabupaten sekaligus, yakni Grobogan, Semarang, dan Demak.[182]

Beberapa tahun belakangan, Rawa Pening ada di ambang kritis ketika fungsinya sebagai wadah tadah air yang menghidupi banyak warga

---

Albab A, "Hitam Pekat Hidup Warga di Jawa Tengah: Laporan Kolaboratif LBH Semarang Bersama Media Jawa Tengah" (YLBHI, 2023).

181 Seftyono, Cahyo, "Rawa Pening dalam Perspektif Politik Lingkungan: Sebuah Kajian Awal", dalam *Indonesian Journal of Conservation* No. 3, Issue 1, 2014 atau https://doi.org/10.15294/ijc.v3i1.3084 (diakses pada 21 November 2023).

182 Mujiburohman, Dian Aries, dan Dwi Wulan Titik Andari, "Revitalization of Rawa Pening Lake, Indonesia", dalam *Environment Conservation Journal*, No. 24 Issue 2, hal. 83-90 atau https://doi.org/10.36953/ECJ.14112421 (diakses pada 30 Mei 2024).

masyarakat makin lama menurun dengan keberadaan lajur sedimentasi danau yang setiap tahun makin naik. Laju sedimentasi di danau ini pada 1993 sebesar 133,751 m^3/tahun, pada 2004 sebesar 149,222 m^3/tahun.[183] Melalui sebuah laporan pada Harian *Kompas*, dengan laju sedimentasi sebesar itu, Rawa Pening bahkan diprediksi akan rata dengan dan oleh tanah pada 2021.[184]

Pertumbuhan eceng gondok yang tak terkendali juga menjadi masalah yang cukup serius. Laju pertumbuhan eceng gondok di Rawa Pening berkisar antara 6,40% dan 7,26%/hari. Angka itu terhitung berada di atas batas normal yang dapat memicu pendangkalan danau karena sistem perakaran eceng gondok yang memungkinkan terjadi perangkap sedimen yang tinggi.[185] Hasil pengukuran sedimentasi dan kualitas air Danau Rawa Pening yang dilakukan pada 2015 menunjukkan danau mengalami pendangkalan dan penurunan luasan efektifnya menjadi 1.850 hektare dari yang sebelumnya 2.670 hektare dengan volume tampungan 48,15 juta m^3 (elevasi +463). Permukaan danau yang ditutupi eceng gondok kurang-lebar 755 hektare atau sekitar 47,7% dari total luas permukaan, sedangkan laju sedimentasi 1,77 milimeter/hektare/tahun.[186]

Dampak dari degradasi danau ini sangat dirasakan oleh warga. Joko menjadi salah satu warga yang sangat dirugikan karena hasil

---

183 Ibid.

184 Amanda Putri Nugrahanti, "Rencana Penyelamatan Danau Rawa Pening Belum Jelas", dalam *Kompas.Com*. atau https://travel.kompas.com/read/2012/05/21/2228206/~Regional~Jawa (diakes pada 30 Desember 2023).

185 Prasetyo, S, Anggoro, S, dan Soeprobowati, TR, "Penurunan Kepadatan Eceng Gondok (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) di Danau Rawapening dengan Memanfaatkannya sebagai Bahan Dasar Kompos", dalam *Bioma: Berkala Ilmiah Biologi*, Volume 23, Issue 1, hal. 57-62 atau https://doi.org/10.14710/bioma.23.1.57-62 (diakses pada 30 Desember 2023).

186 Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, *Studi Pengukuran, Sedimentasi dan Kualitas Air Waduk Rawa Pening*, 2015, atau https://www.scribd.com/document/658598195/4-Paparan-Rawa-Pening-Lombok-25092019 (diakses

tangkapan ikannya sekarang biasanya hanya 2 kilogram sekali jalan. Itu sudah berbeda jauh. "Dulu itu bisa sampai 7 kilogram, Mas, sekali jalan," katanya. Dia menjelaskan, "Pokoknya sekarang Rawa Pening *udah* jadi 'piring', Mas, dari sebelumnya 'mangkuk'." Frasa mangkuk menjadi piring sangat menggambarkan keadaan ekologis danau secara presisi saat ini. Dahulu berkedalaman bisa sampai 15 meter, sekarang paling dalam hanya 5 meter.[187] Kondisi danau yang semakin memprihatinkan itulah yang kelak akan menjadi alasan utama pelaksanaan proyek revitalisasi danau dan masuknya Rawa Pening sebagai danau prioritas nasional.

Dimensi Sosial Rawa Pening: Petani, Nelayan, dan Energi/Air

Dari sekian banyak masyarakat di sekitar Rawa Pening yang memanfaatkan danau untuk kebutuhan hidupnya, saya akan membagi mereka menjadi tiga kelompok utama. Pertama, petani. Mereka memanfaatkan lahan pertanian kurang-lebih 822 hektare yang berada persis di sekitar danau.[188] Kenyataannya, tanah garapan 822 hektare itu beberapa tidak dimiliki warga. Ada sebagian warga menggarap tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dibiarkan begitu saja oleh pihak pemerintah. Tidak ada sistem bagi hasil dalam skema penggarapan lahan tersebut. Jika kita membagi tanah di sekitar Rawa Pening menurut kepemilikan tanah itu maka ada dua jenis, yaitu tanah hak milik warga dan tanah provinsi.

Tanah provinsi adalah tanah yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah sepenuhnya. Tanah provinsi memiliki akar historis dari proyek perluasan danau pada zaman pemerintahan Belanda ketika tanah-tanah warga yang masuk dalam perluasan danau dibeli oleh pemerintah

---

pada 30 Desember 2023).

187 Wawancara Joko, Ambarawa, 30 Maret 2024.

188 Deden Dani Saleh, Slamet Muryono, dan M Nazir Salim, "Dari Mangkuk Menjadi Piring :Studi Tata Kuasa Sumber Daya Agraria di Sekitar Danau Rawa Pening", dalam *Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Hasil Penelitian Strategis STPN) 2013* (Yogyakarta: PPPM-STPN, 2013), hal. 81-131.

kolonial Belanda dan selanjutnya ditenggelamkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanah tersebut berpindah kepemilikan kepada Provinsi Jawa Tengah. Kenyataan, warga masih menggarap tanah-tanah nenek moyang mereka pada musim kemarau. Tidak pernah ada sengketa dalam penggarapan lahan pasang surut[189] tersebut, karena warga tahu bidang-bidang tanah mana yang menjadi areal penggarapannya, meskipun tanah-tanah tersebut sebagian besar belum bersertipikat hak milik. Praktik tersebut dibiarkan oleh Pemerintah Provinsi karena sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Muncul sebuah peraturan tak tertulis bagi warga bahwa apabila tanah yang sedang diolah tersebut tergenang air karena kondisi danau mengharuskan demikian, warga tidak boleh atau tidak dapat menuntut siapa pun atas kerugian yang diderita karena notabene itu bukanlah tanah hak milik mereka.[190]

Selanjutnya adalah tanah hak milik warga, yaitu tanah yang dikuasai dan dimiliki warga secara seutuhnya. Warga memiliki sertifikat resmi dan membayar pajak secara rutin setiap tahun. Berbeda dari tanah provinsi, tanah hak milik tidak pernah dibeli oleh pemerintah kolonial Belanda, dan sejak dahulu sudah dikuasai warga secara turun-temurun. Jenis tanah itulah yang juga akan ditenggelamkan pada proyek revitalisasi Danau Rawa Pening kelak. Warga dirugikan atas tenggelamnya tanah hak milik mereka, sehingga mereka tidak bisa bercocok tanam selama tiga tahun lamanya.

Kedua, nelayan. Ada suatu siklus mata pencaharian yang dapat diamati dari warga Rawa Pening. Ketika musim kemarau datang, ketika danau menyurut dan lahan-lahan persawahan mereka tidak terendam oleh air, mereka akan mulai menanam padi. Menurut Ramlan, "Selama setahun warga biasa menanam sampai dua kali." Ketika musim hujan tiba dan air danau meluap, lahan-lahan persawahan mereka tenggelam

189 Tanah yang tergenang pada musim hujan karena tingkat elevasi danau yang tinggi, timbul kembali pada musim kemarau.

190 Wawancara Joko, Ambarawa, 6 Desember 2023.

oleh luapan air danau, mereka akan menjadi nelayan. Keramba[191] dan *branjang*[192] mulai dioperasikan kembali. Warga mulai menggunakan perahu-perahu kecil yang selama setengah tahun tertambat rapi di pinggiran danau. Siklus itu sudah berlangsung sangat lama dan terjadi setiap tahun. Mata pencaharian warga sangat dipengaruhi oleh musim dan ketinggian permukaan air danau yang berubah-ubah.[193]

Ketiga, perusahaan yang memanfaatkan air danau untuk operasional. Dalam hal ini ada PLTA Jelok dan Limo yang menggunakan aliran Sungai Tuntang untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. PLTA Jelok dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada 1938. Proyek pebangunan PLTA tersebut menenggelamkan 40 desa di sekitar danau.[194] Air yang berasal dari aliran Sungai Tuntang dilimpahkan menggunakan dua pipa besi raksasa berdiameter 1,5 meter. Tekanan air mampu menggerakkan turbin, sehingga menghasilkan listrik 93 GWh per tahun.[195] Keberadaan PLTA Jelok pada zaman pemerintahan kolonial Belanda memegang peranan sangat vital dalam menyediakan energi untuk penjajahan. Setelah kemerdekaan, pengelolaan PLTA Jelok diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang ditugaskan mengelola jaringan listrik, belakangan merasakan kapasitas PLTA Jelok sudah tidak memadai lagi. Berkait dengan hal itu, pada 1957 dibangun PLTA Timo yang berjarak sekitar 4

---

191 Terbuat dari bambu yang dirangkai membentuk persegi empat, menjadi tempat budi daya ikan. Bentuknya simetris dan tidak semrawut seperti *branjang*. Penduduk yang mengusahakan keramba disebut petani ikan, bukan nelayan.

192 *Branjang* adalah tempat yang dibuat khusus untuk menangkap ikan dan diletakkan di tengah danau. Terbuat dari bambu yang dipancangkan membentuk segi empat yang menjadi penambat jala. Bentuknya tidak beraturan.

193 Wawancara Ramlan, Tuntang, 5 November 2023.

194 Wawancara Bogi Subasti, Banyubiru, 31 Maret 2024.

195 Bambang Setyawan, "PLTA Tertua di Indonesia Ini Ternyata Masih Perkasa", dalam *Kompasiana* atau https://www.kompasiana.com/bamset2014/5736e73b0223bd3d1186031f/plta-tertua-di-indonesia-ini-ternyata-masih-perkasa (diakses pada 6 Juni 2024).

kilometer dari PLTA Jelok. Air yang sebelumnya dipakai menggerakkan turbin di Jelok, ditampung di Kolam Tandu[196] yang selanjutnya melalui pipa berdiameter 3 meter, dialirkan menuju ke PLTA Timo.

Selain PLN ada perusahaan swasta yang menggunakan air danau untuk pemenuhan kebutuhan akan air bersih. Rawa Pening memasok kebutuhan air untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Serasi milik Pemerintah Kabupaten Semarang, tetapi dalam pengelolaan menyerahkan ke perusahaan swasta, yakni PT Sarana Tirta Ungaran.[197]

Proyek Revitalisasi

Kasiyan, salah seorang tokoh masyarakat di Dusun Klurahan, Desa Tuntang, menyebutkan kondisi Rawa Pening saat itu sangat kritis. Dengan tekad mengubah keadaan, ia menjadi delegasi warga dalam Konferensi Danau Internasional di Sanur, Bali.[198] Upaya revitalisasi pengelolaan danau disepakati dalam Konferensi Nasional Danau Indonesia yang diselenggarakan di Bali pada 2009. Danau Rawa Pening di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, adalah salah satu dari 15 danau yang harus diselamatkan dan itu menempatkannya dalam danau prioritas nasional. Masalah Danau Rawa Pening saat ini adalah eutrofikasi[199] dan sedimentasi.

Upaya revitalisasi disambut hangat oleh masyarakat Rawa Pening, karena kondisi Rawa Pening yang semakin terdegradasi. Ada dua bentuk revitalisasi Rawa Pening yang saya lihat. Revitalisasi badan air dan

---

197 Sudibyo, S, "Pelayanan Air Bersih Melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta: Studi Kasus PDAM Kabupaten Semarang dan PT Sarana Tirta Ungaran", tesis di Universitas Diponegoro, 2006.

198 Wawancara Kasiyan, 5 November 2023.

199 Eutrofikasi adalah proses ketika aktivitas manusia berkontribusi terhadap peningkatan jumlah nutrisi di dalam air ekosistem dan mengakibatkan perubahan yang tidak diinginkan dalam kualitas air permukaan yang dipengaruhi oleh karbon, nitrogen, dan fosfor biogeokimia yang disebabkan oleh pupuk pertanian, perikanan, dan limbah rumah tangga.

revitalisasi daerah sempadan danau. Jika melihat Keputusan Menteri PUPR Nomor 365 Tahun 2020 tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Rawa Pening, luas danau ini 2507 hektare, dengan luas badan air 2387 hektare, dan luas sempadan 120 hektare. Kawasan sempadan danau adalah kawasan yang dihitung dari titik badan air terluar, sejauh 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah ada, yaitu 463,3 meter.

Di kawasan danau dan sempadan danau terdapat 251 bangunan, yang terdiri atas permukiman, tempat wisata, tempat ibadah, dan restoran. Total luas seluruh bangunan yang berada di kawasan sempadan adalah 6,19 hektare. Jumlah sawah yang masuk ke dalam kawasan sempadan danau 65,6 hektare yang tersebar di seluruh desa di sekitar Danau Rawa Pening. Total panjang jalan yang masuk ke daerah sempadan danau 2.519 meter. Jumlah sawah yang ada di badan air 386,82 hektare. Jumlah keramba jaring apung 3.232 buah.[200]

Dalam praktik, revitalisasi kawasan sempadan penuh dengan kecaman warga. Pertama, karena penentuan batas sempadan pada elevasi 463,3 sangat merugikan warga karena banyak tanah hak milik warga bersertifikat form C yang akan masuk wilayah sempadan tersebut. Bangunan yang masuk ke dalam kawasan sempadan sungai dinyatakan sebagai *status quo*, yang berarti warga tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan memperbaiki kawasan itu karena secara bertahap akan ditertibkan untuk mengembalikan fungsi kawasan sempadan sungai. Artinya, bangunan warga akan terancam digusur dan pemerintah dalam hal ini mempunyai wewenang tersebut melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 365 Tahun 2020. Kedua, warga tidak memiliki kepastian hukum atas tanah hak milik mereka di daerah sempadan karena statusnya tumpang-tindih dengan *status quo* seperti tertulis dalam keputusan menteri.

---

200 Mujiburohman, Dian Aries, dan Dwi Wulan Titik Andari, “Revitalization of Rawa Pening Lake, Indonesia”, dalam *Environment Conservation Journal*, No. 24 Issue 2, hal. 83-90 atau https://doi.org/10.36953/ECJ.14112421 (diakses pada 30 Mei 2024).

Warga yang tergabung dalam Perpenera menuntut Keputusan Menteri PUPR Nomor 365 direvisi, mengubah ketentuan penentuan batas sempadan yang dihitung dari ketinggian elevasi 463,3 menjadi 462,3. Joko Susanto menyebutkan, "Yang kami tuntut juga sebenarnya kepastian hukum dari tanah kami. Rumah ibu saya, Mas, di belakang itu sudah berumur 120 tahun, sudah ada dari zaman Indonesia belum merdeka." Dia bercerita, September 2021 rumahnya didatangi orang-orang berseragam TNI. Mereka memasang patok di belakang rumahnya. Orang berseragam TNI itu mengaku hanya ingin menitipkan patok itu saja atas suruhan pihak BBWS. Joko sangat kaget ketika melihat patok itu bertuliskan "Patok Batas Sempadan Danau Rawa Pening Tahun 2021 Desa Asinan, Milik Negara, Dilarang Merusak". Dengan kata lain, rumahnya dan rumah ibunya yang bersebelahan masuk dalam wilayah sempadan danau yang secara hukum tidak boleh dipergunakan secara individu oleh warga. Joko mempertanyakan tanah yang sudah ia miliki sejak zaman Belanda kok statusnya bisa diubah oleh pemerintah dan terancam digusur untuk memuluskan proyek revitalisasi itu.[201]

Klaim tanah sempadan oleh Kementerian PUPR membuat warga tereksklusi dari tanah mereka. Perluasan dan revitalisasi yang diwacanakan mengundang investor untuk mengembangkan proyek pariwisata menjadi sebuah mekanisme perampasan (*enclosure*) oleh kekuasaan prosedural dalam menjalankan roda kapitalisme.[202] Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Arif Zayin, saat dimintai konfirmasi Kolaborasi Jurnalis Investigasi Jawa Tengah, menyatakan kawasan sekitar Rawa Pening akan dibangun resor-resor dan dilengkapi jalan melingkar di bantaran danau yang dapat dimanfaatkan untuk *jogging*. Ia membayangkan kawasan Gunung Telomoyo dan Rawa Pening bisa menjadi paket wisata dan kelak turis-turis akan banyak menginap di kawasan pesisir Rawa Pening.[203] Ia merencanakan mengundang

---

201 Wawancara Joko Susanto, Ambarawa, 6 Desember 2023.

202 Marx, K, *Capital: A Critique of Political Economy,* Vol. 1 (Penguin Books, 1990).

203 Kolaborasi Jurnalis Investigasi Jawa Tengah, "Ada Motif Turisme di Balik Proyek

banyak investor untuk menanamkan modal dalam proyek wisata yang diproyeksikan dibangun di sekitar Rawa Pening karena berada di kawasan yang cukup strategis.

Menurut saya, cara pandang seperti yang disampaikan Arif Zayin itu tidak bisa diterima sepenuhnya. Paket wisata yang dia sebutkan masuk dalam skema revitalisasi yang digagas pemerintah. Ramlan bercerita, ketika menghadiri sosialisasi proyek revitalisasi Rawa Pening di aula Desa Tuntang pertengahan 2022 bahwa Kementerian PUPR memang akan menjadikan Rawa Pening sebagai kawasan wisata nasional; kelak banyak investor akan berdatangan untuk membangun banyak objek wisata baru di danau itu. Pandangan itu tidak mempertimbangkan nasib warga yang terkena imbas proyek revitalisasi danau. Pemerintah secara normatif melihat tanah sebagai komoditas, tanpa melihat realitas sosial bahwa di dalamnya ada warga Rawa Pening yang menggantungkan hidup pada produksi lahan (dan air) untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tanah (dan air) yang dipandang sebagai komoditas menjadi ciri mendasar kapitalisme.[204]

Kuasa prosedural melegitimasi upaya klaim pemerintah atas tanah sempadan yang beririsan dengan tanah hak milik warga yang menyebabkan mereka tereksklusi dari tanah mereka.[205] Dengan demikian keputusan perluasan Rawa Pening yang dipaksakan melalui jalan-jalan prosedural dengan keberadaan Keputusan Menteri PUPR Nomor 365/KPTS/M/2020 melegitimasi ketimpangan akses terhadap tanah dan danau itu. Kekuasaan prosedural memaksa warga yang menggunakan

---

'Pemekaran' Danau Rawa Pening" dalam *Serat.Id*, 2023 atau https://serat.id/2023/12/18/ada-motif-turisme-di-balik-proyek-pemekaran-danau-rawa-pening/ (diakses pada 30 Desember 2023).

204 Harris, M, *Theories of Culture in Postmodern Times* (Walnut Creek: Altamira Press, 1990).

205 Rodríguez-Labajos, Beatriz, dan Joan Martínez-Alie, "Political Ecology of Water Conflict", dalam *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*, Vol. 2, Issue 5, hal 537-558 atau https://doi.org/10.1002/wat2.1092 (diakses pada 30 Desember 2023).

lahan-lahan produktif untuk bercocok tanam atau lahan hak milik warga yang sudah menjadi pemukiman padat membuat warga meninggalkan secara bertahap. Saya sebutkan begitu karena keputusan Menteri PUPR dikeluarkan tanpa melibatkan partisipasi warga yang berada di daerah sempadan yang termaktub secara implisit dalam peraturan tersebut. Legitimasi Keputusan Menteri PUPR Nomor 365/KPTS/M/2020 yang diakui oleh kekuasaan prosedural mengeksklusi warga dari tanah yang mereka kuasai secara turun-menurun.

Upaya Perlawanan Warga

Perlawanan warga terhadap pemerintah memiliki perjalanan cukup rumit. Pada awalnya warga menuntut dilakukan revitalisasi Rawa Pening karena merasa degradasi lingkungan sudah sangat parah. Joko menganalogikan dengan sebuah frasa “dari mangkuk jadi piring” untuk menggambarkan keadaan danau yang semakin mendangkal karena laju sedimentasi yang sangat besar dan meningkat setiap tahun. Warga yang tergabung dalam sebuah organisasi bernama Forum Petani Rawa Pening Bersatu (FPRPB) mengutus Kasiyan sebagai wakil warga dalam Konferensi Danau Internasional di Bali pada 2009. Kala itu, warga bertujuan melestarikan tanah kelahiran dan mata pencaharian yang terancam oleh keadaan ekosistem danau yang rusak. Upaya revitalisasi danau yang disepakati dalam forum tersebut menjadikan Rawa Pening masuk dalam 15 danau prioritas nasional.

Pada kelanjutannya hasil dari konferensi itu menjadi dasar proyek revitalisasi Rawa Pening yang menjadi sebuah upaya pemerintah meningkatkan daya tampung danau. Revitalisasi yang dibayangkan warga adalah pembersihan eceng gondok dan pengerukan endapan lumpur dan sedimen di dasar danau. Namun kenyataannya revitalisasi versi pemerintah jauh berbeda dari bayangan warga. Keputusan Menteri PUPR Nomor 365/KPTS/M/2020 yang menjadi acuan dalam menjalankan revitalisasi danau justru sangat merugikan warga. Tingkat elevasi danau secara sepihak dinaikkan yang menyebabkan lahan

persawahan yang merupakan hak milik warga tenggelam dan akhirnya warga tidak bisa menanam selama tiga tahun.

Ancaman lain datang dalam bentuk regulasi baru yang mengatur batasan tanah sempadan danau. Banyak tanah hak milik warga masuk dalam daerah sempadan danau. Jika kita merujuk pada keputusan Menteri PUPR, tanah tersebut masuk ke dalam *status quo.* Kemudian, bangunan yang dinyatakan sebagai *status quo* disebutkan "secara bertahap akan ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan danau". Perintah berikutnya, yang dimaksud "aturan *status quo*" adalah "bangunan yang berada di sempadan tidak boleh diubah, ditambah, ataupun diperbaiki". Maka dapat disimpulkan, bangunan warga, rumah-rumah, lahan-lahan produktif warga yang menurut pemerintah melanggar batas ketentuan sempadan Danau Rawa Pening terancam digusur dan dimusnahkan dengan anggapan untuk mengembalikan fungsi wilayah sempadan danau. Hal itu memantik amarah warga. Ramlan menyebutkan, "Bisa kapan saja tanah kami nanti digusur paksa."

Atas dasar itu, upaya pertama warga adalah berdialog dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Warga mendatangi kantor BBWS Pemali-Juana sebagai aktor dalam kronik pemasangan patok itu untuk berbicara dan memperoleh kejelasan mengenai semua itu. Suwestiyono, koordinator FPRPB, menyatakan jawaban BBWS Pemali-Juana cukup mengecewakan. Pejabat di BBWS Pemali-Juana menjawab, itu adalah instruksi atasan dan menyuruh warga bertanya ke pihak lain.[206] Upaya dialog warga berlanjut ke DPRD Jawa Tengah sebagai wakil rakyat. Namun hasilnya pun sama saja; belum ada kejelasan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman hanya bisa menjanjikan solusi terhadap warga. Warga menilai upaya-upaya bernegosiasi dengan pemangku kebijakan hanya membuang-buang waktu bahkan untuk memberikan kepastian saja.[207]

---

206 Wawancara Suwestiono, Tuntang, 3 Maret 2024.

207 Jazilatul Khofsoh, "3 Tahun Lahan Pertanian Tenggelam, Petani Rawa Pening Wadul DPRD Jateng", dalam *Lingkarjateng.id*, 2022, atau https://lingkarjateng.

Itu memunculkan ketidakpercayaan beberapa warga dalam upaya berkompromi dengan pemerintah. FPRPB dinilai terlalu mesra dengan Ngesti Nugraha, Bupati Kabupaten Semarang. Melalui laporan dari *RRI.co.id* pada Agustus 2022 diadakan sebuah forum pengukuhan pengurus FPRPB. Pengukuhan yang ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati yang kemudian diserahkan ke koordinator FPRPB, Suwestiyono. Dalam forum itu, FPRPB menunjuk Bupati sebagai pembina FPRPB. Beberapa warga yang tidak sependapat Bupati dijadikan pembina FPRPB membentuk organisasi baru yang tidak ingin ada ikut campur pemerintah dalam upaya perlawanan warga. Organisasi itu mereka namai Persatuan Petani Nelayan Rawa Pening (Perpenera). Beberapa warga yang tergabung dalam Perpenera dan pernah saya temui adalah Ramlan, Joko Susanto, dan Bogi Subasti. Pada suatu kesempatan Joko berkata, "Lo orang yang kami lawan itu pemerintah, kok ini malah bupati jadi pembina forum." Joko percaya gerakan masyarakat terdampak patok sempadan harus steril dari pemerintah.

Perlawanan (resistansi) dalam tulisan ini bermakna sebagai reaksi warga yang tereksklusi dari tanah hak milik mereka. Pemerintah secara sewenang-wenang menutup akses warga untuk menggarap sawah dengan menaikkan elevasi danau dari sebelumnya 462,3 menjadi 463,3, atau naik 1 meter. Kenaikan itu menyebabkan 200 hektare lahan sawah tidak bisa ditanami selama tiga tahun. "Kalau ditotal saya sudah rugi puluhan juta," tutur Joko tentang sawahnya seluas 0,5 hektare yang terendam. Perampasan akses tanah garapan warga oleh pemerintah menyebabkan mereka tereksklusi. Proses perampasan tanah hak milik warga semacam itulah dimaknai oleh Marx sebagai akumulasi primitif.[208] Wacana perluasan Rawa Pening dan pembentukan kawasan wisata danau, pemerintah harapkan akan mengundang banyak investor. Yang jadi penghalang besar bagi proyek ini adalah tanah di sekitar Rawa

---

id/news/3-tahun-lahan-pertanian-tenggelam-petani-rawa-pening-wadul-dprd-jateng/ (diakses pada 30 Desember 2023).

208 Marx, K,"*Capital: A Critique of Political Economy* Vol. 1 (Penguin Books, 1990).

Pening kebanyakan lahan produktif pertanian. Saya berpikir salah satu upaya pemerintah mendapatkan akses terhadap lahan produktif itu melalui mekanisme revitalisasi danau. Perebutan akses itulah yang menjadi alasan kuat bagi warga untuk melawan.

Pembentukan Perpenera didasari perbedaan pendapat atas keterlibatan Bupati dalam FPRPB. Joko bergumam, "*Dibodhoni thok karo bupatine kuwi*."[209] Dia merasa heran kepada orang-orang yang malah menjadikan Bupati sebagai dewan pembina gerakan perlawanan warga. Ketundukan FPRPB terhadap Bupati menjadi representasi dari hegemoni pemerintah (kelas penguasa) terhadap masyarakat Rawa Pening. Bagi Gramsci, kelas penguasa memanipulasi sistem sosial dan pola pikir masyarakat, sehingga cara pandang kapitalisme menjadi lumrah.[210] Intervensi Bupati terhadap FPRPB yang menjadi motor gerakan perlawanan warga menjadi contoh paling nyata hegemoni kelas penguasa. Joko dan beberapa warga memandang perlawanan masyarakat tidak boleh ditundukkan dengan cara-cara tersebut.

Jalur audiensi dengan pemerintahan yang sudah mereka jalani akhirnya tidak menghasilkan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian masalah. Di titik ini, pembentukan Perpenera dapat dilihat sebagai hegemoni tandingan (kontrahegemoni) yang berupaya keluar dari intervensi Bupati terhadap gerakan perlawanan warga.

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana sikap Perpenera memandang FPRPB ke depan? Joko menjawabnya, "Sebenarnya kami tidak ada masalah dengan Forum. Saya sangat menghormati Pak Suwestiyono sebagai koordinator Forum. Lo orang sama-sama memperjuangkan hak kok. Yang jadi perbedaan kan cuma cara bergerak saja." Secara terbuka Joko tidak ingin warga bergesekan dan malah memunculkan konflik

---

209 Cuma dibohongi oleh bupati.

210 Mouffe, Chantal, "Hegemony and Ideology in Gramsci.", dalam Chantal Mouffe, Norberto Bobbio, Jacques Texier, Nicola Badaloni, Leonardo Paggi, Christine Buci-Glukcsman, Massiomo Salvadori, dan Biagio de Giovanni, *Gramsci and Marxist Theory (RLE: Gramsci)* (New York: Routledge, 2014) hal. 168-204.

horizontal antarorganisasi warga. Selama bertujuan sama, tidak perlu ada perdebatan lebih lanjut berkait dengan perbedaan sikap antara FPRPB dan Perpenera.[211]

Perpenera terbentuk dari hasil *jagongan* beberapa warga di rumah Joko Susanto di Asinan, Ambarawa, akhir 2022. Selanjutnya organisasi itu konsisten menuntut akses pengembalian tanah warga sebagaimana sebelum penetapan Keputusan Menteri PUPR. Perpenera tidak menolak proyek revitalisasi seperti direncanakan semula, karena memang itu demi hajat bersama dalam mengembalikan fungsi danau. Namun yang menjadi permasalahan, kepastian hukum yang seakan bias dengan keberadaan patok-patok di sempadan danau yang didukung oleh regulasi berupa Keputusan Menteri PUPR Nomor 365/KPTS/M/2020. Pada Sabtu, 6 Januari 2024, warga mengadakan aksi pemasangan spanduk besar bertuliskan "Kami Tidak Tolak Revitalisasi Rawa Pening, namun Jangan Rampas Tanah Kami", "Stop Proyek Perluasan Rawa Pening dan Cabut Patok Sempadan dari Tanah Kami!!!", "Pesan kepada Yang Terpilih!!!". Momen pemasangan spanduk itu berbarengan dengan peranti kampanye pemilihan presiden yang bertebaran. Warga menuntut calon pemimpin yang akan terpilih dengan tegas memperjuangkan hak-hak warga di Rawa Pening.[212] Perlawanan yang terus warga lakukan menarik perhatian warga-warga lain yang bahkan tak terdampak oleh proyek perluasan danau itu. Itu yang coba Perpenera dan FPRPB lakukan untuk mengalahkan hegemoni penguasa yang memengaruhi pendapat masyarakat.

Aksi terbuka itu selanjutnya memunculkan banyak intimidasi dari aparat Kodam IV/Diponegoro yang juga menjadi petugas pemasangan patok sempadan. Joko dan beberapa anggota Perpenera secara rutin

---

211 Wawancara Joko Susanto, Ambarawa, 6 Desember 2023.

212 Hawin Alaina, "Pasang Spanduk Capres-Cawapres, Warga Tuntang Tolak Perluasan Rawa Pening", dalam *Jateng.Solopos* 2024 atau https://jateng.solopos.com/pasang-spanduk-capres-cawapres-warga-tuntang-tolak-perluasan-rawa-pening-1835040 (diakses pada 30 Februari 2024).

didatangi anggota Kodam IV. “Lo setiap minggu lo, Mas, pasti saya didatengi intel Kodam,” kata Joko. Beberapa kali bahkan warga didatangi anggota Kodam bersenjata laras panjang. Upaya itu mereka lakukan untuk menekan upaya warga. Kelas penguasa mencoba menundukkan warga dengan infrastruktur represif Kodam IV/Diponegoro dalam melancarkan upaya perampasan aset warga.

Perlawanan warga terbagi dalam dua dimensi. Pertama, dimensi yang terbuka seperti demonstrasi dan audiensi dengan anggota DPRD Jawa Tengah. Kedua, dimensi yang tertutup yang selanjutnya dilakukan dalam ranah sehari-hari yang bahkan jarang terendus sebagai perlawanan warga, seperti gosip yang beredar, adat tradisional, atau cerita-cerita mistik rakyat yang terus diwariskan.

Perlawanan macam itulah yang dimaknai Scott sebagai upaya melawan hegemoni kekuasaan; dia menyebutnya perlawanan sehari-hari.[213] Perlawaan dengan gaya Scottian itu tidak dimanifestasikan dalam bentuk perlawanan terbuka seperti demonstrasi besar, bahkan revolusi. Sebaliknya, ia menyoroti bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari yang lebih kecil dan jarang terdeteksi dan terabaikan dalam analisis politik konvensional (infrapolitik). Ia dimaknai dalam bentuk kecil seperti ketidakpatuhan masyarakat atas peraturan pemerintah, gosip, mitos-mitos yang dilestarikan, atau apa pun itu di mana kelompok-kelompok kecil yang lemah berusaha melawan hegemoni struktur kekuasaan. Mitos Rawa Pening yang berkembang tanpa disadari dianggap sebagai hal biasa. Ia diangggap sederhana dan bahkan tak berarti, tetapi sebenarnya ia menuntut struktur sosial politik yang tak adil.

Perlawanan sehari-hari itulah yang sampai saat ini dilakukan warga terdampak. Cerita mitos tentang aspek mistis Rawa Pening adalah cerita

---

213 Scott, James C, “Domination and the Arts of Resistance”, dalam *On Violence: A Reader*, disunting Bruce B Lawrence dan Aisha Karim (Duke University Press, 2007) hal. 199-214 atau https://doi.org/10.2307/j.ctv120qr2d.17 (diakses pada 30 Desember 2023).

turun-temurun yang dipercayai warga sebagai kebenaran. Ular besar jelmaan Baru Klinting dikonstruksikan sebagai asal-usul terbentuknya Rawa Pening dan sebagai penjaga yang dipercayai warga berada di tengah-tengah danau. Masyarakat secara luas masih menganggap Rawa Pening sebagai tempat keramat dan oleh karena itu perlu dilestarikan dan dirawat. Konstruksi mitos yang ada itu menjadikan masyarakat lebih berpikir dalam jika ingin berbuat sesuatu yang berkenaan dengan danau. Bahkan untuk sekadar mencari ikan saja, menurut Joko Susanto, ketika melihat penampakan ular besar di tengah danau, warga akan langsung pulang tanpa pikir panjang, saking takut.

Joko bercerita, suatu ketika ada prajurit TNI yang menertibkan *branjang* warga yang dianggap semrawut di Desa Rowoboni. Di tengah proses penggusuran *branjang* itu, tentara menemukan seekor bulus berukuran besar. Lalu ia membawanya pulang dan memberikan kepada sang istri untuk dimasak. Beberapa minggu setelah kejadian itu, ia ditugaskan untuk datang dan menemui Joko. Prajurit itu bercerita anak lelakinya yang masih berusia lima tahun meninggal belum lama ini. Joko mengaitkan kematian anak itu dengan kejadian di Desa Rowoboni. Kematian sang anak dikaitkan dengan tindakan tentara itu mengambil bulus dan menyantapnya. Bulus adalah hewan yang dianggap mistik oleh warga sekitar. Memakan bulus dianggap akan mendatangkan marabahaya. Tentara itu langsung ketakutan. Ia berkata menyesal telah membawa pulang bulus itu.

Joko berpikir, cerita mistik seperti itu bisa menjadi bahan untuk menakut-nakuti aparat TNI yang menjadi kaki-tangan pemerintah dalam pelaksanaan proyek revitalisasi Rawa Pening. Perlawanan sehari-hari seperti itu juga yang dilakukan warga untuk melawan kuasa hegemoni pemerintah. Bagi Scott, hegemoni hanya ada dalam ranah ideologis. Bekerjanya kekuasaan akan selalu dibayang-bayangi oleh perlawanan secara terbuka atau secara terselubung.[214]

214 Ibid.

VI

P5L, Respons Warga

sebagai Praktik Demokrasi Langsung untuk Keluar dari Kepungan Banjir dan Rob di Pinggir Pantai Semarang (Kelurahan Panggung Lor)

Eka Handriana[215]

Sari: Banjir, rob, dan amblesan tanah di Panggung Lor merupakan krisis sosial ekologis yang diproduksi lewat alih fungsi lahan tanpa pertimbangan daya dukung lingkungan. Tipikal pembangunan yang timpang; pemodal terus diuntungkan, sedangkan warga tertimbun derita

---

215 Penulis mengucapkan terima kasih kepada 1) Almarhumah Nila Ardhianie yang (semasa hidup) telah memberi masukan pada awal penyusunan kerangka tulisan ini. Nila Ardhianie merupakan direktur Amrta Institute for Water Literacy yang menjadi bagian dari Konsorsium CARING pada 2023. Konsorsium CARING (*Caring the flows for a healthier urban (ized) (ground)water in* Semarang *and* Yogyakarta, Indonesia) saat ini terdiri atas IHE-Delft, Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, dan Arkom Indonesia; 2) Konsorsium Ground-Up yang telah mengizinkan pemakaian datanya. Konsorsium Ground-Up, yang melakukan penelitian terhadap pengelolaan air bawah tanah di Kota Semarang pada 2019-2022 terdiri atas University of Amsterdam, IHE-Delft Institute for Water Education, Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Katolik Soegijapranata, Amrta Institute for Water Literacy, dan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA).

dan terhambat dalam mencari solusi dari pemerintah. P5L dibentuk sebagai respons kolektif warga dengan menggunakan pengetahuan-tersituasikan (*situated knowledge*) untuk mengatasi banjir. P5L dapat dilihat sebagai praktik demokrasi langsung berbasis komunitas, ketika warga menentukan lingkungan tempat tinggal mereka. Model itu dapat direplikasi di komunitas lain dengan penyesuaian berdasar pengetahuan dan situasi masing-masing. Perlu keterhubungan antarkomunitas dan kesetaraan partisipatoris untuk mencapai solusi yang adil dalam mengatasi krisis banjir, rob, dan amblesan tanah di seluruh kota.

Kata-kata kunci: Respons kolektif warga, krisis sosial ekologi, demokrasi langsung, *situated-knowledge*, rizomatik.

Ekologi Politis Urbanisasi Panggung Lor

Pertumbuhan ekonomi merupakan konsentrasi perhatian pemerintah Indonesia dalam acuan pembangunan. Untuk mendorong angka pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Orde Baru misalnya, menggugah investasi dalam negeri dan membuka pintu bagi investasi dari luar negeri. Salah satu langkah yang pemerintah lakukan adalah meluncurkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dengan undang-undang itu, investor asing dapat menggunakan sumber daya dan teknologi dari luar Indonesia, menyewa tenaga kerja asing, dan mentransfer keuntungan ke negara asal setiap saat. Kebijakan itu berhasil menaikkan angka investasi nasional dalam setahun pada Rencana Pembangunan Lima Tahun/Repelita I (1969-1974), sedangkan peningkatan investasi asing mencapai 72%. Karena itu, kebijakan tersebut dilanjutkan pada Repelita II (1974-1979) dengan semangat pemerataan.[216] Pada dekade 1970-an tersebut,

216 Awan Wibowo Laksono Pesoro, "Membangkitkan Investasi di Indonesia", dalam *Policy Assessment* (The Indonesian Institute – Center for Public Policy Research, 2005).

setiap daerah di Indonesia lantas berlomba-lomba membuka jalan bagi penanam modal.

Pada 1975, besaran investasi di Jawa Tengah baru 3% dari total investasi nasional untuk tahun itu. Dengan angka tersebut, Jawa Tengah menduduki peringkat keenam nasional, setelah Jakarta Raya dengan besaran investasi 26,5%, Jawa Barat 25%, Jawa Timur 11,4%, Kalimantan Timur 5,7%, dan Sumatera Utara 5,2%. Pada tahun itu pula Jawa Tengah menempati urutan keempat dalam soal jumlah proyek yang dibangun dengan modal dalam negeri dan modal asing. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat itu memandang jumlah penduduk di wilayahnya sebagai potensi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah membutuhkan modal lebih besar lagi, dengan jumlah proyek yang lebih banyak lagi, untuk mengelola potensi tersebut.[217] Ketua Badan Koordinator Penanaman Modal Daerah (BKMPD) Jawa Tengah, Irawan Sadiman, dalam pertemuan dengan kepala daerah se-Wilayah Kerja Pembantu Gubernur (eks Karesidenan) Semarang dan Surakarta pada masa itu menyatakan akan membantu pengurusan bantuan kebutuhan modal bagi usaha-usaha yang perlu dikembangkan. Dia menyebutkan, untuk menarik modal ke Jawa Tengah, perlu insentif berupa fasilitas-fasilitas bagi investor.

Pengembang *real estate* Tanah Mas merupakan salah satu yang mendapat jalan mulus (fasilitas) dari pemerintah di Kota Semarang kala itu.[218] Pemerintah Kota Semarang mengizinkan pengurukan area rawa-rawa, sawah, dan tambak, hingga menjadi tempat kering pada permulaan pengembangan kompleks Tanah Mas. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penggusuran warga Kampung Peres, yang

---

217 Hanapi, "Jawa Tengah Raksasa Tergugah (1) – Tanah Mas di Bawah, Bukit Sari di Atas", dalam *Suara Merdeka* Edisi 19 Desember 1975.

218 Mila Karmilah, Eka Handriana, Syarifah Atia, Umdatin Nihayah, *Urip Dioyak-Oyak Banyu: Perjumpaan Manusia, Abrasi, Rob, dan Infrastruktur di Sayung*, (Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2023), hal. 84-85.

dipindahkan ke Kelurahan Sadeng, kawasan pinggiran Kota Semarang.[219] Setelah pengurukan, hingga menghasilkan tempat yang bertambah ketinggian dan berjuluk Panggung, lapisan bernama Terra Firma berbahan *polyethylene fiber* yang disebut-sebut kuat menahan beban hingga 10 ton, didatangkan dari Australia. Lapisan tersebut dipakai untuk mengantisipasi rembesan air dan amblesan tanah di bagian yang kelak menjadi jalanan aspal di dalam perumahan. Kompleks *real estate* Tanah Mas saat itu direncanakan dengan konsep penataan blok dan bentuk rumah nyaris seragam, dengan investasi Rp2,5 miliar.[220]

Selain merupakan *real estate* pertama di Kota Semarang, Tanah Mas juga menjadi komoditas perumahan pertama di Kota Semarang yang dijual dengan skema Kredit Perumahan Rakyat (KPR), produk perbankan keluaran P.T. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk.[221] Skema tersebut berbeda atau belum seperti skema kredit perumahaan umumnya saat ini, misalnya dengan jangka waktu utang (tenor) 10 tahun hingga 15 tahun. Pemimpin P.T. Tanah Mas kala itu, Djamin Ceha, menyebut cara pembayaran pembelian rumah *real estate* Tanah Mas dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama pembayaran uang muka 20%. Setelah kompleks perumahan selesai dibangun, pembayaran dilanjutkan ke tahap kedua 30%. Adapun 50% sisanya dibagi rata dalam dua tahap selanjutnya. Pembelian dengan sistem kredit seperti itu memudahkan konsumen menjangkau harga komoditas (dalam hal ini rumah dan tanah), sekaligus mempercepat perputaran modal bagi pengusaha pengembang perumahan.[222]

---

219 Bosman Batubara, Bagas Yusuf Kausan, Eka Handriana, Syukron Salam, Umi Ma'rufah, *Banjir Sudah Naik Seleher – Ekologi Politis Urbanisasi DAS-DAS di Semarang*, (Semarang: Citra Prima Nusantara, 2021), hal. 247.

220 Hanapi, loc. Cit.

221 Dana Aditiasari, "Di Kota Ini, Pertama Kali KPR BTN Disalurkan", dalam *finance.detik.com*, edisi 7 Februari 2016, https://finance.detik.com/properti/d-3136700/di-kota-ini-pertama-kali-kpr-btn-disalurkan (diakses pada 10 Februari 2022).

222 Hanapi, loc. Cit.

Setelah *real estate* Tanah Mas selesai dibangun dan dihuni warga, barulah Kelurahan Panggung Lor sebagai wilayah administratif dibentuk, tepatnya pada 1993. Wilayahnya mencapai 123,430 m^2 yang seluruhnya berisi sekitar 5.000 unit rumah dalam blok-blok yang dibangun P.T. Tanah Mas. Ada empat ukuran rumah yang tersedia, yakni rumah tipe C (10 x 10 m), tipe CM (12 x 10 m), tipe B (12 x 20 m), dan tipe A (14 x 30 m).[223] Hingga kini (2022), Kelurahan Panggung Lor dihuni oleh sekurangnya 13.233 jiwa, dengan 10.204 jiwa di antaranya berusia produktif (15-65 tahun).[224] Wilayah kelurahan itu dikepung oleh air; bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Kali Asin, bagian selatan berbatasan dengan Sungai Brotojoyo, dan bagian barat berbatasan dengan Sungai Bulu Drain yang sejajar dengan Sungai Banjir Kanal Barat, tepatnya bagian hilir Kali Garang. Kali Garang merupakan salah satu sungai besar dan utama di Kota Semarang.[225] Pada awal pendirian kompleks Tanah Mas, kepungan aliran sungai tersebut tampak tidak berpengaruh, keadaan jalanan di lingkungan kompleks Tanah Mas bersih dan kering. Tanah Mas berkembang menjadi kompleks perumahan mandiri, di dalam dan sekitarnya terdapat fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan warga, seperti sekolah, tempat ibadah, pertokoan, pasar, hingga rumah sakit.[226]

---

223 Wawancara dengan Wakil Ketua P5L, Teguh Sumedi, Semarang, 16 Februari 2022. Sebagian kompleks Tanah Mas juga berada di sebagian wilayah Kelurahan Panggung Kidul dan Kelurahan Kuningan.

224 Geografis dan Penduduk Kelurahan Panggung Lor, *Data Umum Monografi Kelurahan Panggung Lor*, https://panggunglor.semarangkota.go.id/geografisdanpenduduk (diakses pada 10 Februari 2022).

225 Bosman Batubara, Bagas Yusuf Kausan, Eka Handriana, Syukron Salam, Umi Ma'rufah, *Banjir Sudah Naik Seleher – Ekologi Politis Urbanisasi DAS-DAS di Semarang*, (Semarang: Citra Prima Nusantara, 2021) hal. 200.

226 Wawancara dengan Wakil Ketua P5L, Teguh Sumedi, Semarang, 16 Februari 2022.

Bagi warga, menempati perumahan Tanah Mas ketika itu merupakan kebanggaan.[227] Hal tersebut karena rumah di Tanah Mas, dipandang dari segi harga (pertama dipromosikan pada Desember 1975 berkisar antara Rp2 juta dan Rp12 juta),[228] luasan tanah dan bangunan, serta spesifikasi bangunan rumah tergolong mahal. Itulah yang membuat Tanah Mas hanya bisa dijangkau oleh kelompok ekonomi masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Kebanggaan yang tersebut antara lain merupakan kebanggaan menyandang status sosial menjadi bagian dari masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Selain itu, tentu saja, kebanggaan tinggal di perumahan dengan bangunan besar-besar, rapi, dan bersih. Singkat kata, mewah.[229]

Namun kebanggaan itu tidak berlangsung lama. Pada 1986, ketika kompleks Tanah Mas berumur 10 tahun, keadaan kompleks Tanah Mas merosot. Aliran Kali Asin sering berbalik arah karena desakan pasang naik air Laut Jawa. Permukaan Kali Asin sebagai saluran pembuangan primer dari kompleks Tanah Mas meninggi dipenuhi rob (pasang naik air laut). Pembalikan aliran air Kali Asin masuk ke saluran-saluran sekunder yang lebih kecil, menuju ke saluran-saluran tersier, yakni got-got di depan rumah-rumah Tanah Mas. Bersamaan dengan itu, rumah-rumah ambles, talud-talud retak; tampaknya alas Terra Firma tidak kuat menahan beban. Dalam keadaan ambles itu, rob yang sudah berada di saluran tersier, got di depan rumah, dengan mudah meluber ke pekarangan, teras, bahkan bagian dalam rumah.[230] Ketua Karang Taruna Kelurahan Panggung Lor, Andre Wirawan, menuturkan dia

---

227 Nawi Mch, "Tanah Mas Semarang, Dulu, Kini, dan Nanti," *Kompasiana*, diunggah 14 Mei 2012, dalam https://www.kompasiana.com/nawi_mch/55106288a33311ca39ba8145/tanah-mas-semarang-dulu-kini-dan-nanti (diakses pada 10 Februari 2022).

228 Hanapi, loc. Cit.

229 Wawancara dengan Wakil Ketua P5L, Teguh Sumedi, Semarang, 16 Februari 2022.

230 Ibid.

selalu terkendala genangan air pasang (banjir rob) setiap kali hendak berangkat ke sekolah. Keadaan itu Andre alami pada awal 1990-an ketika duduk di sekolah menengah pertama (SMP) hingga sekolah menengah atas (SMA). Saat itu, telah banyak warga menjual rumah mereka dan meninggalkan Tanah Mas. Harga tanah dan bangunan di Tanah Mas anjlok. Bahkan rumah yang dahulu menjadi jaminan dalam peluncuran pertama proyek kredit perumahan di Semarang, tidak lagi laku untuk dijadikan agunan utang di bank.[231] Kompleks *real estate* Tanah Mas benar-benar telah identik dengan banjir. Bukan hanya rob, banjir yang terjadi ketika hujan juga menggenangi Tanah Mas, misalnya pada 1988. Pada 1990 ketika terjadi banjir bandang di Kota Semarang, Tanah Mas terkena luapan dari hilir Kali Garang.[232]

Selain telah ditandai warga, amblesnya kawasan Tanah Mas telah diteliti ilmuwan. Tanah uruk disebut memiliki peran dalam amblesan kawasan Tanah Mas. Marsudi (2001) dalam Batubara dkk. (2020) membuka faktor-faktor yang dianggap paling utama menjadi penyebab amblesan tanah di berbagai zona di Semarang. Permodelan Marsudi (2001) memasukkan Tanah Mas bersama Tanjung Emas, Tambak Lorok, dan Pantai Marina termasuk dalam Zona I, yakni zona dengan ketebalan material uruk 3-4,5 meter, tebal lempung lunak 25-30 meter, tebal pasir 15-17 meter, dan penurunan muka air tanah 10-15 meter. Penurunan muka air tanah itu disebabkan oleh pemompaan air tanah. Adapun penurunan muka air tanah mendorong amblesan tanah. Di Zona I, penurunan muka air tanah mendorong amblesan tanah 41-48%. Adapun beban statis berupa tanah urukan serta bangunan mempercepat proses pengeringan lempung lunak yang merupakan sedimen muda, oleh lensa-lensa pasir. Beban material tanah uruk di Zona I, tempat

---

231 Wawancara dengan Andre Wirawan oleh Abdul Roviq (Ground Up), Semarang, 20-30 Desember 2021.

232 Bosman Batubara; Bagas Yusuf Kausan; Eka Handriana; Syukron Salam; Umi Ma'rufah, *Banjir Sudah Naik Seleher – Ekologi Politis Urbanisasi DAS-DAS di Semarang*, (Semarang: Citra Prima Nusantara, 2021), hal 195.

Tanah Mas atau Kelurahan Panggung Lor berada, berperan dominan (52-59%) dalam terjadinya amblesan tanah.[233]

Penelitian Octaviani (2007) mengategorikan Perumahan Tanah Mas dan Panggung Lor secara umum sebagai kawasan rawan banjir dan rob. Kerawanan itu disimpulkan berdasar beberapa karakteristik fisik, yakni bagian utara Perumahan Tanah Mas berbatasan dengan laut, berkemiringan landai, dan berdiri di atas lapisan lunak. Kemiringan lahan kawasan Tanah Mas atau Panggung Lor 0-8%. Angka itu, menurut Octaviani, mewujud pada posisi Panggung Lor yang lebih rendah dari area di sebelah selatan, sehingga saat hujan Panggung Lor menjadi tujuan air dari area yang lebih tinggi. Kelandaian itu juga membuat kawasan Panggung Lor mudah dibanjiri rob ketika air laut pasang. Kawasan Panggung Lor berdiri di atas tanah yang semula merupakan pertanian tambak dengan dasar terbentuk dari endapan aluvial Kali Asin dan Banjir Kanal Barat. Sementara Panggung Lor telah berkembang menjadi permukiman padat. Pada 2007 tercatat telah ada 6.000 unit rumah dibangun di Tanah Mas.[234]

Jika dipantulkan dengan permodelan Marsudi di atas, pembebanan material uruk mendominasi laju amblesan tanah di Panggung Lor, maka beralasan jika banjir dan rob lekat dengan kawasan tersebut. Pembangunan kompleks perumahan Tanah Mas merupakan pembebanan terhadap tanah lunak, sehingga mempercepat proses pemadatan. Percepatan itu memperbesar laju amblesan tanah, yang berarti membuat posisi tanah semakin rendah. Dengan demikian, potensi penerima banjir kiriman

---

233 Bosman Batubara, Ivan Wagner, Syukron Salam, Henny Warsilah, *Maleh Dadi Segoro; Krisis Sosial Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak*, (Semarang: CV Lintas Nalar), hal 34-35.

234 Dina Wahyu Octaviani, "Motivasi Masyarakat Bertempat Tinggal di Kawasan Rawan Banjir dan Rob Perumahan Tanah Mas Kota Semarang", Tugas Akhir, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

dari area yang lebih tinggi dan potensi dilimpasi rob saat air laut pasang semakin besar.

Persoalan sosial, yaitu semakin padat permukiman yang bertaut dengan persoalan ekologi berupa amblesan tanah, banjir, dan rob di Panggung Lor muncul bersamaan dengan pembangunan bertolok ukur pertumbuhan ekonomi yang mengidap ketimpangan. Di satu sisi, pembangunan tersebut mengutamakan keuntungan besar dan cepat bagi pemodal, yang berarti mengutamakan pertumbuhan modal. Namun, di sisi lain, memunculkan penderitaan bagi penghuni Tanah Mas, kerugian petani dan petambak, serta menyingkirkan warga kampung di dekatnya. Ketimpangan itu terjadi dalam perubahan sosiospasial, ketika rawa, sawah, dan tambak menjadi rumah, jalan, tempat olahraga, pertokoan, dan sebagainya. Juga dalam perubahan relasi sosioalami, manakala rawa, sawah, dan tambak yang semula dipakai untuk bertani, mencari ikan, dan menumbuhkan udang menjadi tanah kering berlapis *polyethylene fiber* yang ditumbuhi bangunan dan jalan, yang diikuti dengan kedatangan banjir air pasang naik yang menggenangi rumah-rumah. Ketiga konsep itu – ketimpangan, sosiospasial, dan sosioalami – berkombinasi dalam momen urbanisasi yang terjadi di kompleks Tanah Mas, yang di dalamnya kemudian dibentuk Kelurahan Panggung Lor.[235] Urbanisasi di sini bukan sekadar momen perpindahan orang dari

---

235 Tiga konsep berupa momen ketimpangan, sosiospasial, dan sosioalami, yang ditautkan dengan tradisi ekonomi politik diteoretisasikan Bosman Batubara dalam Ekologi Politis Urbanisasi (*Political Ecology of Urbanization, PEU*). Ketimpangan merupakan ekspresi ketidakmerataan bahkan keberseberangan (diatur-mengatur, mengisap-diisap) di bawah cara produksi kapitalis; sosiospasial adalah pembentukan ruang produksi berdasar relasi sosial yang mengatur (nilai guna dan/atau nilai tukar), jika dibawah kapitalisme maka relasinya adalah nilai tukar; sedangkan sosioalami adalah percampuran peran antara manusia (sosio) dan nonmanusia (alam) dalam produksi nilai lebih di bawah kapitalisme. Bosman Batubara, Bagas Yusuf Kausan, Eka Handriana, Syukron Salam, Umi Ma'rufah, *Banjir Sudah Naik Seleher – Ekologi Politis Urbanisasi DAS-DAS di Semarang*, (Semarang: Citra Prima Nusantara, 2021), hal 13-32.

desa atau kota kecil ke kota besar, melainkan mencakup keseluruhan proses. Oleh karena itu, urbanisasi juga merupakan momen perubahan suatu tempat, seperti pedesaan dan hutan, atau tempat seperti rawa, sawah, dan tambak sebagaimana cikal bakal Kelurahan Panggung Lor menjadi kota.[236]

P5L sebagai Respons Kolektif dengan Pengetahuan-Terletak (*Situated Knowledge*) Warga

Menghadapi banjir rob sejak 1986, ditambah banjir air ketika hujan datang, yang keduanya diiringi amblesan tanah, PT Tanah Mas mendatangkan pompa-pompa sebagai solusi. Koperasi Prestamas,[237] organ bentukan PT Tanah Mas, dipilih sebagai operator pompa-pompa untuk menyedot genangan rob di permukiman. Rumah-rumah pompa didirikan, pompa-pompa dinyalakan untuk menyedot genangan air dari kompleks, dan dibuang ke saluran pembuangan primer, sungai-sungai di sekitar Tanah Mas. Sayang, solusi itu tidak bertahan lama. Prestamas tidak mampu menanggung beban pendanaan operasional yang dibutuhkan untuk menghidupkan pompa-pompa setiap hari. Pompa-pompa berhenti beroperasi, Tanah Mas kembali kebanjiran. Hingga pada 1996, pengelolaan pompa-pompa tersebut diserahkan kepada warga.

Lurah Panggung Lor merespons penyerahan itu dengan mengumpulkan para pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) untuk bermusyawarah mencari jalan keluar. Forum musyawarah bersepakat membentuk Paguyuban Pengendali dan Penanggulangan

---

236 Bosman Batubara dan Eka Handriana, "Urbanisasi sebagai Pabrik Krisis Sosial-Ekologis: Berdialektika dengan Prisma 1971-2021, dalam *Jurnal Prisma,* Vol. 40 No. 4, 2021, hal. 49-68.

237 Keterangan mengenai Koperasi Prestamas didapat dari wawancara dengan Wakil Ketua P5L Teguh Sumedi di Semarang, 16 Februari 2022. Tidak didapat keterangan lebih detail soal Prestamas, termasuk kepanjangan nama organisasi itu.

Air Pasang Panggung Lor (P5L) di bawah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). LPMK merupakan lembaga bentukan pemerintah yang ditujukan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LPMK duduk sebagai penanggung jawab P5L, sedangkan Lurah Panggung Lor sebagai penasihat, dan Camat Semarang Utara sebagai pembina. Kepengurusan P5L kemudian dibentuk untuk mengoperasionalkan kerja pengendalian dan penanggulangan air pasang naik, termasuk memfungsikan kembali pompa-pompa.[238]

Sejak itu pengendalian rob di Kelurahan Panggung Lor diurus oleh warga secara kolektif, berbekal antara lain pengetahuan tentang bagaimana air pasang naik masuk ke permukiman Panggung Lor, seberapa tinggi genangan air, dan berapa lama menggenang; arah atau asal banjir datang; letak dan jarak permukiman dengan sungai-sungai dan laut; karakter sungai-sungai yang mengelilingi kelurahan, misalnya pada pukul berapa permukaan Kali Asin meninggi akibat air laut pasang naik, atau pengetahuan tentang penyebutan Kali Asin berasal dari keasinan air di dalam sungai karena bercampur pasang naik air laut; kesejarahan permukiman, sejak kapan mulai ambles, bagaimana amblesan terjadi, titik-titik amblesan, dan ketinggian amblesan; hingga profil kewargaan kompleks Tanah Mas, seperti banyaknya warga yang berprofesi sebagai pengusaha kuliner, hingga keragaman suku dan ras warga. Teguh Sumedi, seorang warga Kelurahan Panggung Lor, misalnya, mengetahui pada saat laut mengalami pasang surut, permukaan saluran-saluran air di dalam kompleks Tanah Mas lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan Kali Asin, sedangkan saat laut pasang naik yang terjadi sebaliknya. Dia mengetahui aktivitas apa saja yang tidak akan bisa berjalan ketika rob datang, seperti para kerabat yang enggan berkunjung hingga pengusaha kuliner yang sepi pembeli.[239]

---

238 Wawancara dengan Wakil Ketua P5L Teguh Sumedi, Semarang, 16 Februari 2022.
239 Ibid.

Pengetahuan itu terbentuk atau terletak pada pengalaman tinggal di permukiman yang dibangun P.T. Tanah Mas. Pengetahuan itu tidak dimiliki orang lain yang tidak tinggal di sana, bahkan juga tidak dimiliki P.T. Tanah Mas sebagai pihak yang pertama mengembangkan permukiman Tanah Mas. Feminis Donna Haraway menyebut *situated knowledge*, pengetahuan-terletak atau menapak (bukan melayang), untuk pengetahuan seperti yang dimiliki warga Kelurahan Panggung Lor itu. Pengetahuan-terletak merupakan pengakuan atas pengetahuan yang dimiliki subjek atau orang yang tinggal pada, sehingga memiliki ikatan dengan, tempat tertentu. Subjek pemilik pengetahuan tidak terpisah, tetapi berpilin, dengan objek pengetahuan. Pengetahuan-terletak adalah tentang pengetahuan komunitas, bukan tentang individu yang terisolasi atau terasing dari pengetahuan itu. Cara pandang dalam pengetahuan-terletak bukanlah cara pandang dari atas (dari luar), atau *helicopter view*, yang dianggap dapat melihat secara keseluruhan dan objektif. Cara pandang pengetahuan-terletak merupakan gabungan dari berbagai cara pandang dan suara parsial menjadi satu posisi subjek kolektif.[240]

Pengetahuan dari pengalaman warga Kelurahan Panggung Lor terhimpun melalui percakapan keseharian dalam komunitas warga, yang kemudian mereka gunakan untuk memecahkan persoalan, terutama rob dan banjir. Warga yang sama-sama merasakan kesulitan hidup di tengah kepungan rob dan banjir membicarakan pilihan upaya bertahan lebih dulu ketimbang upaya pindah yang tidak bisa diakses merata oleh setiap warga, sebab hanya yang memiliki biaya yang bisa pindah. Pilihan untuk bertahan berimplikasi terhadap pengembangan pengetahuan-terletak warga untuk membuat lingkungan tidak tergenang banjir. Pompa-pompa yang semula dioperasikan Prestamas, kemudian dioperasikan secara swadaya, baik dalam pendanaan maupun operasionalisasi teknis oleh warga. Sepuluh rumah pompa dibangun di titik-titik berdekatan dengan

240 Donna Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective”, dalam *Feminist Studies*, Vol. 14, No. 3. hal 575-599.

sungai-sungai yang mengepung Kelurahan Panggung Lor menggunakan biaya dari hasil iuran warga. Dari sebelah timur wilayah Panggung Lor setiap air banjir dan rob yang datang disedot oleh pompa di enam titik rumah pompa, lalu dibuang ke Kali Asin lewat pipa besar. Adapun di sebelah barat wilayah Panggung Lor, ada empat pompa serupa yang dipakai untuk membuang air ke Sungai Bulu Drain.[241]

Penggunaan pengetahuan-terletak dalam tumpukan persoalan sosial ekologis memunculkan jalan keluar yang lebih berdampak terhadap kehidupan warga ketimbang pengetahuan yang datang dari luar. Sebetulnya Pemerintah Kota Madya Semarang telah merancang solusi untuk mengatasi banjir, termasuk banjir rob di Tanah Mas atau Kelurahan Panggung Lor. Pada 1985 Pemerintah Kota Madya Semarang menjalankan proyek Drainage Improvement Programme (Drip) yang dibiayai dengan dana pinjaman dari Bank Dunia. Proyek tersebut terdiri atas normalisasi Kali Semarang, Kali Banger Timur, dan Kali Garang yang di bagian hilir sejajar dengan Sungai Bulu Drain pembatas Tanah Mas. Dalam proyek tersebut, pintu-pintu air dibuat di bagian hilir sungai, salah satunya di Tanah Mas, untuk mencegah air pasang masuk ke muara sungai yang berisiko menghalangi air hujan atau yang mengalir di sungai terbuang ke laut. Rangkaian gagasan normalisasi sungai dilengkapi pintu air itu tidak datang dari pengetahuan warga. Macam-macam pengetahuan warga Kelurahan Panggung Lor berkaitan dengan banjir dan rob tidak digunakan. Ketika proyek normalisasi sungai dan pembuatan pintu air itu tuntas, kompleks Tanah Mas tetap digenangi rob, ditambah banjir ketika hujan, hingga keadaannya merosot, sebagaimana cerita derita di atas.[242]

Hal yang mirip kembali terjadi pada 2013 ketika pemerintah pusat di Jakarta, bersama pelaksana proyek P.T. Hutama Karya, memperkuat

---

241 Wawancara dengan Wakil Ketua P5L Teguh Sumedi, Semarang, 16 Februari 2022.

242 Bosman Batubara, Bagas Yusuf Kausan, Eka Handriana, Syukron Salam, Umi Ma'rufah, *Banjir Sudah Naik Seleher – Ekologi Politis Urbanisasi DAS-DAS di Semarang*, (Semarang: Citra Prima Nusantara, 2021), hal. 196.

talud Kali Asin menggunakan beton *sheet pile* untuk mengatasi rob di Kecamatan Semarang Utara, termasuk Kelurahan Panggung Lor. *Sheet pile* dipasang sepanjang 1.200 meter kanan-kiri talud Kali Asin. Proyek itu dilaksanakan bersamaan dengan pemasangan *sheet pile* pada 800 meter kanan-kiri talud Kali Semarang dalam proyek yang sama. Upaya itu dibarengi juga dengan pengerukan sedimentasi kedua sungai. Pertimbangan dalam proyek itu adalah elevasi Kali Asin dan Kali Semarang yang lebih tinggi dari permukiman warga. Pemasangan *sheet pile* dan pengerukan sedimen sungai diupayakan untuk meningkatkan kemampuan sungai menampung air pasang yang berbalik. Hal itu ditujukan agar air sungai dan air pasang naik tidak meluap menggenangi permukiman warga. Dengan demikian, kerja pompa akan dapat dikurangi.[243] Namun setelah proyek selesai pada 2014, Tanah Mas tetap banjir, terutama pada saat hujan. Sebab, pemasangan *sheet pile* justru menutup saluran pembuangan primer dari lingkungan permukiman ke Kali Asin. Kerja pompa memang menjadi lebih sedikit, hanya menyedot air banjir, dari yang semula menyedot banjir dan rob. Namun penyedotan menjadi lebih intensif, karena harus mengarahkan air ke pipa pembuangan yang terletak lebih tinggi lantaran harus dipasang di atas *sheet pile*. Hal itu menimbulkan pembiayaan lebih besar.

Sementara, pengetahuan warga berbeda dari pengetahuan yang dibawa pemerintah pusat. Berdasar pengamatan keseharian warga, permukaan Kali Asin tidak selalu lebih tinggi dari permukaan saluran pembuangan sekunder dan tersier di dalam permukiman. Terlebih sejak dibangun kolam retensi yang selesai pada 2015, permukaan Kali Asin sering kali lebih rendah dibandingkan dengan permukaan saluran dalam permukiman. Pengetahuan itu digunakan warga melalui P5L untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Semarang, supaya dibuat saluran

243 Unit Sertifikasi Badan Usaha – Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, *Sheet Pile Salah Satu Upaya Atasi Rob*, http://st307883.sitekno.com/article/125617/sheet-pile-salah-satu-upaya-atasi-rob.html (diakses pada 20 Februari 2022).

gravitasi mengikuti kontur tanah di Kelurahan Panggung Lor. Caranya dengan membuat pintu air yang menghubungkan saluran sekunder dengan Kali Asin. Warga merancang, berbelanja bahan menggunakan dana hasil iuran, hingga membuat pintu air, berbekal pengalaman dan pengetahuan setiap warga. Pintu air akan ditutup ketika rob masuk ke Kali Asin, sebelum elevasi lebih tinggi daripada permukaan saluran sekunder. Pada saat pintu air ditutup, yang bekerja adalah pompa. Adapun dalam keadaan normal, ketika permukaan Kali Asin lebih rendah, pintu air tetap dibuka dan kerja pompa dihentikan.[244] Dengan demikian, tidak menimbulkan pembengkakan biaya pengoperasian pompa, sementara wilayah permukiman tetap terhindar dari genangan banjir. Maka selain berdampak baik terhadap warga, solusi disusun menggunakan pengetahuan-terletak warga itu juga berkelanjutan.

Manajemen P5L, baik dalam keorganisasian maupun teknis pengoperasian pompa, terus diperbaiki dan dikembangkan dengan tetap mempertimbangkan pengetahuan-terletak warga. Sebaliknya, pengetahuan warga pun tumbuh bersamaan dengan berjalannya P5L. Perkembangan pengetahuan itu didokumentasikan di P5L, yang selanjutnya menjadi panduan kerja keseharian. Dokumentasi tersebut meliputi, misalnya, ada dua ancaman banjir dan rob, posisi Kelurahan Panggung Lor yang dikepung tiga sungai ditambah satu sungai sejajar dan laut; ketinggian wilayah Kelurahan Panggung Lor yang berada pada 150-160 sentimeter lebih rendah daripada permukaan air laut sehingga memengaruhi kecepatan kenaikan permukaan Kali Asin dan menentukan kapan waktu menutup pintu air; kesejarahan tempat yang berasal dari tambak dan rawa yang diuruk berimplikasi terhadap potensi penurunan permukaan tanah serendah 8-10 sentimeter per tahun, sehingga perlu pengamatan harian untuk mengantisipasi kerusakan talud, jalan dan fasilitas umum lain; seluruh saluran primer, sekunder, dan tersier adalah saluran terhubung, sehingga pintu air pada rumah

244 Wawancara dengan Wakil Ketua P5L Teguh Sumedi, Semarang, 16 Februari 2022.

pompa I, III, IV, dan VI akan menarik seluruh air untuk dibuang ke Kali Asin; selanjutnya saluran-saluran baik saluran sekunder maupun tersier perlu dibersihkan dari sampah dengan memasang penyaring, sehingga tidak mengganggu kerja pompa, dan air yang terbuang ke Kali Asin telah bebas dari sampah.[245]

P5L sebagai Bentuk Demokrasi Langsung

Jalan keswadayaan kolektif warga Kelurahan Panggung Lor melalui P5L ditempuh karena warga tidak menemukan jalan keluar lain. Jalan pengaduan ke pemerintah, sebagai pihak yang dahulu mendorong dan memberi izin pembangunan kompleks *real estate* Tanah Mas, tidak berbuah solusi. Pemerintah terikat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah. Pada saat itu prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial perumahan Tanah Mas, seperti jalan, saluran air, jembatan, hingga penerangan, belum diserahkan oleh pengembang P.T. Tanah Mas ke Pemerintah Kota Madya Semarang.[246] Dalam Bab VI tentang Pembiayaan, Pasal 21 (Huruf a) peraturan tersebut dijelaskan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial, sebelum penyerahan kepada pemerintah daerah, menjadi tanggung jawab perusahaan pembangunan perumahan.[247] Alhasil, pemerintah

245 Ibid.

246 Prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial Perumahan Tanah Mas baru diserahkan ke Pemerintah Kota Semarang pada 2015. Adi Prianggoro, "Akhirnya Perumahan Tanah Mas Diserahkan kepada Pemkot", dalam *Tribun Jateng* 15 Juli 2015, https://jateng.tribunnews.com/2015/07/15/akhirnya-perumahan-tanah-mas-diserahkan-kepada-pemkot#:~:text=TRIBUNJATENG.COM%2C%20SEMARANG%20%2D%20Setelah,PSU)%20perumahan%20kepada%20Pemkot%20Semarang (diakses pada 22 Februari 2022).

247 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987, https://pustaka.pu.go.id/biblio/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-1-tahun-1987-tentang-penyerahan-prasarana-lingkungan-utilitas-umum-dan-fasilitas-sosial-

tidak akan berbuat apa-apa untuk mengeluarkan warga Tanah Mas dari genangan banjir dan rob. Sementara jalan pengaduan kepada P.T. Tanah Mas sebagai pengusaha pengembang perumahan sudah tertutup sejak Koperasi Prestamas dinyatakan tidak mampu mengelola pompa.

Selanjutnya, setelah P5L dibentuk pada 1996, dilakukan musyarawah yang menghasilkan kesepakatan pendanaan dan operasional kerja. Pertama, anggota P5L adalah seluruh warga Kelurahan Panggung Lor, yang berarti seluruh warga Tanah Mas. Kewajiban anggota adalah membayar iuran kepada koordinator lapangan, dengan besaran iuran setiap bulan bergantung pada tipe rumah yang ditempati. Rumah tipe C sebesar Rp6.500, rumah tipe CM Rp10.500, rumah tipe B Rp22.500, dan rumah tipe A Rp35.000. Kedua, ketua RT dan ketua RW berfungsi menjadi koordinator pembayaran iuran. Ketiga, badan pengawas yang terdiri atas para ketua RW dibentuk untuk mengawasi kinerja P5L. Badan pengawas merupakan badan otonom di luar P5L yang memiliki kepengurusan (ketua, sekretaris, dan bendahara) tersendiri. Keempat, pergantian pengurus dilaksanakan melalui pemilihan oleh warga sekali dalam tiga tahun. Sebelumnya, warga lebih dahulu mendapat laporan pertanggungjawaban kerja pengurus P5L.[248]

Kesepakatan tersebut berkembang dari tahun ke tahun untuk mendapatkan kinerja P5L yang lebih baik. Ide-ide yang diserap dari warga, digodok oleh pengurus P5L menjadi rencana kerja. Fungsi pengawasan badan pengawas beranggota 15 ketua RW memberikan masukan kepada pengurus. Sekali dalam tiga bulan, P5L memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana iuran warga kepada badan pengawas dan warga. Jika kinerja P5L dinilai tidak benar, tidak lagi berdampak terhadap kehidupan warga, atau tidak lagi berdasar kepentingan warga, badan pengawas dapat memberikan teguran.

---

perumahan-kepada-pemerintahan-daerah/EB2J7 (diunduh pada 22 Februari 2022).

248 Wawancara penulis dengan Wakil Ketua P5L Teguh Sumedi, Semarang, 16 Februari 2022.

Menurut Teguh Sumedi yang juga merupakan Wakil Ketua P5L, biasanya badan pengawas memberikan masukan pada rencana baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Namun terlebih dahulu rencana itu dibahas dalam musyawarah, mempertimbangkan dana yang tersedia, supaya dapat dioperasionalkan. Yang terpenting, tujuan utama kerja P5L adalah mengelola wilayah Perumahan Tanah Mas supaya tidak kebanjiran.[249]

Pengelolaan lingkungan tempat hidup yang dilakukan warga Kelurahan Panggung Lor dengan P5L merupakan praktik demokrasi langsung dalam basis operasional pada komunitas. Dalam praktik itu suara warga dihimpun dalam majelis lingkungan bernama P5L untuk dimusyawarahkan. Hasilnya, muncul menjadi kekuatan kewargaan untuk menyelesaikan persoalan warga pada tempat hidup mereka. Keadaan itu berbeda dari keadaan sebelumnya, ketika suara warga Tanah Mas yang kemudian menjadi Kelurahan Panggung Lor tidak mendapatkan saluran. Keadaan sebelumnya itu merupakan implikasi praktik demokrasi perwakilan, manakala wakil rakyat dalam lembaga eksekutif dan legislatif yang dipilih warga, yang merupakan kelompok elite (sekelompok kecil individu) dalam politik kenegaraan, yang merumuskan penyelesaian persoalan warga. Di Panggung Lor, contohnya, penyelesaian persoalan limpasan rob ke permukiman ditentukan oleh kelompok elite di Jakarta dengan menormalisasi sungai dan memasang *sheet pile*; pengelolaan fasilitas permukiman dan perumahan di Panggung Lor ditentukan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dibuat sekelompok elite di Jakarta. Kenyataannya, penyelesaian yang dirancang oleh kelompok elite perwakilan itu tidak berdampak terhadap perbaikan kehidupan warga, pun dalam penyelesaian persoalan kewargaan, seperti terjadi di Panggung Lor.

249 Wawancara penulis dengan Wakil Ketua P5L Teguh Sumedi, Semarang, 16 Februari 2022.

Dalam praktik demokrasi perwakilan, pengetahuan-terletak warga sulit disuarakan. Oleh karena itu, sulit mendapatkan saluran menuju ke dalam proses perumusan solusi krisis atau permasalahan yang dihadapi warga. Hal itu karena dalam praktik demokrasi perwakilan, seperti yang berlangsung saat ini, terjadi penyempitan makna politik dan makna demokrasi. Politik sekadar dimaknai sebagai politik elektoral, tentang cara bagaimana dapat memasuki lingkaran kelompok elite dalam politik kenegaraan (politikus) yang berkuasa menentukan kehidupan warga. Makna demokrasi menyempit menjadi sekadar pemilihan wakil rakyat atau pemilihan umum lima tahunan. Berbeda dari demokrasi perwakilan, dalam demokrasi langsung semua warga di dalam komunitas terlibat pengelolaan urusan secara kolektif melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam musyawarah langsung yang warga gelar. Politik pada demokrasi langsung dimaknai sebagai aktivitas keseharian di dalam lembaga kewargaan yang dikelola bersama secara partisipatif, sebagaimana berlangsung di Kelurahan Panggung Lor dengan P5L. Dengan demikian, demokrasi ketika suara dari warga dipertimbangkan oleh warga untuk menentukan kehidupan bersama terjadi sehari-hari. Demokrasi bukan hanya terjadi lima tahun sekali dalam bentuk kuantifikasi suara dalam pemilihan wakil-wakil.

Ekolog Murray Bookchin dalam menguraikan demokrasi langsung menyebutkan, demokrasi langsung melahirkan warga aktif yang keluar dari konstituen pasif. Konteks politik dalam demokrasi langsung mewujud dalam lembaga-lembaga kewargaan, komunitas-komunitas politik yang secara manusiawi terjalin dan terikat dengan lingkungan alamiahnya. Di dalam komunitas politik tersebut warga memiliki pilihan-pilihan yang berarti, bukan sekadar memilih individu yang mewakili pengambilan keputusan penentu kehidupan. Dengan aktivitas pendukung yang rasional dan etis, sesuai dengan pembagian dan kerja sama, komunitas warga tidak lagi bergantung pada kelompok elite. Pada akhirnya, demokrasi langsung akan membentuk politik yang tidak bersifat parlementer, tidak birokratis, tidak tersentralisasi, dan tidak terprofesionalisasi (politikus sebagai profesi). Namun, demokrasi

langsung akan membentuk masyarakat yang demokratis dan politis dengan budaya politik tumbuh dengan subur, diskusi publik sehari-hari meluap di pinggir-pinggir jalan, di taman, di tempat belanja, di lapangan olahraga. Di mana saja tempat orang berjumpa secara langsung (*face to face*), spontan, dan informal akan terjadi perdebatan tentang permasalahan yang mereka hadapi bersama dan memunculkan keputusan-keputusan berupa tindakan.[250]

Di Kelurahan Panggung Lor, ketika perbincangan menyeruak setiap hari di mana-mana, warga membahas kebutuhan akan lingkungan tempat hidup yang bebas dari banjir. Rupanya hal itulah yang membentuk kesadaran kolektif warga bahwa percuma memiliki tempat tinggal berkonsep *real estate* atau memiliki kendaraan bermotor sebagai sarana mobilitas jika lingkungan tempat hidup selalu kebanjiran. Kesadaran yang dibentuk secara bersama-sama itulah yang menjaga rutinitas pembayaran iuran untuk biaya operasional P5L. Setiap bulan sekurangnya 90% warga membayar iuran, sehingga terkumpul setidaknya Rp40 juta. Iuran digunakan antara lain untuk menggaji karyawan P5L yang terdiri atas dua orang bagian administrasi dan enam orang bagian lapangan yang setiap hari bekerja[251], biaya perawatan pintu air dan pompa, pembelian bahan bakar pompa, pembelian peralatan pendukung seperti kamera CCTV untuk membantu pemantauan ketinggian air, hingga perawatan generator untuk mengantisipasi pemadaman listrik saat banjir sehingga pompa tetap bisa bekerja.

Tidak berhenti sampai di situ. Karena perbincangan warga pun terus terjadi, politik kewargaan berjalan secara dinamis. Warga membicarakan

---

250 Janet Beihl, *Politik Ekologi Sosial – Munisipalisme Libertarian*, diterjemahkan oleh Setiaji Purnasatmoko, 2016, (Yogyakarta: Penerbit Daun Malam, [1998] 2016).

251 Berdasar wawancara dengan Wakil Ketua P5L, Teguh Sumedi di Semarang, 16 Februari 2022, pengurus P5L yang masing-masing menjadi kepala seksi persampahan, pembangunan, lingkungan, hubungan masyarakat, keamanan, dan teknikal mekanikal, bekerja sebagai relawan, alias tidak mendapatkan gaji dari sumber dana iuran warga.

soal sampah yang menumpuk di saluran tersier yang tak lain adalah selokan-selokan di depan rumah. Perbincangan informal soal sampah mereka bawa menjadi pembicaraan formal di dalam rapat kerja P5L, sehingga kemudian bisa memutuskan pembagian tugas dalam kerja sama pembersihan saluran air dari sampah. Pembersihan saluran air tersier dari sampah dilakukan setiap warga, karena saluran tersebut berada di gang-gang di depan rumah warga. Adapun pembersihan sampah di saluran sekunder tempat saluran-saluran tersier bermuara, juga pembersihan sampah di saluran primer yang menuju ke rumah-rumah pompa, dilakukan oleh karyawan lapangan P5L. Semula P5L hanya menggunakan satu kendaraan roda tiga yang memiliki bak pengangkut. Dengan pengembangan iuran warga, sejak 2017 P5L menggunakan dua kendaraan untuk mengangkut sampah supaya tidak menyumbat saluran-saluran air.[252] Dengan demikian, demokrasi langsung terbangun dan berkembang di Kelurahan Panggung Lor; warga membuat keputusan-keputusan bagi komunitas mereka.

Pada 2017 Kelurahan Panggung Lor sudah bebas dari genangan air pasang naik. Nilai jual atau sewa tanah dan bangunan di Tanah Mas kembali meningkat. Jika pada 1990-an rumah-rumah tidak laku diagunkan ke bank, pada 2017 harga rumah seluas 120 m^2 di Tanah Mas sudah melebihi Rp500 juta, bergantung pada kondisi bangunan.[253] Kendati demikian, P5L tetap beroperasi dengan mengubah kepanjangan menjadi Paguyuban Pemberdayaan Pompanisasi dan Pengelolaan Lingkungan Panggung Lor. Dinamika demokrasi langsung dan politik kewargaan pun tetap berjalan. Misalnya, pada 2017 terjadi perombakan kepengurusan lantaran kinerja P5L dinilai kurang mampu menghimpun beberapa suara warga. Pada Mei 2021 juga terjadi dinamika politik kewargaan di Panggung Lor, saat warga yang keberatan membayar iuran mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang. Gugatan itu berisi ketidaksepakatan warga membayar iuran Rp6.500 dan permintaan

---

252 Wawancara dengan Wakil Ketua P5L Teguh Sumedi, Semarang, 16 Februari 2022.

253 Ibid.

pembubaran P5L.[254] Meski akhirnya proses gugatan tidak berlanjut, dinamika politik kewargaan itu mendorong praktik demokrasi langsung di Kelurahan Panggung Lor, dengan P5L sebagai majelis lingkungan kewargaan untuk terus-menerus secara dialektis berproses menemukan bentuk yang ideal.

Perluasan secara Rizomatik untuk Mencapai Keadilan Sosial Redistributif dan Rekognitif

Kompleks Perumahan Tanah Mas atau wilayah Kelurahan Panggung Lor bisa dikatakan telah menemukan jalan keluar dari kepungan banjir dan rob. Bahkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang menyebut penanganan banjir dan rob di Tanah Mas telah mencapai 80% tingkat keberhasilan. Oleh karena itu, layak dijadikan contoh penanganan persoalan serupa di kawasan pesisir.[255] Namun, perlu diingat, untuk keluar dari kepungan banjir dan rob, warga Kelurahan Panggung Lor dengan P5L tidak dapat bekerja sendiri. Teguh Sumedi, berdasar pengalaman sebagai pengurus P5L sekaligus warga yang telah tinggal di Kelurahan Panggung Lor sejak 1992, menyatakan lewat P5L, warga Kelurahan Panggung Lor berkomunikasi dengan pemerintah untuk mengakses bantuan alat berat yang dipakai untuk mengeruk sedimen di Kali Asin dan pengerukan sampah di saluran primer menuju Kali Asin.[256]

---

254 M Zaenal Arifin, "Digugat ke PN Semarang, Hartoyo: Jika P5L Dibubarkan, Siapa yang Mengurusi Banjir", dalam *Tribun Jateng* 31 Mei 2021, https://jateng.tribunnews.com/2021/05/31/digugat-ke-pn-semarang-hartoyo-jika-p5l-dibubarkan-siapa-yang-mengurusi-banjir (diakses pada 20 Februari 2022).

255 Lanang Wibisono, "Tak Lagi Banjir Kawasan Tanah Mas Bisa Jadi Contoh Penanganan Persoalan Pesisir", dalam *Halo Semarang* 4 Februari 2021, https://halosemarang.id/tak-lagi-banjir-kawasan-tanah-mas-semarang-bisa-jadi-contoh-penanganan-persoalan-pesisir (diakses pada 22 Februari 2022).

256 Wawancara dengan Wakil Ketua P5L Teguh Sumedi, Semarang, 16 Februari 2022.

Ada dua hal yang dapat dirumuskan dari keadaan tersebut. Pertama, penanganan banjir dan rob di Tanah Mas layak dijadikan contoh. Dengan kata lain, memiliki potensi diduplikasi atau dijadikan proyek percontohan bagi kampung lain. Namun apa atau bagian mana yang sebetulnya dapat dicontoh serta bagaimana cara pencontohan itu? Pertanyaan tersebut penting, mengingat sering kali proyek percontohan seperti itu hanya menjadi gerakan yang latah, meniru-niru, lalu akhirnya gagal dan tidak berdampak terhadap penyelesaian persoalan warga.[257]

Namun model P5L menyimpan potensi ketidakmerataan, ketika hanya Kelurahan Panggung Lor yang terbebas dari banjir dan rob, sedangkan warga kampung-kampung di sekitarnya seperti Kelurahan Kuningan tetap kebanjiran. Karena itu, kedua, penanganan banjir dan rob di Tanah Mas, sebagaimana tidak dapat berjalan sendirian tetapi butuh kerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, sedianya berjejaring dengan kampung-kampung di sekitarnya yang sejauh ini belum dilakukan. Jaringan itu perlu dibuat supaya kampung lain juga bisa terbebas dari banjir. Adapun P5L dapat memperoleh informasi perihal keadaan dari kampung lain yang berguna bagi kerja keseharian. Dalam persoalan sedimentasi di Kali Asin, misalnya, mengingat Kelurahan Panggung Lor berada di hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Garang, P5L perlu mendapatkan informasi asal-usul material endapan dari kampung di kawasan hulu DAS. Informasi mengenai debit Kali Garang yang berdekatan Sungai Bulu Drain yang membatasi Kelurahan Panggung Lor juga perlu diketahui. Secara keseluruhan, mereka akan memperoleh jalan keluar bersama-sama dalam cakupan wilayah yang lebih luas.

257 Seperti proyek normalisasi Kali Semarang dalam program Drip (1985). Proyek normalisasi yang sama diterapkan di sungai-sungai lain di Semarang (Kali Garang, Kali Banger, Banjir Kanal Timur), juga di tempat lain, Kota Jakarta hingga Kabupaten Demak. Namun normalisasi Kali Semarang tidak menyudahi banjir dan rob di Panggung Lor.

Kedua rumusan itu dapat diringkas menjadi penanganan banjir dan rob di Kelurahan Panggung Lor dengan lembaga P5L layak diluaskan, tetapi perluasan itu membutuhkan jaringan kerja sama untuk mencapai keadilan. Maka alih-alih menjadikan P5L sebagai proyek percontohan, prinsip demokrasi langsung yang menghimpun pengetahuan-terletak warga dalam pembentukan dan kerja sama kewargaan yang terlembagakan dalam P5L tersebutlah yang perlu diluaskan. Lembaga seperti P5L tidak dapat menjadi percontohan yang persis, karena keadaan setiap daerah tidak sama.

Gambarannya sebagai berikut. Dua kelurahan lain yang berdekatan dengan Panggung Lor adalah Panggung Kidul dan Kuningan. Kelurahan Panggung Kidul memiliki luas wilayah 3.400 hektare dengan jumlah penduduk 7.307 jiwa atau 2.379 keluarga. Kelurahan Kuningan memiliki luas 4.100 hektare dengan jumlah penduduk 14.584 jiwa. Berdasar penelitian Konsorsium Ground Up, warga di ketiga kelurahan itu sama-sama menghadapi krisis sosial ekologis serupa, yakni banjir dan rob. Sebanyak 73,2% warga pernah mengalami banjir saat hujan melebihi kapasitas drainase, sedangkan 40% warga pernah mengalami rob. Banjir yang lama menggenangi rumah berdampak terhadap kesehatan. Hal itu pernah dialami 66,1% warga. Sebagai upaya menghadapi banjir dan rob, 35,7% warga pernah meninggikan atap dan dinding rumah. Sebanyak 37,5% warga mengatakan jalanan di depan rumah mereka pernah ditinggikan. Namun itu bukan keadaan yang homogen.

Keadaan ekonomi warga di ketiga kelurahan tersebut berbeda. Keadaan ekonomi warga Kelurahan Kuningan kurang baik jika dibandingkan dengan Kelurahan Panggung Lor dan Panggung Kidul. Keadaan itu tergambar pada luas rumah dan lebar jalan di Kelurahan Kuningan yang sebagian besar lebih kecil dari luas rumah-rumah di Panggung Lor dan Panggung Kidul. Di antara ketiga kelurahan itu, warga Kelurahan Kuninganlah yang paling jarang meninggikan rumah, sehingga lebih banyak rumah lebih pendek daripada ketinggian rumah di dua kelurahan lain. Besar kemungkinan pengumpulan iuran warga

yang setiap bulan mencapai Rp40 juta di Kelurahan Panggung Lor akan sulit didapat di Kelurahan Kuningan.[258] Selain itu, kepadatan penduduk di Kuningan berbeda dari Panggung Lor. Pada 2022, kelurahan dengan luas 0,81 km^2 itu dihuni 14.155 penduduk, sedangkan Kelurahan Panggung Lor yang lebih luas (2,43 km^2) dihuni oleh lebih sedikit penduduk (12.722 jiwa).[259]

Kelurahan Panggung Lor, Panggung Kidul, dan Kuningan sebetulnya berada dalam sistem polder (kolam retensi) yang sama sebagai bagian dari penanganan banjir Kota Semarang. Polder Tanah Mas berada di sebelah barat, menampung aliran dari Kelurahan Panggung Lor dan Panggung Kidul. Di sebelah timur ada polder Kali Semarang yang antara lain menampung aliran air dari Kelurahan Kuningan. Supaya tidak terjadi banjir saat hujan dan rob, air harus dipompa untuk keluar dari tembok polder.[260] Di Kelurahan Kuningan ada delapan rumah pompa, antara lain Rumah Pompa Boom Lama I, II, dan III, yang sudah memiliki genset, panel-panel, pompa banjir, ruang operasi, dan perlengkapan pemeliharaan sistem pompa.[261] Berbeda dari rumah-rumah pompa di Panggung Lor yang dapat beroperasi secara rutin, banyak pompa di Kelurahan Kuningan, baik milik warga maupun Pemerintah Kota

---

258 Database Ground-Up.

259 Badan Pusat Statistik Kota Semarang, "Kecamatan Semarang Utara Dalam Angka 2023", (Semarang: BPS Kota Semarang, 2023)

260 Hari Nugroho, Dwi Kurniani, Mega Asiska, Nuraini Nuraini, "Kajian Kinerja Sistem Polder sebagai Model Pengembangan Drainase Kota Semarang Bagian Bawah dengan Balanced Scorecard", dalam *Media Komunikasi Teknik Sipil*, Vol. 22 No. 1, Oktober 2016, hal. 43-50.

261 Berdasar database Ground-Up, hingga 2021 di seluruh Semarang terdapat 78 pompa yang difungsikan di 43 rumah pompa dengan kapasitas 83.620 m^3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak Desember 2016 membangun Rumah Pompa Kali Tenggang dan Kali Sringin untuk mengendalikan banjir di Semarang Utara yang berkapasitas masing-masing 2.000 liter/detik. Untuk membangun dua rumah pompa itu butuh biaya total sekitar Rp461,38 miliar.

Semarang, yang tidak berfungsi. Pengoperasian pompa, termasuk penggajian karyawan dan pembelian alat pendukung untuk mencapai bebas banjir, sulit dicapai dengan swakelola warga Kelurahan Kuningan. Perbedaan lain, Kelurahan Kuningan yang meskipun juga berada di hilir DAS Garang sebagaimana Panggung Lor, memiliki kesejarahan tempat yang berbeda. Kelurahan Kuningan merupakan kawasan permukiman yang jauh lebih dulu ada ketimbang Kelurahan Panggung Lor. Keadaan itu tentu membedakan pula pengetahuan-terletak warga di Kelurahan Kuningan dari pengetahuan-terletak warga Kelurahan Panggung Lor. Misalnya, di Kuningan telah terdapat saluran perpipaan kuno untuk pemenuhan kebutuhan akan air bersih.[262]

Perbedaan akan semakin kentara antara Kelurahan Panggung Lor yang berada di hilir DAS Garang dengan Kelurahan Sekaran di hulu DAS Garang. Satu contoh mencolok, misalnya di hulu DAS Garang tidak terjadi rob sebagaimana di kawasan hilir DAS Garang. Perbedaan lain, keberkurangan vegetasi di Kelurahan Sekaran karena pembangunan permukiman menambah material endapan di Kali Garang dan terbawa hingga ke kawasan hilir. Keadaan itu berpengaruh terhadap kemampuan sungai dalam menampung air, karena itu memengaruhi potensi banjir.[263] Dengan perbedaan-perbedaan itu, pemasangan pompa serta pembuatan saluran gravitasi dengan pintu air yang dilakukan P5L tidak bisa dicontoh begitu saja.

Lalu bagaimana prinsip demokrasi langsung yang terkandung dalam kerja P5L dan keseharian warga Panggung Lor dikembangkan? Gilles Deleuze dan Felix Guattari menawarkan filosofi rizomatik, berasal dari prinsip pertumbuhan rimpang atau rizoma yang tidak datang dari satu titik asal. Pertumbuhan rizomatik tidak mengenal struktur hierarki dengan satu pusat asal, tetapi merupakan proses pertumbuhan yang

262 Database Ground-Up.

263 Bosman Batubara, Bagas Yusuf Kausan, Eka Handriana, Syukron Salam, Umi Ma'rufah, *Banjir Sudah Naik Seleher – Ekologi Politis Urbanisasi DAS-DAS di Semarang*, (Semarang: Citra Prima Nusantara, 2021), hal. 200-207.

datang dari banyak sumber asal, acak (random), sangat kompleks, tidak homogen. Deleuze dan Guattari menolak paradigma *arborescene* atau model pohon, saat sebuah benih ide akan tumbuh menjadi akar dan cabang yang banyak, dengan satu batang penopang yang kukuh. Dalam model pertumbuhan pohon, segalanya dapat dilacak dan terhubung kembali ke benih asal. Adapun pertumbuhan rimpang adalah saling berhubungan tanpa memiliki pusat, tidak dapat dilacak, baik dari mana berasal maupun sampai di mana berakhir, tidak memiliki bentuk atau struktur tertentu, ia tumbuh di mana-mana di setiap titik sehingga sulit dicabut atau dimusnahkan.[264] Singkat kata, perluasan secara rizomatik merupakan pengembangan yang cair, tumbuh, dan terbuka pada perkembangan lebih lanjut.

Jika demokrasi langsung pada majelis kewargaan seperti P5L akan diperluas ke suatu tempat, di tempat baru diyakini telah ada pengetahuan-terletak warga berdasar pengalaman ketubuhan yang secara kolektif hidup dan tinggal di sana. Maka gagasan demokrasi langsung dalam pembentukan dan kerja P5L, masuk ke tempat baru dengan tujuan untuk bertemu gagasan lain, sehingga secara dialektis akan terus berkembang.[265] Dengan demikian, yang dibahas oleh majelis warga di wilayah hulu merupakan solusi banjir yang berbeda dari wilayah hilir. Misalnya, solusi banjir di wilayah hulu seperti di Kelurahan Sekaran bukan solusi pompa dan pintu air seperti di Kelurahan Panggung Lor, melainkan pembatasan kawasan terbangun dan perluasan kawasan vegetasi. Jadi, ketika hujan, wilayah hulu tidak akan mengirim air bersama material endapan besar-besaran ke wilayah hilir.

---

264 Gilles Deleuze dan Felix Guattari, *A Thousand Plateaus - Capitalism and SchizophreniaI,* diterjemahkan oleh Brian Massumi (London: University of Minnesota Press Minneapolis [1987] 2005).

265 Bosman Batubara dan Eka Handriana, “Dari Krisis Sosial-Ekologis ke Ekologi Sosial: Kasus Suburbia Semarang”, dalam *Jurnal Prisma* Vol. 40 No. 4, 2021, hal. 30-46.

Begitu pula dengan wilayah hilir lain yang keadaannya tidak sama dengan Kelurahan Panggung Lor, barangkali akan memunculkan solusi berbeda sesuai dari pengetahuan-terletak warga dan tidak melulu bergantung pada infrastruktur besar berbiaya mahal. Perluasan demokrasi langsung dalam P5L secara rizomatik itu perlu untuk memecahkan persoalan krisis sosial ekologi yang menantang seperti banjir dan rob di level lebih besar dari wilayah kelurahan, misalnya wilayah kota. Sebab level krisis berupa banjir dan rob sudah bukan di wilayah kelurahan lagi, melainkan mencapai wilayah kota. Bahkan jika mengacu ke bentang alam berupa DAS, tempat dari mana dan ke mana air permukaan mengalir, level krisis sudah melampaui wilayah kota. Mengingat batas-batas DAS melewati dan bukan merupakan batas-batas administratif wilayah kota seperti Kota Semarang.

Perluasan secara rizomatik memberi pintu masuk bagi partisipasi komunitas lain untuk menjadi warga aktif dengan kekuatan pengetahuan-terletak masing-masing, alih-alih menjadi konstituen pasif dalam menghadapi permasalahan lingkungan tempat hidup. Perluasan secara rizomatik menautkan keadaan yang berbeda-beda dari beberapa tempat hidup komunitas. Jadi setiap komunitas dalam redistribusi secara horizontal duduk setara, tidak ada pusat pertumbuhan ala pohon ketika ada komunitas yang paling mendapatkan rekognisi (pengakuan) yang menjadi pusat asal perkembangan. Feminis dan pemikir teori kritis Nancy Fraser merumuskan dimensi keadilan sosial, yang mensyaratkan redistribusi hak yang merata sekaligus rekognisi atau kepedulian yang menjamin partisipasi secara setara (*participatory parity*). Politik rekognisi, menurut Fraser, bukan pengakuan atas satu identitas kultural tertentu, melainkan pengakuan atas setiap individu dan komunitas tertentu untuk berpartisipasi secara setara dalam tatanan sosial politik. Ketika ada dominasi salah satu pola atau identitas kultural dan menjadi terinstitusionalisasi, di situlah mulai muncul persoalan ketiadaan pengakuan (*misrecognition*) atas identitas kultural lain yang

menghambat perluasan kesetaraan partisipasi politik, karena itu juga menghambat ketercapaian keadilan sosial.[266]

Menggunakan rumusan Nancy Fraser tersebut dapat disimulasikan, jika pembentukan P5L dijadikan contoh atau pusat dari mana asal pertumbuhan berasal dan tidak diluaskan secara rizomatik (horizontal) yang setara, maka akan mengidap potensi menjadi eksklusif. Pengakuan atas penanggulangan banjir dan rob di Kelurahan Panggung Lor dengan P5L akan menjadi dominan, sehingga menghambat partisipasi komunitas warga lain dalam politik lingkungan perkotaan. Misalnya, jika tidak ada kepedulian atau rekognisi terhadap komunitas warga Kelurahan Kuningan, tidak ada pengakuan atas pengetahuan-terletak warga di Kuningan, demokrasi langsung di Panggung Lor tidak diperluas ke Kuningan, maka komunitas warga Kuningan tidak akan berpartisipasi dalam menentukan lingkungan tempat hidup yang bebas banjir. Tidak akan tercapai keadilan sosial, justru ketimpangan bagi komunitas warga Kelurahan Kuningan karena masih akan terus ditimpa penderitaan atas krisis sosial ekologi berupa banjir dan rob. Respons atas krisis dalam skala besar membutuhkan penguatan solidaritas sosial. Oleh karena itu, respons partikularitas justru dapat memperparah krisis bagi yang ada di bagian lain.

---

266 Nancy Fraser, "Social Justice in The Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, Participation", dalam *Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) Berlin Discussion Paper*, No. FS I 98-108.

VII

Okupasi, Solidaritas, dan Reokupasi:

Perjuangan Kaum Miskin Kota Membangun Kampung Tambakrejo, Semarang

Bosman Batubara dan Iqbal Alma Ghosan Altofani[267]

Sari: Kami mendokumentasikan proses membangun – mendirikan, merawat, dan mempertahankan – Kampung Tambakrejo, Semarang, dengan menggunakan "perjuangan" sebagai kerangka teori dengan tiga elemen: okupasi, solidaritas, dan reokupasi. Proses okupasi bantaran Banjir Kanal Timur (BKT) dimulai akhir 1970-an, melalui pembuatan tambak oleh warga. Pada Mei 2019, program manajemen banjir Normalisasi BKT menggusur 164 kepala keluarga (KK). Penggusuran membentuk solidaritas warga, aktivis organisasi nonpemerintah, mahasiswa, dan seniman melawan penggusuran. Sebanyak 97 KK

267 Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua *interlocutor* (teman bercakap-cakap) yang telah merelakan waktunya kami pakai untuk wawancara, juga kepada Noer Fauzi Rachman, kolega penulis pertama dalam mendiskusikan permasalahan kaum miskin kota, termasuk tulisan ini.

bertahan di lokasi, tidak mengambil tawaran pemerintah pindah ke rumah susun sederhana sewa. Reokupasi terjadi melalui pembangunan rumah deret untuk 97 KK yang bertahan dengan dibiayai pemerintah. Data untuk tulisan ini berasal dari observasi partisipatoris, wawancara mendalam, data kependudukan, dan media (arus utama dan sosial).

Kata-kata kunci: Okupasi, solidaritas, reokupasi, kaum miskin kota, Tambakrejo, Semarang.

Membangun dan Mempertahankan Kampung Tambakrejo Semarang

Hak atas perumahan yang layak dan terjangkau adalah salah satu masalah yang sangat persisten di kota-kota di negara-negara Selatan Global (*Global South*).[268] Di Indonesia, menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),[269] sekitar 22% (sekitar 29 juta jiwa) penduduk tinggal di kawasan yang disebut kumuh (*slums*). Permukiman yang disebut *slums* biasanya dicirikan oleh hunian yang padat, bangunan tak beraturan (*irregular*), kurang akses terhadap infrastruktur seperti akses terhadap air, sanitasi, dan jalan, rentan terhadap bencana, dan biasanya tidak memiliki klaim kepemilikan tanah yang kuat atau sering kali disebut permukiman ilegal. Dalam hal ini, ilegalitas ditinjau dari sudut pandang peraturan pemerintah.

Warga yang tinggal di (daerah yang oleh PUPR dikategorikan sebagai) *slums*, di Indonesia lazim dikenal dengan kaum miskin kota. Di kota seperti Jakarta, keberadaan kaum miskin kota tak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa perampasan tanah di perdesaan. Di Pulau Jawa dan Madura, sebagai contoh, melalui perusahaan seperti Perhutani,

---

268 David Satterthwaite, "Getting Land for Housing; What sStrategies Work for Low-Income Groups?", dalam *Environment & Urbanization*, Vol. 21, No. 2, 2009, hal. 299-307.

269 Ministry of Public Works and Housing, Directorate General of Human Settlement, *The National Urban Slum Upgrading Program: Environmental and Social Management Framework* (Jakarta: PUPR, 2016).

negara menguasai 2,5 juta hektare tanah yang di dalamnya mencakup wilayah banyak desa. Tanah-tanah tersebut bukanlah tanah kosong, karena kehidupan warga di desa-desa tercakup dengan berbagai cara terhubungkan dengan keberadaan hutan. Pembangunan bendungan-bendungan pada era Orde Baru, sebagai bagian dari modernisasi pertanian era Revolusi Hijau, adalah peristiwa lain yang membentuk momen-momen perampasan tanah di perdesaan.

Perampasan-perampasan tanah seperti itu mengubah total bentang alam perdesaan. Perubahan itu bukan hanya dalam hal klaim atas tanah, melainkan juga menyangkut kualitas lingkungan. Yang terakhir terjadi karena tanah yang dikuasai negara biasanya dikelola dengan sistem monokultur dengan tanaman seperti pinus. Pola tanam dan tanaman seperti itu menurunkan fungsi ekologi bentang alam karena mengurangi perkolasi air permukaan ke dalam siklus air tanah, yang pada ujungnya meletakkan bentang alam perdesaan terayun pada dua ekstrem hidrologi: makin mudah banjir pada musim hujan dan makin mudah kekeringan pada musim kemarau.[270]

Perubahan kepemilikan lahan di perdesaan melalui proses perampasan tanah, berkombinasi dengan kebangkrutan fungsi-fungsi ekologi bentang alam perdesaan, adalah bagian yang tak terpisahkan dari migrasi desa-ke-kota yang sudah menjadi karakter khusus kota-kota di Indonesia. Tidak memiliki tanah di desa adalah salah satu faktor yang membuat para penduduk pindah dari desa kelahiran ke Jakarta, menjadi tukang becak, pada 1970-an dan 1980-an.[271]

Para migran dari perdesaan biasanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Itu membuat mereka susah berkompetisi untuk bekerja di

---

270 Bosman Batubara, Michelle Kooy, Yves Van Leynseele, Margreet Zwarteveen, dan Ari Ujianto, "Urbanization in (Post-)New Order Indonesia: Connecting Unevenness in the City with that in the Countryside", dalam *The Journal of Peasant Studies,* Vol. 50, No. 3, 2023, hal. 1207-1226.

271 Yosh Azuma, "Socioeconomic Changes among Beca Drivers in Jakarta, 1988-98", dalam *Labour and Management in Development Journal*, Vol. 1, No. 6, 2000, hal.

sektor formal, seperti perkantoran, di perkotaan. Penghasilan yang tidak teratur membuat mereka hanya bisa menjangkau kawasan-kawasan rentan di perkotaan sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, mengapa permukiman kaum miskin kota biasanya berada di daerah-daerah yang rentan banjir di kawasan perkotaan, misalnya bantaran kali atau daerah yang dekat dengan area infrastruktur perkotaan seperti waduk. Ditinjau dari lensa migrasi desa-ke-kota, pada dasarnya keberadaan kaum miskin kota tak bisa dilepaskan dari masalah-masalah agraria, seperti akses terhadap tanah di perdesaan. Dengan demikian, permasalahan kaum miskin perkotaan adalah sebuah permasalahan agraria-perdesaan yang memanjang sampai ke kota (*extended agrarian question*).[272]

Bencana banjir yang belakangan ini semakin intens di Indonesia membuat permukinan kaum miskin kota rentan menghadapi penggusuran. Yang paling lazim dijadikan argumentasi penggusuran biasanya adalah usaha meningkatkan ruang untuk air, misalnya meningkatkan debit aliran di sungai atau daya tampung waduk. Meningkatkan debit aliran sungai dipandang penting dalam manajemen banjir perkotaan agar air mengalir, tidak mandek, dan menyebabkan banjir di kawasan permukiman di sekitarnya. Meningkatkan daya tampung waduk-waduk di kota dilihat perlu dalam manajemen banjir untuk mengurangi debit yang masuk ke sungai-sungai dan kanal-kanal pada waktu yang sama.

Kampung Tambakrejo, RT 05 RW 16 Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang (lihat peta pada Gambar VII-1), adalah salah satu contoh permukiman kaum miskin kota. Tambakrejo digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, 9 Mei 2019. Alasan penggusuran itu adalah normalisasi BKT, sebagai bagian dari proyek manajemen banjir Kota Semarang.

1-31.

272 Lihat Batubara, Bosman & Noer Fauzi Rachman, "Extended Agrarian Question in Concessionary Capitalism: The Jakarta's Kaum Miskin Kota," dalam *Agrarian South: Journal of Political Economy*, Vol. 11, No. 2, 2022, hal. 232-255.

Tambakrejo didirikan oleh warga sejak 1970-an dengan cara menduduki (okupasi) area bantaran BKT. Sebelum digusur pada Mei 2019, Tambakrejo tercatat dihuni oleh 164 KK. Setelah digusur oleh Satpol PP pada 2019, 97 KK warga bertahan dan tinggal di bedeng yang didirikan di sekitar perkampungan lama. Melalui serangkaian aksi solidaritas yang luas, akhirnya warga berhasil meyakinkan – untuk tidak menyebut memaksa – Pemerintah Kota Semarang membangun kembali Tambakrejo, sehingga memungkinkan mereka kembali menduduki (reokupasi) Tambakrejo. Dari pemaparan singkat sejarah Kampung Tambakrejo tersebut, pertanyaan yang hendak dijawab oleh tulisan ini adalah: proses-proses seperti apa yang warga lalui atau kerjakan untuk membangun – mendirikan, mempertahankan, dan merawat – Kampung Tambakrejo?

Tulisan ini menjawab pertanyaan tersebut dengan cara membidik rangkaian peristiwa menyejarah di atas (pendudukan langsung bantaran BKT oleh warga sejak 1970-an, solidaritas pada sekitar penggusuran 2019, serta reokupasi atau pendudukan ulang melalui pembangunan kembali kampung setelah penggusuran 2019), sebagai bagian dari membangun – mendirikan, mempertahankan dan merawat – kampung. Salah satu warga yang kami wawancarai secara mendalam mendeskripsikan proses itu sebagai "perjuangan". Mengikuti penjelasan *interlocutor* (teman bercakap-cakap) yang kami temui di Tambakrejo itu, kami menjadikan "perjuangan" sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan proses membangun Tambakrejo.

Kami membagi tulisan ini dalam lima blok. Blok berikutnya (kedua) mendiskusikan "perjuangan" sebagai alat analisis dengan tiga elemen; pendudukan langsung atau okupasi (*occupy*); solidaritas; dan reokupasi melalui proses advokasi untuk pembangunan kembali kampung yang sudah digusur.[273] Blok ketiga menjelaskan cara pengumpulan data yang

---

273 Analisis dengan tiga elemen ini terinspirasi dari penjelasan yang mirip untuk kasus Kampung Akuarium, Jakarta. Lihat Bosman Batubara, Guntoro, Noer Fauzi Rachman, Herlily, dan Joko Adianto, "Land Occupation, Re-Occupation,

kami pakai untuk menggarap tulisan ini. Blok keempat menyampaikan kasus yang kami bagi menjadi tiga subblok, yaitu proses pendudukan langsung sejak 1970-an, proses penggalangan solidaritas sebelum dan setelah penggusuran Mei 2019, dan proses re-okupasi melalui advokasi untuk pembangunan kembali Kampung Tambakrejo. Blok kelima menyarikan langkah-langkah praksis untuk strategi mobilisasi dari pengalaman Tambakrejo. Kami menutup tulisan ini dengan kesimpulan dan diskusi.
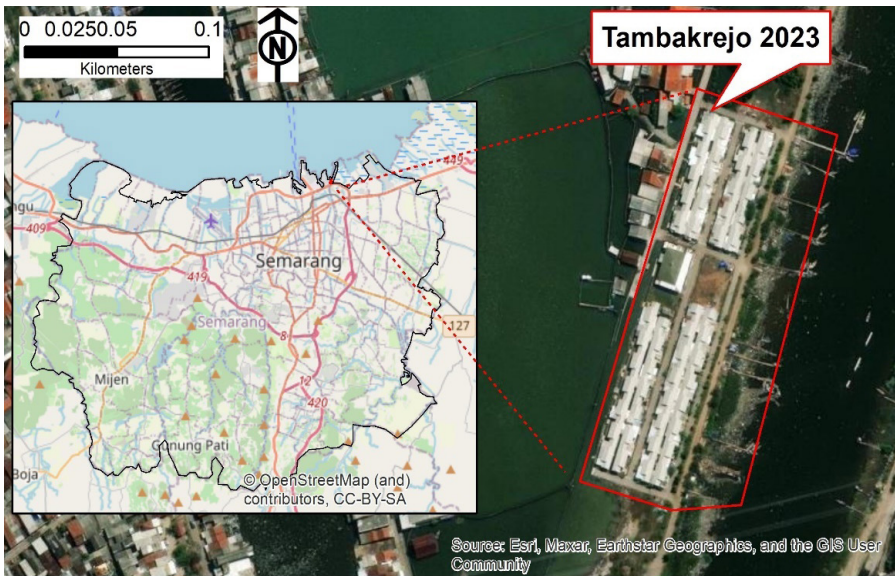
Gambar VII-1: Lokasi Tambak Rejo di bagian utara Kota Semarang.

and Housing Cooperative: Commune Formation by Jakarta's Urban Poor", dalam *Agrarian South: Journal of Political Economy*, Vol. 13, No. 1, 2024, hal. 89-109.

Perjuangan: Okupasi, Solidaritas, dan Reokupasi

Pewawancara: Itu semua disebut apa… berhasil mendapatkan rumah tadi ini lagi…?

Siji : Ya perjuangan *ta.*

Bagi Siji (nama samaran, laki-laki) proses membangun kampung, mempertahankan dari penggusuran, dan mendapatkan kembali melalui proses solidaritas dan reokupasi melalui advokasi yang panjang disebut "perjuangan". Kami sangat terinspirasi oleh pemakaian kata "perjuangan" oleh Siji. Oleh karena itu, kami menjadikannya sebagai konsep pada artikel ini, dan secara analitik membaginya menjadi tiga elemen, yaitu okupasi, solidaritas, reokupasi.

Okupasi atau pendudukan langsung adalah satu cara yang lazim dilakukan warga di Indonesia untuk mendapatkan sebidang tanah. Di berbagai kota, dengan mudah kita melihat tanah-tanah yang tak tergarap ditanami dengan berbagai tanaman seperti tomat, cabai, singkong, dan pisang, atau juga lahan rel kereta api yang menjadi halaman belakang rumah seseorang. Pemandangan seperti itu mudah terlihat di pinggir-pinggir rel kereta api, misalnya di sepanjang rel kereta api Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Kota Jakarta. Di Semarang, misalnya di Desa Mangkang Kulon, area yang ditujukan untuk pembangunan jalan inspeksi, antara Sungai Bringin yang dinormalisasi pemerintah di bawah program manajemen banjir dan permukiman warga, pada akhir Januari 2024 kami saksikan sudah ditanami warga dengan terong.

Pendudukan langsung dapat dilihat sebagai satu model aksi langsung (*direct action*). Aksi langsung sering dipraktikkan kelompok anarkis revolusioner yang banyak berkembang di negara-negara Dunia Utara (*Global North*). Aksi langsung anarkisme revolusioner adalah satu bentuk pernyataan politik langsung untuk melawan hierarki, dalam hal ini negara. Dengan mengutip anarkis Norwegia, Beyer-Arnesen, antropolog-anarkis David Graeber menjelaskan aksi langsung

sebagai suatu tindakan yang langsung mengubah material yang ada di lapangan.[274]

Beyer-Arnesen menjelaskan aksi langsung melalui pembuatan sumur oleh warga kota. Katakanlah, demikian Beyer-Arnesen, warga dalam sebuah kota mengalami kesusahan akses terhadap air tanah karena plot tanah di mana sumur air tanah (akan) dibangun dikuasai oleh seseorang, dan pemilik menutup akses warga ke tanah itu untuk membuat sumur air tanah. Kalau warga melakukan konfrontasi langsung di lapangan dan kemudian menggali sumur air tanah, dalam pemaparan Beyer-Arnesen, itu disebut aksi langsung. Namun kalau warga mengambil jalan lobi, misalnya mendatangi kantor wali kota untuk mengubah aturan tertentu agar tanah yang telah dipagar oleh pemilik tersebut dibuka kembali supaya warga bisa membangun sumur air tanah di sana, itu bukan sebuah aksi langsung.[275]

Dalam gerakan agraria di Indonesia, aksi langsung seperti yang dilakukan warga kota dalam ilustrasi Beyer-Arnesen tersebut banyak terjadi. Misalnya, para petani di Jawa dan Sumatera sudah melakukan aksi langsung dalam bentuk okupasi lahan-lahan, baik itu milik negara maupun yang dikelola nonnegara, agar mereka dapat menggarap. Berbeda dari anarkisme revolusioner di Dunia Utara yang cenderung menjadi artikulasi perlawanan terhadap negara, okupasi melalui aksi langsung pendudukan lahan di Indonesia dilakukan sebagai praktik sehari-hari (*everyday practices*) agar kehidupan bisa berjalan.[276]

Elemen analitis kedua adalah solidaritas, yang memiliki banyak makna. Dalam tulisan ini, kami mengikuti pemetaan yang dilakukan

---

274 David Graeber, *Direct Action: An Ethnography* (Edinburgh: AK Press, 2009).

275 Harold Beyer-Arnesen, "Direct Action: Towards An Understanding of A Concept", dalam *Anarcho-Syndicalist Review*, 2012, No. 29. Tersedia di https://syndicalist.us/2012/08/01/direct-action-towards-an-understanding-of-a-concept/ (diakses 5 Desember 2023).

276 Lihat, misalnya, (1) Christian Lund dan Noer Fauzi Rachman, "Occupied! Property, Citizenship and Peasant Movements in Rural Java", dalam *Development*

Hunt-Hendrix dalam disertasinya untuk memahami solidaritas. Ini kami lakukan karena disertasi Hunt-Hendrix, dalam bacaan kami yang terbatas, menjelaskan asal mula solidaritas dengan terperinci dan filosofis. Hunt-Hendrix membagi solidaritas ke dalam tiga interpretasi: republikan, marxis, dan anarkis.[277]

Bagi republikan Prancis, demikian Hunt-Hendrix, solidaritas adalah satu cara menuju negara kesejahteraan; negara dipakai untuk memperjuangkan hak-hak kaum yang tertindas. Kondisi Prancis pada akhir abad ke-19 dilihat sebagai refleksi kesejarahan, manakala hak dan tanggung jawab individual dilihat sebagai warisan dari masa lalu yang tak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat. Seseorang memiliki harta karena warisan dari leluhurnya, yang dengan berbagai mekanisme dia ambil dari masyarakat. Karena banyak orang yang hidup miskin, maka orang yang memiliki kekayaan berlebih dilihat berutang pada kemanusiaan. Solidaritas, misalnya, dapat diwujudkan dengan peran serta orang kaya membantu membayar utang orang miskin. Konsep solidaritas itu melebar ke negara, yang mengarah ke pendirian sebuah negara kesejahteraan. Gerakan solidaritas berhasil meningkatkan kondisi hidup buruh, misalnya melalui cara pengurangan jam kerja dan kenaikan upah.[278]

Bagi marxis, solidaritas muncul dalam bentuk panggilan untuk kebersatuan buruh di seluruh dunia (solidaritas internasional). Marxis melihat masyarakat terbagi atas kelas borjuis dan proletariat. Kelas borjuis adalah mereka yang menguasai alat-alat produksi seperti mesin-mesin pabrik dan tanah-tanah pertanian. Adapun proletariat adalah mereka yang menjual tenaga untuk bekerja bagi/dalam usaha-

---

and Change, Vol. 47, No. 6, 2016, hal. 1316-1337; (2) David E Gilbert, "Shutting Down the Machines of Destruction: Possibilities for Agrarian Life on the Protest Blockade", dalam *Antipode,* Vol. 55, 2022, hal. 1433-1453.

277 Leah Hunt-Hendrix, "The Ethics of Solidarity: Republican, Marxist and Anarchist Interpretations"; disertasi doktoral, 2014, Princenton University.

278 Ibid., 55-60.

usaha borjuis. Dalam proses menjual tenaga itu, proletariat diisap atau dieksploitasi oleh borjuis melalui pencurian waktu kerja-lebih proletariat oleh borjuis. Kondisi itu berlaku di industri di seluruh dunia. Oleh karena itu, solidaritas yang harus dibangun adalah solidaritas internasional kelas buruh.[279]

Bagi anarkis, musuh utamanya adalah hierarki di masyarakat. Hierarki antara kelompok borjuis dan proletar hanyalah salah satu jenis. Selain itu ada banyak hierarki, misalnya dalam hal usia (tua versus muda), jenis kelamin (laki-laki versus perempuan), tatanan sosial (institusi seperti negara versus warga). Negara dilihat sebagai sebuah institusi yang mematikan kreativitas organik warga. Karena itu, bagi anarkis revolusioner, negara adalah salah satu penghambat perkembangan kehidupan sosial yang organik, misalnya ia menghambat pertumbuhan demokrasi langsung di tingkat komune atau kota. Solidaritas bagi anarkis adalah panggilan untuk membongkar dan menjatuhkan semua bentuk hierarki.[280]

Di Indonesia, solidaritas juga berkembang dengan masif, terutama pada momen bencana alam. Umumnya solidaritas dilihat sebagai tindakan berbagi sesama warga negara. Solidaritas saat terjadi bencana bukan hanya meliputi mekanisme pertukaran yang melibatkan kekuasaan, lebih jauh solidaritas bisa juga muncul sebagai ekspresi yang dapat bersifat spiritual seperti tolong-menolong.[281]

Elemen ketiga, reokupasi melalui proses advokasi kebijakan, adalah bagian yang tak terpisahkan dari politik. Advokasi kebijakan biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil untuk mengubah kebijakan yang dilihat merugikan sekelompok masyarakat. Dalam kasus ini, yang menjadi kebijakan pemerintah adalah proyek normalisasi BKT dengan

---

279 Ibid., hal 91-129.

280 Ibid, hal. 130-149.

281 Laila Kholid Alfirdaus, Eric Hiariej, dan Farsijana Adeney-Risakotta, "Theories of Social Solidarity in the Situations of (Natural) Disasters", dalam *Politika*, Vol. 6, No.1, 2015, hal. 44-70.

warga Tambakrejo sebagai kelompok yang dirugikan oleh kebijakan tersebut. Advokasi kebijakan mensyaratkan berbagai elemen seperti pengetahuan dan keterampilan hukum, membangun jaringan, mobilisasi massa dan sumber daya, serta kemampuan lobi pada aktor-aktor yang terlibat melakukan advokasi. Produk akhir yang diharapkan dari sebuah proses advokasi adalah perubahan kebijakan yang tidak merugikan, atau lebih tidak merugikan, bagi kelompok terdampak.[282]

Perjuangan, sebagai lensa dalam tulisan ini, adalah kombinasi dari ketiga elemen – okupasi, solidaritas, dan reokupasi melalui advokasi – yang kami pakai sebagai penjelas proses membangun – mendirikan, merawat, dan mempertahankan – Kampung Tambakrejo yang dilakukan oleh warga sebagai bagian dari praktik sehari-hari, atau *laku*. Lebih luas dari sekadar pendudukan atas tanah, kami menjelaskan okupasi di Tambakrejo juga sebagai proses mengolah lingkungan untuk pekerjaan/ penghidupan (*livelihoods*) yang akan kami bahas lebih mendalam setelah uraian tentang bagaimana kami memperoleh data yang kami gunakan dalam tulisan ini pada bagian berikut.

Data

Tulisan ini kami garap menggunakan lima jenis sumber data: pengamatan partisipatif, wawancara mendalam, *database* (gudang data) advokasi, dokumen pemerintah, dan arsip di media arus utama dan media sosial.

Penulis pertama menyaksikan proses penggusuran pada 2019. Penulis pertama berada di Semarang pada waktu itu sehubungan dengan pekerjaannya sebagai peneliti di Universitas Amsterdam, pada proyek riset bertajuk "Ground-Up: A Practice Based Analysis of Groundwater Governance for Integrated Urban Water Resources Management in

---

282 Muhammad Syoffi dan Laila Kholid Alfirdaus, "Koalisi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Kebijakan Relokasi Warga Tambakrejo Kota Semarang," dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 8, No. 1, 2020, hal. 112-135.

Semarang" yang didanai The Dutch Research Council (NWO, Lembaga Penelitian Belanda). Proyek itu berlangsung pada rentang waktu 2019-2023. Pada 2023, penulis pertama kembali mendapatkan waktu untuk tinggal di Semarang melalui keterlibatan dalam proyek yang bertajuk "Caring the Flows for Healthier Urban(ized) (Ground)water in Semarang and Yogyakarta, Indonesia" yang didanai Water and Development Partnership Programme, IHE-Delft Institute for Water Education, yang sedang berlangsung dan direncanakan akan selesai pada 2026.

Yang lebih partisipatif adalah penulis kedua. Penulis kedua terlibat dalam proses pendampingan warga Tambakrejo sejak sebelum digusur sampai sekarang (Desember 2023). Keterlibatan penulis kedua dalam proses pendampingan dilakukan melalui aktivitas di Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah. Selama dalam proses pendampingan, penulis kedua mendokumentasikan data yang berhubungan dengan Kampung Tambakrejo.

Kedua penulis bertemu, terutama, melalui proses keseharian dalam Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS), sebuah koalisi dengan anggota organisasi nonpemerintah, peneliti, dan warga yang memperhatikan krisis sosial ekologis di sepanjang pantai utara (pantura) Jawa Tengah (Jateng), seperti daerah Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, dan Jepara.[283]

Untuk memperkaya dokumentasi yang dilakukan penulis kedua, pada November 2023, penulis pertama dan kedua melakukan wawancara mendalam yang direkam terhadap tujuh orang warga Tambakrejo, dan seorang aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang yang menjadi bagian dari solidaritas untuk Tambakrejo, dengan durasi masing-masing kurang lebih satu jam. Salah satu *interlocutor* dari warga Tambakrejo kami wawancarai dua kali. Wawancara mendalam itu, secara umum,

283 Lebih jauh soal koalisi MDS dapat disimak di https://www.instagram.com/malehdadisegoro/ dan https://twitter.com/malehdadisegoro (diakses 1 Maret 2024).

bermaksud untuk mengetahui kronologi proses perjuangan – okupasi, solidaritas, dan reokupasi melalui advokasi – guna memahami usaha-usaha yang dilakukan warga dalam membangun Kampung Tambakrejo. Selain itu, penulis pertama menggali kembali pengalaman penulis kedua dengan cara mewawancarainya. Dalam tulisan ini semua nama *interlocutor* dari Kampung Tambakrejo kami samarkan.

Data demografi atau kependudukan dalam tulisan ini penulis peroleh dari gudang data yang dibangun penulis kedua sebagai bagian dari kegiatan pendampingan warga. Gudang data itu berisi berbagai informasi, seperti, nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, dan pekerjaan.

Data yang didapatkan dari ketiga cara di atas (pengamatan partisipatif, wawancara mendalam, dan gudang data) dipadukan dengan berbagai sumber lain seperti dokumen proyek normalisasi BKT, publikasi-publikasi yang sudah ada tentang Tambakrejo, dan arsip di media arus utama dan media sosial, untuk merekonstruksi perjuangan warga Tambakrejo dalam tiga babak: okupasi, solidaritas, dan reokupasi melalui advokasi.

Okupasi, Solidaritas, dan Reokupasi melalui Advokasi untuk Membangun Tambakrejo

Bagian ini menjelaskan perjuangan warga Tambakrejo dalam membangun kampung. Proses okupasi bukan hanya persoalan mengklaim lahan, melainkan juga perihal membangun mata pencaharian, terutama nelayan. Proses solidaritas meliputi pekerjaan merajut koalisi berbagai elemen yang lebih luas, tidak terbatas pada warga kampung. Proses reokupasi melalui advokasi melibatkan berbagai upaya untuk mendorong pembangunan kembali Kampung Tambakrejo dalam bentuk perumahan deret.

Okupasi sejak 1970-an

Loro (nama samaran) menuturkan lahir di Medan, 1969. Ibu kandungnya asli Medan, sedangkan sang ayah dari Pacitan. Ibunya punya banyak anak, karena itu dia diangkat menjadi anak oleh perempuan lain yang tidak memiliki anak perempuan. Ibu angkatnya seorang transmigran, korban penggusuran untuk pembangunan Waduk Gajahmungkur, Wonogiri, Jawa Tengah.[284] Pada waktu itu, warga satu desa dipindahkan melalui program transmigrasi karena desa mereka ditenggelamkan menjadi waduk. Ibu angkat Loro ditempatkan di Batang Sarangan, di bagian utara Sumatera Utara, berbatasan dengan Aceh. Tempat itu merupakan daerah transmigrasi, terutama bagi mereka yang berasal dari Solo dan Wonogiri di Jawa Tengah serta kota/kabupaten lain di Jawa Timur.

Ibu angkat Loro tidak betah di daerah transmigrasi, karena di sana ada banyak hama, lintah, dan orang utan. Sebelum meninggalkan Batang Sarangan, tanah yang diberikan oleh pemerintah, mereka jual selakunya saja. Dia tidak tahu persis berapa luas tanah yang diberikan pemerintah, yang dalam istilah dia sebut hektaran. Ketika Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih eksis, GAM meminta sebagian tanah milik keluarga mereka yang masih bertahan di lokasi transmigrasi. Menurut Loro, orang GAM tidak bisa bertani. Mereka tidak punya sawah. Transmigran dari Jawa yang mengolah tanah di sana. Kemudian orang GAM menyerap ilmu bertani, lalu menyingkirkan orang Jawa. Dalam bahasa Loro, "Ilmunya diserap, orangnya ditembak."

Pada 1970-an awal, ibu angkatnya membawa dia pindah ke Semarang. Mereka tinggal di Kelurahan Rejomulyo, yang sekarang dikenal sebagai Cilosari Dalam. Di Rejomulyo, Loro bertemu laki-laki yang menjadi suaminya sekarang, Siji. Mereka menikah pada 1984, dan secara perlahan pindah ke Tambakrejo. Siji, lahir pada 1963 di

---

284 Menurut George Junus Aditjondro, *Kebohongan-Kebohongan Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 6, bendungan Gajah Mungkur diresmikan pada 1981.

Kampung Karangsuko, Semarang, yang sekarang sudah menjadi Rumah Sakit Panti Loso (Wiloso) Citarum, Semarang. Rumah keluarga mereka dibongkar untuk pembangunan rumah sakit. Pemerintah memberi kepada bapaknya tanah pengganti di daerah berbukit-bukit di Simongan. Namun bapaknya tidak mengurus tanah itu karena terlalu jauh dari Citarum. Bapaknya meneruskan mengontrak rumah di Citarum.

Siji termasuk salah seorang yang paling awal menduduki Tambakrejo. Dia mulai menggarap area bantaran BKT 1970-an akhir. Menggarap yang dimaksud di sini adalah mengolah tanah kosong di pinggir BKT dengan cara mengubah tanah *amba* (luas) menjadi tambak. Dia memanfaatkan sela-sela waktunya yang luang di antara kegiatan sehari-hari bekerja di Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dia membikin satu tambak seluas 150 m^2. Bapaknya membuat satu tambak lain. Kalau ditotal, kedua tambak seluas 300 m^2 lebih. Cara itu kemudian diikuti oleh banyak orang lain, mengubah tanah *amba* di pinggir BKT menjadi tambak.

Membuat tambak di pinggir BKT bukanlah tanpa tantangan. Salah satu pengganggu adalah aparat negara. Pada masa Orde Baru, dia dipanggil oleh Komando Rayon Militer (Koramil) Semarang Timur, karena mengerjakan tambak di bantaran BKT. "*Intine iki, ya biasalah wong-wong kuwi nggolek ngene ta* (Intinya, biasalah orang-orang itu kan mencari ini)," kata dia sambil menggesek ibu jari dan jari tengah; maksudnya minta uang. Pada ujungnya dia diminta juga untuk membeli satu set seragam pertahanan sipil (hansip).

Pada 1980-an awal, mereka membuat pondok di Tambakrejo untuk berteduh, sembari menggarap tambak. Sementara mereka sekeluarga tetap tinggal di Cilosari. Pada 1990-an mereka membuat rumah dan menetap di Tambakrejo. Di atas tanah di Tambakrejo tidak bisa langsung dibangun rumah, tetapi harus menguruk atau menimbun dulu. Misalnya, satu truk material penimbun berupa bongkaran dari bangunan lain berharga Rp150.000 pada waktu itu. Untuk menimbun tanah seluas 8 x 12 meter, misalnya, butuh 15 truk material urukan. Mereka membuat rumah, antara lain, dengan memanfaatkan (mendaur ulang) ranting-

ranting kayu dan bambu yang dibawa hanyut oleh banjir BKT dan mengendap di pinggir atau tersangkut di bagian-bagian tertentu kanal. Setelah sekitar lima tahun bersama dengan lima keluarga lain menempati rumah mereka di pinggir kanal, mulai berdatangan tetangga.

Sejak 1998, orang makin banyak datang dan tinggal di Tambakrejo. Orang-orang datang bisa dengan cara mematok lahan di pinggir BKT atau juga bisa dengan membeli dari orang yang sudah lebih dulu mematok lahan. Membeli di sini bisa dilakukan dengan cara mengganti uang rokok dan uang ke sana-kemari dalam mematok tanah di pinggir BKT. Uang ganti rokok itu antara Rp200.000 dan Rp300.000, untuk tanah berukuran 4 x 12 meter. Namun itu bukan harga mati, melainkan bergantung pada kesepakatan kedua pihak. Motivasi orang untuk tinggal di Tambakrejo adalah, daripada mengontrak rumah di tempat lain, lebih baik mendirikan rumah di Tambakrejo. Di sisi lain, Koramil Semarang Timur tak pernah datang lagi seperti sebelum 1998.

Secara kronologis, apa yang dialami warga Tambakrejo itu bukan cerita tunggal. Penurunan Suharto oleh Gerakan Reformasi pada 1998 membuat rezim melemah, dan itu banyak gerakan rakyat di perdesaan gunakan untuk menduduki tanah-tanah yang tak digarap.[285]

Kemelemahan negara setelah Reformasi 1998 juga menjadi peluang bagi warga di Tambakrejo. Sejak 1998, rumah di Tambakrejo semakin banyak. Pada 2003, berdasar perkiraan Loro, jumlah kepala keluarga di Tambakrejo sudah antara 40 dan 50. Sekitar 2013, anggota pengajian ibu-ibu, menurut Loro, sudah mencapai 60 orang. Ditambah yang tidak ikut pengajian, mungkin pada 2013 jumlah kepala keluarga yang tinggal di Tambakrejo sudah mencapai 100.

Orang-orang Tambakrejo datang dari berbagai daerah. Gudang data kependudukan Tambakrejo yang memuat data 96 KK (368 jiwa, 131 orang di antaranya berusia di bawah 17 tahun dan 236 orang berusia di

---

285 Christian Lund, *Nine-tenths of the Law* (New Haven: Yale University Press, 2020), hal. 19.

atas 17 tahun) memperlihatkan variasi asal warga Tambakrejo. Mayoritas warga (265 orang) Tambakrejo saat ini orang yang lahir di Semarang. Sisanya (103 orang) berasal dari daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Demak, Grobogan, Klaten, Jepara, Boyolali, dan Kudus, seperti tersaji pada Tabel VII-1.

Tabel VII-1: Tempat Lahir Warga Tambakrejo (diolah dari data kependudukan Tambakrejo yang didokumentasikan oleh penulis kedua, Iqbal).

Tempat Lahir	Jiwa	Jumlah
Semarang	265	265
Demak	47	47
Grobogan	15	15
Klaten	7	7
Jepara	6	6
Boyolali	5	5
Kudus	3	3
Kebumen, Batang, Karang Anyar, dan tidak diketahui.	Masing-masing 2	8
Temanggung, Purwodadi, Sragen, Cilacap, Jakarta Utara, Rembang, Sragen, Kendal, Gunung Kidul, Surakarta, Kabupaten Semarang, Ulak Paceh	Masing-masing 1	12
Jumlah		368

Dalam hal pendidikan, seperti sudah kami sampaikan pada bagian pembuka tulisan ini, umumnya tingkat pendidikan di kalangan kaum miskin kota rendah, terlihat pula di Tambakrejo. Dari 314 orang warga yang terdokumentasikan pendidikannya, hanya dua orang yang memiliki tingkat pendidikan sarjana (S-1), dengan mayoritas warga memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar (SD), seperti tersaji dalam Gambar VII-2.
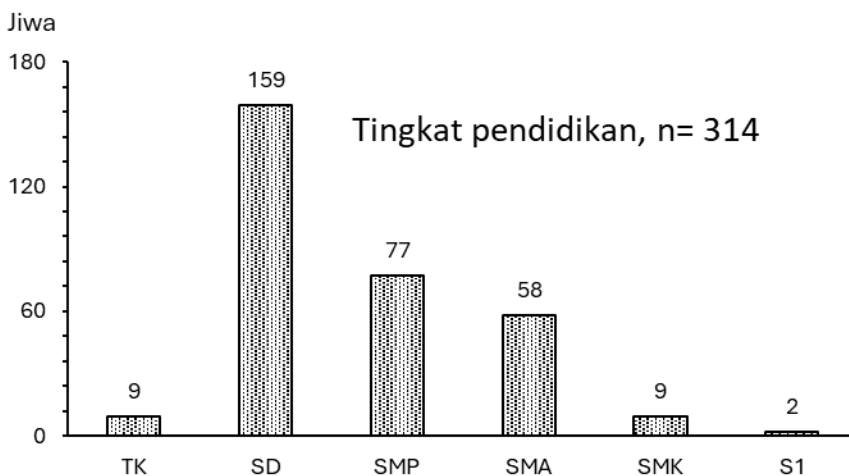
Gambar VII-2: Tingkat pendidikan warga Tambakrejo (diolah dari gudang data kependudukan yang didokumentasikan oleh penulis kedua, Iqbal).

Warga Tambakrejo menyandarkan hidup pada berbagai jenis pekerjaan. Mirip dengan pola yang kami sampaikan pada bagian pembukaan tulisan ini tentang pekerjaan kaum miskin kota, dapat disebutkan mayoritas orang Tambakrejo bekerja di sektor yang sering disebut sebagai sektor informal. Dari 210 orang dengan jenis pekerjaan yang tersedia pada gudang data yang kami pakai, hanya 39 orang dapat dikategorikan bekerja di sektor formal, misalnya sebagai buruh pabrik dan karyawan swasta. Adapun 171 orang bekerja di sektor informal. Di sini kami memahami informalitas sebagai sektor pekerjaan yang tidak membayar pajak terhadap negara, atau juga pekerjaan yang relatif tidak memiliki kontrak. Perlu kami sampaikan, gudang data yang kami pakai tidak terlalu detail dalam hal pekerjaan. Kami membagi warga berdasar pekerjaan dalam tulisan ini hanya untuk memberikan gambaran umum tentang pekerjaan warga Tambakrejo. Pekerjaan-pekerjaan yang kami sebut sektor informal tersebut, misalnya, sopir, pedagang keliling, petugas kebersihan, penjahit, penyapu, tukang las, tenaga keamanan

(*security*), kuli bongkar muat, tukang pangkas, pemulung, nelayan, serta pekerjaan lain yang berhubungan dengan profesi nelayan seperti pedagang ikan dan buruh harian nelayan.

Pekerjaan sebagai nelayan, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan profesi nelayan, adalah sesuatu yang sangat penting bagi warga Tambakrejo. Dari gudang data yang kami miliki, 40 (20%) orang bekerja di sektor itu. Mengingat signifikansi angka ini, kami memperdalam melalui penjelasan soal budi daya kerang hijau. Hal itu sekaligus untuk menunjukkan bagaimana elemen okupasi tanah untuk rumah berjalan bergandengan dengan elemen okupasi ruang untuk membangun mata pencaharian (*livelihoods*).

Siji adalah orang pertama yang membuat rumpon bambu untuk budi daya kerang hijau di Tambakrejo, pada akhir 1990-an. Kali pertama dia membikin rumpon bambu di depan muara sungai. Dia mendapatkan ilmu budi daya kerang hijau di rumpon bambu dengan, berdasarkan penuturannya, belajar dari alam. Waktu itu dia mencari kerang hijau di alam liar (*liaran*). Kerang-kerang hijau di dasar laut menempel di batu, di kayu, di sampah seperti ban mobil bekas, umumnya menempel di apa yang bisa ditempeli. Akhirnya dia membikin sistem rumpon dengan menanam bambu di laut. Langkah itu diikuti oleh banyak tetangganya.

Pertama dia mendirikan rumpon bambu di muara sungai. Namun itu tidak bagus karena sungai membawa air tawar, lumpur, dan limbah yang membuat banyak kerang hijau mati. Rumpon di depan sungai juga berisiko kalau terjadi hujan atau banjir. Masuknya air tawar menyebabkan makanan bagi kerang, yang adalah spesies air asin, berkurang. Karena itu kerangnya kurus. Dia mencari lahan di laut yang tidak terlalu banyak limbahnya, di daerah yang disebut Kaliwatu atau muara Kali Tenggang. Daerah itu adalah bekas muara sungai yang sudah mati. Sungai sudah ditutup, sehingga tidak ada lagi lumpur dan limbah yang masuk dari sungai. Jarak dari Tambakrejo ke rumponnya yang sekarang sekitar 3,5 kilometer, bisa ditempuh dalam waktu 10-15 menit dengan kapal motor.

Lokasi di laut yang dipakai oleh nelayan untuk mendirikan rumpon terletak di luar kandang. Kandang di sini adalah area yang dipakai pemerintah untuk menjadi area lalu lintas kapal-kapal di laut yang lalu lalang keluar-masuk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Area itu tertutup bagi rumpon kerang hijau warga.

Area-area rumpon di laut sudah diplot-plot, berdasar siapa yang lebih dulu memakai. Patok-patok yang sudah ada, misalnya dalam bentuk rumpon, menjadi penanda batas area seseorang. Kalau sudah ada patok bambu, berarti itu milik seseorang. Kalau seseorang tidak *ngrumat* (merawat) area itu, tidak dipakai, orang lain bisa memakai. Kalau masih ada bambunya, berarti *dirumat* (dirawat). Kalau tidak ada bambunya, berarti tidak *dirumat*. Aturannya hanya itu. Setiap orang sudah tahu siapa memiliki area mana. Sampai saat ini belum ada orang yang memiliki surat resmi yang menyatakan kepemilikan area rumpon di laut. Ide untuk melegalisasi usaha kerang hijau muncul di kalangan nelayan. Dengan tujuan, lebih agar nelayan bisa memiliki alas hak jika, misalnya, rumpon mereka ditabrak kapal-kapal tongkang.

Rumpon bambu dapat berfungsi sebagai tempat pemancingan. Orang-orang biasanya datang untuk memancing di sekitar rumpon. Ikan-ikan senang berkeliaran di sekitar rumpon. Dalam penjelasan Siji, itu terjadi karena ikan-ikan kecil memakan lumut-lumut yang menempel di batang-batang bambu. Karena ada ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar berdatangan, membentuk satu ekosistem rumpon. Namun, kalau pemancingan dibuka di rumpon, itu adalah pekerjaan tersendiri. Perlu tenaga ekstra untuk menjaga. Untuk satu kali memancing, orang membayar Rp25.000. Para pemancing biasanya memancing di gubuk-gubuk rumpon di tengah laut. Plot rumpon yang membuka pemancingan bisa memiliki sampai tujuh gubuk di tengah laut.

Untuk membangun rumpon, bambu-bambu ditancapkan ke dasar laut dengan kedalaman antara 60 sentimeter dan 75 sentimeter, atau lebih. Bambu ditancapkan dengan cara ditekan sampai mentok. Kalau sudah mentok, diperkirakan sudah cukup kuat. Makin lama bambu akan

kian kuat, karena sedimen di dasar laut makin padat. Selain itu, pada bambu yang baru ditancapkan masih ada udara, yang bisa mendorongnya untuk mengambang. Kalau dilubangi agar udara dalam bambu keluar, bambu bisa cepat lapuk. Udara dalam bambu lama-kelamaan habis karena air laut meresap ke dalam bambu. Oleh karena itu, makin lama bambu menancap kian berkurang udara di dalamnya dan makin kuat daya tancapnya di sedimen dasar laut.

Satu truk bambu kurang-lebih 500 batang dengan panjang setiap bambu sekitar 5 meter, berharga antara Rp6,5 juta dan Rp7 juta. Bambu-bambu itu bisa ditancapkan oleh pemilik rumpon atau pekerja borongan yang disewa pemilik. Bambu 500 batang bisa ditancapkan oleh dua orang pekerja dalam tiga hari, dengan upah Rp200.000/orang/hari. Total, untuk menancapkan 500 batang bambu butuh Rp1,2 juta. Kalau lancar, 500 batang bambu yang ditancapkan dapat menghasilkan 6 ton kerang hijau selama satu musim rumpon yang berlangsung satu tahun.

Area laut seluas 1 meter persegi bisa ditanami sembilan-10 batang bambu. Makin rapat bambu di rumpon sebenarnya kian bagus, karena bisa dengan cepat bambu yang berdekatan dihinggapi/ditempeli kerang hijau. Kalau rapat, batang-batang bambu yang ditempeli kerang bisa membentuk tabir, satu batang bambu dengan batang lain bertemu, dihubungkan oleh kerang yang menempel di dalam air. Ukuran pertimbangan kerapatan bambu adalah badan orang. Hal itu agar orang bisa lewat di sela-selanya, untuk memudahkan pekerjaan saat panen. Kalau panen bagus, 1 meter persegi area rumpon dapat menghasilkan 1 kuintal kerang hijau, atau minimal 75-80 kilogram. Harga jual di Tambakrejo sekitar Rp3.500/kg, alias Rp350.000/kuintal. Setelah dipotong semua pengeluaran pada masa panen, sisa pemasukan biasanya dibagi dua antara pemanen dan pemilik rumpon. Tabel VII-2 menyajikan ekonomi budi daya kerang hijau rumpon bambu untuk area satu meter persegi di Tambakrejo.

Tabel VII-2: Ekonomi Budi Daya Kerang Hijau dengan Rumpon Bambu di Tambakrejo untuk 1 Meter Persegi (diolah dari wawancara dengan Siji).

Item	Pengeluaran	Pemasukan
	[Rp]	[Rp]
Bambu 10 batang	140.000	
Pemasangan 10 batang	2.400	
Membersihkan kerang pada saat panen	100.000	
Sewa/biaya perahu	20.000	
BBM perahu	20.000	
Pemanen kerang	33.800	
Pemilik rumpon	33.800	
Harga 1 kuintal kerang hijau di Tambakrejo		350.000
Total	350.000	350.000

Selain ditanam vertikal, bambu juga bisa dipasang horizontal; satu batang bambu bisa diikatkan horizontal di bambu-bambu yang ditanam vertikal. Kalau ditanam vertikal, tidak semua bagian bambu berada di dalam air. Jadi tidak semua ditempeli kerang. Kalau dipasang horizontal, semua batang bambu berada dalam air, sehingga keseluruhan batang bambu bisa ditempeli kerang hijau.

Siklus tanam bambu untuk rumpon biasanya berlangsung pada akhir Maret-awal April setiap tahun. Bibit kerang hijau biasanya mulai muncul Mei-Juni, menempel di bambu-bambu. Sejak ditanam sampai mulai panen, rumpon tidak terlalu ditengok, hanya sekali-sekali dikunjungi. Biasanya selain kerang, tumbuh juga benalu yang disebut *runti merica.* Benalu ini tajam, kalau kena tangan bisa sobek. *Runti merica* menempel di batang-batang bambu, sedangkan kerang hijau menempel di *runti merica*. Kalau ada ombak dan arus agak besar, *runti merica* bisa rontok, demikian pula kerang. Kerang yang jatuh ke dasar laut bisa tetap tumbuh/hidup, meskipun sekitar 80% biasanya

mati. Kalau ada banyak benda, seperti kayu, di dasar laut, kerang bisa menempel di sana, hidup, dan kelak bisa dipanen. Pada Agustus sudah mulai bisa panen, tetapi masih harus memilih kerang-kerang yang sudah bisa dipanen. Sekitar September-November-Desember sudah harus ditebas semua, dipanen raya. Sebab kalau tidak diambil, kelak ombak datang dan semua batang bambu bisa disapu gelombang. Selama Desember-Maret, kerang tidak datang. Tahun depan, akhir Maret-awal April, ombak sudah mulai reda, dan masa pemasangan bambu dimulai lagi. Kalau masih ada sisa bambu yang menancap, bisa dipakai lagi.

Ada beberapa risiko harus dihadapi oleh para nelayan di rumpon bambu kerang hijau. Pertama, rumpon bambu ditabrak oleh kapal tongkang yang terlepas dari jangkar. Kedua, bambu-bambu tumbang dan hanyut disapu dan diseret gelombang tinggi/besar. Itu biasanya terjadi setiap tahun. Siji pernah mengalami semua bambu yang dia tanam disapu dan dibawa oleh gelombang dan arus. Bambu-bambu yang sudah disapu gelombang biasanya diseret arus ke mana-mana, dan orang-orang adu cepat "memanen" – dalam ungkapan Siji – bambu-bambu yang diseret arus dan diombang-ambingkan gelombang.

Ketiga, "kambing hitam", yaitu dicuri orang atau tetangga. Fluktuasi muka air laut juga berpengaruh. Kerang yang sepenuhnya berada di dalam air, tidak terpapar dengan naik-turun muka air laut, biasanya akan tumbuh baik. Kerang yang hinggap/menempel agak ke bagian atas bambu yang ditancapkan vertikal, terpapar dengan naik-turun muka air laut, biasanya akan terhambat pertumbuhannya (*stunting*). Untuk suatu penyebab yang belum diketahui, pernah terjadi dalam satu tahun, *kijing* atau kerang tidak bagus, hanya ada kerang hitam. Kalau ada kerang hitam, kerang hijau tidak datang.

Proyek-proyek infrastruktur (seperti pembangunan tanggul laut yang direncanakan oleh pemerintah) dapat mengaduk-aduk sedimen dari dasar laut dan menyebabkan air laut keruh. Kalau air laut keruh,

perkembangan kerang hijau terhambat. Sebagai contoh, sekitar awal 2000-an ada penanaman pipa gas di dasar laut yang mengaduk-aduk tanah/sedimen dan membuat air laut keruh. Siji meminta ganti rugi Rp1,5 juta. Perusahaan yang menanam pipa gas tidak percaya di sana ada rumpon. Akhirnya terjadi adu argumentasi, yang berhasil dia menangkan dan tuntutannya dipenuhi.

Budi daya kerang hijau di Tambakrejo makin masif belakangan ini (2023). Mayoritas warga di Tambakrejo memiliki rumpon kerang hijau. Ada empat kelompok nelayan di Tambakrejo dengan anggota masing-masing 14 orang. Berarti ada 56 KK yang memiliki rumpon kerang hijau. Selain itu, ada juga kelompok yang memiliki rumpon kolektif. Yang berkelompok baru diorganisasikan belakangan ini belum pernah panen (sampai November 2023). Dengan makin masif orang membudidayakan kerang hijau di rumpon bambu, dengan sendirinya kasus-kasus pencurian kerang hijau berkurang.

Makin berkembang budi daya kerang hijau di Tambakrejo tak dapat dipisahkan dari proyek normalisasi BKT dan penggusuran pada 2019. Normalisasi BKT menyebabkan blok-blok mangrove yang semula adalah habitat bagi kepiting, yang biasanya ditangkap dan dijual warga, menghilang. Begitu blok-blok mangrove habis dibongkar oleh normalisasi BKT, kepiting habis, kemudian banyak orang mengalihkan mata pencarian ke budi daya kerang hijau di rumpon.

Solidaritas: 2018/9-2021

Normalisasi BKT merupakan proyek yang sudah direncanakan oleh pemerintah sejak 2016. Proyek itu diinisiasi Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, serta Pemerintah Kota Semarang; unit terakhir bertugas membantu "menertibkan" masalah sosial yang terjadi selama proses normalisasi. Rilis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air/PUPR pada 17 Oktober 2016 menjelaskan,

tujuan utama normalisasi BKT adalah mengurangi banjir di Semarang, sebagai salah satu dari 20 kota dengan krisis banjir di Indonesia.[286] Proyek itu merupakan kelanjutan normalisasi yang dilakukan pada Sungai Banjir Kanal Barat (BKB) Semarang. Proyek normalisasi BKT dimulai sejak 2017 dan selesai pada 2021.[287] Proyek normalisasi BKT dilakukan dari jembatan Jalan Majapahit hingga muara, dengan total panjang 6,7 kilometer, dan berdampak terhadap 1.374 petak pedagang kaki lima (PKL), dan 666 plot/petak hunian.[288]

Menurut Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PUPR, Saproyogi, alokasi anggaran untuk normalisasi BKT kira-kira Rp560 miliar.[289] Anggaran itu dibagi menjadi tiga paket, dengan perincian paket: (1) dimulai dari muara pantai hingga jembatan kereta api sepanjang 1,95 kilometer dan nilai kontrak Rp107.878.670.000, (2) dari jembatan kereta api hingga Jembatan Citarum sepanjang 2,05 km dan nilai kontrak Rp169.335.319.000, dan (3) dari Jembatan Citarum hingga Jembatan Majapahit sepanjang 2,7 kilometer dan nilai kontrak Rp187.099.224.000.[290]

Melalui proyek itu, bantaran BKT diproyeksikan menjadi salah satu tujuan wisata baru di Semarang. Sebab, lahan sepanjang bantaran BKT

---

286 Lihat: https://sda.pu.go.id/berita/view/setengah_triliun_rupiah_untuk_normalisasi_banjir_kanal_timur_semarang (diakses 4 Februari 2024).

287 Lihat: https://radarsemarang.jawapos.com/cover-story/721387556/banjir-kanal-timur-sudah-siap-sambut-musim-hujan-sungai-beringin-masih-dinormalisasi (diakses 4 Februari 2024).

288 Nico Andi Wauran, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Warga Terdampak Proyek Normalisasi Kanal Banjir Timur Kota Semarang", skripsi Universitas Negeri Semarang, 2020, hal. 2.

289 Lihat: https://sda.pu.go.id/berita/view/setengah_triliun_rupiah_untuk_normalisasi_banjir_kanal_timur_semarang (diakses 4 Februari 2024).

290 Lihat: https://semarangkota.go.id/p/74/lanskap_banjir_kanal_timur_masa_depan (diakses 4 Februari 2024).

akan disulap menjadi zona rekreasi dan sarana olahraga, seperti sarana permainan sepeda, sepatu roda, serodotan, dan permainan tangga. Namun, muncul berbagai permasalahan selama proses normalisasi BKT, seperti penggusuran. Penggusuran pertama proyek dilakukan kepada para pedagang di Jalan Barito pada 7 Maret 2017[291] dan diakhiri dengan penggusuran Kampung Tambakrejo pada 9 Mei 2019.[292]

Warga Tambakrejo mendapatkan surat dari Kelurahan Tanjungmas pada 1 Februari 2018. Surat peringatan pertama berisi larangan pendirian bangunan di sepanjang BKT. Surat peringatan kedua warga terima 8 Februari 2018, berisi perintah agar warga segera membongkar dan memindahkan bangunan yang ada saat itu. Setelah mendapatkan surat peringatan kedua, menurut Telu (seorang warga, nama samaran, perempuan), warga melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Semarang yang dihadiri Camat Semarang Utara, wakil BBWS Pemali-Juana, wakil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Semarang, dan Asisten Wali Kota Semarang. Dalam audiensi pada 2 Maret 2018 itu, warga membahas tiga hal, yaitu (1) rencana relokasi yang jauh dari mata pencaharian mereka, (2) ketiadaan kepastian pekerjaan dan sekolah bagi anak-anak, dan (3) ganti rugi atas bangunan mereka.

Salah satu alasan terbesar penolakan warga atas penggusuran adalah mengenai rencana relokasi mereka ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kudu yang berada di Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Genuk. Jika dihitung menggunakan aplikasi Google Maps, lokasi Tambakrejo ke Rusunawa Kudu berjarak sekitar 10 kilometer. Lokasi yang jauh itu akan menghilangkan mata pencaharian warga

---

291 Lihat: https://mediatajam.com/normalisasi-banjir-kanal-timur-bkt-pedagang-barito-enggan-direlokasi (diakses 4 Februari 2024).

292 Lihat: https://serat.id/2019/05/09/lbh-semarang-sayangkan-pengusuran-warga-tambakrejo/https://serat.id/2019/05/09/lbh-semarang-sayangkan-pengusuran-warga-tambakrejo/ (diakses 4 Februari 2024).

yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Warga secara khusus memberi cacatan agar tetap bisa bermukim dekat dengan laut, supaya kehidupan mereka sebagai nelayan tetap berlangsung. Mereka beranggapan, relokasi ke Rusunawa Kudu sama saja dengan merampas ruang hidup mereka sebagai nelayan.

Siji menuturkan, bagi nelayan seperti mereka, lokasi Tambakrejo bagus karena terletak dekat dengan laut. Tinggal di Rusunawa Kudu jelas tidak mungkin bagi nelayan. Nelayan memiliki siklus tersendiri yang cenderung seenak mereka. “Saya sebagai nelayan, bekerja tidak diperintah. Saya bekerja semau saya,” kata Siji. Pekerja nelayan yang tidak memiliki kepastian jadwal kerja seperti itu, bukan tipe yang cocok untuk tinggal di rusunawa yang terlalu jauh dari laut. Kalaupun ada transportasi terjadwal dari Rusunawa Kudu ke laut, tetap tidak cocok. Di samping memang tidak ada jaminan fasilitas transportasi dari pemerintah.

Konsep permukiman dengan model rumah susun juga tidak cocok dengan kebutuhan nelayan. Contohnya, nelayan membutuhkan ruang/tempat untuk menyimpan peralatan kerja seperti jaring, tempat ikan, hingga hasil tangkapan. Sementara ruangan yang disediakan dalam rusunawa hanya 24 m^2. Penolakan relokasi diperkuat oleh hasil survei warga di beberapa rusunawa, seperti rusunawa di Kebonharjo dan Kudu mengenai kondisi fisik dan kehidupan warga di rumah susun tersebut. Warga Tambakrejo berkesimpulan, tinggal di rusunawa tidak baik bagi mereka.

Namun, para pejabat yang hadir dalam audiensi tidak dapat memenuhi permintaan warga. Mereka tidak dapat memastikan penggantian kerugian atas bangunan warga, dengan alasan selama ini warga menempati tanah negara. Jadi seandainya gagal dalam perjuangan,

pada ujungnya orang yang tidak sepakat pindah ke Rusunawa Kudu tetap akan bisa dipindah ke sana.

Pada masa-masa itu, petugas Satpol PP Kota Semarang menyampaikan ada kompensasi oleh pemerintah Rp5 juta per keluarga yang mau pindah ke Rusunawa Kudu. Orang-orang yang sudah setuju pindah ke rusunawa diminta oleh petugas Satpol PP menjadi *penggaet*, mengajak para tetangga untuk juga pindah. Ada iming-iming kompensasi dari Satpol PP untuk jasa *penggaet*. Sebanyak 50-an KK kemudian setuju pindah ke rumah susun. Namun baik kompensasi bagi mereka yang mau pindah ke rusunawa maupun untuk *penggaet* tidak pernah dicairkan oleh Satpol PP Kota Semarang.

Sementara di Tambakrejo, warga yang tidak memenuhi surat peringatan didatangi Satpol PP Kota Semarang, Camat Semarang Utara, dan wakil BBWS Pemali Juana pada 3 Mei 2019, untuk digusur. Penggusuran itu dapat digagalkan warga melalui aksi pengadangan. Dua hari setelah itu, yaitu 9 Mei 2019, Satpol PP Kota Semarang kembali mendatangi Kampung Tambakrejo dengan membawa alat berat tiga unit ekskavator dan puluhan mobil/truk yang membawa 200-an personel. Kali ini, selain Satpol PP, puluhan personel polisi dan tentara membantu menggusur pemukiman warga. Bahkan, menurut Telu, polisi membawa tiga anjing pelacak.

Sebelum eksekusi penggusuran, Papat (warga, nama samaran, laki-laki) bersama warga lain dan para mahasiswa meminta dialog. Tujuan mereka, agar tempat pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dipertahankan karena merupakan tempat mengaji bagi anak-anak. Ajakan berdialog tidak ditanggapi Satpol PP dan tim, dengan dalih mereka bertindak atas perintah dari atasan.[293]

293 Wawancara dengan Papat, Semarang, 16 November 2023.

Gambar VII-3: Proses penggusuran Kampung Tambakrejo pada 9 Mei 2019 (sumber dokumentasi Iqbal).

Akhirnya, Satpol PP, polisi, dan tentara memaksa membongkar rumah warga (Gambar VII-3). Suasana saat itu ricuh. Warga dan jaringan solidaritas yang mengadang aparat negara dan alat berat kalah jumlah, sumber daya jaringan solidaritas pun hanya seadanya. Semua bangunan di Kampung Tambakrejo, rumah, TPQ, hingga musala dihancurkan.

Penggusuran kampung nelayan pada hari ketiga ramadan (bulan puasa) menimbulkan kemarahan masyarakat umum, khususnya berbagai organisasi masyarakat sipil di Kota Semarang. Penggusuran kaum miskin kota sudah menjadi kebijakan pemerintah yang dikutuk warganet Indonesia (*netizen* +62). Pemicunya, penggusuran-penggusuran di Jakarta pada 2015 dan 2016, yang memuncak ketika isu itu menjadi vital dalam kampanye pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 2017. Semua itu mengagitasi masyarakat, memunculkan

simpati terhadap korban penggusuran tumbuh, dan mempermudah aliran solidaritas.

Tak pelak, semua itu memobilisasi solidaritas lebih luas. Berbagai jaringan solidaritas yang terlibat membantu warga setelah penggusuran antara lain Forum Komunikasi Warga Semarang (FKWS), Pencinta Sepeda/Goes Semarang, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Semarang, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesian (PPMI), Setara (organisasi yang fokus pada advokasi dan konseling anak jalanan), Gusdurian (jaringan warga yang terus-menerus menerjemahkan ide-ide Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur) Semarang, Persaudaran Lintas Agama (Pelita), Aksi Kamisan Semarang, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang, Dewan Kesenian Semarang (Dekase), Walhi Jawa Tengah, Bazarnas, serta berbagai organisasi mahasiswa dan organisasi lain di Semarang. Relawan dalam jaringan solidaritas tersebut menamakan diri Aliansi Peduli Tambakrejo (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Aliansi).

Tokoh-tokoh berbagai agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Konghucu) hadir di lokasi, beberapa jam setelah penggusuran, untuk memberikan dukungan moral kepada warga. Jaringan solidaritas lain hadir, membantu warga mengangkut barang-barang yang masih dapat diselamatkan, karena warga tidak sempat mengeluarkan barang-barang berharga sebelum rumah dibongkar paksa (Gambar VII-4). Selain itu, jaringan solidaritas juga membangun pos komando (posko) darurat untuk tempat tinggal warga.

Gambar VII-4: Warga dan sukarelawan menyelamatkan barang berharga setelah penggusuran (sumber dokumentasi Iqbal, 10 Mei 2019).

Menurut Telu, pada penggusuran 9 Mei 2019, semua sukarelawan Aliansi bahu-membahu, fokus membantu warga menyelamatkan barang-barang berharga dan membangun beberapa tenda darurat untuk tempat tinggal sementara, khususnya bagi perempuan dan anak-anak (Gambar VII-5). Setelah itu, sukarelawan solidaritas terus terlibat berbagi peran berdasar kapasitas masing-masing. Pembagian peran itu didasari kebutuhan warga setelah penggusuran, seperti logistik (sandang, pangan dan papan), *trauma healing* (terutama bagi perempuan dan anak), penggalangan dukungan (kampanye), dan advokasi untuk mengembalikan hak-hak warga serta pemulihan ekonomi warga.

Gambar VII-5: Tenda darurat warga setelah penggusuran (sumber Instagram Aksi Kamisan Semarang).

Beberapa organisasi yang terlibat dalam tim logistik adalah PMI Kota Semarang, Goes Semarang, Gusdurian Semarang, Aksi Kamisan Semarang, dan berbagai organisasi mahasiswa di Kota Semarang. Tim logistik fokus pada pemenuhan kebutuhan warga dari pakaian, makanan, tenda darurat, membangun fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) komunal, tempat salat, posko kesehatan, dapur umum, hingga instalasi penerangan. Uang dan barang untuk kebutuhan logistik diperoleh dari penggalangan donasi publik melalui berbagai organisasi di Kota Semarang hingga mobilisasi melalui media sosial (Gambar VII-6).

Gambar VII-6: Poster penggalangan donasi oleh Aliansi (sumber Instagram Aksi Kamisan Semarang).

Tim *trauma healing* fokus mengatasi ketakutan, kecemasan, dan kepanikan warga setelah penggusuran, terutama setelah bentrok dengan aparat hukum dan melihat rumah mereka dibongkar. *Trauma healing* dilakukan dalam berbagai bentuk, meliputi acara musik, pentas seni, pengajian, hingga acara menggambar bagi anak-anak. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan secara intens setelah penggusuran oleh Yayasan Setara, Dekase, dan kolektif-kolektif seniman di Semarang.

Reokupasi melalui Advokasi: 2019-2022

Setelah penggusuran terjadi, sukarelawan Aliansi membangun beberapa tenda darurat sebagai tempat berlindung dan tempat tinggal sementara. Adapun barang-barang berharga dikumpulkan di bawah *fly over* BKT agar terlindung dari hujan. Itu karena masa penggusuran bertepatan dengan musim hujan. Selain tenda sebagai tempat tinggal warga, ada pula beberapa tenda untuk kebutuhan logistik, dapur umum, penampungan donasi, tempat ibadah, dan sarana kesehatan. Untuk salat Idulfitri, warga harus melaksanakan di lahan bekas reruntuhan rumah mereka.

Selain fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan psikologis warga, berbagai organisasi juga tetap melakukan kampanye dan advokasi pengembalian hak warga. Mulai dari menuntut ganti rugi atas bangunan, pembuatan tempat tinggal sementara yang layak huni, hingga pengembalian Kampung Tambakrejo yang telah digusur. Upaya kampanye dilakukan dengan membuat berbagai tulisan dan poster berisi informasi penggusuran warga Tambakrejo, kekejaman aparat negara, hingga alasan mengapa hak-hak warga harus dikembalikan. Upaya advokasi dilakukan melalui audiensi dan pelaporan kepada berbagai instansi terkait, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (Gambar VII-7), Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), oleh LBH Semarang, Pattiro Semarang, Walhi Jawa Tengah, Pelita, Dekase, Yayasan Setara, dan sebagainya.

Gambar VII-7: Warga dan LBH Semarang membuat pelaporan kepada Komnas HAM, sebelum penggusuran, pada 18 Juli 2018 (sumber Instagram Aksi Kamisan Semarang).

Informasi penggusuran pada 9 Mei 2019 yang menyebar cepat lewat media massa arus utama dan media sosial menuai banyak kecaman publik. Dua kecaman terbesar adalah mengenai tindakan penggusuran paksa terhadap kampung nelayan dan penggusuran yang dilakukan pada bulan puasa. Berbagai kecaman publik itu memaksa reaksi cepat dari Pemerintah Kota Semarang dan Gubernur Jawa Tengah.

Laporan warga kepada Komnas HAM pada 18 Juli 2018 juga cepat ditindaklanjuti dengan memediasi dialog antara warga korban penggusuran dan Pemerintah Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah pada 13 Desember 2018 (sebelum penggusuran)[294] dan 12 Mei 2019 (sesudah penggusuran). Mediasi yang difasilitasi Komnas HAM pada 12 Mei 2019 dihadiri wakil warga Tambakrejo, LBH Semarang sebagai kuasa hukum warga, Gubernur Jawa Tengah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang, BBWS Pemali-Juana, Camat Semarang Utara, Dinas Perumahan Permukiman, Satpol PP Kota Semarang, dan Lurah Tanjungmas.

Dalam mediasi itu, warga menegaskan penolakan terhadap rencana relokasi ke tempat tinggal setelah penggusuran, Rusunawa Kudu. Warga menuntut, dengan cara memberikan pilihan kepada pemerintah, berupa pemberian kaveling tanah, rumah subsidi, atau rumah deret kepada warga. Dengan catatan, warga cenderung menginginkan rumah deret di lokasi yang sama dengan rumah lama mereka. Keinginan itu disampaikan Limo (nama samaran, laki-laki), salah seorang warga yang ikut mediasi. Dia menyampaikan terdapat wilayah di Kalimati yang dapat dipadatkan dan dibangun rumah deret. Dalam mediasi tersebut, menurut Enem (warga, nama samaran, laki-laki), warga menekankan tuntutan berdasar rasa kemanusiaan. Menjauhkan nelayan dari laut sama saja dengan merampas ruang hidup nelayan.

Setelah pemberitaan media tentang penggusuran, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah saat itu, marah. Dia merasa dirugikan karena citranya menjadi buruk. Dalam ungkapan Ganjar, "Saya diolok-olok media massa dan publik, dianggap tidak mengurus warga saya." Itu membuat Ganjar mengejar kesanggupan Wali Kota Semarang, Hendrar

---

294 Dalam pandangan Nico Waruan, aktivis LBH Semarang, kuasa hukum warga Tambakrejo, penggusuran 9 Mei 2019 sebenarnya tidak perlu, karena dalam mediasi 13 Desember 2018, warga sudah menyatakan akan pindah sendiri, lihat https://serat.id/2019/05/09/lbh-semarang-sayangkan-pengusuran-warga-tambakrejo/ (diakses 1 Maret 2024).

Prihadi, untuk memenuhi tuntutan warga. Wali Kota Semarang lantas menyanggupi tuntutan warga dan berjanji membangun rumah deret di lokasi yang sama dengan rumah warga sebelum penggusuran. Dia berjanji menyelesaikan pembangunan rumah deret dalam 1,5 tahun, dengan alasan membutuhkan waktu untuk memadatkan tanah. Namun Hendrar Prihadi menyampaikan konsekuensi dari pilihan warga akan lokasi, berupa status tanah yang bukan milik warga, melainkan milik BBWS Pemali-Juana. Artinya, setiap saat BBWS Pemali-Juana dapat saja meminta lahan itu.

Selagi menunggu proses pembangunan rumah deret, warga bertahan dengan membangun tenda-tenda darurat. Ganjar Pranowo menawarkan kepada warga untuk sementara pindah ke Rusunawa Kudu. Namun tawaran tersebut warga tolak. Pitu (warga, nama samaran, laki-laki) sebagai wakil warga, menawarkan solusi agar pemerintah membangun hunian sementara (huntara) berupa bedeng[295] di lokasi bekas penggusuran dengan jumlah empat unit. Permintaan itu disanggupi sebagian oleh Wali Kota; hanya dua unit rumah bedeng yang dibangun. Jumlah itu belum dapat menampung semua warga korban penggusuran. Warga kemudian meminta tambahan rumah bedeng kepada Camat Semarang Utara. Permintaan tersebut dipenuhi dengan membangun satu unit rumah bedeng, sehingga ada tiga bedeng yang dijadikan hunian sementara yang selesai dibangun Agustus 2019.

Satu unit bedeng mampu menampung hingga 20-an keluarga. Kondisi bedeng yang tanpa sekat membuat warga terpaksa tidur berjejer secara bercampur dan mengakibatkan suami dan istri jarang melakukan hubungan suami-istri. Tak pelak, itu menimbulkan kejenuhan. Dalam penjelasan salah seorang warga:

> “Hampir seluruhnya kami tidur tanpa sekat, berjejer satu sama lain begitu. Misalkan yang suami tidurnya berjauhan dengan

---

295 Bedeng merupakan hunian sementara yang biasanya dipergunakan untuk buruh di lokasi proyek.

istri dan kebetulan secara tidak sengaja mendapat tempat dengan yang lain. Ada rasa khawatir tersendiri jika terjadi sesuatu yang tidak baik. Lebih tepatnya saat itu, terutama yang suami-istri jarang berinteraksi satu sama lain. Lama-kelamaan kami juga merasa jenuh atas kondisi tersebut." (Papat, wawancara 2 Januari 2024)

Akhirnya warga sepakat membuat sekat di bedeng, memisahkan setiap ruang yang berukuran 2 x 4m masing-masing bagi setiap keluarga. Ukuran itu sangat sempit. Setiap ruang disesaki oleh keluarga yang sebagian besar beranggota lebih dari tiga orang, ditambah barang-barang. Selain sempit, bedeng juga bising. Lokasi bedeng tepat di bawah jalan layang yang melintang di atas BKT, dilintasi macam-macam kendaraan bermotor (Gambar VII-8).

Gambar VII-8: Warga berkumpul di bawah jalan layang pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 16 Agustus 2020 (sumber dokumentasi Iqbal, 16 Agustus 2020).

Untuk memastikan aspirasi warga pada mediasi 12 Mei 2019 diwujudkan bahwa akan dibangun rumah deret di lokasi yang sama dengan rumah warga sebelum penggusuran, warga Tambakrejo

didampingi LBH Semarang kembali melakukan audiensi pada 25 Oktober 2019. Menurut Nico Wauran, pendamping warga dari LBH Semarang,[296] dalam audiensi itu diketahui terdapat alokasi dana untuk pembangunan permukiman nelayan Rp11,5 miliar dan telah dimasukkan dalam rencana anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang 2020. Belakangan secara terperinci diketahui dana pembangunan Kampung Nelayan Tambakrejo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 2020, disalurkan melalui satuan kerja Disperkim dengan nama paket Pembangunan Kampung Nelayan Tambakrejo.

Melalui pengumuman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Kota Semarang[297] diketahui nominal pagu[298] pembangunan Kampung Nelayan Tambakrejo Rp11.311.000.000. Adapun nilai harga perkiraan sendiri (HPS)[299] paket Rp9.836.346.981, yang dikerjakan CV Adyatma sebagai pemenang tender. Itu berarti, ada selisih antara anggaran yang direncanakan (pagu) oleh Disperkim Kota Semarang pada 2020 dan anggaran yang dipakai (HPS) oleh pemenang tender, yaitu CV Adyatma. Sementara, dalam sebuah kesempatan, Hendrar Prihadi menyampaikan biaya yang dikeluarkan untuk membangun Kampung Nelayan Tambakrejo sekitar Rp8,3 miliar (Gambar VII-9).[300] Ia menyampaikan dana tersebut bersumber dari dana tidak terduga yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang. Itu berarti,

---

296 Wawancara dengan Nico Wauran (pengacara LBH Semarang), Semarang, 22 Desember 2023.

297 Lihat https://lpse.semarangkota.go.id/eproc4/lelang/5120108/pengumumanlelang (diakses 4 Februari 2024).

298 Pagu dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) diartikan sebagai batas nilai tertinggi (maksimal) anggaran yang dikeluarkan.

299 HPS adalah harga barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak ketiga, dikalkulasi ahli berdasar data yang dapat dipertanggungjawabkan.

300 Lihat https://www.rmoljawatengah.id/walikota-semarang-resmikan-masjid-al-haibah-dan-kampung-nelayan-tambakrejo (diakses 18 Desember 2023).

anggaran yang dikeluarkan jauh lebih kecil lagi daripada pagu yang disampaikan LKPP Kota Semarang.

Gambar VII-9: Papan proyek pembangunan Kampung Nelayan Tambakrejo (sumber dokumentasi Iqbal, 16 Agustus 2020).

Berdasar penuturan Limo, sesuai dengan informasi yang ia dapat, terjadi pengurangan anggaran pembangunan Kampung Nelayan Tambakrejo. Yang dikurangi adalah anggaran pembangunan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Dengan demikian, Pemerintah Kota Semarang hanya membangun unit rumah deret, tanpa fasum dan fasos. Pengurangan itu disebabkan oleh pengalokasian anggaran untuk dana penanganan Covid-19.

Setelah audiensi 12 Mei 2019, warga mendata jumlah kepala keluarga yang berhak mendapatkan rumah deret, yang kemudian dilaporkan ke Disperkim. Data tersebut dijadikan bahan dalam perencanaan anggaran dan desain rumah deret Tambakrejo. Warga bingung dalam pengambilan data penerima rumah deret, antara data kepemilikan

jumlah rumah sebelum penggusuran dan data kepala keluarga yang bertahan. Kebingungan itu bersumber dari, misalnya, ada kepala keluarga yang memiliki lebih dari satu rumah dan ada satu rumah dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Forum terbatas yang diadakan warga memutuskan memakai penerima rumah deret berdasar jumlah kepala keluarga yang bertahan di Tambakrejo.

Sebanyak 97 KK yang bertahan di Tambakrejo diputuskan berhak menerima rumah deret. Adapun warga Tambakrejo yang sudah menerima dan pindah ke rusunawa sebelum penggusuran tidak masuk dalam daftar warga yang berhak mendapatkan rumah deret. Itulah yang menjadi alasan, walaupun sebelum penggusuran warga Tambakrejo memiliki jumlah kepala keluaga sebanyak 164 – terdiri atas 97 KK yang bertahan, 47 KK masuk rusunawa, dan 20 KK tidak terdeteksi; yang terakhir adalah warga bertempat tinggal sementara di Tambakrejo, seperti mengontrak dan kos – akhirnya, warga memutuskan yang berhak mendapatkan rumah deret adalah warga yang bertahan, yakni 97 KK.

Data yang diberikan kepada Disperkim tidak ditolak atau dikurangi. Disperkim membangun rumah deret berdasar data yang diberikan warga. Namun, menurut Enem, Pemerintah Kota Semarang tetap melakukan berbagai macam verifikasi kebenaran data tersebut. Dari pihak warga, salah satu cara untuk mempertahankan legitimasi data itu adalah dengan selalu menjawab 97 KK kepada semua orang yang bertanya soal jumlah kepala keluarga di Tambakrejo.

Oktober 2019, desain rumah deret selesai dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Semarang. Menurut Telu,[301] dalam pembuatan desain rumah deret, Dinas PU tidak menyosialisasikan kepada dan tidak melibatkan warga Tambakrejo. Untuk mengetahui desain pembangunan Kampung Nelayan Tambakrejo yang dibuat Disperkim Kota Semarang dan kemajuan pembangunannya, warga mengadakan "dialog interaktif progres pembangunan hunian warga

301 Wawancara dengan Telu, Semarang, 13 Desember 2023.

Tambakrejo", 16 September 2020 (Gambar VII-10).[302] Dalam dialog itu, warga mengundang Disperkim, Dinas PU, dan kontraktor yang membangun Kampung Nelayan Tambakrejo. Dalam dialog itu, warga menyampaikan berbagai macam usulan berkait dengan fasilitas dan infrastruktur yang dirasa penting menunjang Kampung Tambakrejo sebagai kampung nelayan.

Gambar VII-10: Audiensi warga Tambakrejo dan tim advokasi Tambakrejo dengan kontraktor rumah deret dan Disperkim Kota Semarang membahas usulan desain (sumber dokumentasi Iqbal, 16 September 2020).

Termasuk dalam usulan warga adalah desain Kampung Tambakrejo yang dibuat warga bersama tim advokasi, sesuai dengan konsep permukiman nelayan (Gambar VII-11). Desain yang dibuat tim pendamping itu, menurut Telu, penting karena konsep permukiman nelayan tidak dapat disamakan dengan permukiman lain. Desain yang diajukan warga dan tim advokasi tidak disetujui Dinas PU dan kontraktor, sehingga desain Kampung Nelayan Tambakrejo tetap menggunakan desain dari Disperkim.

---

302 Lihat https://www.instagram.com/p/CFaQh83gYaw/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== (diakses 20 Desember 2023).
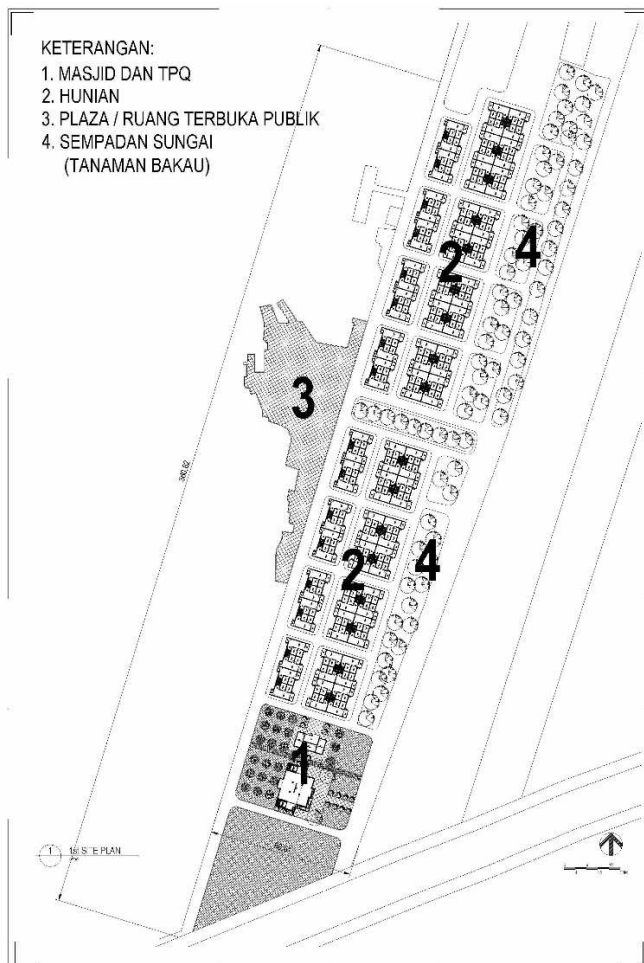
Gambar VII-11: Desain Kampung Nelayan Tambakrejo oleh tim pendamping (sumber Dr. Mila Karmilah, S.T., M.T., dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung/Unissula Semarang).

Desain Disperkim (Gambar VII-12 dan VII-13) berisi model Kampung Nelayan Tambakrejo yang berbentuk rumah deret berjumlah 97 bangunan yang dibagi ke dalam empat blok (baris) dengan kode A, B, C, dan D. Ada rumah yang berhadapan, tetapi ada pula rumah yang menghadap BKT dan tambak. Blok A berisi 24 rumah, blok B 23 rumah, blok C 25 rumah, dan blok D berisi 25 rumah.

Proyek pembangunan rumah deret selesai pada Desember 2020.[303] Artinya, selama dua tahun pemerintah membiarkan warga tinggal di bedeng. Sebanyak 97 unit rumah deret mulai ditinggali warga pada 18 Februari 2021. *Boyongan* (pindahan) ke rumah deret dilakukan pada 18 Februari 2022 bertepatan dengan 1 Rajab (dalam kalender Jawa/Islam). Kampung Nelayan Tambakrejo diresmikan oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, melalui sebuah acara di Masjid Al Haibah, Ngaliyan, 7 April 2021.[304] Walaupun diresmikan pada 7 April 2021, *boyongan* ke rumah deret pada 1 Rajab selalu diperingati warga dalam acara Grebek Kampung Nelayan, sampai sekarang (2023). Dalam acara Grebek Kampung Nelayan, salah satu kegiatan adalah Kirab Boyongan, berupa arak-arakan keliling kampung diiringi musik dan kostum.[305] Kegiatan itu menjadi pengingat bagi warga tentang penggusuran yang mereka alami dan perjuangan yang mereka lakukan untuk mempertahankan Kampung Tambakrejo.

Unit-unit rumah deret Kampung Nelayan Tambakrejo memiliki luas per unit 6 x 8 m, dipotong teras 2 m^2, dan bagian belakang rumah seluas 1,3 m^2. Rumah deret terdiri atas satu kamar tidur, satu kamar mandi, dan satu ruang tamu. Kontraktor hanya memberikan rumah kosong kepada warga dengan kondisi bangunan belum lengkap, seperti lantai masih berupa tanah, tembok masih berupa bata ringan (tanpa cat dan semen).

Perumahan deret yang dibangun belum disertai fasum dan fasos, seperti dermaga, jalan masuk kampung, penerangan jalan, masjid, tempat pelelangan ikan (TPI), dan lapangan olahraga, yang semua ada dalam desain. Akibat belum ada fasum dan fasos, warga akhirnya harus

---

303 Lihat https://jateng.tribunnews.com/2020/12/29/rumah-deret-tambakrejo-semarang-selesai-dibangun-khusus-warga-terdampak-normalisasi-bkt?page=all (diakses 14 Desember 2023).

304 Lihat https://www.rmoljawatengah.id/walikota-semarang-resmikan-masjid-al-haibah-dan-kampung-nelayan-tambakrejo (diakses 18 Desember 2023).

305 Lihat https://linikampus.com/2022/02/04/mengingat-satu-tahun-boyongan-menjaga-nyala-api-perjuangan/ (diakses 19 Desember 2023).

membangun secara swadaya. Bahkan warga menggalang dana untuk membangun Masjid Al-Firdaus sebagai tempat ibadah, TPQ, dan aula pertemuan. Selain masjid, warga juga membangun secara swadaya dermaga yang saat ini (akhir 2023) sudah berjumlah 11.

Gambar VII-12: Desain rumah deret Kampung Nelayan Tambakrejo (sumber dokumentasi Iqbal).

Gambar VII-13: Desain rumah deret Kampung Nelayan Tambakrejo (sumber dokumentasi Iqbal).

Meskipun warga sudah mendapatkan rumah, bukan berarti permasalahan selesai. Warga Tambakrejo masih menghadapi ancaman penggusuran kembali. Sebab, status lahan yang dipakai sebagai rumah deret merupakan milik BBWS Pemali-Juana dan tidak dapat ditukargulingkan.[306] Hal itu disampaikan Ali dari Disperkim Kota Semarang ketika diwawancarai *TribunJateng.com* pada 29 Desember 2020.[307] Pemerintah Kota Semarang menggunakan lahan BBWS Pemali-Juana itu dengan sistem sewa selama lima tahun untuk tahap pertama dan dapat diperpanjang hingga tahap kedua. Belum ada kepastian nasib Kampung Nelayan Tambarejo setelah batas akhir kesepakatan sewa antara Pemerintah Kota Semarang dan BBWS Pemali-Juana.

Pelajaran untuk Strategi Mobilisasi

Mengingat ke depan masalah penggusuran sangat mungkin kembali datang ke Tambakrejo, perlu membuat inti-inti strategi mobilisasi yang menurut kami penting dalam proses reokupasi melalui advokasi di Tambakrejo. Tanggapan publik yang sangat besar terhadap penggusuran Tambakrejo muncul dalam berbagai bentuk, seperti pemberitaan media arus utama (lokal, regional dan nasional), media sosial (Instagram, Twitter, dan grup Whatsapp), dan aksi langsung (penggalangan dana, bakti sosial, dan panggung rakyat). Tanggapan publik yang besar itu adalah tekanan terhadap pihak pemerintah, antara lain terhadap Ganjar

306 Tukar guling, pertukaran aset, *ruislag* atau *asset swap* adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, antarpemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Aturan mengenai tukar guling terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

307 Lihat https://jateng.tribunnews.com/2020/12/29/rumah-deret-tambakrejo-semarang-selesai-dibangun-khusus-warga-terdampak-normalisasi-bkt?page=all (diakses 4 Februari 2024).

Pranowo, yang terpaksa langsung turun tangan untuk mencari jalan penyelesaian.[308]

Tanggapan publik yang besar terhadap kasus penggusuran Tambakrejo diikuti dengan reaksi dari pemerintah, menurut Syofii dan Alfirdaus (2020: 124), adalah "akumulasi sumber daya dari berbagai organisasi yang terlibat menghasilkan berbagai strategi advokasi".[309] Memperdalam atau melengkapi pandangan Syofii dan Alfirdaus (2020), kami membagi berbagai strategi advokasi, atau lebih tepatnya strategi mobilisasi, menjadi lima bagian, yaitu (1) pembentukan tim pendamping, (2) membangun Aliansi, (3) penggalangan dukungan publik (kampanye), (4) pelaporan kepada lembaga terkait, dan (5) memaksa langkah konkret dari pemerintah.

Pertama, tim pendamping merupakan tim inti yang menjadi forum pembahasan berbagai strategi dan upaya yang akan dilakukan bersama antara warga, tim advokasi yang memahami permasalahan hukum dan kebijakan, dan jaringan solidaritas yang terlibat upaya mengembalikan hak nelayan Tambakrejo. Tim inti berisi berbagai lembaga/organisasi lintas isu (HAM, lingkungan, kebudayaan/kesenian, perlindungan anak, perempuan) dan lintas agama.

Kedua, membangun Aliansi. Aliansi merupakan wadah bagi jaringan solidaritas, baik individu maupun organisasi yang berempati terhadap penggusuran yang dihadapi warga Tambakrejo. Anggota Aliansi lebih luas dan beragam, seperti mahasiswa, organisasi pencinta alam, seniman, organisasi keagamaan, dan masyarakat sekitar Tambakrejo. Aliansi memiliki peran dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan warga setelah penggusuran, seperti pakaian, makanan, hunian, bahkan

---

308 Lihat https://jateng.suara.com/read/2019/05/12/223219/penggusuran-tambaklorok-bergejolak-ganjar-turun-tangan-pakai-jurus-ahok (diakses 14 Desember 2023).

309 Syofii, Muhammad dan Alfirdaus, Laila Kholid, "Koalisi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Kebijakan Relokasi Warga Tambakrejo Kota Semarang", dalam *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 8, No. 1, 2020, hal. 112-133.

ketersediaan air bersih. Pemenuhan kebutuhan dilakukan melalui berbagai penggalangan donasi meliputi pakaian bekas, uang, dan makanan.

Ketiga, penggalangan dukungan publik merupakan kampanye untuk menekan pihak yang berwenang, salah satunya Pemerintah Kota Semarang. Penggalangan dukungan atau kampanye itu dilakukan melalui berbagai media massa, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan Whatsapp dengan menggunakan tagar/hastag: #LawanPenggusuranTambakrejo, #TolakPenggusuranTambakrejo, #KembalikanHakNelayan, #LawanPenggusuran, hingga #TambakrejoTolakPenggusuran. Tekanan publik itu terbukti efektif untuk menyeret pihak terkait dari pemerintah agar lebih bertanggung jawab, dalam hal ini, misalnya Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Semarang.

Keempat, melapor ke lembaga terkait, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pelaporan oleh warga ke Komnas HAM dilakukan sebelum penggusuran Tambakrejo, yaitu 18 Juli 2018. Hasil pelaporan itu, setelah penggusuran Tambakrejo, Komnas HAM memfasilitasi mediasi antara warga dan Pemerintah Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah pada 12 Mei 2019.

Kelima, memaksa langkah konkret dari pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak warga. Langkah itu warga lakukan bersama organisasi nonpemerintah, misalnya LBH Semarang. Beberapa aktivitas yang mereka lakukan adalah memastikan pelaporan warga ke berbagai macam lembaga negara dan instansi ditindaklanjuti sebagai upaya menekan Pemerintah Kota Semarang mengembalikan hak warga Tambakrejo. Sebagai contoh, memastikan dan mengawal hasil mediasi 12 Mei 2019, ketika warga berhasil menekan pemerintah untuk menyediakan hunian sementara berupa bedeng sembari menunggu rumah deret selesai dibangun.

Langkah-langkah tersebut berhasil mengubah cara pandang Wali Kota Semarang, Camat Semarang Utara, hingga Lurah Tanjungmas, terhadap warga Kampung Neyalan Tambarejo, seperti Enem

sampaikan.[310] Sebelum ada penggusuran, Enem merasa warga selalu mendapatkan tanggapan berbelit-belit dari berbagai jajaran pemerintah, jarang didengarkan, jarang ditemui, dan tuntutan mereka selalu ditolak. Saat penggusuran, warga tidak mendapatkan ganti rugi uang atas rumah mereka yang dihancurkan. Tuntutan warga untuk memperoleh rumah deret juga ditolak. Namun sesudah penggusuran ramai dan terbentuk Aliansi, Enem merasa warga mendapatkan tanggapan lebih cepat dari berbagai jajaran pemerintah, selalu didengarkan, perwakilan pemerintah lebih berhati-hati ketika berurusan dengan warga, hingga tuntutan warga diterima. Bahkan hingga kini (2023), Tambakrejo sering mendapatkan program, kegiatan, dan kunjungan dari Pemerintah Kota Semarang.

Kesimpulan

Dalam tulisan ini kami telah memaparkan proses perjuangan kaum miskin kota di Tambakrejo dalam tiga babak: okupasi, solidaritas, dan reokupasi melalui advokasi. Pemaparan ini kami lakukan dengan meminjam istilah "perjuangan" yang kami dengar dari salah seorang *interlocutor*, sebagai teori payung yang kami pakai untuk, di satu sisi menempatkan kasus Tambakrejo dalam perbincangan teoretis okupasi, solidaritas, dan re-okupasi melalui advokasi, dan di sisi lain kasus Tambakrejo membantu kami mengidentifikasi tiga babak praksis dalam perjuangan warga tersebut.

Dalam pemaparan, kami memaknai okupasi bukan sekadar pendudukan lahan (untuk perumahan) atau yang dalam referensi yang kami acu dalam kasus-kasus agraria di perdesaan untuk keperluan pertanian, tetapi lebih jauh kami memaknai okupasi sebagai juga proses pembentukan cara penghidupan (*livelihoods*), atau bahkan pembentukan ekosistem, misalnya ekosistem rumpon budi daya kerang hijau yang

310 Wawancara dengan Enem, Semarang, 17 Desember 2023.

menjadi salah satu mata pencaharian warga yang penting di Tambakrejo, terutama setelah penggusuran pada 2019.

Solidaritas yang terbentuk dalam Aliansi bukanlah solidaritas dari kelompok kaya terhadap yang miskin seperti terjadi di kalangan republikan Prancis, solidaritas buruh ala marxis, atau solidaritas antihierarki atau antinegara ala anarkis revolusioner. Ia tidak antinegara, karena tetap menuntut tanggung jawab, mendesak, dan akhirnya menerima program pemerintah untuk membangun kampung deret. Di satu sisi, solidaritas dalam Aliansi adalah lintas kelas, lintas agama, lintas skala (lokal hingga nasional), dan lintas geografi/ruang. Di sisi lain, solidaritas dalam Aliansi berjangkar pada tujuan politik yang membumi: mendorong pemenuhan hak dasar warga Tambakrejo yang digusur, terutama hak terhadap perumahan dan tempat tinggal yang menunjang profesi mayoritas warga sebagai nelayan.

Dari sudut pandang jumlah kepala keluarga di Tambakrejo, di satu sisi ada kelompok warga yang mendapatkan rumah deret, yaitu 97 KK yang bertahan setelah penggusuran 2019, dan sekarang ini (2023) menjadi penghuni rumah deret di Tambakrejo. Itu dapat dilihat sebagai satu kemenangan bagi warga, setelah melalui berbagai babak dalam perjuangan yang berbeda tetapi saling berkait menjadi satu rangkaian perjuangan: okupasi, solidaritas, dan reokupasi melalui advokasi. Namun, di sisi lain, kemenangan bagi 97 KK warga itu terjadi bersamaan dengan penurunan drastis jumlah kepala keluarga di Tambakrejo dibandingkan sebelum penggusuran, yakni ada 164 KK yang tinggal di Tambakrejo.

Dari sudut pandang program pemerintah, di satu sisi seolah-olah pemerintah gagal, karena harus membangun kembali Kampung Tambakrejo yang dia gusur untuk menormalisasi BKT. Dalam perspektif ini pemerintah terpaksa memenuhi tuntutan warga yang bertahan. Di sisi lain, pemerintah tetap berhasil memaksakan normalisasi BKT, meski akhirnya mengakomodasi tuntutan warga membangun rumah deret untuk 97 KK di Tambakrejo. Keberhasilan menjalankan

program normalisasi BKT bekerja melalui proses ganda-tetapi-tunggal: penggusuran dan pembangunan perumahan deret di Tambakrejo.

Mengingat Kampung Tambakrejo yang sekarang masih sangat rentan terhadap bahaya penggusuran, terutama setelah habis masa sewa oleh Pemerintah Kota Semarang kepada BBWS Pemali-Juana sebagai pemilik lahan sesuai dengan hukum negara, warga Tambakrejo perlu sejak sekarang memikirkan langkah-langkah agar tidak digusur lagi. Karena itu, kami merefleksikan strategi untuk mobilisasi pada bagian sebelumnya, yang bisa dibuka setiap saat diperlukan. Selain itu, pilihan-pilihan lain, misalnya, terus-menerus memperkuat organisasi warga Tambakrejo dan bergabung dengan kekuatan massa yang lebih besar yang bisa mendorong penguasaan tanah oleh warga di Tambakrejo menjadi kepemilikan warga secara permanen.

VIII

Menolak Privatisasi Air

sebagai Bagian dari Upaya Merawat Air Perspektif Islam

Umi Ma'rufah

Sari: Pengelolaan air yang bertumpu pada corak produksi kapitalisme menempatkan air sebagai komoditas menjadikan sumber air dapat diprivatisasi. Akibatnya, terjadi ketimpangan akses terhadap air hingga terjadi krisis air yang mengancam sebagian besar masyarakat miskin serta keberlanjutan air itu. Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, dengan demikian penting untuk melihat pandangan agama Islam tentang air. Tulisan ini menjawab kebutuhan itu dengan melihat bagaimana agama Islam mendudukkan permasalahan air. Oleh karena itu, tulisan ini menawarkan "profetik ekologi sebagai etika pengelolaan air". Paradigma profetik ekologi — dengan instrumen objektifikasi, internalisasi, eksternalisasi, dan transendental — memandang alam sebagai amanah Tuhan yang digunakan untuk kemaslahatan manusia yang harus dijaga kelestariannya.

Kata-kata kunci: Air, privatisasi, profetik ekologi, Islam, hadis.

Kebutuhan akan Pandangan Islam tentang Tata Kelola Air

Air merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup di bumi. Sudah banyak hasil penelitian menyatakan betapa air merupakan

unsur sangat penting bagi kelangsungan hidup dan oleh karena itu juga menjadi sumber kehidupan.[311] Tubuh manusia terdiri atas 50-70% air.[312] Maka kajian mengenai air sangat penting untuk menjaga agar kebutuhan akan air dapat terus terpenuhi. Mulai dari kajian pengaturan sistem pengelolaan air untuk dapat terdistribusikan secara merata di sebuah negara[313] sampai konservasi sumber air dan pelestarian lingkungan di sekitarnya telah dilakukan.[314]

---

311 Alfandi Nur Wicaksana, "Hubungan Antara Manusia dengan Daerah Air Sungai: Dampak yang Ditimbulkan Manusia bagi Air Sungai Cisadane, Jawa Barat – Banten", dalam *Ethics and Law Journal: Business and Notary* (ELJBN), Vol. 2 No. 1 2024 ISSN 2988-1293 (*online*), atau https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/100/76 (diakses 13 Maret 2024); Muhjidin Mawardi, "Air dan Masa Depan Kehidupan", dalam *Jurnal Tarjih*, Vol. 12 (01)1435 H/2014 M, atau https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/86/87 (diakses 13 Maret 2024); Arie Herlambang, "Pencemaran Air dan Strategi Penanggulangannya", dalam *Jurnal Air Indonesia*, Vol. 2 (01) 2006, atau https://doi.org/10.29122/jai.v2i1.2280 (diakses 13 Maret 2024); Ikhwanuddin Mawardi, "Upaya Meningkatkan Daya Dukung Sumberdaya Air Pulau Jawa", dalam *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 9 (01) 2008; dan Siti Musarofah, "Ketersediaan Air bagi Kehidupan: Studi terhadap Asal-Usul dan Hilangnya Air di Bumi Perspektif Al-Qur'an dan Sains", dalam *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 14 (01) 2021, atau https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/ngabari/article/view/291 (diakses 13 Maret 2024).

312 Arif Zulkifli, *Pandangan Islam terhadap Lingkungan* (Yogyakarta: Ecobook, cet I, 2017), hal. 174.

313 Misalnya Rusmadi (2004) membahas mengenai pengelolaan air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur Jawa Barat yang *multiuser*. Ia menyinggung soal akses dan hak dan hubungannya dengan *power*, dan bagaimana mewujudkan keadilan air melalui berbagai teori keadilan. Rusmadi berkesimpulan air harus dipahami dan diposisikan sebagai barang publik (*public good*); pengelolaannya sepenuhnya dikuasai oleh badan publik (*government*) secara murni. Selengkapnya baca di Rusmadi, "Tantangan Islam: Menyisir Keadilan Air di Tengah Liberalisasi Alam", dalam *Jurnal Conference Proceeding AICIS XII*, 2004.

314 Misalnya Arie Herlambang (2006) dalam penelitiannya tentang pencemaran air dan strategi penanggulangannya, menyimpulkan dalam pengendalian

Sayang, seiring upaya menjaga ketersediaan air untuk jutaan umat manusia, terjadi pula tindakan-tindakan berlawanan yang justru mendegradasi sumber daya air baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kerusakan alam terjadi makin masif seiring perkembangan peradaban manusia, seperti konversi lahan perhutanan dan area resapan air untuk permukiman, usaha dan perindustrian, penumpukan sampah yang terus meningkat di wilayah sungai dan laut, pencemaran oleh limbah industri dan rumah tangga, pengambilan air tanah yang tidak memperhatikan kapasitas regenerasi batuan sarang air tanah (akuifer), pemberian izin tambang yang memiliki daya rusak lingkungan, dan privatisasi sumber daya air oleh segolongan kelompok swasta yang makin menyulitkan masyarakat di sekitarnya untuk mengakses air. Segala bentuk tindakan itu terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya banyak, seperti terjadi bencana lingkungan banjir dan rob, perubahan iklim yang begitu signifikan, dan terutama krisis air bersih.

Dewasa ini, krisis air bersih menjadi isu sentral yang marak diberitakan. Di beberapa kota di dunia, krisis air bersih membuat warga harus membeli air bersih dengan harga cukup mahal. Kemenjamuran air minum isi ulang adalah terstimoni tersendiri yang menunjukkan pernyataan tersebut bukanlah asumsi belaka. Hal tersebut adalah fakta, air bersih bukan lagi barang gratis yang bisa diperoleh secara bebas di alam.[315] Namun kebutuhan akan air yang makin tinggi tidak diimbangi dengan upaya konservasi lingkungan yang mampu menjaga ketersediaan

---

pencemaran perlu dilakukan perlindungan sumber air dengan menata tata ruang yang berwawasan lingkungan dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan untuk membuat sistem data yang terpadu dan kontinu guna menunjang penegakan hukum bagi pelanggaran undang-undang. Selengkapnya baca di Arie Herlambang, "Pencemaran Air dan Strategi Penanggulangannya", dalam *Jurnal Air Indonesia*, Vol. 2 (01) 2006, atau https://doi.org/10.29122/jai.v2i1.2280, (diakses 13 Maret 2024).

315 Arif Zulkifli, *Pandangan Islam terhadap Lingkungan,* (Yogyakarta: Ecobook, cet I, 2017), hal. 180.

air untuk jangka panjang. Hal itu tercermin dari bagaimana sumber daya air yang seharusnya dikelola dan didistribusikan secara merata ke seluruh masyarakat, justru dengan mudah dimonopoli oleh segelintir pihak yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai komoditas. Privatisasi atas sumber daya air oleh pihak swasta malah menjadikan krisis ketersediaan air makin berkepanjangan.

Di Indonesia, perusahaan air minum di berbagai daerah menimbulkan masalah berkait dengan ketersediaan air bagi masyarakat di sekitar. Masyarakat pun banyak yang menolak kehadiran perusahaan air mineral. Seperti Warga Desa Adat Pelandung, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang menolak aktivitas eksplorasi air tanah yang dilakukan PT Tirta Investama, produsen air mineral bermerek Aqua, di wilayah mereka.[316] Lalu warga Serang, Pandeglang, Banten, memprotes dan mengusir PT Tirta Fresindo Jaya, anak perusahaan Mayora, yang dianggap telah mengganggu mata air yang menopang kehidupan warga.[317] Ada pula ratusan petani dari berbagai daerah di Klaten, Jawa Tengah, menggelar aksi menuntut PT Tirta Investama (TI) yang menjadi produsen air minum dalam kemasan (AMDK) merek Aqua, segera ditutup.[318] Masih banyak lagi kasus perebutan sumber

---

316 Ni Komang Erviani, "Warga Tolak Privatisasi Air Bersih oleh Produsen Minuman Aqua", dalam *Mongabay.co.id* (diposting 15 Januari 2013), https://www.mongabay.co.id/2013/01/15/warga-tolak-privatisasi-air-bersih-oleh-produsen-minuman-aqua/ (diakses 13 Maret 2024).

317 Arbi Sumandoyo, "Melawan Penyedotan Mata Air oleh Mayora Group", dalam *Tirto.id* (diunggah 3 April 2017), https://tirto.id/melawan-penyedotan-mata-air-oleh-mayora-group-cl4f (diakses 13 Maret 2024).

318 Avit Hidayat, "Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah", dalam *Metro.tempo.co* (diunggah 16 Oktober 2018), https://metro.tempo.co/read/1136744/pemerintah-dki-susun-aturan-penghentian-eksploitasi-air-tanah (diakses 13 Maret 2024).

daya air yang justru membuat masyarakat sulit mendapatkan air untuk kehidupan mereka.

Praktik dan anggapan air sebagai komoditas tak lain merupakan akibat dari penerapan paradigma ekonomi kapitalisme yang menganggap segala sesuatu dapat dilabeli dengan nilai uang, dipertukarkan, alias menjadi komoditas. Air yang sudah diolah dan dikemas akhirnya dapat dijual dan memberi keuntungan bagi pemodal, dalam rangka menyediakan air bagi masyarakat. Jadi, permasalahan akses terhadap air yang susah telah diubah oleh para kapitalis air menjadi momen untuk mengeruk keuntungan. Syarat agar air dapat dijual adalah menjadikannya barang privat, dengan menguasai sumber air, agar perusahaan air tersebut dapat terus mengambil keuntungan. Akhirnya air — baik yang berasal dari air permukaan, mata air, maupun air tanah — disedot dan dieksploitasi sedemikian rupa sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan serta ketersediaan air bagi masyarakat di sekitarnya.

Dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, penting untuk melihat pandangan agama Islam tentang air. Tulisan ini menjawab kebutuhan tersebut dengan melihat bagaimana agama Islam mendudukkan permasalahan air. Untuk itu, tulisan ini menawarkan "profetik ekologi sebagai etika pengelolaan air" sebagai cara pandang agama Islam terhadap tata kelola air, sekaligus sebagai lensa analisis yang digunakan dalam tulisan ini.

Pada bagian berikutnya, tulisan ini menjejerkan berbagai kritik dalam tata kelola air, meliputi (1) kritik terhadap privatisasi air, (2) kritik terhadap air sebagai barang privat, (3) kritik terhadap air sebagai komoditas, dan (4) kritik terhadap distribusi air yang timpang. Setelah itu, tulisan ini menjelaskan lensa "profetik ekologi sebagai etika pengelolaan air" dengan mengambil inspirasi dari relasi ilmu pengetahuan dan agama. Pada bagian berikutnya, cara pandang "profetik ekologi sebagai etika pengelolaan air" dipakai untuk membedah satu per satu kritik dalam tata kelola air tersebut. Tulisan ini ditutup dengan kesimpulan.

Kritik dalam Tata Kelola Air

Bagian ini menyajikan empat kritik dalam tata kelola air, yaitu 1) kritik terhadap kedudukan air yang dikelola oleh negara, (2) kritik terhadap air sebagai barang privat, (3) kritik terhadap air sebagai komoditas, dan (4) kritik terhadap distribusi air yang timpang.

Kritik terhadap Privatisasi Air

Privatisasi air adalah proses yang mendominasi tata kelola air sekarang. Privatisasi air dilihat sebagai solusi terhadap krisis air yang terjadi, ketika air menjadi barang berharga pada abad ke-21. Kemelambungan nilai air disebabkan oleh jumlahnya yang dari hari ke hari menurun, sedangkan tingkat penggunaan kian tinggi. *World Water Development Report* (WWDR) pada 2003 sudah menyatakan dunia terancam akan mengalami kelangkaan air. Diperkirakan pasokan air per orang turun sepertiga dalam 20 tahun ke depan. Pada 2000 minimal ada kematian 2,2 juta jiwa karena kualitas sanitasi yang rendah dan 1,1 miliar penduduk dunia tidak mendapatkan akses pasokan air bersih yang cukup.[319]

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kelangkaan air sebagai *water stress,* yang menjadi faktor utama ketergangguan penopang kehidupan dasar masyarakat. PBB juga merilis prakiraan pada 2025 populasi dunia yang tinggal di daerah dengan skala *water stress* akan mencapai 35%. Bank Dunia meramalkan pada 2025, dua pertiga populasi dunia akan mengalami krisis air bersih. Ekonomi dunia akan mengalami masa suram dengan krisis air bersih, sehingga Bank Dunia menyebut air sebagai "minyak abad 21". Untuk menghadapi krisis tersebut, menurut Bank Dunia, perusahaan swasta, terutama perusahaan multinasional, akan memainkan banyak peranan dalam

319 Ahmad Zarkasi Efendi, Anam Rifai, Arif Erwinadi, Yosef Eko Budi Susilo, *Bisnis Air: Komodifikasi, Privatisasi, dan Eksploitasi,* (Malang: Averroes Press, 2010), hal. 6-7.

mengatasi penderitaan akibat kekurangan air karena air merupakan kebutuhan dasar yang penting.[320]

Pemerintah dinilai mempunyai keterbatasan dan kelemahan dalam mengatasi krisis air bersih, menyediakan pasokan air, meningkatkan upaya konservasi, membantu masyarakat yang rentan, mengatasi polusi dan meningkatkan kesadaran publik. Oleh karena itu, banyak pejabat pemerintah di seluruh dunia beralih ke privatisasi, yaitu memindahkan kendali atas pengelolaan sumber daya air sebagai sumber daya yang berharga dari sektor publik ke sektor swasta.[321] Penilaian seperti itu, yakni swasta lebih baik dalam mengelola air dibandingkan perusahaan milik pemerintah, meleset, misalnya dalam kasus Jakarta. Selama 25 tahun Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya, milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, bekerja sama dengan Palyja dan Aetra (keduanya swasta), cakupan pelayanan air bersih di Jakarta nyaris tidak berkembang, hanya mencapai 65,85%. Hal itu kontradiktif dengan klaim dan argumen yang menyatakan betapa bagus pengelolaan sumber daya oleh swasta.[322]

Privatisasi atas sumber daya air juga menjadi salah satu permasalahan yang disoroti ketika menghadapi bencana krisis air. Hal itu disebabkan oleh karakteristik privatisasi air yang kapitalistik justru memperparah ketersediaan air. Ketika pengelolaan sumber daya air yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah diserahkan

---

320 Abd. Gafur Sangadji, "Dampak Liberalisasi Ekonomi terhadap Kebijakan Privatisasi Air: Analisis Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Pasal 33 UUD 1945", *tesis* Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hal. 34.

321 Ibid., hal. 35.

322 Ayu Nurfaizah, "Swastanisasi Air di Jakarta, Masyarakat Sipil Tuntut Jaminan Ketersediaan", dalam *Kompas.id* (diunggah 30 Januari 2023), https://www.kompas.id/baca/metro/2023/01/30/gerakan-masyarakat-sipil-surati-penjabat-gubernur-terkait-swastanisasi-air (diakses 13 Maret 2024).

ke pihak swasta, terlebih swasta asing, orientasi pelayanan publik berubah menjadi kegiatan transaksional antara penjual dan pembeli yang bertujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Itulah yang membuat privatisasi air justru menciptakan masalah kebutuhan air menjadi makin rumit.

Privatisasi tidak dapat dilepaskan dari paradigma sistem ekonomi kapitalisme yang memiliki prinsip ekonomi kebebasan (*freedom*), kepentingan diri sendiri (*self-interest*), dan persaingan (*competition*). Tata kelola yang berasas *freedom* menyebabkan pelayanan hanya fokus pada ranah yang menguntungkan bagi perusahaan bermodal besar. Itu sejalan dengan prinsip *self-interest*, yakni pelayanan yang lebih menguntungkan itu menjadi prioritas perusahaan air karena memfasilitasi kepentingan untuk menangguk untung (sebesar-besarnya). Keuntungan besar yang diperoleh itu menimbulkan persaingan antarpengusaha, sehingga eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya air tidak terelakkan. Dengan pengelolaan yang demikian, privatisasi atas air telah menimbulkan berbagai masalah, antara lain distribusi pelayanan air tidak merata, polusi air, ketidakmampuan Pemerintah Indonesia memperluas jaringan irigasi bagi keperluan pertanian sehingga salah satunya terjadi penurunan produksi padi, dan keberkurangan persediaan air akibat eksploitasi besar-besaran atas sumber daya air.

Persoalan keberkurangan pemenuhan kebutuhan akan air tidak lepas dari keberadaan perusahaan air mineral dalam kemasan (AMDK) seperti Aqua yang memonopoli dan mengeksploitasi mata air dan air tanah. Misalnya, di Desa Babakan Sari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, awalnya saat dibangun pada 1992, Aqua mengeksploitasi air permukaan secara langsung dari Mata Air Kubang. Namun cara itu tidak berlangsung lama. Dua tahun setelah itu, setelah membangun pabrik baru, Aqua mengeksploitasi air bawah tanah lewat pengeboran dengan mesin bertekanan tinggi. Berdasar penelitian Daniel Mangoting (2006), ada beberapa versi yang menyatakan jumlah sumur

artesis antara dua dan tiga titik dengan kedalaman antara 40 meter dan 75 meter di Desa Babakan.[323]

Dengan informasi itu, dapat dikatakan sumber air yang dieksploitasi Aqua bukan air artesis karena bukan berasal dari lapisan akuifer tertekan, melainkan berasal dari lapisan akuifer bebas. Sementara berdasar petunjuk teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi, kedalaman sumur artesis sebaiknya lebih dari 200 meter agar tidak menimbulkan dampak lingkungan berupa keberkurangan air di sumur warga. Apabila kedalaman pengeboran sumber air artesis Aqua memang hanya antara 40 meter dan 75 meter, secara teoretis jelas membawa dampak lingkungan berupa ketersedotan air dari sumur gali milik warga. Secara teknis operasional, hal itu mengindikasikan ada pelanggaran peraturan pemerintah berkait dengan sumur artesis oleh Aqua. Akibatnya, penduduk yang tinggal di sekitar sumber air Aqua mengeluh kesulitan mendapatkan air bersih. Saat kemarau sebagian sumur milik penduduk kekeringan. Dahulu, menurut warga, memiliki sumur dengan kedalaman antara 5 meter dan 7 meter sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi sejak tahun 2000, sumur harus digali lebih dalam lagi paling tidak hingga 17 meter.

Contoh lain terjadi di Sumber Air Si Gedhang, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang menjadi lokasi eksploitasi air oleh PT Tirta Investama Aqua-Danone (TIA-D). Sumber Air Si Gedhang secara geografis bersandingan dengan Sumber Air Kapilaler dan Sumber Air Cokro Tulung. Di lini produksi PT TIA-D, Sumber Air Si Gedhang yang dibor menimbulkan kematian beberapa sumber air, antara lain keberkurangan debit air Cokro yang difungsikan oleh PDAM Solo dan debit air Kapilaler yang difungsikan petani sebagai sarana irigasi dan kebutuhan domestik daerah hilir.

---

323 Daniel Mangoting dan Indro Surono, "Studi Awal Pemantauan Dampak Eksploitasi AMDK 'Aqua' terhadap Lingkungan dan Penduduk Sekitar Pabrik (Kasus PT Tirta Investama di Kabupaten Sukabumi)", Laporan Penelitian KruHA, 2006.

Selain itu, keberadaan PT TIA-D juga mengancam kehidupan petani. Kehidupan petani lahan basah (sawah) dan lahan kering (ladang) sangat tergantung pada pola pasokan air. Di Kecamatan Trucuk, Klaten, misalnya, setelah berdiri Aqua-Danone, untuk mencukupi kebutuhan pasokan air petani harus mengandalkan sumur pompa, bergantung pada air hujan, dan mengeluarkan uang senilai Rp1,6 juta untuk mendapatkan air dari Kapilaler pada musim kemarau guna membayar 27 pos air yang harus dilalui. Kebutuhan suplai air menjadi tambahan ongkos produksi tersendiri di luar pembelian pupuk dan bibit. Penurunan kuantitas air itu terjadi terutama di sekitar jaringan irigasi Sumber Air Kapilaler dan Sumber Air Si Gedhang, secara langsung berimplikasi terhadap penurunan kuantitas suplai air petani di sepanjang jalur irigasi Kapilaler.[324]

Privatisasi air yang menjelma dalam bentuk perusahaan AMDK telah menyebabkan kerusakan lingkungan di berbagai tempat. Penggunaan teknologi bor dan pompa listrik secara besar-besaran menjadi faktor pemicu keberkurangan ketersediaan air. Shiva (2003) menyatakan, penggunaan mesin berbahan bakar minyak dan pompa listrik menyerap air lebih cepat dari kemampuan siklus alam untuk mengisi ulang air tanah.[325] Akibatnya, air dalam tanah cepat habis dan karena itulah turut mengurangi ketersediaan air di mata air.

Kelangkaan air, isu perubahan iklim, dan kabut di perkotaan menunjukkan kerusakan tatanan ekologi sudah sedemikian dahsyat. Penggundulan hutan telah merusak cadangan air, menurunkan kapasitas resapan air. Lingkungan secara otomatis menjadi terbebani akibat ulah rakus manusia (kapitalis). Semua itu merupakan bukti kapasitas bumi dan siklus hidrologi dunia telah terganggu. Pelajaran ini menunjukkan

---

324 Erwin Endaryanta, *Politik Air di Indonesia; Penjarahan Si Gedhang oleh Korporasi Aqua-Danone* (Yogyakarta: Laboratiorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UGM, 2007), hal. 196.

325 Vandhana Shiva, *Water Wars: Privatisasi, Profit, dan Polusi,* diterjemahkan oleh Achmad Uzair (Yogyakarta: Insist Press & Walhi, 2003), hal. 12-13.

kapitalisme sebagai pendekatan pembangunan dan pengelolaan air tidak menjadi solusi krisis air. Bahkan cenderung menurunkan kapasitas lingkungan.[326]

Kritik terhadap Air sebagai Barang Privat

Di Indonesia, sumber daya alam bukan barang privat yang berguna untuk sekelompok orang, melainkan barang yang perlu dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat. Keberadaan sumber daya alam di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, yang di dalamnya juga mengatur hak atas air, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat 2. Pasal itu menyatakan bahwa, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Kalimat tersebut mengandung makna tanggung jawab negara untuk menjamin dan menyelenggarakan penyediaan air yang menjangkau setiap individu warga negara. Pada tingkat internasional, hak atas air yang setara juga diteguhkan dalam Ecosoc Declaration (Deklarasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya) PBB pada November 2002.[327]

Dengan dasar konstitusi yang jelas-jelas mengamanatkan negara untuk mengelola sumber daya alam secara adil, seharusnya pemerintah mampu meminimalkan monopoli sumber daya alam. Sebab, sebagaimana disebutkan pada bagian awal, privatisasi/penguasaan swasta atau segelintir orang terhadap sumber daya air berdampak buruk bagi ketersediaan air di masyarakat yang notabene hidup di antara, atau bahkan bersama, sumber air. Dengan kata lain, air ada dan banyak tetapi tidak bisa diakses warga (publik) karena telah dikuasai secara privat.

---

326 Ahmad Zarkasi Efendi, Anam Rifai, Arif Erwinadi, Yosef Eko Budi Susilo, *Bisnis Air: Komodifikasi, Privatisasi, dan Eksploitasi,* (Malang: Averroes Press, 2010), hal. 6-7.

327 M. Thalhah, Achmad Mufid, *Fiqh Ekologi,* (Yogyakarta: Total Media, Cet I, 2008), hal. 195.

Bahkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 yang digadang-gadang mampu mengadakan sistem pengelolaan air secara adil, ternyata malah seolah-olah menjadi landasan hukum yang melegalkan praktik privatisasi dengan lebih mudah. Oleh karena itu, mengapa pada tahun 2013 undang-undang itu resmi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-undang itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33. Hal itu disebutkan dalam bagian alasan dan pokok permohonan yang diajukan oleh para pemohon, yakni beberapa persoalan yang muncul dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air berkait dengan keterlibatan pihak swasta dalam proses pengelolaan. Hal itu tidak terlepas dari pergeseran makna air, yang sebelumnya merupakan barang publik menjadi komoditas yang lebih mementingkan aspek ekonomi yang akhirnya berorentasi pada keuntungan.[328]

Kritik terhadap Air sebagai Komoditas

Salah satu penyebab krisis air yang terjadi di banyak tempat di dunia adalah monopoli terhadap sumber daya air dan menjadikannya komoditas untuk dijualbelikan. Daerah yang sebelumnya memiliki air berlimpah dan cukup, sekarang kekurangan air, sementara wilayah yang sudah kekurangan air kemudian mengalami kelangkaan air.

Vandana Shiva dalam bukunya *Water Wars* menjelaskan, ada dua paradigma yang bertentangan dalam menjelaskan krisis air, yaitu paradigma pasar dan paradigma ekologis. Paradigma pasar melihat kekurangan air sebagai krisis yang disebabkan oleh ketiadaan perdagangan air. Jika air dapat dipindah(tangan)kan dan didistribusikan secara bebas melalui pasar bebas, seperti dinyatakan dalam paradigma ini, air akan disalurkan ke wilayah yang kekurangan. Kemudian harga yang tinggi akan memberi insentif pada upaya konservasi. Mengutip

328 Putusan MK RI No. 85/PUU-xi/2013, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Test-123_PUU-XIII_2015.pdf hal. 16 (diakses 14 Maret 2024).

Anderson dan Snyder, "Pada tingkat harga yang tinggi, orang cenderung mengonsumsi lebih sedikit komoditi dan mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tak terkecuali air."[329]

Lebih lanjut, Shiva menekankan asumsi paradigma pasar buta terhadap batas ekologis yang ditetapkan oleh siklus air dan batas ekonomis yang ditentukan oleh kemiskinan. Dalam hal batas ekologis, eksploitasi berlebihan terhadap air dan gangguan terhadap siklus air menciptakan kekurangan air absolut yang tidak dapat digantikan oleh pasar dengan komoditas lain. Asumsi substitusi sesungguhnya adalah logika sentral dari komodifikasi.[330] Pendapat abstrak itu melupakan poin yang paling krusial – ketika air punah, tidak ada alternatif. Dalam hal batas ekonomis, bagi perempuan Dunia Ketiga, kelangkaan air berarti menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan air. Bagi petani, itu berarti kelaparan dan kemelaratan ketika kekeringan menggagalkan panen mereka. Bagi anak-anak berarti dehidrasi dan kematian. Sungguh, tidak ada pengganti yang sederhana bagi cairan yang sangat berharga itu, yang diperlukan untuk kelangsungan hidup biologis hewan dan tumbuhan.[331]

Contohnya, ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian (sawah) di Desa Babakanpari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang cenderung berkurang secara drastis. Saat ini, para petani di kampung itu berebut air karena ketersediaan air secara umum sudah jauh berkurang. Bahkan ada beberapa sawah yang tidak kebagian air. Karena situasi itu sudah berlangsung cukup lama (sejak 2000), muncullah istilah sawah tadah hujan untuk sawah yang tidak teraliri sehingga hanya mengandalkan air hujan. Keadaan itu paling parah terjadi pada musim kemarau. Pada musim kemarau, lebih dari setengah

329 Vandhana Shiva, *Water Wars: Privatisasi, Profit, dan Polusi,* diterjemahkan oleh Achmad Uzair (Yogyakarta: Insist Press & Walhi, 2003), hal. 18.

330 Ibid.

331 Loc. Cit. hal. 19.

dari total luasan areal sawah petani tidak bisa ditanami padi karena air tidak mencukupi.[332]

Kritik terhadap Distribusi Air yang Timpang

Distribusi air yang merata menjadi prinsip dasar dalam menyusun/ menerapkan kebijakan untuk memenuhi hak atas air. Faktanya, peniadaan terhadap hak atas air terus meluas, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Lebih dari satu miliar orang tidak memiliki akses terhadap air yang memadai, 80% di antaranya merupakan penduduk perdesaan. Kontaminasi akibat keburukan sanitasi dan laju industrialisasi, penipisan kandungan serta distribusi yang tidak seimbang, memperburuk kemiskinan yang telah ada.[333]

Pengalihan wewenang pengelolaan atas air dan pemberian hak atau izin usaha atas air ke swasta menimbulkan permasalahan dalam akses atas air oleh masyarakat. Down to Earth (DtE), sebuah perusahaan swasta terbatas yang mendorong demokrasi, keadilan sosial, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, memaparkan salah satu masalah privatisasi air di Indonesia adalah distribusi pelayanan air yang tidak merata. Dalam sistem privatisasi air, distribusi lebih banyak difokuskan untuk melayani kegiatan komersial yang mendukung pembangunan ekonomi. Hanya konsumen yang mampu membayar yang dapat memiliki akses terhadap air bersih.

Pada 2002, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB merilis komentar umum tentang hak atas air yang menyatakan hak atas air bersih yang cukup, aman, dan terjangkau secara fisik serta finansial

---

332 Daniel Mangoting dan Indro Surono, "Studi Awal Pemantauan Dampak Eksploitasi AMDK 'Aqua' terhadap Lingkungan dan Penduduk Sekitar Pabrik (Kasus PT. Tirta Investama di Kabupaten Sukabumi)", Laporan Penelitian KRuHA, 2006.

333 Policy Brief KRuHA, *Hak Atas Air; Panduan untuk Penyelenggara Negara,* t.t., hal. 2

untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga adalah hak bagi semua orang.[334] Mengutip Komentar umum PBB, *policy brief* Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) menyebutkan ada beberapa komponen utama hak atas air bersih, yakni setiap orang harus mempunyai akses atas air yang;

- Mencukupi. Jumlah yang mencukupi harus tersedia sesuai dengan pedoman internasional. Ini biasanya berarti antara 50 liter dan 100 liter dan atau minimal 20 liter per orang per hari.
- Aman. Air yang digunakan untuk keperluan pribadi dan rumah tangga harus aman.
- Terjangkau secara fisik. Air harus berada dalam jangkauan fisik yang aman, di dalam atau di dekat rumah, sekolah, atau fasilitas medis.
- Terjangkau secara finansial. Air harus dapat dibeli tanpa mengurangi kemampuan orang untuk membeli barang-barang pokok lain. Artinya, kebutuhan minimal air kadangkala harus disediakan secara cuma-cuma.[335]

Indonesia termasuk salah satu negara yang telah meratifikasi Kovenan PBB tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia wajib menghargai, melindungi, dan memenuhi hak atas air rakyat. Tiga kewajiban utama bagi pemerintah yang harus dipenuhi adalah;

- Menghargai. Mensyaratkan negara-negara pihak tidak melakukan campur tangan secara langsung atau tidak langsung terhadap penikmatan hak atas air. Kewajiban tersebut mencakup,

---

334 Ibid., hal. 8.

335 Policy Brief KruHA, *Hak Atas Air; Panduan untuk Penyelenggara Negara*, t.t., hal. 9.

antara lain, tidak melakukan praktik atau aktivitas apa pun yang menghalangi atau membatasi akses yang setara terhadap air yang memadai, secara sewenang-wenang mencampuri pengaturan adat atau tradisi mengenai alokasi air, mengurangi atau mencemari air secara melawan hukum, misalnya melalui limbah dari fasilitas milik negara atau melalui penggunaan dan pengujian senjata, dan membatasi akses terhadap atau menghancurkan layanan dan infrastruktur air sebagai tindakan hukuman, misalnya selama konflik bersenjata yang melanggar hukum kemanusiaan internasional.

- Melindungi. Kewajiban melindungi mengharuskan negara pihak untuk mencegah pihak ketiga menginterv ensi dalam bentuk apa pun terhadap penikmatan hak atas air. Pihak ketiga meliputi perorangan, kelompok, korporasi, dan badan lain serta agen yang bertindak di bawah wewenangnya. Kewajiban tersebut mencakup, antara lain, penerapan undang-undang dan langkah-langkah lain yang diperlukan dan efektif untuk mencegah, misalnya, pihak ketiga menolak akses yang setara terhadap air yang memadai, dan mencemari serta mengambil sumber daya air secara tidak adil, termasuk sumber alam, sumur, dan sistem distribusi air lain.
- Memenuhi. Kewajiban memenuhi dapat dipilah menjadi kewajiban untuk memfasilitasi, memajukan, dan menyediakan. Kewajiban memfasilitasi mengharuskan negara mengambil langkah-langkah positif untuk membantu individu dan masyarakat menikmati hak mereka. Kewajiban mempromosikan mewajibkan negara pihak untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan ada pendidikan yang tepat mengenai penggunaan air yang higienis, perlindungan sumber air, dan metode untuk meminimalkan pemborosan air. Negara-negara pihak juga berkewajiban memenuhi (memberikan) hak ketika individu atau kelompok tidak mampu, karena alasan-alasan di

luar kendali mereka, untuk mewujudkan hak tersebut melalui sarana yang mereka miliki.[336]

Pada 2015, Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan yang secara mendasar menetapkan hak atas air bagi rakyat. Negara wajib “menguasai” air, yang dijabarkan dalam bentuk;

> “... Hak penguasaan negara atas air dapat dikatakan ada bilamana negara, oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan (*beleid*), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), tindakan pengaturan (*regelendaad*), tindakan pengelolaan (*beheersdad*), dan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).”[337]

Keputusan itu menetapkan posisi konstitusional air, sekaligus memberi kerangka atas saling silang para pengguna air. Dalam keputusan iu, Mahkamah Konstitusi menetapkan lima posisi pokok mengenai hak atas air (Tabel VIII-1).[338]

---

336 United Nations, *Substantive Issues Arising in The Implementation of The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, General Comment No. 15 (2002), Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*, E/C.12/2002/11, 20 Januari 2003, hal. 9-10, https://www2.ohchr.org/english/issues/water/docs/cescr_gc_15.pdf (diakses 14 Maret 2024).

337 Putusan MK RI No. 85/PUU-xi/2013, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Test-123_PUU-XIII_2015.pdf hal. 140 (diakses 14 Maret 2024).

338 Policy Brief KruHA, *Hak Atas Air: Panduan untuk Penyelenggara Negara*, t.t., hal. 6.

Tabel VIII-1: Ringkasan Relasi antara Kewajiban Negara dan Hak Warga Negara (sumber Policy Brief KRuHA, Hak Atas Air; Panduan untuk Penyelenggara Negara, t.t.).

Kewajiban Negara	Hak Warga Negara
1. Syarat sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai wujud hak rakyat atas air.	Warga negara berhak atas kemanfaatan, sumber air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; warga negara berhak atas pemerataan, partisipasi, dan penghormatan secara turun-temurun.
2. Syarat hak asasi manusia dengan rumusan kewajiban negara terhadap hak atas air.	Hak asasi manusia yang muncul dari Pasal 28 konstitusi dalam kesetaraan di depan hukum dalam mewujudkan hak atas air; norma internasional menetapkan hak asasi manusia atas air dalam hal ketersediaan, kualitas, aksesibilitas, hak asasi mencakup perwujudan atas air dalam komunitas.
3. Syarat kelestarian lingkungan hidup.	Siklus hidrologi yang terjaga dan mendukung kehidupan manusia; semesta air sebagai siklus kehidupan manusia; penyelenggaraan akses atas air yang mengutamakan air permukaan.
4. Syarat pengawasan dan pengendalian negara atas air.	Hak rakyat dalam mengontrol penyelenggara negara dalam mewujudkan tata kelola air.
5. Syarat mengenai prioritas pengusahaan air pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.	Warga dapat menyelenggarakan swakelola air atas alasan komunitas; warga negara berhak mendapatkan air untuk kepentingan kemanusiaan, bukan untuk dieksploitasi.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, demi pemenuhan hak atas air yang mencukupi, aman, dan terjangkau secara fisik dan finansial, semestinya pengelolaan air diserahkan ke negara atau pemerintah sebagai bentuk pelayanan publik, karena itu merupakan tanggung jawab negara. Namun, faktanya, negara justru menyerahkan sistem pengelolaan sumber daya air ke pihak swasta. Misalnya, pemanfaatan sumber daya air di Kanal Tarum Barat (KTB). KTB adalah salah satu saluran yang mengalirkan air dari Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, melalui Bendungan Curug hingga ke DKI Jakarta. Alokasi air di KTB juga diperuntukkan bagi banyak pengguna, yakni irigasi, suplai air baku industri, dan suplai air baku perkotaan.

Kenyataannya, terdapat tren volume alokasi yang berbeda antarpengguna. Neraca alokasi air di KTB untuk sektor irigasi cenderung menurun, sedangkan alokasi untuk sektor non-irigasi (suplai air baku industri dan perkotaan) cenderung naik dari tahun ke tahun, terutama setelah terjadi perubahan manajemen Perum Jasa Tirta II (PJT II) sebagai pemegang otoritas pengelolaan. Perubahan manajemen tersebut adalah pemberian wewenang lebih luas ke PJT II untuk mencari keuntungan ekonomi dalam pengelolaan air.[339]

Tren alokasi air dan prosedur alokasi yang "lebih berpihak" ke sektor non-irigasi itu menjadikan kelompok petani sebagai kelompok pengguna paling rentan karena memiliki mekanisme akses yang lemah. Di beberapa daerah irigasi di Kabupaten Bekasi menunjukkan ada kekurangan air di sektor irigasi. Akibatnya, banyak terjadi rebutan air dengan menyedot air dari saluran air menggunakan pompa air dan membobol saluran air yang tidak jarang justru menyebabkan kemunculan konflik antarwarga. Selain itu, banyak juga petani menggunakan air buangan limbah dari sungai pembuangan yang sebenarnya membahayakan petani.[340]

Profetik Ekologi sebagai Etika Pengelolaan Air

Profetik merupakan pendekatan religius atas relasi ilmu pengetahuan dan agama, termasuk dalam memandang hubungan manusia dengan alam. Selain profetik, dalam Islam muncul berbagai corak pemikiran yang berupaya membangun hubungan harmonis integratif atas ilmu pengetahuan dan agama.[341] Gagasan utama profetik tentang hubungan agama dan ilmu pengetahuan (ilmu humaniora khususnya) dilakukan

---

339 Rusmadi, "Tantangan Islam: Menyisir Keadilan Air di Tengah Liberalisasi Alam", dalam *Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies* (AICIS) XII, 5-8 November 2012, Surabaya – Indonesia, hal. 2113-2114 atau http://digilib.uinsa.ac.id/7593/ (diakses 15 Maret 2024).

340 Ibid, hal. 2115.

341 Absori, Khudzaifah Dimyati, Ridwan, "Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik", dalam *Jurnal Al-Tahrir* Vol. 17 No. 2 November 2017, hal. 339.

dengan mengintegrasikan dan mengobjektifikasi ajaran-ajaran normatif Al-Qur'an ke dalam kategori-kategori objektif (memiliki kaitan dengan keseharian). Islam harus menjadi paradigma, menjadi teori, yang berlaku objektif, agar menjadi rahmat. Objektifikasi itu diawali dari internalisasi (mendialogkan cara pandang agama dengan kehidupan keseharian) menuju eksternalisasi (menggunakan cara pandang agama yang sudah diinternalisasi sebagai panduan dalam hidup) dengan metode sintetik analitik (secara substantif/analitik menginternalisasi, atau mendialogkan/menyintesiskan, cara pandang agama yang adalah peraturan dengan bagaimana keseharian beroperasi; dan memakai hasil internalisasi itu sebagai panduan dalam hidup untuk, sebaliknya, membentuk manusia pemeluk agama dan dunia selain manusia), serta pendekatan struktur transendental (tetap menjadikan agama dan kepercayaan kepada tuhan sebagai jangkar tempat berlabuh/bertaut bagi proses-proses objektifikasi, internalisasi, dan eksternalisasi).

Bila sains modern sebagai penyokong kapitalisme materialisme melihat alam sebagai benda semata-mata, secara berbeda, profetik melihat alam memiliki cakupan makna berbeda, yakni bermakna sakral yang eksis dalam dunia mental/pemikiran, bukan material. Penggunaannya tidak dieksploitasi tanpa batas dan hasilnya pun tidak ditumpuk oleh segelintir orang sebagaimana dilakukan kapitalis. Paradigma profetik ekologi memandang alam sebagai amanah Tuhan yang digunakan untuk kemaslahatan manusia yang harus dijaga kelestariannya.[342] Jadi, dimensi transendental menjadi batas apa yang boleh dan tidak boleh.

Islam (sebagai perangkat peraturan) datang sebagai agama dengan maksud membebaskan manusia dari kondisi ketidakadilan (kondisi yang beroperasi dalam kehidupan keseharian). Hal itu dapat dilihat dari begitu banyak ayat Al-Qur'an yang memerintah manusia berbuat adil dan menentang kezaliman, antara lain Surah Al-A'raf Ayat 29 yang

342 Absori, Khudzaifah Dimyati, Ridwan, "Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik", dalam *Jurnal Al-Tahrir* Vol. 17 No. 2 November 2017, hal. 340.

berarti, “Katakanlah: Tuhanku memerintahkan supaya kamu berbuat adil....” Kemudian Surah Al-Hujurat Ayat 9, “Dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” Selanjutnya Surah Al-Maidah Ayat 8, “Berlaku adillah karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.” Keadilan yang diajarkan oleh Islam dalam hal menata penguasaan dan pemilikan tanah serta sumber air adalah bahwa Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi menolak monopoli.[343]

Sumber daya alam sebagai sumber energi kehidupan yang tersedia, dengan demikian, seharusnya dimanfaatkan dengan baik dan tidak boleh digunakan secara berlebihan. Rasulullah saw mengajarkan pada kita betapa penting menggunakan sumber daya alam secara efisien. Misalnya air, meski melimpah, Rasulullah saw mengajarkan umat untuk menghemat penggunaan air. Sebab, bisa jadi air melimpah di satu tempat, sementara di tempat lain kekeringan, hewan-hewan mati dan manusia bertikai berebut air bersih.[344] Rasulullah saw bersabda;

> Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash bahwasanya Rasulullah saw berjalan melewati Sa’ad yang sedang berwudlu dan menegurnya, ‘Kenapa kamu boros memakai air?’ Sa’ad balik bertanya, ‘Apakah untuk wudlu pun tidak boleh boros?’ Beliau Rasulullah saw menjawab, ‘Ya, tidak boleh boros meskipun kamu berwudlu di sungai yang mengalir.’” (HR. Ahmad).[345]

Rasulullah saw juga menganjurkan pemanfaatan sumber energi di muka bumi untuk kepentingan bersama dan dikelola secara komunal,

---

343 Gita Anggraini, *Islam dan Agraria; Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2016), hal. 2.

344 Marzuki Wahid (ed.), *Fikih Energi Terbarukan; Pandangan dan Respon Islam atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)* (Jakarta: Lakpesdam-PBNU, 2017), hal. 74, atau https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/314/2019/08/e-book_FIKIH_ENERGI_TERBARUKAN.pdf (diakses 16 Maret 2024).

345 Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Nomor Hadis 6889).

bukan dimonopoli dan diprivatisasi. “Rasulullah saw bersabda, umat Islam bersekutu dalam tiga hal: air, rumput, dan api.” (HR. Ahmad)[346]

Dengan demikian, pengelolaan air berdasar hadis Nabi harus didasari dua hal, yaitu penghematan penggunaan air dan kepemilikan secara komunal. Selain itu, Nabi juga melarang umat muslim menahan kelebihan air.

> “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A’raj dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Jangan menahan kelebihan air, dengan maksud untuk menahan tumbuhnya tanaman.’” (HR. Bukhari: 2182)[347]

Larangan menahan air itu dapat dimaknai dalam dua konteks. Pertama, berkait dengan larangan menahan air untuk diberikan kepada orang lain. Sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, pemilik air tidak boleh menahan kelebihan air yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Kepemilikan air itu didasari kepemilikan tanah tempat sumur itu berada. Jika kebutuhan pemilik air telah terpenuhi, ia harus memberikan air kepada orang yang membutuhkan. Dalam konteks hadis, kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan dia, keluarga, tanaman, dan hewan miliknya. Adapun orang yang membutuhkan dalam konteks masa Nabi adalah para penggembala yang membutuhkan air untuk minum binatang ternak. Ketika tidak ditemukan sumber air lain selain sumur milik seseorang, si pemilik sumur harus memberikan kelebihan airnya. Kewajiban memberi air didasari kebutuhan mendesak akan air. Jika dieksternalisasikan pada saat ini, kebutuhan tersebut bisa bermacam-macam dan diukur berdasar

---

346 Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Nomor Hadis 22004).

347 Shahih Bukhari 2182 diambil dari Aplikasi HaditsSoft (aplikasi Hadis Kitab 9 Imam).

skala prioritas, misalnya kebutuhan untuk konsumsi, rumah tangga, dan pertanian.

Kedua, larangan menahan air juga berarti larangan untuk mengontrol air. Aktivitas membendung air atau pembangunan infrastruktur air skala besar seperti waduk, kanal, dan pintu air adalah bentuk-bentuk mengontrol air. Dalam konteks ini, saya menafsirkan aktivitas mengontrol air adalah langkah pertama monopoli, yang dilarang oleh Islam seperti disebutkan di atas. Di salah satu ayat Al-Qur'an, Allah Swt telah menyatakan sumber-sumber air telah diatur secara alami berdasar siklus hidrologi. Sumber utama air di bagian darat bumi adalah hujan. Air hujan itu kemudian diatur Allah Swt menjadi sumber air di bumi untuk memenuhi keperluan makhluk-Nya. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah Az-Zumar (39): 21;

> "Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal."

Alih-alih mengontrol air yang dapat berujung monopoli, profetik ekologi mendorong aktivitas merawat air. Beberapa tindakan atau sikap yang dapat mendukung upaya merawat air berdasar ajaran Rasulullah saw (profetik ekologi) adalah sebagai berikut. [348]

Pertama, senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Rasulullah saw menganjurkan betapa penting hidup bersih. Kebersihan diposisikan

---

348 Disarikan dari Marzuki Wahid (ed.), *Fikih Energi Terbarukan: Pandangan dan Respon Islam atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)* (Jakarta: Lakpesdam-PBNU, 2017), hal. 74-78, atau https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/314/2019/08/e-book_FIKIH_ENERGI_TERBARUKAN.pdf

Rasulullah saw sebagai bagian dari iman dan memengaruhi kualitas keimanan seseorang. Lingkungan yang kotor dapat menyebabkan berbagai kerusakan (kesehatan, banjir, dan polusi udara).

Kedua, melakukan penghijauan dan penanaman pohon. Nabi saw bersabda: Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah saw bersabda, "Apabila kiamat tiba terhadap salah seorang di antara kamu dan di tangannya ada benih tumbuhan, maka tanamlah." (HR. Ahmad)

Penghijauan memiliki fungsi ekologis yang vital. Penghijauan dapat mengembalikan fungsi tanah sebagai resapan air. Daerah resapan air bisa berupa lapangan bola dengan tanah yang mampu meresapkan air, taman kota, dan hutan kota. Memelihara kawasan resapan air merupakan aksi nyata gerakan penghijauan. Manfaat penghijauan di kawasan itu adalah mengurangi debit atau limpasan air saat musim hujan.

Ketiga, tidak mencemari lingkungan. Rasulullah saw pernah meneladankan soal itu. Ia melarang sahabatnya kencing di air yang tergenang. Rasulullah saw juga melarang kencing dan buang air besar di bawah pohon yang berbuah karena dikhawatirkan buah yang jatuh mengenai kotoran itu.

Keempat, tidak sembarangan menebang pohon dan menggunduli hutan. Rasulullah saw melarang siapa pun mematahkan tangkai pohon atau menebang batangnya dan menggunduli hutan, meskipun dalam kondisi perang.

Kelima, memanfaatkan tanah yang telantar. Tanah dalam ajaran Islam harus dimanfaatkan untuk kepentingan yang bermanfaat dan produktif. Soal ini dalam kajian fikih dibahas dalam bab "*Ihya Al-Mawat* (Menghidupkan Tanah Mati)", yaitu membuka lahan atau tanah mati dan belum pernah ditanami, sehingga tanah itu dapat bermanfaat sebagai tempat tinggal, untuk bercocok tanam, dan lain sebagainya.

Keenam, menetapkan suatu tempat sebagai kawasan konservasi. Rasulullah saw telah mengenalkan konsep *hima*, yaitu suatu zona

---

(diakses 16 Maret 2024).

tertentu untuk konservasi alam. Tidak boleh didirikan bangunan dalam zona proteksi tersebut. *Hima* merupakan kawasan hukum yang dilarang diolah dan dimiliki seseorang secara pribadi, sehingga tetap menjadi wilayah yang dipergunakan bagi siapa pun, juga sebagai tempat tumbuh rumput dan tempat menggembalakan hewan. Rasulullah saw pernah menetapkan suatu tempat seluas 6 mil menjadi *hima* bagi kuda-kuda kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Anshar.

Profetik Ekologi Air dalam Islam

Dalam bagian ini, secara sintetik analitik melalui proses objektifikasi, internalisasi, dan ekseternalisasi, profetik ekologi air dalam Islam dipakai untuk mendiskusikan (1) kritik terhadap privatisasi air, (2) kritik terhadap air sebagai barang privat, (3) kritik terhadap air sebagai komoditas, dan (4) kritik terhadap distribusi air yang timpang.

Kritik terhadap Privatisasi Air

Bagi agama Islam, pada dasarnya air, sebagai objek keseharian, merupakan barang publik yang dapat dinikmati semua orang dan seharusnya tidak dapat dimiliki segelintir orang sebagaimana yang dipahami dalam paradigma privatisasi air. Pendekatan sintetik analitik untuk menginternalisasi ajaran agama dalam memandang kategori objektif keseharian dalam bentuk air ini dapat dilakukan dengan melihat lebih dalam bagaimana Islam mendudukkan masalah privatisasi air. Dalam Islam, air dipandang tidak hanya penting bagi kelangsungan hidup manusia, tetapi juga seluruh makhluk hidup di muka bumi ini, sehingga termasuk tanaman, hewan, tanah sekalipun berhak atas air. Pemikiran bahwa air adalah kebutuhan setiap makhluk hidup disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 57-58.[349]

> Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga

---

349 *Al-Qur'an in Word*, 2019, Surah Al-A'raf: 57-58.

apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran (57).

Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur (58).

Dan Surah An-Nahl Ayat 10;

> Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.[350]

Begitu penting air bahkan dalam sabdanya, Nabi pernah mengatakan sedekah paling baik adalah memberikan minum air.[351] Sabdanya;

> Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ammar Al Husaini bin Huraits dari Waki' dari Hisyam dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab dari Sa'd bin 'Ubadah ia berkata, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Memberi minum air.'." (HR. Nasa'i: 3605)

Nabi juga melarang menahan air untuk menahan tanaman tumbuh. Berikut sabda beliau;

> Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al

350 *Al-Qur'an in Word*, 2019, Surah An-Nahl: 10.

351 Sunan Nasa'i 3605 diambil dari aplikasi HaditsSoft (aplikasi Hadits Kitab 9 Imam).

A'raj dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam bersabda, "Jangan menahan kelebihan air, dengan maksud untuk menahan tumbuhnya tanaman." (HR. Bukhari: 2182)[352]

Dengan keterangan itu, maka privatisasi air juga menjadi tantangan bagi umat muslim karena di dalam agama Islam, air memiliki kedudukan penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Berangkat dari objektifikasi dan internalisasi ekologi profetik itulah, penting sekali untuk mempertanyakan sekaligus mereformasi kebijakan privatisasi atas sumber daya air sebagai langkah eksternalisasi ekologi profetik yang meletakkan permasalahan transenden sebagai jangkar dalam tata kelola air.

Kritik terhadap Air sebagai Barang Privat

Kebijakan privatisasi air telah mengubah kedudukan air yang semula merupakan barang umum menjadi barang privat. Artinya, sumber air hanya boleh diambil dan dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki. Kepemilikan itu mendapat legitimasi dari pemerintah melalui mekanisme perizinan dan kerja sama berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2004. Namun undang-undang yang disahkan pada 19 Februari 2004 dan diundangkan pada 18 Maret 2004 itu menuai banyak kontroversi, karena ada beberapa pasal diindikasikan memicu privatisasi pengelolaan air dan komersialisasi air yang bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, mengapa kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan *judicial review* oleh PP Muhammadiyah dkk., dan hasilnya MK pun membatalkan undang-undang tersebut.

Salah satu alasan yang dikemukakan dalam keputusan sidang pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bernomor 85/PUU-XI/2013 adalah air dalam pandangan Al-Qur'an adalah esensi

352 Shahih Bukhari 2182 diambil dari aplikasi HaditsSoft (aplikasi Hadits Kitab 9 Imam).

terpenting untuk keberlangsungan hidup seluruh makhluk di muka bumi, sekaligus bumi itu sendiri, sebagaimana firman Allah Swt;

> Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran). (Surah An-Nahl: 65)

Nabi Muhammad saw juga mengakui air adalah kebutuhan pokok bagi manusia dan mengelompokkannya dalam barang-barang yang menjadi milik umum dan tidak boleh dimiliki perseorangan. Hal itu dinyatakan dalam hadis Nabi saw;

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Yazid berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli: air, rumput, dan api." (HR. Ibnu Majah: 2464)

Hal itu menunjukkan betapa penting air bagi kehidupan manusia. Air sebagai kebutuhan pokok termasuk ke dalam benda-benda yang dilarang dimonopoli oleh individu tertentu. Oleh karena itu, Islam sepakat hak terhadap air merupakan hak asasi manusia.

Air merupakan barang publik dan akses manusia terhadap air bersifat terbuka. Ditinjau dari *haq syafah* (kebutuhan manusia akan air untuk kebutuhan sehari-hari), air dibagi menjadi tiga macam.[353]

1. Air umum yang tidak dimiliki seseorang, misalnya air sungai, rawa-rawa, telaga, dan yang lain. Air milik umum boleh digunakan oleh siapa saja, dengan syarat tidak memudaratkan (membahayakan/merugikan) orang lain.

353 Sulaiman Jajuli, "Kepemilikan Umum dalam Islam", dalam *Asy-syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum,* Vol. 48 No. 2, Desember 2014, hal. 411.

2. Air di tempat-tempat yang ada pemiliknya, seperti sumur yang dibuat oleh seseorang untuk mengairi tanaman di kebun. Selain pemilik tanah tersebut tidak ada yang berhak menguasai tempat air yang dibuat oleh pemiliknya. Orang lain boleh mengambil manfaat dari sumur atas seizin pemilik kebun.
3. Air yang terpelihara, yaitu air yang dikuasai pemiliknya, dipelihara, dan disimpan di suatu tempat yang telah disediakan, misalnya air di kolam, kendi, dan bejana-bejana tertentu.

Yusuf Al-Qaradhawy dalam *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim aladzi Nansyuduhu* menyatakan berkenaan dengan kepemilikan umum, Islam membolehkan kepemilikan oleh individu. Akan tetapi jika sesuatu itu merupakan hajat hidup orang ramai/banyak, kepemilikannya menjadi milik jamaah (umum). Jadi, benda tersebut tidak boleh dikuasai oleh seseorang atau sebagian orang saja – mereka mengambil manfaat hanya untuk mereka, sementara tindakan itu akan mengakibatkan kemudaratan (kerugian) bagi masyarakat umum.[354]

Kritik terhadap kepemilikan privat juga muncul dalam diskusi soal kepemilikan. Menurut Taqyuddin al-Nabhani, kepemilikan harta dibagi atas tiga, yakni kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan umum (*public property*), dan kepemilikan negara (*state property*). Pengelolaan kekayaan mengikuti kepemilikan atau siapa yang memiliki hak terhadap harta itu. Harta kekayaan yang seharusnya dimiliki masyarakat (*public property*) tidak boleh dimiliki individu (swasta). Dalam syariah Islam, sumber daya alam yang berjumlah besar tidak boleh diserahkan kepemilikannya kepada individu. Individu yang mengelola wajib diperlakukan sebagai pekerja (*ajir*) dan bukan pengelola dalam suatu akad *syirkah* (kemitraan usaha yang berbagi hasil). Sebagai *ajir*, dia mendapat upah yang sesuai dengan tenaga profesional yang dia keluarkan, bukan sesuai dengan hasil, karena hasil usaha sumber daya alam hakikatnya milik publik. Hutan, laut, sumber

354 Ibid, hal. 415.

daya mineral, energi, bahkan keindahan alam, hakikatnya milik publik. Hasil dari setiap eksploitasi komersial terhadap semua itu seharusnya dikembalikan untuk kemaslahatan umum.[355]

Sebagai yurisprudensi, pada masa lalu, Abyaḍ bin Hammal pernah meminta kepada Rasulullah saw untuk mengelola suatu tambang garam. Rasulullah saw pertama menerima izin permintaan itu, tetapi beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, "Wahai, Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (*ma'u al-'iddu*)." Rasulullah saw kemudian bersabda, "Tariklah tambang tersebut darinya!" (HR. Al- Tirmizi)

Penarikan kembali pemberian Rasul saw kepada Abyaḍ adalah *illat* (alasan) dari larangan untuk menguasai milik umum. Termasuk, dalam hal ini, barang tambang dan sumber daya air dengan kandungan terlalu banyak untuk dimiliki individu. Dalam kasus ini, eksternalisasi telah berlangsung. Bahwa pandangan/ajaran agama sudah diinternalisasi dalam kategori objektif (tambang garam, juga air), dan dipakai membentuk (eksternalisasi) dunia manusia (Abyad bin Hammal sebagai pengelola tambang) dan dunia selain manusia (garam).

Kritik terhadap Air sebagai Komoditas

Komodifikasi (menjadikan sesuatu sebagai komoditas, produk dari kerja buruh yang diperdagangkan) terhadap air merupakan konsekuensi logis dari privatisasi air. Prinsip profetik ekologi melarang komodifikasi air. Penjualan air, menurut hadis Nabi saw, dilarang karena air merupakan kebutuhan umum yang tidak boleh siapa pun menahan air, sehingga membuat orang yang membutuhkan kesulitan air. Hal itu berdasar hadis Nabi saw berikut.

355 Taqyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (al-Niẓām al-Iqtiṣādī fī al-Islām)*, diterjemahkan oleh Moh Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. II, 1996), hal. 240.

> Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah mengabarkan kepada kami Waki'. (Dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id semuanya dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual kelebihan air." (HR. Muslim)[356]

Dan dalam hadis lain sebagai berikut.

> Telah mengabarkan kepada kami Al Husain bin Huraits, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al Fadhl bin Musa As Sinani dari Husain bin Waqid dari Ayyub As Sakhtiyani dari 'Atho` dari Jabir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari menjual air. (HR. Nasa'i: 4581)[357]

Dengan mengutamakan kebutuhan mendasar akan air untuk seluruh makhluk hidup (manusia, hewan, tanaman, dan lain-lain), dan larangan menjualnya, Nabi saw mendudukkan air sebagai barang sosial, bukan barang ekonomi. Barang sosial (*social goods*) adalah suatu benda yang berguna tidak hanya bagi individu, tetapi juga penting bagi kehidupan masyarakat. Ketersediaan air bersih secara luas dan terjangkau adalah vital bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di muka bumi. Karena itu, air adalah barang sosial.[358] Meskipun telah dimiliki, seperti di dalam bejana milik pribadi atau mengusahakan air dengan menggali,

---

356 Shahih Muslim No. 2926 diambil dari aplikasi HaditsSoft (aplikasi Hadits Kitab 9 Imam).

357 Sunan Nasa'i 4581 diambil dari aplikasi HaditsSoft (aplikasi Hadits Kitab 9 Imam).

358 Abd Gafur Sangadji, "Dampak Liberalisasi Ekonomi terhadap Kebijakan Privatisasi Air: Analisis Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Pasal 33 UUD 1945", tesis Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hal. 20.

orang yang memiliki air tetap tidak boleh melarang orang lain untuk memanfaatkan air tersebut selama kebutuhan airnya telah terpenuhi.

Dengan demikian, hadis itu juga mengkritik paradigma privatisasi air dalam sistem kapitalisme yang menempatkan air sebagai komoditas. Dengan menjadikan air sebagai komoditas tentu akan membuat air berubah menjadi benda ekonomis. Dalam moda produksi kapitalisme, privatisasi atas air tidak lagi memandang air sebagai barang yang bersifat terbatas dan memiliki siklus hidrologis tertentu, tetapi sesuatu yang dapat terus dieksploitasi oleh alat dan teknologi yang dimiliki demi peningkatan keuntungan semata-mata. Terlebih dalam privatisasi air tidak ada batas keperluan yang dapat membuat mereka yang memiliki hak atas air itu berhenti untuk mengambil.

Di satu sisi, kritik yang sama terhadap komodifikasi air dari pembelajar seperti Vandana Shiva dan dari sudut pandang profetik ekologi, hingga saat ini masih tetap sebagai kritik/ajaran, air tetap menjadi komoditas. Namun, di sisi lain, ini peluang bagus untuk mendorong aliansi antara pembelajar kritis seperti Shiva dan pembacanya dengan pembelajar profetik ekologi. Bahwa pemahaman agama yang sudah diobjektifikasi melalui proses internalisasi itu perlu didorong lebih kuat untuk mendapatkan ekspresi eksternalisasi.

Kritik terhadap Distribusi Air yang Timpang

Pengaturan distribusi air yang timpang dapat dilihat dalam contoh pengelolaan yang dilakukan di Kanal Tarum Barat (KTB) oleh Perum Jasa Tirta (PJT) II. Prosedur alokasi oleh PJT II yang lebih berpihak pada sektor non-irigasi menjadikan kelompok petani menjadi kelompok pengguna paling rentan karena memiliki akses yang lemah. Dalam hal ini, Nabi Muhammad saw mengkritik masalah ketimpangan dalam distribusi air. Sabda Nabi saw;

> Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jangan menahan kelebihan air, dengan maksud untuk menahan tumbuhnya tanaman." (HR. Bukhari: 2182)[359]

Dalam konteks hadis, kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan diri sendiri, keluarga, tanaman, dan hewan miliknya. Adapun orang yang membutuhkan dalam konteks masa Nabi adalah para penggembala yang membutuhkan air untuk dia dan binatang ternaknya minum serta tanaman rerumputan sebagai sumber pangan binatang ternak. Dalam situasi ketika tidak ditemukan sumber air lain selain sumur milik seseorang, maka si pemilik sumur harus memberikan kelebihan airnya. Kewajiban memberi air didasari kebutuhan mendesak akan air.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengelompokkan beberapa fungsi air berdasar sumber utama Islam, Al-Qur'an dan hadis, yang juga bisa dilihat sebagai kebutuhan pokok atas air bagi kehidupan. Menurut buku tersebut, air berfungsi sebagai sumber kehidupan, kebutuhan pokok makhluk hidup, sarana konservasi (pemeliharaan dan perlindungan) tanah, sarana penyucian dan kesehatan (sanitasi), lahan transportasi bagi bahtera di laut dan sungai yang juga menjadi habitat bagi banyak makhluk hidup. Air juga dipakai sebagai simbol untuk surga, ketakwaan, dan rahmat Tuhan. Fungsi lain, air sebagai sarana produksi biomasa dan fungsi energi dalam suatu pembangkit listrik tenaga air. Dengan berpedoman keterangan itu, kebutuhan masyarakat atas air untuk sehari-hari dan untuk mengairi pertanian harus lebih

359 Shahih Bukhari 2182 diambil dari aplikasi HaditsSoft (aplikasi Hadits Kitab 9 Imam).

diutamakan dibandingkan dengan pemanfaatan (eksploitasi) atas air yang dilakukan perusahaan air atau para pelaku industri lain.

Mengenai permasalahan distribusi yang timpang, kaidah fikih Islam pada dasarnya berprinsip bahwa dalam penentuan hukum Islam semua kaidah akan bertujuan satu, yakni "menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan".[360]

Maksud dari kaidah fikih tersebut adalah bagaimana tujuan dari penetapan hukum tercipta dapat memilah-milah antara lebih banyak manfaat atau lebih banyak madarat yang tercipta. Jika kita menarik ke dalam *al-maqasid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan dari pokok syari'at Islam), yaitu dapat memberikan keadilan yang menyeluruh tidak hanya memberikan dan bersikap adil terhadap manusia, tetapi juga keseimbangan hidup. Objektifikasinya, hukum mengenai air harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijadikan rujukan dalam penetapan hukum, yakni berdasar *maqasid asy-syari'ah*.[361]

Kebutuhan manusia terhadap penggunaan air dapat dijenjangkan menjadi tiga hal, yaitu penggunaan air bersifat primer (*ad-daruriyyat*), sekunder (*al-hajiyyat*), dan tersier (*at-tahsiniyyat*).[362] Pada dasarnya, tiga jenis kebutuhan akan air itu harus diusahakan agar tercukupi. Namun dalam implementasi harus mengedepankan prioritas. Kebutuhan air yang bersifat primer harus didahulukan daripada kebutuhan air bersifat sekunder. Begitu pun kebutuhan air bersifat sekunder harus didahulukan dari kebutuhan bersifat tersier. Berikut ini skema tentang skala prioritas penggunaan air (Tabel VIII-2).

---

360 Moh Adib Bisri, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyah Risalah Qawa-id Fiqh* (Rembang: Menara Kudus, 1997), hal. 24.

361 Ibid.

362 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Air* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hal. 55.

Tabel VIII-2: Skala Prioritas Penggunaan Air (sumber Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Air, *2016).*

Kebutuhan terhadap air	Pengertian	Penggunaan
Primer	Kebutuhan yang bersifat sangat penting. Jika pemenuhan kebutuhan itu tidak ada, akan menimbulkan kerusakan secara langsung dalam kehidupan manusia. Ketiadaan kebutuhan primer dapat menyebabkan kebinasaan manusia dan kehidupan itu sendiri.	Makan Minum Ibadah Sanitasi (kesehatan)
Sekunder	Kebutuhan yang penting tetapi tidak mendesak. Jika kebutuhan itu tidak ada, akan menimbulkan kesempitan dan kekacauan, tetapi tidak menyebabkan akibat buruk bersifat langsung terhadap kehidupan.	Irigasi Menjaga keseimbangan ekosistem (seperti memberi-kan suplai makanan dan minuman bagi makhluk hidup selain manusia) Produksi energi (seperti membangun pembangkit listrik) Industri (kebutuhan pabrik)
Tersier	Kebutuhan yang berfungsi melengkapi atau memperindah kehidupan manusia, yang keberadaannya tidak bersifat urgen dan tidak mendesak. Fungsi dari kemaslahatan ini hanyalah berkait dengan nilai estetika dan keindahan.	Mencuci mobil atau motor Membuat kolam renang Membuat danau buatan untuk kepentingan tempat rekreasi Dan lain-lain.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, distribusi air yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya mendahulukan kebutuhan dasar/primer masyarakat untuk sanitasi dan air minum, baru kemudian mengalokasikan air untuk kebutuhan pertanian, makhluk hidup lain, dan seterusnya. Bukan berdasar kemampuan bayar setiap orang, melainkan atas dasar pemenuhan hak atas air.

Kesimpulan

Berdasar pemaparan yang telah penulis sampaikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, privatisasi air adalah keberpindahan pengelolaan air yang semula merupakan wewenang lembaga publik (pemerintah) ke pihak swasta. Privatisasi tidak dapat dilepaskan dari paradigma sistem ekonomi kapitalime yang memiliki prinsip ekonomi kebebasan (*freedom*), kepentingan diri sendiri (*self-interest*), dan persaingan (*competition*). Dengan pengelolaan sedemikian itu, privatisasi atas air telah menimbulkan berbagai masalah, antara lain distribusi pelayanan air tidak merata, polusi air, ketidakmampuan Pemerintah Indonesia memperluas jaringan irigasi bagi keperluan pertanian, sehingga salah satunya terjadi penurunan produksi padi dan keberkurangan persediaan air akibat eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya air.

Kedua, menempatkan air sebagai barang privat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 yang mengamanatkan, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Menjadikan air sebagai komoditas juga bertentangan dengan prinsip air yang memiliki batas ekologis dan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Eksploitasi berlebihan terhadap air dan gangguan terhadap siklus air menciptakan kekurangan air absolut yang tidak dapat digantikan oleh pasar dengan komoditas lain.

Ketiga, paradigma profetik ekologi — dengan instrumen objektifikasi, internalisasi, eksternalisasi, dan transendental — memandang alam sebagai amanah Tuhan yang digunakan untuk kemaslahatan manusia yang harus dijaga kelestariannya. Hadis Nabi menolak paradigma privatisasi air yang menempatkan air sebagai barang privat dan air sebagai komoditas. Melalui hadis berserikat dalam tiga hal, Nabi Muhammad saw mengakui air adalah kebutuhan pokok bagi manusia dan mengelompokkannya dalam barang-barang yang menjadi milik umum dan tidak boleh dimiliki perseorangan. Dan dalam hadis larangan

menjual air, Nabi Muhammad saw mengisyaratkan air adalah barang sosial, bukan barang ekonomi. Barang sosial (*social goods*) adalah suatu benda yang berguna bagi tidak hanya individu, tetapi juga penting bagi kehidupan masyarakat. Jadi pemanfaatannya pun tidak atas perantara jual-beli. Kewajiban memberi air didasari kebutuhan mendesak akan air. Jika dikontekstualisasikan pada saat ini, kebutuhan tersebut bisa bermacam-macam dan diukur berdasar skala prioritas, antara lain ada kebutuhan primer (*ad-daruriyyat*), sekunder (*al-hajiyyat*), dan tersier (*at-tahsiniyyat*).

Memaknai Merawat Air:

Resistensi, Desentralisasi, dan Transformasi Tata Kelola Air

Marwa

"Critical inquiry that begins with particular resistant knowledge projects...typically pursues questions that differ from those of tradition and crucial social theory in the academy. Projects of antiracism, feminism and decolonisation are called resistant knowledge projects for a reason. For such projects, the guiding question is less whether to resist prevailing power arrangements and more what forms such resistance might take (Pertanyaan kritis dimulai dengan proyek-proyek pengetahuan yang resisten... biasanya mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dari tradisi dan teori sosial yang penting di ranah akademi. Proyek antirasisme, feminisme, dan dekolonisasi disebut sebagai proyek pengetahuan yang resisten karena suatu alasan. Untuk proyek-proyek semacam ini, pertanyaan utamanya, bukanlah apakah akan menolak kekuasaan yang berlaku, melainkan apa bentuk perlawanan yang mungkin dilakukan)."[363]

Sebagaimana kutipan dari Collin itu, fokus buku ini berkait dengan konsep *caring for water* atau merawat air yang dapat dilihat sebagai

363 Patricia Hill Collins, *Intersectionality as Critical Social Theory,* (Duke University

bentuk perlawanan terhadap model pembangunan dominan berbasis kapitalisme. Krisis perubahan iklim dan ketidaksetaraan yang dihasilkan dari model pembangunan saat ini telah mengungkap kecacatan dari pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi eksponensial. Merawat air sebagai bentuk perlawanan menawarkan dinamika lain antara manusia dan alam, yang sebelumnya berdasar penaklukan dan penguasaaan menjadi perawatan dan kepedulian. Seperti telah dibahas oleh Muhamad Nasihudin di Bab Dua, masyarakat di Padukuhan Sejati Desa mengembangkan PAM Dusun yang memanfaatkan teknologi sederhana untuk mendukung keseharian warga dan secara bersamaan menjaga keberlanjutan sumber daya air setempat. Bentuk perlawanan berbasis perawatan juga bisa diidentifikasi di Bab Enam oleh Eka Handriana bagaimana masyarakat Kelurahan Panggung Lor mempraktikkan demokrasi langsung dalam membentuk tata kelola penanganan banjir yang menempatkan mereka dalam posisi pengawasan dan pengoperasian. Model perencanaan pembangunan yang berbasis rizomatik itu layaknya akar tumbuhan yang menjalar, terbuka, dan tumbuh. Jadi alih-alih mengalienasi masyarakat dari pengambilan keputusan dan membatasi mereka hanya sebagai objek kebijakan, perlawanan melalui perawatan mentransformasi masyarakat menjadi agensi politik aktif.[364] Selanjutnya, perlawanan juga bisa dilihat tidak hanya dari praktik atau keterlibatan masyarakat dalam tata kelola air, tetapi juga pembentukan pengetahuan alternatif di luar modernitas berbasis kapitalisme dan kolonialisme. Misalnya, strategi sains warga yang dibahas Yesaya Sandang dan Nandra Eko Nugroho, berupa pemanfaatan seni rupa dan visual, kerja sama penelitian dan juga tuntutan jalur hukum oleh jaringan warga dan aktivis di Yogyakarta yang berhasil memosisikan warga sebagai *knowledge producer* atau penghasil pengetahuan. Selain itu, di Bab Delapan, Umi Ma'rufah juga menawarkan perspektif alternatif

Press. 2019. *JSTOR*) https://doi.org/10.2307/j.ctv11hpkdj. hal 116.

364 Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed,* Penguin Modern Classics. (London, England: Penguin Classics, 1997).

dalam cara pandang Islam melalui pendekatan profetik ekologi dalam mengkritik praktik privatisasi air. Sejalan dengan tema besar di buku ini, ajaran Islam menekankan betapa penting merawat air sebagai sumber penghidupan, melalui upaya konservasi lingkungan dan tata kelola bersifat komunal untuk kesejahteraan bersama. Menurut Hobart dan Kneese, pengetahuan dan strategi merawat air yang diadopsi oleh warga ketika infrastruktur rusak, gagal dan mengabaikan sekelompok masyarakat tertentu, merepresentikan bentuk kepedulian yang dapat membentuk dunia secara radikal, jauh dari model yang ditawarkan oleh negara posneoliberal yang ketidakmemampuannya dalam menyediakan perawatan sudah terbukti.[365]

Lebih jauh, pembentukan pengetahuan alternatif oleh masyarakat juga mengungkap model-model tata kelola air yang bersifat desentralistik. Hal itu sejalan dengan semangat untuk provinsialisasi teori perkotaan atau upaya untuk mengintegrasikan konflik, penyalahgunaan kekuasaan, ironi dan kontradiksi ke dalam narasi modernitas atau pembangunan kota.[366] Mengadopsi semangat provinsialisasi atau desentralisasi tata kelola air mengacu tidak hanya pada metabolisme melalui jaringan infrastruktur, standar kota-kota di wilayah utara, tetapi juga serangkaian proses yang lebih umum terjadi di kota-kota di wilayah selatan – seperti ekstraksi swasta, transportasi dan penjualan – yang secara bersama-sama terus mereproduksi lanskap perairan perkotaan.[367] Contohnya saja Nafisatul Khoidah yang mengungkap relasi antara krisis sampah dan krisis air Jogja dengan perspektif reproduksi sosial dan *caring for water* atau merawat air di Bab Empat. Dikembangkan melalui perspektif

---

365 Hiʻilei Julia Kawehipuaakahaopulani Hobart dan Tamara Kneese, "Radical Care: Survival Strategies for Uncertain Times" dalam *Social Text 38* (1). 2020. Hal 1-16.

366 Dipersh Chakrabarty, *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference,* (Princeton: Princeton University Press, 2008), hal 43-44.

367 Kathryn Furlong dan Michelle Kooy, "Worlding Water Supply: Thinking beyond the Network in Jakarta", dalam *International Journal of Urban and Regional Research*, 41(6), 2017, hal 888-903. doi:10.1111/1468-2427.12582.

orang pertama, atau dalam hal ini sang peneliti, tulisan ini menunjukkan bagaimana metabolisme pembangunan kota Yogyakarta sangat bergantung pada ketersediaan lahan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Piyungan untuk menampung segala bentuk ekskresi dari konsumsi massa (*mass consumption*). Ketergantungan itu melahirkan sebuah krisis bermata dua. Di satu sisi, timbunan sampah liar di kota Yogyakarta. Di sisi lain, pencemaran air di kawasan TPS Piyungan. Namun, perlu diperhatikan, distribusi risiko dan tanggung jawab yang dihasilkan dari krisis sampah di Yogyakarta tidaklah setara antara kelompok masyarakat berdasar geografis, kelas, dan gender. Ketidaksetaraan itu jugalah yang memunculkan aktivisme dan praktik perawatan terhadap air, khususnya oleh masyarakat sekitar TPS Piyungan.

Selanjutnya selain perlawanan, pengembangan pengetahuan alternatif, serta praktik tata kelola air desentralistik, buku ini secara bersamaan menempatkan posisi negara dan infrastruktur dalam analisis sentral. Tidak bisa dimungkiri, narasi hak asasi manusia yang utama di berbagai perjuangan untuk akses dan risiko dari pengelolaan air, memperkuat peran negara sebagai pelindung dan penyedia akses air bagi manusia melalui infrastruktur fisik.[368] Hal itu bertolak belakang dari situasi ketika negara kerap berkontribusi terhadap keterciptaan disparitas, ketimpangan dalam akses terhadap air, ruang hidup serta distribusi risiko dari bencana alam.[369] Seperti dibahas di Bab Tiga, pertumbuhan hotel di Yogyakarta yang difasilitasi dengan pembangunan orientasi pariwisata pemerintah setempat telah mengakibatkan krisis air tanah bagi masyarakat sekitar. Selain itu, di kasus Rawa Pening,

---

368 Karen Bakker, "The 'Commons' Versus the 'Commodity': Alter-Globalization, Anti-Privatization and the Human Right to Water in the Global South", dalam *Antipode* (39). 2007, hal. 430-455. https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2007.00534.x

369 Bosman Batubara, Michelle Kooy dan Margaret Zwarteveen, "Uneven Urbanisation: Connecting Flows of Water to Flows of Labour and Capital Through Jakarta's Flood Infrastructure", dalam *Antipode*, *50*(5), 2018, hal. 1186-1205. https://doi.org/10.1111/anti.12401.

Semarang, proyek revitalisasi danau yang semula didukung warga berujung pada perampasan lahan dan disrupsi terhadap sumber penghidupan warga, baik dari segi pertanian dan perikanan. Proyek revitalisasi itu didesain untuk pengembangan pariwisata nasional dan memobilisasi pendanaan oleh para investor. Hal itu menunjukkan realitas dari perjuangan untuk hak atas air dan penghidupan di berbagai belahan dunia, ketika aktivisme warga dikooptasi oleh aktor negara dan menimbulkan pertanyaan pelik bagi aktivis air. Seperti dicatat William Morris, dan seperti yang ditunjukkan dengan jelas dalam Rawa Pening "laki-laki dan perempuan berjuang dan kalah dalam pertempuran, dan hal yang mereka perjuangkan tetap terjadi meskipun mereka kalah, dan ketika hal tersebut terjadi ternyata bukan apa yang mereka maksudkan, dan laki-laki dan perempuan lain harus memperjuangkan apa yang mereka maksudkan dengan nama berbeda."[370]

Dengan mengungkap dinamika relasi antara kelompok marginal dan negara dalam konteks pembangunan infrastruktur, buku ini juga berhasil tidak hanya menunjukkan upaya merawat air sebagai gerakan resistensi dan alternatif, tetapi juga menggabungkan bagaimana pada dasarnya pembangunan modernitas tidak terlepas dari konflik, pemanfaatan kekuasaan, dan kekerasan. Seperti ditunjukkan dalam proyek revitalisasi Rawa Pening dan normalisasi Banjir Kanal Timur, keduanya merupakan pembangunan infrastruktur nasional dan didasari perusakan ruang hidup dan mata pencaharian masyarakat. Hal itulah yang, menurut Chakrabarty, cenderung diabaikan dalam sejarah yang baik secara implisit dan eksplisit, yang sering kali memuji kebangkitan negara modern dan konsep kewarganegaraan berbasis penindasan dan kebrutalan dalam keberhasilan modernitas.[371] Kontradiksi itu – awal yang tidak demokratis dari sebuah "demokrasi" – paling terlihat

---

370 Wiliam Morris, *A Dream of John Ball, Three Works by William Morris*, (London: Lawrence and Wishart, 1968), hal. 53.

371 Dipesh Chakrabarty, *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference,* (Princeton: Princeton University Press, 2008), hal. 43-44.

dalam sejarah layanan infrastruktur air, sanitasi, sampah yang berkaitan dengan kebersihan pribadi, yang kisah-kisahnya berperan penting dalam memosisikan tubuh individu modern di persimpangan antara publik dan swasta, sebagaimana difasilitasi dan ditengarai oleh negara.[372] Pada akhirnya, gerakan-gerakan akar rumput mendapati diri mereka harus menghadapi serangkaian relasi baru yang tidak setara dan situasi ketika hal yang mereka perjuangkan tampaknya telah terjadi, padahal jalan perjuangan masih panjang.[373]

Serangkaian hubungan sosioekologis yang mengatasnamakan negaralah merupakan inti dari situasi paradoks ini. Secara khusus melalui kasus Tambakrejo di Bab Tujuh, kita juga bisa menyaksikan apa yang kemudian dapat pahami sebagai bekerja dengan melawan, dan lebih dari negara (*with, against and beyond the state*), yang berarti aktivisme dan solidaritas dari para kelompok marginal dari agenda pembangunan harus bisa tidak hanya bekerja dengan dan melawan negara, tetapi juga membangun tata kelola pembangunan yang memungkinkan keterlibatan aktor-aktor di luar negara.[374] Melalui perspektif okupasi, solidaritas, dan re-okupasi, Bosman Batubara dan Iqbal Alma Ghosan Altofani menunjukkan bagaimana masyarakat miskin kota bisa memperjuangkan hak mereka terhadap ruang hidup, baik untuk tempat tinggal maupun mata pencaharian. Berbeda dari dua kisah sebelumnya, ketika masyarakat antara melawan atau bekerja dengan negara, dalam kasus Tambakrejo, warga miskin kota yang semula menjadi korban dari penggusuran oleh pemerintah setempat, berhasil menggeser respons pemerintah untuk lebih akomodatif terhadap kepentingan sosial dan ekonomi warga Tambakrejo. Melalui dukungan berbagai aliansi gerakan sosial, mobilisasi dan kampanye di

---

372 Ibid.

373 James Angel dan Alex Loftus, "With-against-and-beyond the Human Right to Water", dalam *Geoforum*, *98*, 2019, hal. 206-213. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.05.002 .

374 Ibid.

media sosial, serta pemanfaatan badan pengawas hak asasi manusia, warga Tambakrejo dapat merealisasikan skema pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Misalnya, dengan pembangunan rumah deret bagi 97 kepala keluarga yang sebelumnya tergusur akibat proyek normalisasi Banjar Kanal Timur.

Meskipun begitu, prinsip merawat air juga perlu dipahami secara kritis dan sebisa mungkin tidak berujung pada romantisasi dalam pengembangan pengetahuan dan praktik lokal yang berkembang sebagai bentuk perlawanan atau alternatif. Pertama, merawat air bisa dikaitkan dengan konsep resiliensi dan adaptasi dari masyarakat, khususnya dalam menghadapi tekanan dari krisis iklim dan peningkatan bencana alam. Mengutip tulisan Kaika yang berjudul "Don't Call Me Resilient (Jangan Panggil Saya Tabah)" atau sebuah kutipan dari pidato Tracy Washington, alih-alih berkonsentrasi terhadap peningkatan ketahanan masyarakat terlepas dari tantangan yang mereka hadapi, kita perlu mengalihkan fokus ke identifikasi individu dan mekanisme yang bertanggung jawab dalam menciptakan kebutuhan untuk bertahan lebih bagi kelompok masyarakat tertentu.[375] Seperti kita lihat dalam pengembangan PAM Dusun Tirta Wening, ketika masyarakat merasa perlu membentuk sistem pengelolaan air komunal akibat keterbatasan akses air dari sistem yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan ketika ditempa oleh kekeringan, masyarakat memilih menolak bantuan dari pemerintah karena pertimbangan ketergantungan dan harga air yang di luar jangkauan masyarakat. Hal itu perlu dipahami sebagai konsekuensi dari sistem tata kelola air yang berorientasi pasar dan memarginalkan kelompok masyarakat tertentu, sehingga masyarakat mau tak mau harus mengembangkan mekanisme tersendiri sebagai bentuk ketahanan.

---

375 Maria Kaika, "Don't Call Me Resilient Again!: the New Urban Agenda as Immunology … or … What Happens when Communities Refuse to be Vaccinated with 'Smart Cities' and Indicators", dalam *Environment and Urbanization*, 29(1), 2017. Hal: 89-102. https://doi.org/10.1177/0956247816684763.

Berkait dengan ketidaksetaraan yang sistematis, merawat air tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa yang berlaku. Menurut Hobart dan Kneese, prinsip merawat memberikan harapan terhadap solusi radikal dengan tindakan langsung yang otonom dan kerja kolektif nonhierarki, tetapi merawat air juga berkaitan dengan ketidaksetaraan dan kekuasaan yang sistemik, yang mengarah pada pemaksaan, pengawasan, pekerja tidak dibayar, dan perpecahan antarkelompok berdasar kelayakan perawatan.[376] Oleh karena itu, menjadi penting untuk memahami merawat air dalam konteks ketidaksetaraan sistemik, baik dari segi kelas, gender, dan identitas, maupun persimpangannya dalam memarginalkan individu tertentu dan menempatkan tanggung jawab lebih untuk merawat air. Seperti yang telah dibahas dalam kasus perawatan air di TPS Piyungan oleh ibu-ibu rumah tangga, yang tidak hanya harus bertanggung jawab lebih atas pengelolaan air, tetapi juga menanggung risiko atau konsekuensi lebih dari kualitas air yang kotor. Akibatnya, upaya adaptif yang diadopsi ibu-ibu di Piyungan dalam mengelola air limbah tidak bisa dimaknai sebagai sebuah resiliensi, tetapi merupakan konsekuensi pembiaran dan pengabaian dari sistem pembangunan yang eksploitatif dan eksklusif.

Akhirnya, dengan memahami resiliensi dan merawat air dengan lebih kritis, buku ini bisa menjadi sebuah harapan bagi gerakan akar rumput dan kaum marginal di tengah-tengah gempuran pembangunan infrastruktur nasional yang cenderung meminggirkan ketimbang memberdayakan masyarakat. Melalui kisah-kisah yang memosisikan masyarakat sebagai agensi politik yang aktif dalam mengambil keputusan yang bermakna untuk menentukan bagaimana air dialirkan, dikelola, dan dijaga, buku ini menggeser narasi-narasi yang cenderung berfokus pada kesedihan dan ketidakberdayaan masyarakat. Inilah yang kemudian bisa dimaknai sebagai *desire-centred research* atau riset berbasis

---

376 Hiʻilei Julia Kawehipuaakahaopulani Hobart dan Tamara Kneese, "Radical Care: Survival Strategies for Uncertain Times", dalam *Social Text 38* (1). 2020, hal. 1-16.

harapan.[377] Pada dasarnya strategi riset tersebut bukanlah bertujuan meniadakan tragedi, trauma, dan rasa sakit yang dialami masyarakat, tetapi menunjukkan bagaimana posisi dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat dihadapi dengan ketidaksetaraan sebagai sebuah modalitas bagi pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Buku ini membawa para pembaca untuk bisa berimajinasi lebih liar, lepas dari keterjebakan, dalam mencari jalan keluar dari krisis sistemik yang kita hadapi saat ini.

---

377 Eve Tuck dan K Wayne Yang, "R-Word: Refusing Research", dalam Django Paris & Maisha T Winn (*eds.*), *Humanizing Research: Decolonizing Qualitative Inquiry with Youth and Communities*, (SAGE Publication, 2014), hal. 223-247.

Laporan Keuangan

Buku ini dibiayai dengan dana yang berasal dari dua sumber. Pertama, dana yang dimobilisasi dari *platform on-line*, *kitabisa.com* (tautan: https://kitabisa.com/campaign/merawatairsemarangdanyogya). Setelah dipotong komisi untuk platform *kitabisa.com* serta biaya transaksi dan teknologi, secara total proses penerbitan ini mendapatkan pemasukan Rp7.074.828 (lebih dari tujuh juta). Nama donatur disajikan dalam Tabel X-1. Dana dari *kitabisa.com* dipakai untuk penerbitan (penyuntingan bahasa, disain sampul, tata letak, dan penerbitan buku 20 eksemplar).

Tabel X-1: Pemasukan dari Platform kitabisa.com.

No.	Nama donatur	Jumlah	Fee kitabisa.com
		[Rp]	[Rp]
1	Anonim	10000	500
2	Kenalan lama	20000	1000
3	Anonim	30051	1503
4	Elisa Sutanudjaja	500000	25000
5	Anonim	200000	10000
6	Muhammad Syihabuddin Alfikri	250000	12500
7	Anonim	1000	50
8	Anonim	1000	50
9	Anonim	300000	15000
10	Anonim	20000	1000
11	Anonim	30000	1500

No.	Nama donatur	Jumlah	Fee kitabisa.com
		[Rp]	[Rp]
12	Bayu M	100000	5000
13	Anonim	100000	5000
14	Noer Fauzi Rachman	2500000	125000
15	Anonim	1000000	50000
16	Anonim	15000	750
17	Bagas Yusuf Kausan	23000	1150
18	Anonim	30000	1500
19	Anonim	50000	2500
20	Hanif Furqon Hidayat	5000	250
21	Cak Faiz	100000	5000
22	Mila Karmilah	200000	10000
23	Lecieldu	100000	5000
24	Indah Romadona	50000	2500
25	Sahabat MDS	1000000	50000
26	Anonim	50000	2500
27	Gugun Muhammad	100000	5000
28	Mama Brigitte	500694	25035
29	Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam	75000	3750
30	Imel	50000	2500
31	Una	100000	5000
32	Anonim	2000	100
Jumlah		**7512745**	**375638**

Kedua, berasal dari kontribusi proyek Caring the Flows for Healthier Urban(ized) (Ground)water in Semarang and Yogyakarta, Indonesia (CARING) sebanyak Rp40 juta.[378] Dana dari proyek *CARING* ini, sampai Juli 2024 belum turun, dan rencananya akan dipakai sebagai honorarium untuk para penulis.

378 Lebih jauh soal proyek CARING: https://airwarga.id/.

Tentang Penulis

Bagas Yusuf Kausan merupakan anggota Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS) dan salah seorang anggota/pendiri Yayasan Amerta Air Indonesia. Sekarang, Bagas terlibat program penelitian bertajuk “Caring the Flows for Healthier Urban(ized) (Ground)water in Semarang and Yogyakarta, Indonesia (CARING)”, sembari kuliah Magister Ilmu Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada (UGM) lewat jalur program penelitian yang sama. Kontak Bagasyusufkausan@gmail.com.

Bosman Batubara adalah peneliti pada Human Geography and Spatial Planning Department, Utrecht University, dan salah seorang anggota/pendiri Yayasan Amerta Air Indonesia. Sejauh ini, Bosman sudah terlibat advokasi dan penulisan kasus agraria, seperti di Porong (Jawa Timur) dan Kebumen (Jawa Tengah), serta penulisan isu air perkotaan menggunakan lensa ekologi politik urbanisasi di Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Informasi lebih jauh dapat disimak di https://www.uu.nl/staff/BBatubara.

Eka Handriana adalah anggota dan salah seorang pendiri Yayasan Amerta Air Indonesia. Pengalaman kepenulisan Eka peroleh dari kerja jurnalistik sejak bergabung dengan pers mahasiswa hingga saat bekerja sebagai jurnalis beberapa media massa selama kurang-lebih 11 tahun. Eka pernah terlibat dalam riset dan penulisan tentang banjir di Semarang berdasar analisis ekologi politik urbanisasi dan krisis sosial ekologi di pesisir Demak. Saat ini, Eka mengerjakan riset perawatan air (tanah) di Semarang di bawah Amerta, bekerja sama dengan Universitas Gadjah

Mada (UGM) dan Arkom Yogyakarta, di bawah Water and Development Partnership Programme-IHE Delft.

Iqbal Alma Ghosan Altofani adalah mahasiswa Program Studi Magister Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dia juga aktif bergiat di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah sejak 2021 hingga sekarang sebagai manajer advokasi dan kampanye serta aktif melakukan pendampingan dalam berbagai kasus hak atas lingkungan dan hak asasi manusia. Selain itu, ia aktif bergiat di Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS) yang memiliki fokus pada isu pesisir di Kendal, Semarang, dan Demak.

Marwa adalah dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM. Saat ini, Marwa melakukan studi doktoral di University of Cambridge, dengan topik "Kontestasi Remunisipalisasi Air dalam Finansialisasi Infrastruktur Air di Jakarta". Sejak 2016, Marwa sudah mendalami isu perdebatan berkait dengan peran negara dan bisnis dalam penyediaan pelayanan air di perkotaan. Di luar konteks kajian, Marwa juga bergiat dalam aktivisme untuk perjuangan hak atas air di Indonesia. Marwa memiliki minat kajian studi politik urban-global, pendanaan pembangunan dan tata kelola air. Profil dan publikasi Marwa lebih lanjut dapat diakses di kanal https://acadstaff.ugm.ac.id/marwa#.

Muhamad Nabil Gunawan adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Politik di Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan merupakan kader FNKSDA Semarang yang yang mempunyai ketertarikan pada kajian ekologi politik. Dia juga aktif di Amnesty International Chapter Unnes yang banyak melakukan kampanye/advokasi tentang hak asasi manusia dan hak atas ruang hidup. Pernah terlibat dalam penulisan Kertas Advokasi: Mempertahankan Rawa Pening yang digawangi oleh para penulis dari Amnesty Unnes. Nabil dapat dihubungi melalui nabielgunawan@gmail.com.

Muhamad Nasihudin adalah pegiat sosial yang tinggal di Yogyakarta. Pengalaman aktivitas sosial dia dilakukan sejak kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2012. Melalui PMII, Gerakan Literasi Indonesia (GLI), dan FNKSDA Yogyakarta, dia terlibat kerja-kerja pengorganisasian lintas latar belakang dengan membentuk ruang-ruang belajar inklusif seperti Lingkar Studi Agraria dan Kajian Ekologi Politis.

Nafisatul Khoidah adalah kader FNKSDA Yogyakarta dan anggota Biro Perempuan dan Gender Komite Nasional FNKSDA. Nafisa menjalani proses menulis sejak berkuliah di UIN Sunan Kalijaga dengan bergabung di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) *Humaniush* dan divisi sastra di Teater ESKA. Ia pernah terlibat pembuatan film dokumenter *Labirin Sampah* di Yogyakarta bersama Walhi Yogyakarta. Nafisa memiliki ketertarikan pada diskursus perempuan, Islam, dan ekologi. Sejak 2019 hingga sekarang, dia bekerja sebagai reporter di *Beritabaru.co*. Dia dapat dihubungi di nafisanainawa13@gmail.com.

Nandra Eko Nugroho adalah dosen dan peneliti di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta. Nandra mengajar di Program Studi Teknik Lingkungan dan memiliki keahlian dalam manajemen bencana geologi. Selain itu, Nandra terlibat dalam penelitian tentang karakter dan potensi risiko kerusakan ekosistem karst di cekungan air. Dia juga bergiat di Lingkar Keadilan Ruang, Yogyakarta, suatu kelompok kerja kolektif yang mengorganisasikan kelompok belajar, forum diskusi, dan kampanye, yang berfokus pada ekologi kritis, kemandirian, otonomi, dan aktivisme seni.

Umi Ma'rufah sejak Januari 2022 menjadi pengurus Walhi Riau. Saat ini, dia menjabat Manajer Pengembangan Program dan Kajian Walhi Riau dan akan menempuh pendidikan di Magister Sosiologi Universitas Indonesia (UI) mulai Agustus 2024. Karyanya dalam tiga tahun terakhir terdiri atas hasil penelitian dan kajian, antara lain 1)

Edo Rakhman, Umi Marufah, Ardi, Bagas Yusuf Kausan, dan Boy Jerry Even Sembiring (2021), *Analisis Pengaruh Rencana Pembangunan Major Project Jalan Trans Papua terhadap Aspek Sosial-Ekologis Papua,* Jakarta: Eksekutif Nasional Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), 2) Edo Rakhman, Umi Marufah, Ardi, dan Bagas Yusuf Kausan (2021), *Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya,* Jakarta: #BersihkanIndonesia; 3) Penelitian Etnografi Banjir bersama Rujak Center for Urban Studies dan UNDP (2021); 4) kontributor dalam penerbitan buku Andi Misbahul Pratiwi (editor) (2021), *Narasi Perempuan & Interseksionalitas: Pembangunan dan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Odise Books Publishing; 5) Tinjauan Lingkungan Hidup Walhi Riau 2023 (Februari 2023), *Tahun Politik: Menagih Janji yang Belum Tuntas!*; 6) Walhi Riau (Desember 2023), *Laporan Investigasi Pasal 110A dan 110B UUCK: Mengorbankan Kawasan Hutan dan Melanggengkan Praktik Buruk Korporasi Sawit*; dan 7) Tinjauan Lingkungan Hidup 2024 (Januari 2024), *Bahu-membahu Mewujudkan Keadilan Ekologis di Bumi Melayu*.

Yesaya Sandang adalah dosen dan peneliti di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, tepatnya di program studi Magister Studi Pembangunan dan Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata. Karyanya yang telah diterbitkan meliputi artikel dan buku tentang pariwisata, air, dan hak asasi manusia. Salah satu fokus penelitiannya adalah bagaimana hotel dapat meningkatkan pengelolaan air secara berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia. Selain itu, Yesaya aktif bergiat di Lingkar Keadilan Ruang Yogyakarta, memperjuangkan pariwisata yang regeneratif dan hak asasi manusia atas air, terutama untuk warga dan komunitas yang terpinggirkan dari kepariwisataan.

"...fokus buku ini terkait konsep caring for water atau merawat air, dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap model pembangunan dominan berbasis kapitalisme. Krisis perubahan iklim dan ketidaksetaraan yang dihasilkan dari model pembangunan saat ini telah mengungkapkan kecacatan dari pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi eksponensial. Merawat air sebagai bentuk perlawanan menawarkan dinamika lain antara manusia dan alam, yang sebelumnya berdasar pada penaklukan dan penguasaan menjadi perawatan dan kepedulian..."

--Marwa--

MATA KATA INSPIRASI
(Anggota IKAPI No. 146/DIY/2021)
www.matakatainspirasi.id

ISBN: 978-623-8435-99-9
9 786238 435999